LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin arah dan keberlanjutan pembangunan daerah, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepala daerah;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkat akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Kebijakan adalah keputusan dan/atau tindakan yang dapat berbentuk penetapan atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang berupa keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai:

a. pedoman Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun;
b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : gambaran umum Daerah;
   c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
   c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IYAN EDIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT : (6/125/2025);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen tahunan dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Bupati paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode I Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman", sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu "Jabar Istimewa", dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Visi Daerah berupa "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman" yang diterjemahkan kedalam Misi yang memuat upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi dengan mengacu pada rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan Tahun 2025-2029 dan telah dilakukan pembahasan secara teknokratik. Hasil rumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional;
2. menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat;
3. menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya;
4. menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya; dan
5. menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025 - 2029

Cirebon BERIMAN
(Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD ini merupakan pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun yang menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon masa jabatan 2025-2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan arah pembangunan yang terukur, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Cirebon, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman."

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik maupun Musrenbang. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sekaligus menyadari masih adanya keterbatasan dalam dokumen ini. Masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaannya.

Semoga RPJMD ini dapat menjadi acuan utama pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cirebon, 20 Agustus 2025
BUPATI CIREBON,



IMRON

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **viii**
BAB I PENDAHULUAN **I - 1**
1.1 Latar Belakang I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I - 6
1.3 Hubungan antara Dokumen I - 10
1.4 Maksud dan Tujuan I - 12
1.5 Sistematika Penyusunan I - 13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II - 1**
2.1 Gambaran Umum kondisi Daerah II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 56
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II - 91
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II - 110
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal II - 117
2.1.6 Kerjasama Daerah II - 125
2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD di Kabupaten Cirebon II - 126
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II - 130
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu II - 131
2.2.2 Neraca Daerah II - 141
2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II - 146
2.2.4 Kerangka Pendanaan II - 152
2.2.5 Alternatif Pendanaan Pembangunan II - 157
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II - 161
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon II - 161
2.3.2 Isu Strategis II - 174
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **III - 1**
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III - 1
3.1.1 Visi III - 1
3.1.2 Misi III - 5
3.1.3 Tujuan dan Sasaran III - 7
3.1.4 Keselarasan Visi-Misi Bupati Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya III - 12

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan III - 21
3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Kerangka Nasional dan Provinsi III - 21
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029 III - 27
3.2.3 Lokus Pembangunan III - 50
3.2.4 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah III - 55
3.3 Program Prioritas III - 59
3.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah III - 59
3.3.2 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional III - 79
3.3.3 Kolaborasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi III - 90
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 1
4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah IV - 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV - 58
4.2.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon IV - 59
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV - 60
4.2.3 Rencana Penetapan Standar Pelayanan Minimal IV - 77
BAB V PENUTUP V - 1
5.1 Pedoman Transisi V - 1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V - 2
5.3 Manajemen Risiko V - 4
5.3 Penutup V - 8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon	II - 4
Tabel 2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Cirebon	II - 10
Tabel 2.3	Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 11
Tabel 2.4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 15
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon	II - 17
Tabel 2.6	Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon	II - 20
Tabel 2.7	Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan	II - 26
Tabel 2.8	Klasifikasi PoU	II - 32
Tabel 2.9	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 34
Tabel 2.10	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)	II - 38
Tabel 2.11	Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon	II - 40
Tabel 2.12	Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II - 41
Tabel 2.13	Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II - 42
Tabel 2.14	Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II - 43
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024	II - 45
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 50
Tabel 2.17	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 51
Tabel 2.18	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 53
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 56
Tabel 2.20	PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 58
Tabel 2.21	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 61
Tabel 2.22	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024	II - 63

Tabel 2.23	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	II - 64
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	II - 67
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024	II - 71
Tabel 2.26	Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Cirebon	II - 87
Tabel 2.27	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022	II - 90
Tabel 2.28	Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon	II - 97
Tabel 2.29	Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023	II - 102
Tabel 2.30	Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 103
Tabel 2.31	Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023	II - 103
Tabel 2.32	Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II - 105
Tabel 2.33	Progres Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon	II - 106
Tabel 2.34	Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon	II - 107
Tabel 2.35	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 108
Tabel 2.36	Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 118
Tabel 2.37	Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 119
Tabel 2.38	Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 121
Tabel 2.39	Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 122
Tabel 2.40	Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 123
Tabel 2.41	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024	II - 124
Tabel 2.42	Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	II - 127

Tabel 2.43	Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044	II - 129
Tabel 2.44	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 132
Tabel 2.45	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024	II - 137
Tabel 2.46	Hasil Analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon	II - 140
Tabel 2.47	Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 142
Tabel 2.48	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 145
Tabel 2.49	Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 151
Tabel 2.50	Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Cirebon	II - 151
Tabel 2.51	Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 152
Tabel 2.52	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030	II - 154
Tabel 2.53	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon	II-162
Tabel 2.54	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional	II-180
Tabel 2.55	Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029	II-216
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon	III - 16
Tabel 3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030	III - 29
Tabel 3.3	Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030	III - 44
Tabel 3.4	Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cirebon	III - 51
Tabel 3.5	Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah	III - 56
Tabel 3.6	Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Tahun 2025-2029	III - 60
Tabel 3.7	Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon	III - 61
Tabel 3.9	Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2026-2030	III - 66
Tabel 3.10	Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026-2030	III - 76

Tabel 3.11	Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029	III - 83
Tabel 3.12	Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029	III - 91
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030	IV - 5
Tabel 4.2	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030	IV - 59
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030	IV - 60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030	IV - 61
Tabel 4.5	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030	IV - 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029	I - 2
Gambar 1.2	Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon	I - 5
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I - 10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	II - 4
Gambar 2.2	Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 7
Gambar 2.3	Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 7
Gambar 2.4	Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon	II - 9
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon	II - 17
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Cirebon	II - 20
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon	II - 20
Gambar 2.8	Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2020-2024	II - 21
Gambar 2.9	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 24
Gambar 2.10	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023	II - 25
Gambar 2.11	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023	II - 26
Gambar 2.12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 28
Gambar 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 30
Gambar 2.14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 32
Gambar 2.15	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 33
Gambar 2.16	Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon	II - 39
Gambar 2.17	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 41
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II - 42

Gambar 2.19 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) II - 47
Gambar 2.20 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa) II - 48
Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 50
Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) II - 51
Gambar 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II - 52
Gambar 2.24 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen) II - 53
Gambar 2.25 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 II - 55
Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 II - 59
Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen) II - 60
Gambar 2.28 Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 II - 62
Gambar 2.29 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 65
Gambar 2.30 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 66
Gambar 2.31 Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 66
Gambar 2.32 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 67
Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 68
Gambar 2.34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022 II - 69
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023 II - 70
Gambar 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023 II - 71
Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 72
Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 II - 73
Gambar 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon

Tahun 2020-2024 II - 74
Gambar 2.40 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 75
Gambar 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024 II - 76
Gambar 2.42 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 76
Gambar 2.43 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II - 79
Gambar 2.44 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita II - 80
Gambar 2.45 Rasio ekspor dan impor terhadap PDB II - 81
Gambar 2.46 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 82
Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 85
Gambar 2.48 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 88
Gambar 2.49 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2024 II - 89
Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 91
Gambar 2.51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 91
Gambar 2.52 Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023 II - 92
Gambar 2.53 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 93
Gambar 2.54 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 94
Gambar 2.55 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 95
Gambar 2.56 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2020-2024 II - 111
Gambar 2.57 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 112
Gambar 2.58 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 113
Gambar 2.59 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 114

Gambar 2.60 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 115
Gambar 2.61 Proporsi Masing- Masing Komponen Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 117
Gambar 2.62 Celah Fiskal Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 118
Gambar 2.63 Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II - 138
Gambar 2.64 Periodesasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045 II - 158
Gambar 2.65 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029 II - 159
Gambar 2.66 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional II - 159
Gambar 2.67 Visi Misi Presiden II - 163
Gambar 2.68 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) II - 166
Gambar 2.69 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II - 187
Gambar 2.70 Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon II - 187
Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 7
Gambar 3.2 Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 9
Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Logis Misi 1 III - 10
Gambar 3.4 Kerangka Berpikir Logis Misi 2 III - 11
Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Logis Misi 3 III - 11
Gambar 3.6 Kerangka Berpikir Logis Misi 4 III - 12
Gambar 3.7 Kerangka Berpikir Logis Misi 5 III - 12
Gambar 3.8 Skema Keterkaitan Visi-Misi RPJPD 2025-20245 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 13
Gambar 3.9 Skema Keterkaitan RPJMN 2025-20245 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 14
Gambar 3.10 Skema Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 15
Gambar 3.11 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 III - 21
Gambar 3.12 Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Cirebon Periode RPJMD 2025-2029 III - 22
Gambar 3.13 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah

	Jawa Barat	III - 22
Gambar 3.14	Arah Pembangunan Wilayah Jawa Barat	III - 23
Gambar 3.15	Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045	III - 27
Gambar 3.16	Tematik Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030	III - 42
Gambar 3.17	Tema dan Tahap Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030	III - 43
Gambar 3.18	Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih	III - 63
Gambar 4.1	Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon	IV - 4
Gambar 5.1	Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah	V - 6
Gambar 5.2	Proses Pengelolaan Risiko	V - 6





BAB I

PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

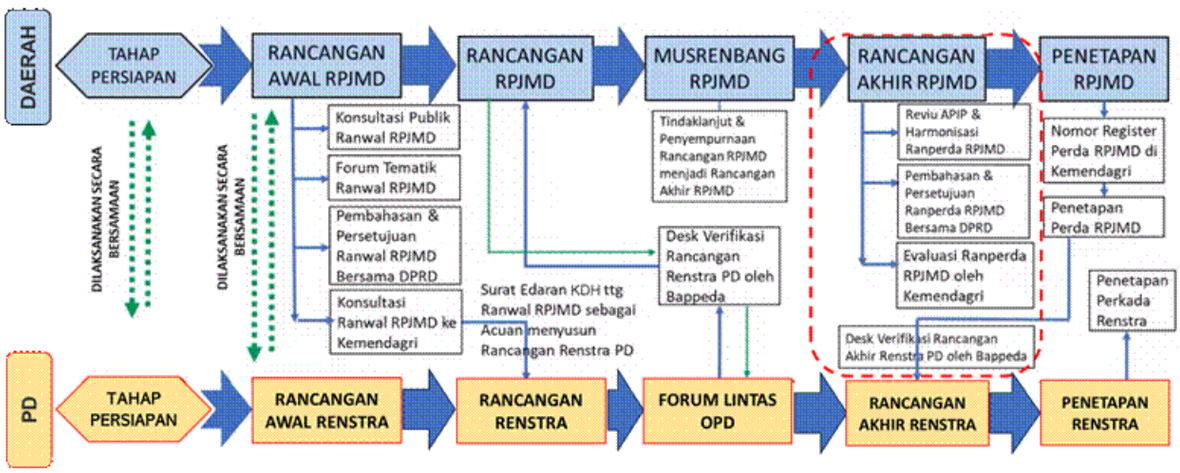
1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, dan kerangka pendanaan daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD memiliki kedudukan yang strategis sebagai pedoman sekaligus instrumen pengendali dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 dan Pasal 264 menyebutkan bahwa salah satu tugas kepala daerah terpilih sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2025-2029 terpilih, yaitu **H. Imron** dan **H. Agus Kurniawan Budiman**, dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya, adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, kearifan lokal, dan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 41 hingga 72 Permendagri 86/2017 menguraikan tata cara penyusunan RPJMD mencakup 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu tahap persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029

Secara teknis, penyusunan RPJMD merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sekaligus sebagai upaya penyelarasan RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029. Inmendagri tersebut secara rinci menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD, yaitu: (1) persiapan penyusunan; (2) pembahasan visi dan misi secara teknokratik; (3) penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD; (4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD; (5) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD; (6) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; (7) Konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten ke provinsi; (8) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah (PD) untuk Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD; (9) Forum PD/Lintas PD; (10) Verifikasi Renstra PD; (11) Penyusunan Rancangan RPJMD; (12)

Musrenbang RPJMD; (13) Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD; (14) Review Rankhir oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (15) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD kepada DPRD; (16) Pembahasan Ranperda RPJMD; (17) Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten oleh provinsi; (18) Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD; dan (19) Perumusan Rankhir hingga Penetapan Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD. Dokumen ini merupakan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, output hingga tahap keenam proses penyusunan RPJMD tersebut di atas.

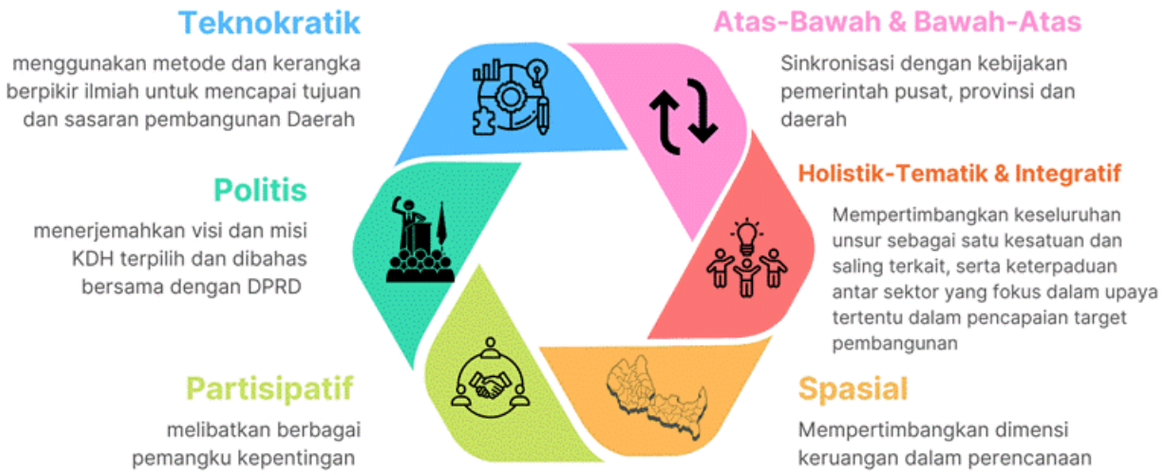
Penyusunan RPJMD menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down.* Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan kepala daerah terpilih dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RPJMD. Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan RPJMD yang memperhatikan kebijakan dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan

dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan kewenangan daerah dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah. Dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 menjadi rujukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cirebon untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon menggunakan pendekatan *dynamic governance* yang berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif, dinamis, dan adaptif. Konsep *dynamic governance* memiliki tiga pilar, meliputi pilar *thinking ahead*, pilar *thinking again*, dan pilar *thinking across*. Pilar *thinking ahead* mencakup perumusan visi dan misi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman", yang menggambarkan orientasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional serta menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pilar *thinking again* digunakan sebagai evaluasi kebijakan yang telah berjalan agar lebih efektif dan responsif melalui adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon. Pilar *thinking again* menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, responsif, dan terukur melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD. Sementara itu, pilar *thinking across* menggambarkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan pemangku

kepentingan untuk menciptakan inovasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Cirebon.



Gambar 1.2 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon

Penyusunan RPJMD tidak semata-mata merupakan kewajiban normatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga merupakan kebutuhan substantif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Melalui dokumen RPJMD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu merumuskan arah pembangunan yang realistis, terukur, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam konteks dinamika pembangunan saat ini, tantangan yang dihadapi daerah semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, politik, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menuntut adanya perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Penyusunan RPJMD dilaksanakan secara politis, teknokratis, *top dwon, bottom up*, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan agar RPJMD yang dihasilkan benar-benar

mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan potensi daerah, serta memiliki legitimasi publik yang kuat dalam pelaksanaannya.

RPJMD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Tantangan globalisasi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan adaptif. Dengan adanya RPJMD, pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan permasalahan utama, menetapkan prioritas pembangunan, dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyusunan RPJMD juga menjadi sarana untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, sehingga tercipta konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini penting agar dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, serta potensi daerah, sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, RPJMD harus mampu mengidentifikasi permasalahan pokok daerah, merumuskan prioritas pembangunan, serta menyusun strategi yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian, RPJMD bukan hanya merupakan dokumen perencanaan teknokratis, melainkan juga kontrak sosial politik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang–undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 6547);
5. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

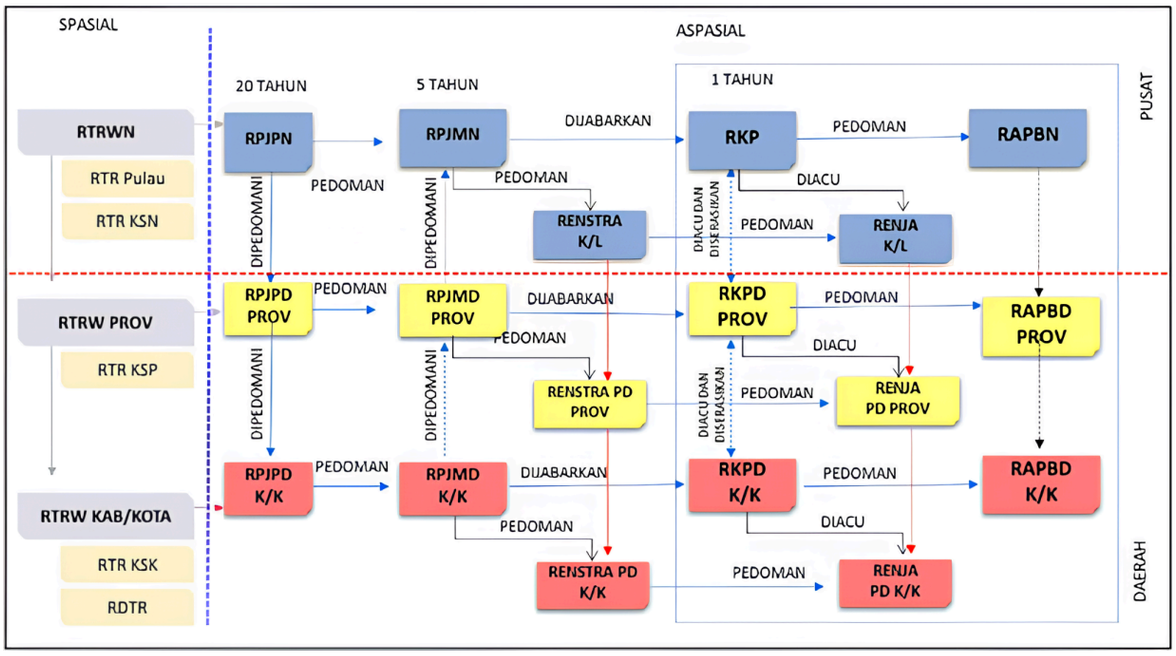
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 304);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor Noreg Perda Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat Nomor (8/231/2024);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

1.3 Hubungan antara Dokumen

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan daerah (kabupaten) disusun dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta rencana tata ruang wilayah. Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana dalam Gambar 1.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Cirebon memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Cirebon bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2025-2029. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2025-2045 periode ke I menjadi acuan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

3. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Tahap I. Dengan demikian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Cirebon juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Tahap pertama.
4. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2024-2044. RPJMD harus memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan dan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur yang integratif dan inklusif.
5. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Sementara itu, secara substantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, berserta dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu. Maka keselarasan substansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab 2 permasalahan dan isu strategis.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2045-2045.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025- 2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Cirebon tahun 2025- 2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025- 2029;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan;

Bab II : Gambaran Umum Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; menjelaskan gambaran singkat kondisi keuangan daerah, terdiri dari kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, dan kerangka pendanaan pembangunan daerah; serta uraian rumusan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari sub bab gambaran umum daerah. Permasalahan dan Isu strategis yang dirumuskan berupa permasalahan dan isu strategis yang bersifat dominan/signifikan yang mempengaruhi kondisi daerah.

Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan serta menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat program Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, pagu indikatif sebagai gambaran kebutuhan pendanaan,

target kinerja yang akan dicapai secara bertahap selama periode perencanaan, serta perangkat daerah penanggung jawab yang melaksanakan program sesuai mandat dan fungsinya. Selain itu, Bab ini juga menjelaskan ukuran kinerja keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon–Patimban–Kertajati, diproyeksikan sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, didukung oleh kehadiran infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan laut internasional, dan bandar udara bertaraf internasional. Letaknya yang strategis membentuk segitiga pertumbuhan yang menghubungkan wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka, menjadikan kawasan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas logistik dan rantai pasok industri regional maupun nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, kawasan Rebana telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menarik investasi, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai episentrum baru perekonomian Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ini, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman, furniture dan produk kayu, industri perkapalan, pakan ternak, bahan galian non-logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, serta pengolahan hotmix dan beton. Spesialisasi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ke depan, potensi Kabupaten Cirebon dalam mendukung kawasan Rebana dapat terus diperluas melalui beberapa strategi pengembangan. Pertama, penguatan ekosistem industri berbasis digital dan teknologi hijau

untuk mendorong industrialisasi berkelanjutan. Kedua, optimalisasi konektivitas antar moda transportasi untuk mendukung efisiensi distribusi logistik. Ketiga, pengembangan kawasan permukiman dan pusat layanan publik terpadu yang ramah investasi dan ramah lingkungan untuk mendukung kawasan industri sebagai bagian dari kota baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, potensi wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Cirebon juga dapat dikembangkan secara sinergis dengan sektor industri kreatif, sebagai penopang ekonomi alternatif dan daya tarik tambahan bagi investor dan wisatawan. Melalui pendekatan pengembangan yang holistik dan berkelanjutan, kawasan Rebana, khususnya di Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu menjadi model transformasi wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain termasuk kedalam Kawasan industri Rebana, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

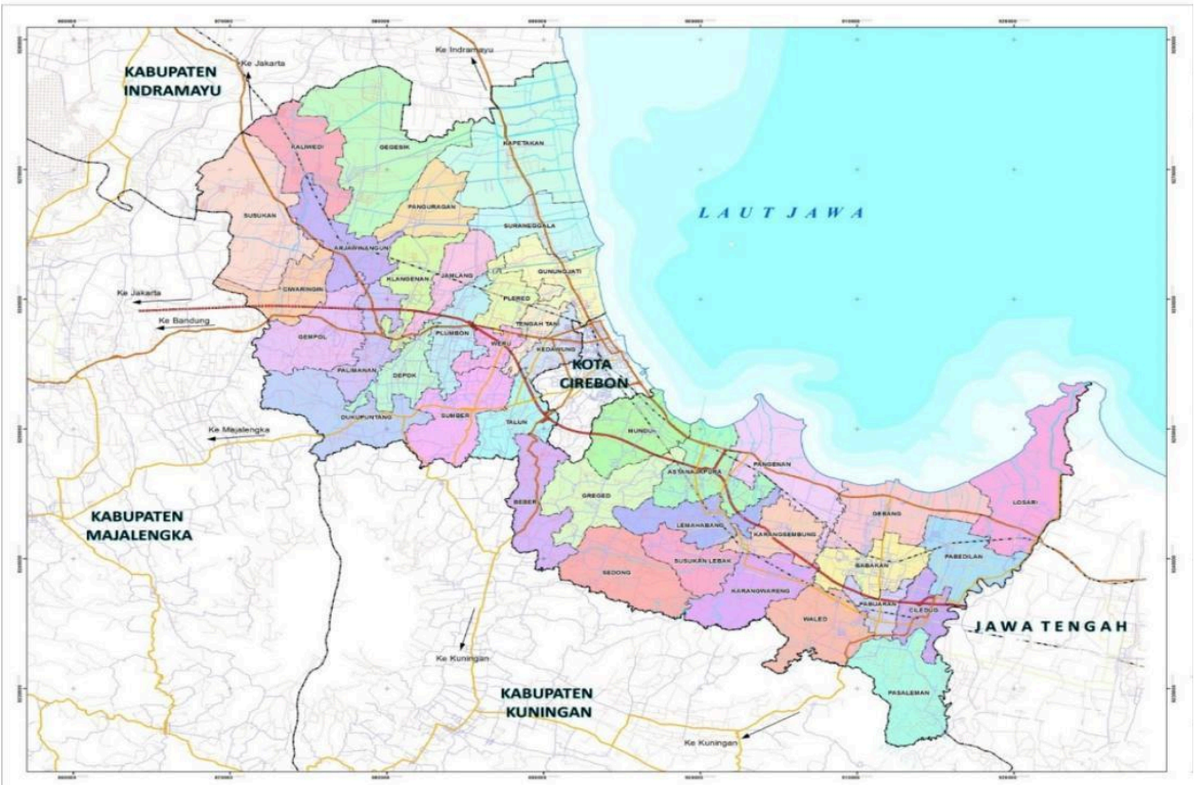
1) Kabupaten Cirebon ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Sumber (Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun) dan Pusat Pelayanan Regional Cirebon Raya;
2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;
3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan;
4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);

5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok Listrik nasional jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

6) Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Pengembangan Edu-Heritage (Budaya dan Sejarah)

Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30´ 58” – 7° 00‘ 24” Lintang Selatan dan 108° 19’ 30” – 108° 50´ 03” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.075,17 km2. Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi dan Jawa Tengah



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km2) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83

km2), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km2).

2.1.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima peran penting yaitu : berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sektor pertanian cukup tinggi. Kabupaten Cirebon memiliki potensi kawasan pertanian seluas 54.815 ha, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon

NO	KAWASAN PERTANIAN	LUAS (HA)	LOKASI		
1	Kawasan Tanaman Pangan	48.683	40 Kecamatan		
2	Kawasan Hortikultura	6.050	Kecamatan :		
			1. Astanajapura, 2. Babakan, 3. Beber, 4. Ciledug, 5. Depok, 6.Dukupuntang, 7. Gegesik, 8. Gempol, 9. Greged, 10. Jamblang,	11. Kaliwedi, 12. Karangsembung, 13. Karangwareng, 14. Klangenan, 15. Lemahabang, 16. Mundu, 17. Pabedilan, 18. Pabuaran, 19. Palimanan, 20. Pasaleman,	21. Sedong, 22. Sumber, 23. Susukan, 24. Susukan Lebak, 25. Talun, 26 Waled
3	Kawasan Peternakan	82	Kecamatan : 1. Ciledug, 2. Karangwareng, 3. Pasaleman, 4. Waled		
Jumlah		54.815			

Sumber Data : Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044

Dari total luas potensi kawasan pertanian Kabupaten Cirebon, seluas 44.093 ha ditetapkan sebagai **Kawasan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (KP2B).** KP2B dimaksud tersebar di 39 (*tiga puluh sembilan*) kecamatan selain Kecamatan Kedawung.

Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan baik oleh gubernur juga presiden. Pada tahun 2024, luas tanam padi di Kabupaten Cirebon mencapai 91.395 ha**,** dengan luas panen 90.587 ha dan total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 683.880 Ton (GKP). Selain tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon adalah jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu.

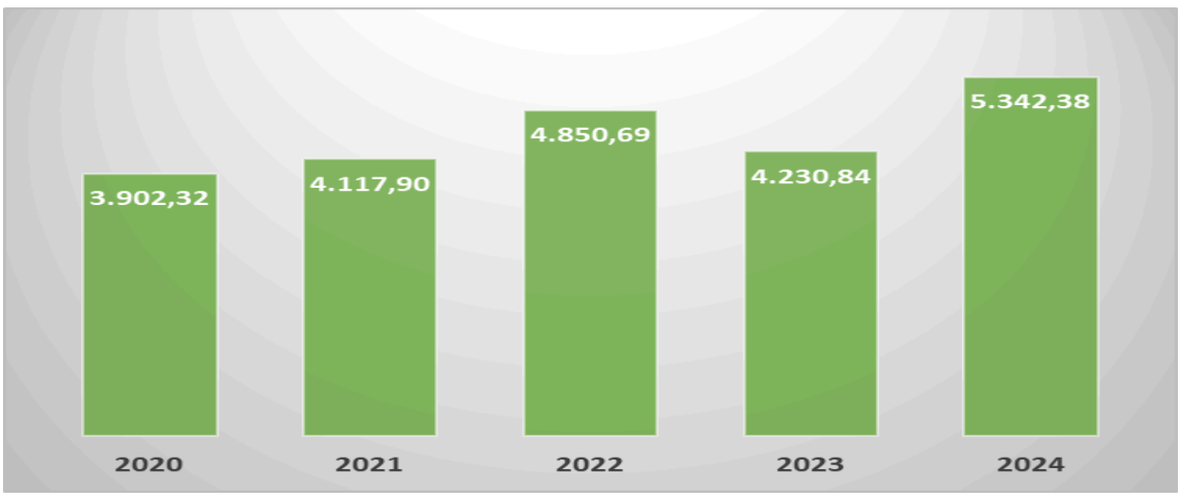
Kabupaten Cirebon juga kaya dengan potensi tanaman hortikultura yaitu tanaman buah dan tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang berkembang di Kabupaten Cirebon, yaitu : bawang merah, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, jamur tiram, jamur merang, kacang panjang, kangkung, ketimun, petsai, terung, dan tomat. Tanaman sayuran dengan produksi tertinggi adalah bawang merah dengan produksi tahun 2024 sebesar 320.944 kuintal, disusul oleh cabai besar dengan produksi sebesar 41.537 kuintal dan jamur merang dengan produksi tahun 2024 sebesar 16.502. Tanaman buah-buahan yang berkembang di Kabupaten Cirebon, yaitu : melon, semangka, alpukat, duku/langsat, belimbing, durian, jambu air, jeruk siam/keprok, mangga, melinjo, nangka/cempedak, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, anggur, buah naga, jeruk lemon, dan lengkeng. Mangga memiliki jumlah produksi terbesar dari semua jenis buah yang berkembang di Kabupaten Cirebon yakni sebesar 422.801 kuintal pada tahun 2024.

Tanaman perkebunan yang berkembang di Kabupaten Cirebon yaitu kelapa dan tebu. Luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 770, 83 ha dengan produksi sebesar 239,68 ton. Sedangkan areal perkebunan tebu lebih mendominasi dibandingkan perkebunan kelapa, dengan areal perkebunan seluas 4.571,55 ha, produksinya mencapai 21.305, 68 ton di tahun 2024. Sektor perkebunan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan. Namun, selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), luas lahan produksi perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:

1. Alih fungsi lahan akibat tekanan pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan industri, khususnya di wilayah barat dan tengah Kabupaten Cirebon yang berada pada koridor strategis Pantura.
2. Fluktuasi harga komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa, dan mangga, yang mempengaruhi minat dan kemampuan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.
3. Kondisi iklim ekstrim, seperti kemarau panjang maupun banjir musiman, yang menyebabkan sebagian lahan tidak dapat digunakan secara optimal pada tahun-tahun tertentu.
4. Keterbatasan dukungan sarana prasarana pertanian dan modal usaha, yang menyebabkan pengelolaan lahan menjadi tidak maksimal pada periode tertentu.

Kenaikan kembali luas lahan pada tahun 2024 diperkirakan merupakan hasil dari intervensi Pemerintah Daerah melalui program rehabilitasi perkebunan, pemberian bantuan bibit, pelatihan teknis kepada petani, serta peningkatan akses pasar dan teknologi. Meski demikian, data ini juga menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih memiliki kerentanan struktural, sehingga dibutuhkan upaya penguatan tata kelola dan perencanaan jangka menengah secara lebih komprehensif.

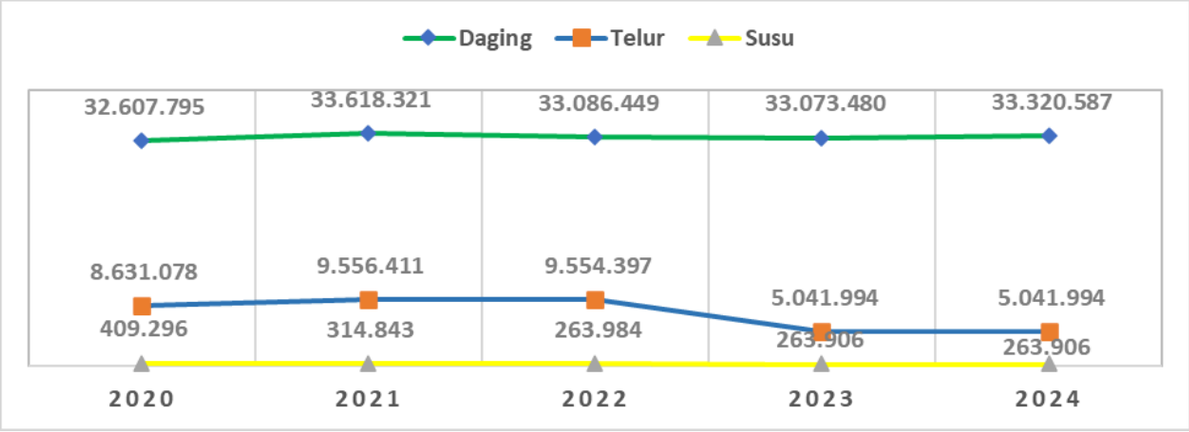


Gambar 2.2 Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, kelinci. Populasi ternak terbesar di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024

adalah ternak domba dengan jumlah populasi sebanyak 308.482 ekor, disusul kambing sebanyak 21.745 ekor dan sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 4.200 ekor. Sedangkan unggas yang berkembang di Kabupaten Cirebon adalah ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan itik manila. Populasi unggas terbanyak di Kabupaten Cirebon adalah ayam pedaging dengan` populasi di tahun 2024 adalah sebanyak 4.006.774 ekor, disusul ayam kampung dengan populasi sebanyak 1.387.653 ekor dan ayam petelur dengan populasi sebanyak 60.907 ekor. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan daging, telur dan susu sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.3, produksi komoditas peternakan di Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Produksi daging menunjukkan fluktuasi ringan namun stabil, dimulai dari 33.607.795 kg pada tahun 2020 dan berakhir di angka 33.320.587 kg pada tahun 2024. Sementara itu, produksi telur mengalami sedikit variasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 9.556.411 kg dan menurun drastis mulai tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi sebesar 5.041.994 kg. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan yang cukup drastis produksi telur itik/itik manila. Meski demikian Kabupaten Cirebon masih mampu menjaga kestabilan pasokan protein hewani utama, khususnya daging dan telur, walaupun tetap dibayangi tantangan produktivitas.

Produksi susu perlu mendapatkan perhatian karena menunjukkan tren penurunan cukup tajam, dari 409.296 liter pada tahun 2020 menjadi hanya 263.906 liter pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai akibat dari:

1. Penurunan jumlah peternak sapi perah, terutama di wilayah yang semula menjadi sentra produksi susu.
2. Tingginya biaya operasional dan pakan ternak, yang tidak sebanding dengan harga jual susu segar di tingkat produsen.
3. Kurangnya akses teknologi peternakan dan pendampingan teknis, sehingga produktivitas per ekor sapi perah menurun.
4. Minimnya skema kemitraan atau industri pengolahan susu lokal, yang menyebabkan ketidakpastian pasar bagi peternak kecil.

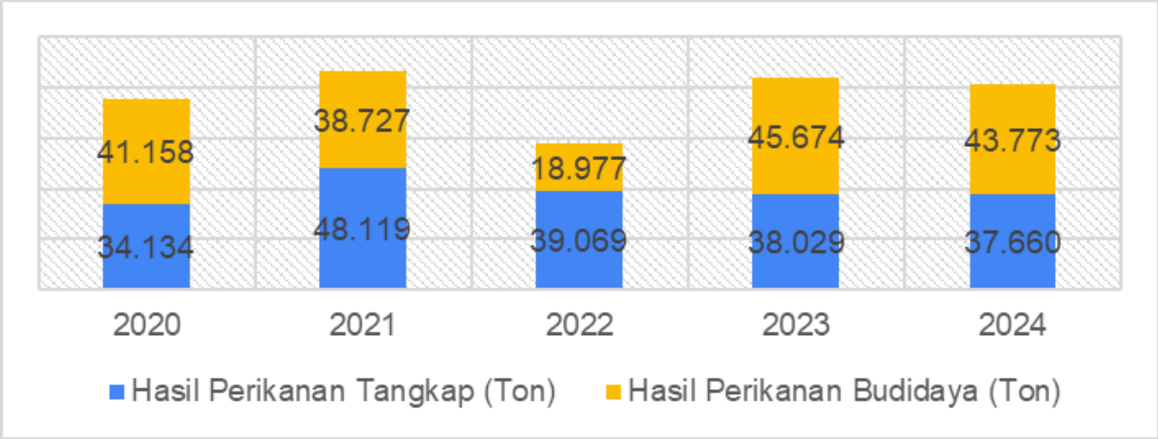
Penurunan produksi susu ini penting untuk menjadi perhatian dalam perumusan program jangka menengah daerah, mengingat potensi subsektor susu cukup strategis dalam mendukung gizi anak dan keluarga, serta pengembangan ekonomi berbasis peternakan rakyat.

B. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon pada masa mendatang perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebesar 42,40 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 81.432,56 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu sebagian hasil perikanan Kabupaten Cirebon dijual ke luar daerah (ekspor domestik maupun antar provinsi), konsumsi ikan penduduk masih ditambah dari pasokan luar daerah, dan ada inefisiensi dalam distribusi, atau ikan hasil produksi tidak terserap optimal untuk konsumsi masyarakat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan produktivitas perikanan budidaya maupun tangkap, terutama di wilayah pesisir dan tambak, perlu upaya diversifikasi produk olahan ikan lokal agar konsumsi meningkat dan produksi tidak hanya diekspor, perli perluasan akses pasar dalam kabupaten untuk menekan ketergantungan distribusi dari luar dan perlu sosialisasi gerakan makan ikan agar konsumsi per kapita bisa terus naik seiring produksi.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, baik dari sisi perikanan tangkap maupun budidaya. Selama periode 2020–2024, kinerja sektor perikanan menunjukkan pola fluktuatif

yang berbeda antara subsektor tangkap dan budidaya, sebagaimana tergambar pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon relatif stabil, dengan fluktuasi moderat. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 34.134 ton, sedangkan puncaknya terjadi pada 2021 mencapai 48.119 ton. Tahun 2022 hingga tahun 2024, jumlah produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan banyak nelayan masih menggunakan kapal kecil (GT rendah), penggunaan alat tangkap yang tidak efisien atau masih tradisional, masih minimnya kapasitas nelayan, kurangnya akses terhadap teknologi penangkapan ikan, kurangnya akses terhadap permodalan, cuaca ekstrem membatasi hari melaut yaitu pada saat musim barat (gelombang tinggi) nelayan tidak melaut, ketersedian dan fungsi sistem rantai dingin serta pasar belum optimal dalam menunjang pemasaran hasil perikanan tangkap.

Sementara itu, subsektor perikanan budidaya menunjukkan volatilitas tinggi, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 18.977 ton dari kisaran di atas 40 ribu ton pada tahun sebelumnya. Meskipun produksi kembali meningkat pada tahun 2023 (45.674 ton), terjadi penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 43.773 ton. Fluktuasi tajam ini menunjukkan bahwa subsektor budidaya masih sangat rentan terhadap gangguan eksternal dan internal. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi produksi perikanan budidaya yaitu alih fungsi tambak ke non-perikanan (perumahan/industri) menurunkan luasan produksi, banyak tambak tidak direvitalisasi atau mengalami penurunan kesuburan lahan, kualitas dan harga benih ikan/udang mempengaruhi survival rate, tingginya harga pakan ikan, sistem tambak sebagian besar masih tradisional (ekstensif), masih minimnya penerapan budidaya intensif/modern (misal bioflok, tambak super-intensif), pengaruh

cuaca dan musim di beberapa lokasi terjadi rob, masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan, kurangnya akses terhadap teknologi pembudidayaan ikan dan kurangnya akses terhadap permodalan bagi pembudidaya ikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perikanan budidaya menyimpan potensi peningkatan produksi yang sangat tinggi, namun diperlukan kebijakan intervensi yang lebih terstruktur dari Pemerintah Daerah.

C. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.6 Tahun 2024, luas total Kawasan Pariwisata ini adalah sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi:

1) Wisata Bukit Golf Ciperna yang berada di Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun;
2) Kawasan Agrowisata Sedong yang berada di Kecamatan Sedong;
3) Kawasan Batik Trusmi yang berada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru;
4) Wisata Pantai Baro yang berada di Kecamatan Gebang;
5) Wisata Setu Patok yang berada di Kecamatan Mundu; dan
6) Lokasi Pariwisata lainnya.

Tabel 2.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Cirebon

Indikator	*Satuan*	*Tahun*				
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Kunjungan Wisman	*Orang*	*2.357*	*5.200*	*9.031*	*14.227*	*5.454*
Kunjungan Wisnus	*Orang*	*511.497*	*439.512*	*682.944*	*956.827*	*1.091.575*
JUMLAH		***513.854***	***444.239***	***691.975***	***971.054***	***1.097.023***

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2025, data yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020 hingga 2024, sektor pariwisata Kabupaten Cirebon menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Jumlah kunjungan wisnus meningkat signifikan dari 439.512 orang pada tahun 2021 menjadi 1.091.575 orang pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan minat wisatawan domestik terhadap destinasi wisata lokal, seiring dengan membaiknya

infrastruktur, promosi daerah, dan pemulihan pasca pandemi. Sebaliknya, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sempat meningkat hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan tajam pada 2024, dari 14.227 menjadi 5.454 orang, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi pemasaran dan aksesibilitas pasar internasional.

Secara keseluruhan, total kunjungan wisatawan di Kabupaten Cirebon meningkat dari 513.854 orang pada tahun 2020 menjadi 1.097.023 orang pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi daerah. Ke depan, penguatan pariwisata perlu diarahkan pada diversifikasi produk wisata, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan pasar wisatawan mancanegara, sehingga pariwisata dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah secara berkelanjutan.

D. Kebudayaan

Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat pada sejarah panjang Kesultanan Cirebon dan perkembangan sosial masyarakatnya. Unsur-unsur kebudayaan yang ada tidak hanya mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat, tetapi juga menjadi aset penting dalam pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Tabel 2.3, terdapat delapan unsur kebudayaan utama yang tersebar di berbagai kecamatan dan mencakup kategori cagar budaya, kampung adat, kesenian tradisional, tradisi lisan, serta tradisi dan upacara.

Tabel 2.3
Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	Satuan
1	Tradisi Lisan	12	Objek
2	Manuskrip	8	Objek
3	Adat Istiadat	13	Objek
4	Ritus	23	Objek
5	Pengetahuan Tradisional	58	Objek
6	Teknologi Tradisional	49	Objek
7	Seni	60	Objek
8	Bahasa	14	Objek
9	Permainan Rakyat	24	Objek
10	Olahraga Tradisional	2	Objek

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang dikelola dalam SIPD, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 10 unsur kebudayaan yang masuk dalam objek pemajuan kebudayaan (OPK) di

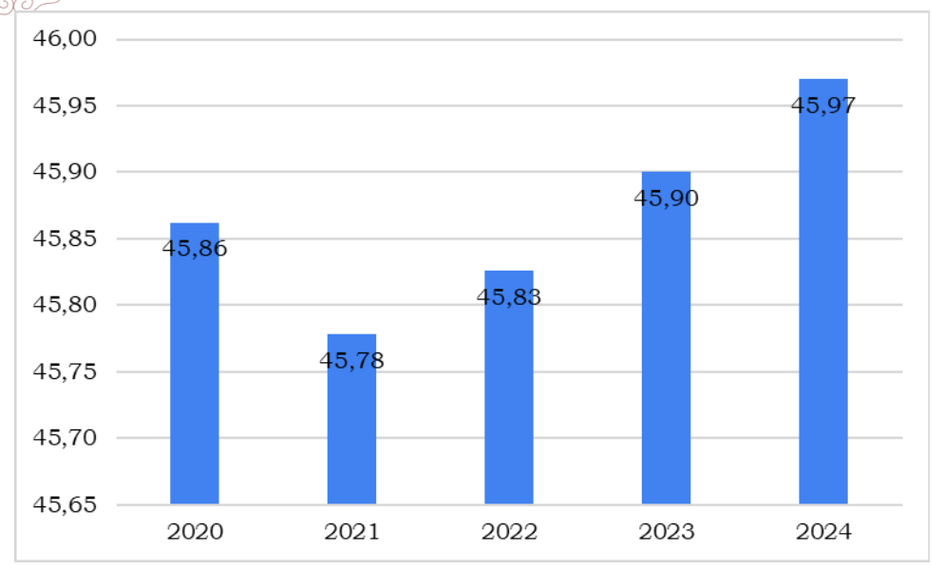
Kabupaten Cirebon. Unsur kebudayaan dengan jumlah objek terbanyak adalah seni sebanyak 60 objek, diikuti oleh pengetahuan tradisional sebanyak 58 objek, dan teknologi tradisional sebanyak 49 objek.

Sementara itu, unsur ritus memiliki 23 objek, permainan rakyat sebanyak 24 objek, serta adat istiadat sebanyak 13 objek. Di sisi lain, unsur kebudayaan dengan jumlah objek paling sedikit adalah olahraga tradisional yang hanya memiliki 2 objek, diikuti oleh manuskrip sebanyak 8 objek, dan bahasa sebanyak 10 objek.

Kondisi ini mencerminkan kekayaan dan keragaman warisan budaya Kabupaten Cirebon, sekaligus mengindikasikan perlunya upaya pelestarian dan pengembangan yang merata pada semua unsur, terutama pada unsur-unsur dengan jumlah objek yang relatif rendah agar tidak mengalami kepunahan atau pengabaian dalam proses pemajuan kebudayaan daerah.

Keberadaan dan keberlangsungan unsur-unsur budaya ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan budaya lokal, antara lain melalui perlindungan hukum, revitalisasi situs, fasilitasi seniman dan budayawan lokal, serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah.

Dalam merumuskan langkah strategis tersebut, pemerintah membutuhkan pemahaman yang utuh dan terukur mengenai kondisi kebudayaan di wilayahnya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran tersebut adalah melalui Indeks Kebudayaan Daerah (IKD), yang menyajikan potret kuantitatif tentang berbagai dimensi dan indikator pembangunan kebudayaan. IKD berperan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pelestarian dan pengembangan budaya yang berbasis data dan sesuai karakteristik daerah.



Gambar 2.5 Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Pada tahun 2021, IKD tercatat sebesar 45,78 dan meningkat menjadi 45,97 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,19 poin. Meskipun kenaikan ini terbilang moderat, hal tersebut menandakan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Kenaikan IKD bisa jadi merupakan hasil dari upaya konservasi dan revitalisasi situs bersejarah atau benda cagar budaya, hasil realisasi target tersebut diukur berdasarkan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. Kenaikan yang terjadi bisa jadi mencerminkan adanya kegiatan rutin seperti festival atau upacara adat yang berhasil menjaga tradisi. Namun, stagnasi menunjukkan tantangan dalam menghadapi modernisasi atau globalisasi yang bisa menggerus nilai-nilai lokal.

Peran Pemerintah dan Regulasi Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus yang jauh lebih besar untuk program kebudayaan dan cagar budaya. Anggaran ini tidak hanya untuk pemeliharaan, tetapi juga untuk revitalisasi dan promosi. Sinergi Lintas Sektor Program kebudayaan diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Misalnya, festival seni dan budaya lokal dijadikan agenda tahunan yang menarik wisatawan, dan situs cagar budaya dikelola secara profesional sebagai destinasi wisata unggulan. Inovasi dan Pemberdayaan Museum dan situs bersejarah Cirebon mulai mengadopsi teknologi digital. Pemanfaatan virtual tour, aplikasi mobile, dan media sosial secara optimal.

E. Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 19,2°C, suhu maksimum 38,1°C dan suhu rata-rata 28°C.

Berdasarkan data pengamatan unsur iklim dari Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon tahun 2024, terdapat pola musiman yang jelas dalam hal variasi suhu udara dan kelembaban relatif. Pemahaman terhadap dinamika unsur iklim ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, khususnya sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim seperti pertanian, kesehatan, dan sumber daya air.

Secara umum, pola musiman iklim di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Musim Hujan**: Terjadi pada bulan Desember hingga Maret, ditandai dengan suhu relatif stabil dan kelembaban tinggi.
- **Musim Kemarau**: Terjadi pada bulan Juni hingga September, ditandai dengan suhu tinggi pada siang hari dan kelembaban rendah.
- **Masa Peralihan (Pancaroba)**: Terjadi pada bulan April–Mei dan Oktober–November, ditandai oleh fluktuasi suhu dan kelembaban yang cukup signifikan.

Pola iklim tahunan di Kabupaten Cirebon memiliki implikasi strategis bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor yang rentan terhadap dinamika cuaca ekstrem. Dalam bidang pertanian, diperlukan penyesuaian pola tanam agar tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau, dengan rekomendasi awal masa tanam dilakukan pada akhir musim hujan sekitar bulan Maret hingga April untuk mengoptimalkan ketersediaan air tanah. Pada aspek pengelolaan sumber daya air, perlu disusun strategi konservasi yang efektif guna menghadapi periode kering, khususnya pada bulan Agustus hingga Oktober. Di sektor kesehatan, dibutuhkan kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama musim hujan, serta risiko dehidrasi dan *heat stroke* selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pendekatan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sistem peringatan dini untuk meningkatkan ketahanan iklim daerah secara menyeluruh.

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan sebesar 2.182,80 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660

mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang pantai utara pulau jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan > 40%.

Tabel 2.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Bulan	Suhu			Kelembaban Udara		
	Minimal	Rata-Rata	Maksimal	Minimal	Rata-Rata	Maksimal
Januari	23,20	27,95	35,40	56,00	85,65	98,00
Februari	23,40	28,04	35,40	58,00	83,83	100,00
Maret	23,40	28,11	35,40	45,00	83,48	97,00
April	24,00	29,18	35,80	53,00	81,41	98,00
Mei	22,80	29,10	35,60	45,00	76,12	98,00
Juni	22,40	28,24	34,70	43,00	79,03	98,00
Juli	19,20	27,57	34,80	53,00	75,05	98,00
Agustus	19,80	28,42	37,00	50,50	66,41	80,75
September	23,30	29,67	36,50	46,50	65,22	80,75
Oktober	22,00	30,69	38,10	45,00	64,39	73,00
November	23,40	29,18	36,00	68,25	78,30	85,25
Desember	23,80	28,04	35,00	73,50	83,65	91,25

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

F. Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air.

1) Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-Cisanggarung dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS

Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Cikeusik, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpul Kwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon memiliki enam belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS).

Kabupaten Cirebon memiliki cakupan wilayah yang dilewati oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang tersebar di seluruh kecamatan. Keberadaan DAS memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi hidrologi, pelestarian lingkungan, serta mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan dokumen penetapan RKPD tahun 2025, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Cirebon antara lain:

a. DAS Bangkaderes seluas kurang lebih 20.214,84 Ha.
b. DAS Cisanggarung seluas kurang lebih 20.035,29 Ha;
c. DAS Ciwaringin seluas kurang lebih 32.739,43 Ha; dan
d. DAS Kalibunder seluas kurang lebih 24.524,62 Ha.

Keempat sistem aliran air ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ketahanan sumber daya air di daerah tersebut.

DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembagian pengelolaan kewenangan DI tersebut sebagai berikut:

a. DI dengan kewenangan pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis;
b. DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas 32.593 Ha, meliputi:
    - DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 Ha;
    - DI Ciwaringin seluas kurang lebih 1.103 Ha;
    - DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 Ha dan
    - DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 Ha.
c. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 8.988 Ha meliputi:
    - DI Walahar seluas kurang lebih 1.292 Ha;
    - DI Jamblang seluas kurang lebih 2.164 Ha;
    - DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 Ha;

- DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 Ha;
- DI Paniis Lebak seluas kurang lebih 332 Ha;
- DI Cibacang seluas kurang lebih 259 Ha;
- DI Cipurut seluas kurang lebih 134 Ha;
- DI Jawa seluas kurang lebih 111 Ha;
- DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 Ha;
- DI Katiga seluas kurang lebih 662 Ha; dan
- DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 Ha.

d. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon:

- DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 Ha;
- DI Soka seluas kurang lebih 282 Ha;
- DI Rajadana seluas kurang lebih 170 Ha;
- DI Ciparigi seluas 467 Ha;
- DI Keputon seluas kurang lebih 446 Ha;
- DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 Ha;
- DI Ciwado seluas kurang lebih 833 Ha;
- DI Agung seluas kurang lebih 711 Ha;
- DI Kecepet seluas kurang lebih 477 Ha;
- DI Panongan seluas kurang lebih 952 Ha dan
- DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 Ha.

Secara keseluruhan, luas cakupan keempat DAS tersebut di wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 107.028,69 hektar. Di antara keempat nya, DAS Ciwaringin memiliki cakupan wilayah terluas yakni 32.739,43 hektar, diikuti oleh DAS Cisanggarung seluas 29.035,29 hektar, DAS Kalibunder dengan luas 24.524,62 hektar, serta DAS Bangkaderes yang mencakup 20.214,83 hektar. Melihat luas cakupan tersebut, DAS Ciwaringin menjadi sistem aliran air paling dominan dan strategis, terutama dalam konteks konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13	Gunung Jati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data yang dikelola dalam SIPD

Pemeliharaan dan perbaikan fungsi hidrologi di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Keberadaan perangkat serta indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas fungsi hidrologi DAS sangatlah krusial. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menilai kondisi suatu DAS adalah melalui penggunaan model hidrologi. Terdapat empat kelompok utama yang mempengaruhi respons fungsi hidrologi, yaitu kondisi iklim, karakteristik fisik bentang lahan, indikator kewilayahan, dan pola penggunaan lahan. Di antara keempat kelompok tersebut, indikator kewilayahan dan iklim diketahui sebagai parameter yang memberikan pengaruh paling signifikan.

2) Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±13.790,000 m2, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ± 1,850,000 m^3.

3) Mata Air

Kegiatan inventarisasi potensi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi. Data yang biasa diambil di antaranya adalah sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akuifer, daerah resapan (*recharge area*), daerah pelepasan (*discharge area*), debit dan kualitas air, debit penurapan dan jenis pemanfaatannya. Jumlah

mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jumlah Titik		Nama Mata Air
1	Dukupuntang	5	1	Mata air Citangkurak di Desa Cipanas
			2	Mata air Cidahu di Desa Cipanas
			3	Mata air Cibuyut di Desa Cipanas
			4	Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
			5	Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat
2	Palimanan	1	1	Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1	Mata air Balonggede di Desa Cipinang
			2	Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1	Mata air Bakam di Desa Greged
			2	Mata air Umbar di Desa Nanggela
			3	Mata air Cilengceng di Desa Nanggela
			4	Mata air Mandiangin di Desa Durajaya
			5	Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak
			6	Mata air Pakuwon di Desa Gumulung
			7	Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
			8	Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng
5	Lemahabang	14	1	Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa
			2	Mata air Cidahu di Desa Belawa
			3	Mata air Ciloa di Desa Belawa
			4	Mata air Kegambulan di Desa Belawa
			5	Mata air Cikondang di Desa Wangkelang
			6	Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang
			7	Mata air Pesantren di Desa Pasawahan
			8	Mata air Cibinung di Desa Pasawahan
			9	Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan
			10	Mata air Sindangpancuran di Desa Sindanglaut
			11	Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut
			12	Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh
			13	Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon
			14	Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon
6	Sedong	1	1	Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1	Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1	Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem
			2	Mata air Cadas Gantung di Desa Waled Asem
			3	Mata air Gunung Cibelut di Desa Ciuyah
			4	Mata air Balong di Desa Ciuyah
			5	Mata air Bulak Canggah di Desa Ciuyah
9	Pasaleman	2	1	Mata air Jambe Racak di Desa Cigobang
			2	Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1	Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1	Mata air Krandon di Desa Krandon
			2	Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	2	1	Mata air Seureuh Beureum Sidawangi
			2	Mata air Sipedang di Desa Sidawangi
	Jumlah	44		

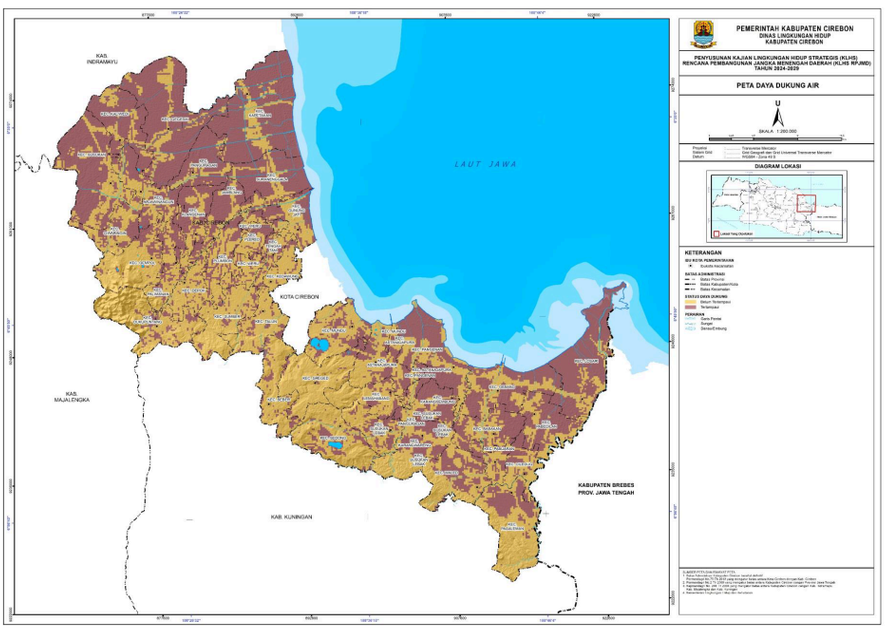
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2038, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

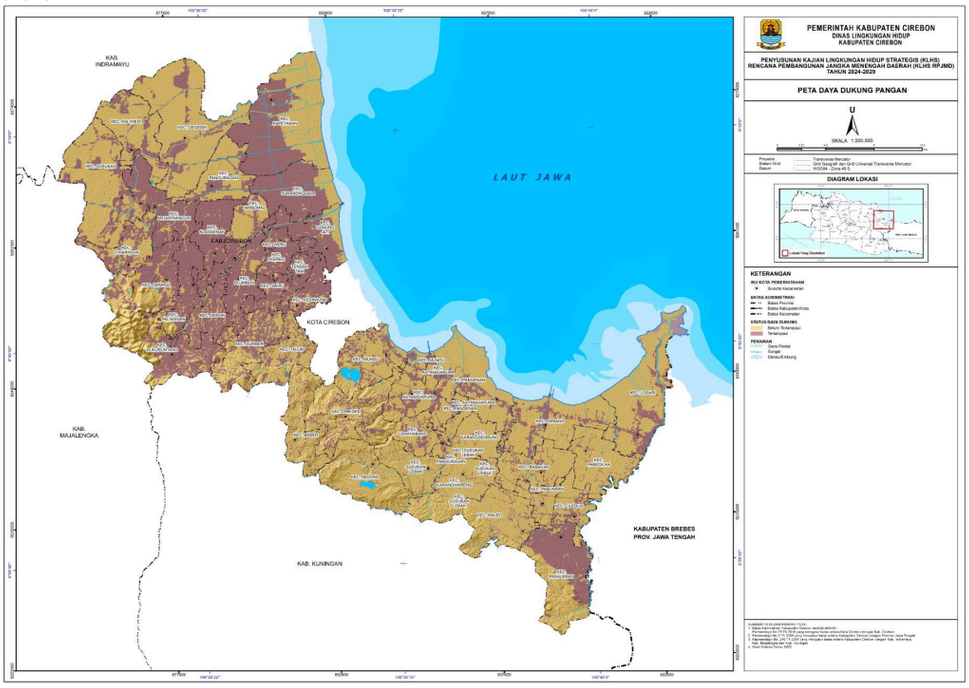
Status daya dukung air di Kabupaten Cirebon sebesar 55.418,86 ha atau 51,47% belum terlampaui dan sebesar 52.062,65 ha atau 48,35% terlampaui. Sedangkan status daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon sebesar 67.869,87 ha atau 63,21% belum terlampaui dan sebesar 39.496,20 ha atau 36,79% telah terlampaui.

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada kelas JE penyedia air sedang, dengan luasan sebesar 83.574,47 ha (78,00%). Sedangkan dominasi JE penyedia pangan berada pada kelas JE penyedia pangan sangat tinggi, dengan luasan sebesar 61.518,49 ha (57,13 %). Untuk JE pengatur air dominan berada pada kelas JE pengatur air sedang, dengan luasan sebesar 83.687,56 ha (77,72 %). Sementara dominasi JE pengatur iklim berada pada kelas JE pengatur iklim sedang, dengan luasan sebesar 78.971,66 ha (73,34%). Sebagian besar Kabupaten Cirebon berada pada kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas rendah dengan luasan seluas 83.346,75 Ha atau 77,60 % dari luas Kabupaten Cirebon.

Untuk JE pengatur banjir di Kabupaten Cirebon dominan berada pada kelas JE pengatur banjir rendah, dengan luasan sebesar 85.742,72 ha (79,63 %). Sedangkan dominasi JE pengatur mitigasi bencana kebakaran berada pada kelas JE pengatur mitigasi bencana kebakaran sangat tinggi, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha (78,79 %). Sedangkan dominasi JE pengatur longsor berada pada kelas JE pengatur longsor sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha (92,00%).



Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Cirebon
Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon
Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Energi (IKE)

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup energy system performance, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan buku ketahanan energi tahun 2019 dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Energy Transition Index (ETI) Indonesia berada pada peringkat 53 dengan nilai 55,5. World Economic Forum (WEF) mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan potensial challenges.

Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh expert. Aspek 4A terdiri dari, Availability (ketersediaan energi), Accessibility (kemampuan akses), Affordability (harga terjangkau), Acceptability (ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu:

1) “Sangat Tahan” (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
2) “Tahan” (Nilai 6 - 7, 99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.

3) "Kurang Tahan" (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
4) "Rentan" (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
5) "Sangat Rentan" (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat sejak tahun 2019 yang terkategori dengan kondisi tahan. Berikut adalah perkembangan ketahanan energi Indonesia.



Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2019-2024
Sumber: Dewan Energi Nasional (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.9, Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Nilai IKE naik dari 6,57 pada tahun 2019 menjadi 6,69 pada tahun 2024, yang seluruhnya berada dalam kategori "Tahan". Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sejumlah aspek ketahanan energi nasional, seperti sistem ketersediaan energi, aksesibilitas masyarakat terhadap energi, keterjangkauan biaya energi, serta kesinambungan dalam pengelolaan dan distribusi energi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor energi yang mendukung agenda transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. Potensi ini mencakup berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari panas bumi, energi bayu (angin), persampahan, hingga cadangan gas alam. Keberagaman ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah strategis dalam peta ketahanan dan kemandirian energi daerah di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, khususnya di kawasan selatan seperti Kecamatan Pasaleman dan sekitarnya, yang merupakan bagian dari jalur vulkanik Jawa. Berdasarkan data Kementerian ESDM melalui Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi panas bumi di wilayah ini diperkirakan mencapai puluhan megawatt.

Pemanfaatannya masih dalam tahap eksplorasi dan studi kelayakan, namun menyimpan potensi menjadi sumber energi base-load yang bersih dan berkelanjutan.

Beberapa titik di wilayah utara dan pesisir Kabupaten Cirebon, seperti Kecamatan Gebang dan Losari, memiliki kecepatan angin yang cukup stabil dengan rerata di atas 4 m/s, yang memenuhi ambang batas minimum untuk pengembangan turbin angin skala kecil hingga menengah. Ini membuka peluang bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berbasis komunitas dan industri kecil-menengah.

Pada tahun 2024, tingkat rumah tangga yang memiliki akses listrik di Kabupaten Cirebon mencapai 99.65%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sebagian besar penduduk di Kabupaten Cirebon telah terpenuhi, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan pelayanan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

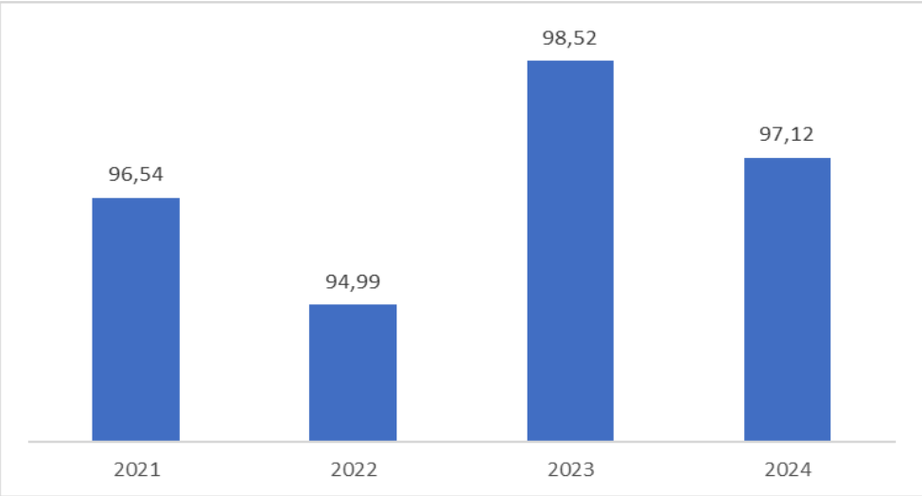
Sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Namun, hal ini sekaligus menjadi peluang untuk konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy/WtE). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur dan TPA lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) skala mikro. Teknologi ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan listrik dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dengan potensi yang ada, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi daerah maupun nasional. Namun demikian, pemanfaatan potensi energi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, investasi, dan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKE tidak hanya menjadi indikator keberhasilan nasional, tetapi juga menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan kebijakan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

B. Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Secara umum kondisi SPAM eksisting yang teridentifikasi di Kabupaten Cirebon adalah SPAM jaringan perpipaan yang dikelola oleh BUMD/PERUMDA AIR MINUM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, SPAM kelompok masyarakat

(Pokmas/KSM/KPSPAM/HIPAM/Bumdes) dan SPAM bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sampai dengan Desember Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) cabang dengan total kapasitas terpasang 548,38 /detik dengan jumlah sambungan aktif sebanyak 41.245 unit SR. SPAM jaringan perpipaan kelompok masyarakat (Pokmas) pada umumnya mengelola SPAM terbangun dari program Pamsimas dan atau pembangunan SPAM perdesaan lainnya dengan sumber dana pembangunan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten yang tersebar di Kabupaten Cirebon sebanyak unit 48.118 SR.



Gambar 2.10
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025

C. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan IKP 2024 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah *cut off point* IKP.

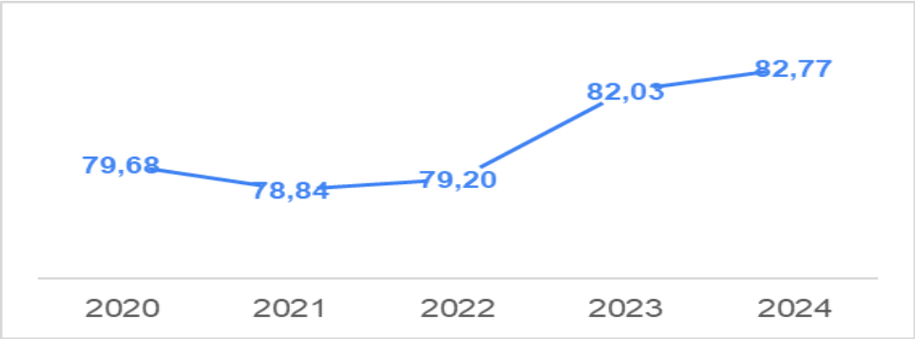
Tabel 2.7

Cut off point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Tahun 2024 Kabupaten Cirebon memiliki IKP sebesar 82,77, angka ini menempatkan Kabupaten Cirebon pada urutan ke-167 diantara kabupaten/kota di Indonesia. Point IKP Kabupaten Cirebon meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 poin IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,03 dan meningkat menjadi 82,77 pada tahun 2024. Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kabupaten Cirebon yang juga meningkat/positif, skor PPH Kabupaten Cirebon sebesar 78,06. Kondisi IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,77 secara relatif berada sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat yang memiliki skor IKP sebesar 82,97. Kabupaten Cirebon dengan IKP sebesar 82,77 masuk dalam kelompok prioritas 6 yakni daerah **sangat tahan pangan** menurut kriteria pengelompokan wilayah berdasarkan IKP dari Badan Pangan Nasional.



Gambar 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

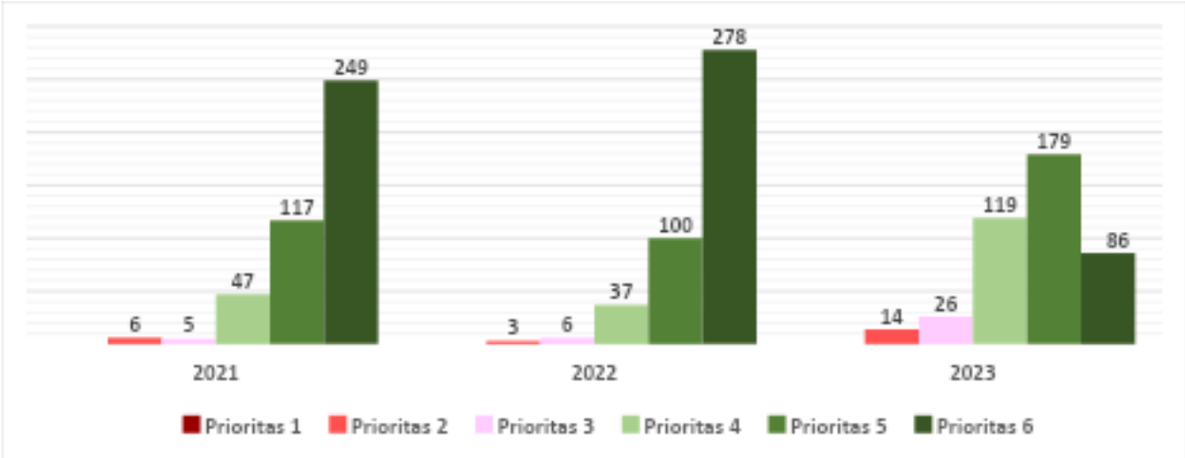
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan,

desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

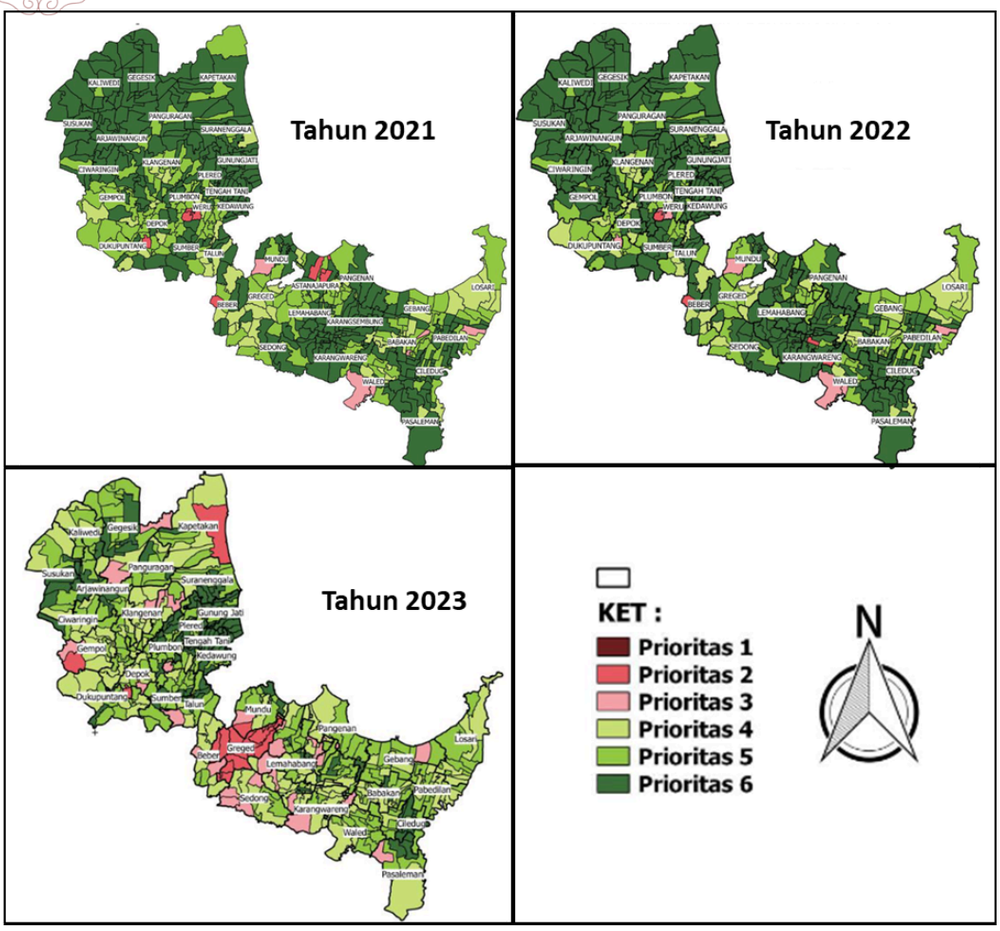
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah desa yang masuk prioritas 2 dan 3. Kemudian, jumlah desa yang masuk pada prioritas 6 dan 5 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 ditunjukan pada grafik berikut.



Gambar 2.12 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2023, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Cirebon berada pada kondisi tahan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 5), yaitu sebanyak 179 desa (42,22%). Jumlah desa yang masuk prioritas 4 (cukup tahan terhadap rawan pangan) juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 119 desa (28,07%). Jika dilihat dari kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, maka desa yang berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6) sebanyak 384 desa (90,57%), sedangkan desa yang berada pada kondisi rentan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 1-3) sebanyak 40 desa (9,43%).



Gambar 2.13 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebagian besar kecamatan (21 kecamatan), semua desanya berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6). Ada 6 Kecamatan yang desanya masuk kedalam prioritas 5 dan 6 yaitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani dan Kecamatan Plered. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Cirebon sudah baik, meskipun jika dilihat masing-masing indikatornya masih membutuhkan penanganan yang lebih optimal.

Ada 6 (*enam*) isu strategis terkait pangan di Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Produksi dan penyediaan pangan yang berkelanjutan, dengan permasalahan :
   - Luas lahan pertanian sawah dan produksi GKG menunjukkan tren menurun selama 5 tahun terakhir
   - Resiko perubahan iklim menyebabkan gagal panen karena banjir/kekeringan

- Energi dan Protein Cukup tapi skor PPH rendah disebabkan diversifikasi ketersediaan sayur buah, kacang kacangan, dan protein nabati masih rendah
- Ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah (Contoh : kedelai, daging sapi, telur ayam, cabai)
- Perbaikan manajemen data dan analisis ketahanan pangan seperti produksi, cadangan, stok, ekspor, impor pangan perlu Kebijakan yang tepat

2. Pemantauan harga dan pasokan pangan, dengan permasalahan :
   - Adanya kenaikan pangan strategis (seperti : cabai rawit hijau, cabai rawit merah dan minyak goreng) diatas 5 persen selama kurun waktu 5 tahun terakhir berpotensi langsung mengurangi akses terhadap pangan bergizi jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan yang sepadan *(Cost of Diet WFP, 2021).*
3. Peningkatan akses pangan, dengan permasalahan :
   - Masih tingginya jumlah penduduk miskin (2024) sekitar 245,9 ribu jiwa, rata-rata menurun sekitar -0,05% selama 5 tahun. Kemiskinan cenderung meningkatkan risiko POU. Keluarga dengan daya beli rendah cenderung tidak mampu mengonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang. Penduduk miskin memiliki daya beli terbatas (Garis Kemiskinan Rp. 475.046), kemiskinan berkorelasi kuat dengan skor PPH yang rendah (golongan 300-499rb), memperkuat risiko kekurangan gizi kronis.
4. Penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal, dengan permasalahan yaitu :
   - turunnya tren konsumsi energi sebesar -2,2 persen
   - turunnya tren konsumsi protein sebesar -2,7 persen
   - Konsumsi pangan hewani, sayur buah, kacang-kacangan sangat kurang di golongan masyarakat dengan pengeluaran untuk pangan sekitar Rp. 300.000,00 - Rp. 499.000,00
   - Masih tingginya kasus gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kurang nya gizi mikro pada remaja. Stunting meningkat signifikan dari 18,6 persen pada tahun 2022 menjadi 22,9 persen pada tahun 2023. Wasting meningkat dari 9,3 di tahun 2022 menjadi 9,7 persen di tahun 2023. Underweight menurun dari 19,7 persen di tahun 2022 menjadi 18,6 persen di tahun 2023. Overweight balita naik dari 2,9 persen di tahun 2022 menjadi 4,7 persen di tahun 2023. Anemia ibu hamil naik

dari 3,76 persen di tahun 2022 menjadi 4,37 persen di tahun 2023. Terakhir anemia remaja masih tinggi sebesar 41,89 persen di tahun 2023

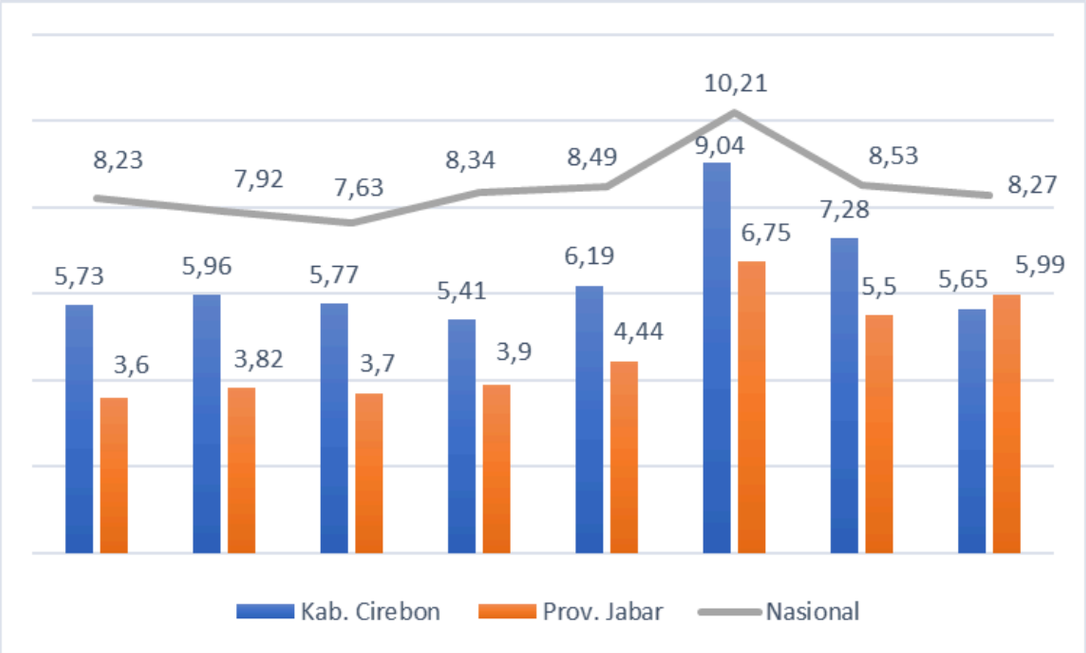
- Terjadinya penurunan keamanan pangan olahan dari 100 persen di tahun 2022 dan 2023 menjadi 80 persen di tahun 2024

5. Pengelolaan *Food Loss and Waste*, dengan permasalahan yaitu :
   - masih tingginya angka *food loss* atau kehilangan hasil dari panen, giling dan pengemasan produksi pertanian khususnya padi yakni sekitar 10-11 persen
   - Belum adanya data komposisi sampah di Kabupaten Cirebon
6. Integrasi Tata Kelola pangan

C. *Prevalence Of Undernourishment* (PoU)

Kabupaten Cirebon meski secara kewilayahan dengan IKP sebesar 82,77 termasuk kedalam kelompok prioritas 6 yakni daerah **sangat tahan pangan** menurut kriteria pengelompokan wilayah berdasarkan IKP dari Badan Pangan Nasional. Namun masih banyak penduduk Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan cukup asupan energi dari makanan yang dikonsumsi dan mengalami ketidakcukupan pangan kronis (kelaparan), hal ini terlihat dari persentase Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Cirebon yang masih tinggi di tahun 2024 sebesar 5,65 persen mencerminkan proporsi penduduk Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan cukup asupan energi dari makanan yang dikonsumsi, dan mengalami ketidakcukupan pangan kronis (kelaparan) sebanyak 6 (*enam*) orang per seratus penduduk Kabupaten Cirebon. Tingkat PoU Kabupaten Cirebon yang masih signifikan menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang mengalami kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan pangan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif, meskipun secara umum indeks ketahanan pangan menunjukkan perbaikan dalam ketersediaan. Hal ini mengindikasikan bahwa **tingginya IKP belum selalu langsung menurunkan PoU**, terutama jika perbaikan dimensi ketersediaan tidak diikuti dengan pemerataan akses dan peningkatan edukasi gizi. Dengan kata lain, ketahanan pangan secara makro (IKP) belum sepenuhnya menjamin tercapainya **ketahanan pangan rumah tangga dan individu**, yang tercermin dalam PoU. Kebutuhan ideal konsumsi energi dan protein berdasarkan WNPG 2018 adalah sebesar 2.100 Kkal per kapita per hari dan 57 gram protein per kapita per hari.

PoU Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2024, disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.14 PoU Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Nasional 2025, data yang dikelola dalam SIPD

FAO (*Food and Agriculture Organization*) mengklasifikasikan PoU ke dalam beberapa kategori, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Klasifikasi PoU

Kategori	Persentase PoU	Makna
Sangat Rendah	<2,5%	Ketahanan Pangan Sangat Baik
Rendah	2,5% - <5%	Ketahanan Pangan Cukup Baik
Sedang	5% - <15%	Masih Ada Kerawanan Pangan
Tinggi	15% - <25%	Ketahanan Pangan Rendah
Sangat Tinggi	≥25%	Krisis Ketahanan Pangan

Sumber : FAO (Food and Agriculture Organization), 2025

Dari Gambar 2.14 terlihat bahwa PoU Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 adalah sebesar 5,65 persen, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat namun masih di bawah nasional. PoU sebesar 5,65 persen menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori PoU sedang yang bermakna masih ada kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan daerah yang komprehensif perlu menurunkan angka PoU. Penurunan angka PoU di Kabupaten Cirebon

memerlukan upaya yang lebih fokus pada: Peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui penguatan ekonomi lokal dan perlindungan sosial, Perbaikan distribusi dan keterjangkauan pangan bergizi di desa rentan, serta Edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang serta intervensi gizi berbasis masyarakat.

2.1.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran menyeluruh terhadap kondisi lingkungan yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH sendiri disusun dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA diukur melalui tujuh parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform. Sementara itu, IKU dihitung berdasarkan parameter konsentrasi SO_2 dan NO_2, dan IKL dihitung dari luas tutupan lahan yang masih tersisa.

Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Setelah mengalami peningkatan dari 41,43 pada tahun 2021 hingga mencapai puncak 53,2 pada tahun 2023, nilainya kembali menurun menjadi 45,93 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun sebelumnya, keberlanjutan dan efektivitas upaya tersebut masih belum konsisten. Penurunan di tahun terakhir patut dicermati sebagai indikasi kemungkinan meningkatnya beban pencemaran air akibat pertumbuhan permukiman, aktivitas pertanian non-organik, atau kurangnya sistem pengolahan limbah domestik dan industri.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Cirebon secara umum berada pada kategori baik, dengan nilai yang relatif tinggi dan stabil selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari 81,12 di tahun 2021 menjadi 76,13 pada tahun 2023, nilai IKU kembali meningkat menjadi 76,86 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas udara di Kabupaten Cirebon sudah berada di jalur yang cukup baik, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi penurunan akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas pembangunan, dan penggunaan energi berbasis fosil.

Komponen yang paling mengkhawatirkan adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang menunjukkan nilai sangat rendah dan mengalami peningkatan yang sangat lambat, dari 27,2 pada tahun 2021 menjadi hanya 28,09 pada

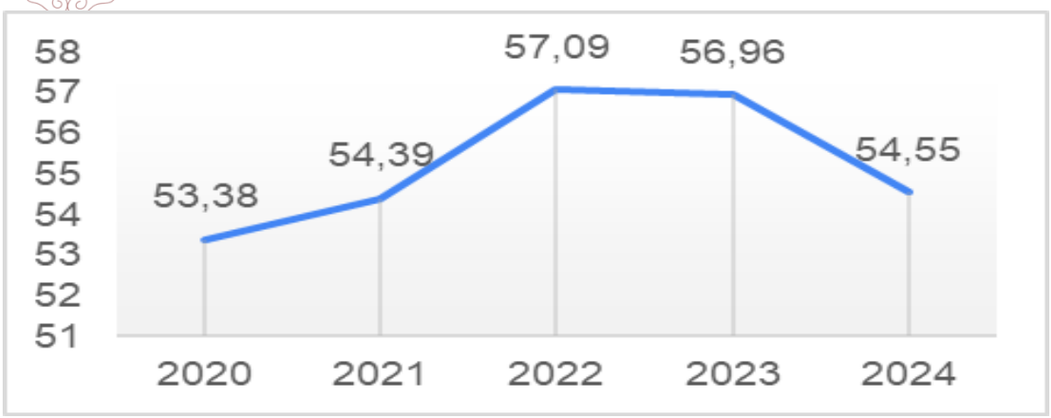
tahun 2024. Rendahnya IKL menunjukkan adanya degradasi lahan yang cukup serius, termasuk konversi lahan pertanian ke lahan terbangun, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan lemahnya perlindungan terhadap kawasan lindung. Situasi ini menuntut perhatian dan intervensi yang lebih strategis, mengingat kualitas lahan merupakan faktor krusial dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 2.9
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024

	2021	2022	2023	2024
IKA	41,43	48,52	53,2	45,93
IKU	81,12	81,03	76,13	76,86
IKL	27,2	27,56	27,96	28,09

Sumber: Open Data Cirebon, *Indeks Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator di Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD*

Berdasarkan hasil penghitungan terkini, nilai IKLH Kabupaten Cirebon berada pada angka 54,55, yang mengindikasikan kualitas lingkungan hidup berada pada kategori sedang (50 < IKLH < 70). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan yang cukup serius dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Indeks yang masih berada pada kategori sedang ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengelolaan lingkungan, namun dampaknya belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya nilai ini adalah pencemaran air dan udara yang masih tinggi, serta menurunnya kualitas tutupan lahan akibat alih fungsi lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam hal ini, rendahnya nilai IKA bisa disebabkan oleh tingginya kadar BOD dan coliform dalam badan air, yang mencerminkan pencemaran akibat limbah domestik yang belum terkelola dengan baik. Sementara itu, kualitas udara yang menurun di beberapa wilayah padat penduduk, serta degradasi tutupan lahan di kawasan perbukitan dan pesisir juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap skor IKLH tersebut.



Gambar 2.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon (2020-2024), *data yang dikelola dalam SIPD*

Salah satu tantangan utama yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di daerah ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon didominasi oleh limbah rumah tangga yang volumenya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri yang terletak di Kecamatan Palimanan saat ini sudah sangat terbatas untuk menampung sampah dari wilayah barat Cirebon, walaupun pelayanan sampah wilayah timur sudah dilayani oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memprakarsai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya selain penguatan opsi teknologi dalam pengelolaan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg. Fasilitas ini dirancang dengan pendekatan *waste to energy*, yakni mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai IKLH.

Selain tantangan lingkungan akibat sampah, Kabupaten Cirebon juga menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari kerentanan terhadap bencana alam. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem menjadi kejadian yang cukup sering melanda sejumlah wilayah, terutama pada musim hujan atau kemarau panjang. Selain itu, potensi bencana lainnya seperti banjir rob di wilayah pesisir dan abrasi pantai juga semakin mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah mitigasi yang lebih terencana dan menyeluruh, agar risiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Pendekatan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup terpadu serta pembangunan infrastruktur yang

adaptif terhadap perubahan iklim menjadi semakin mendesak untuk diimplementasikan demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

2.1.1.1.6 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)

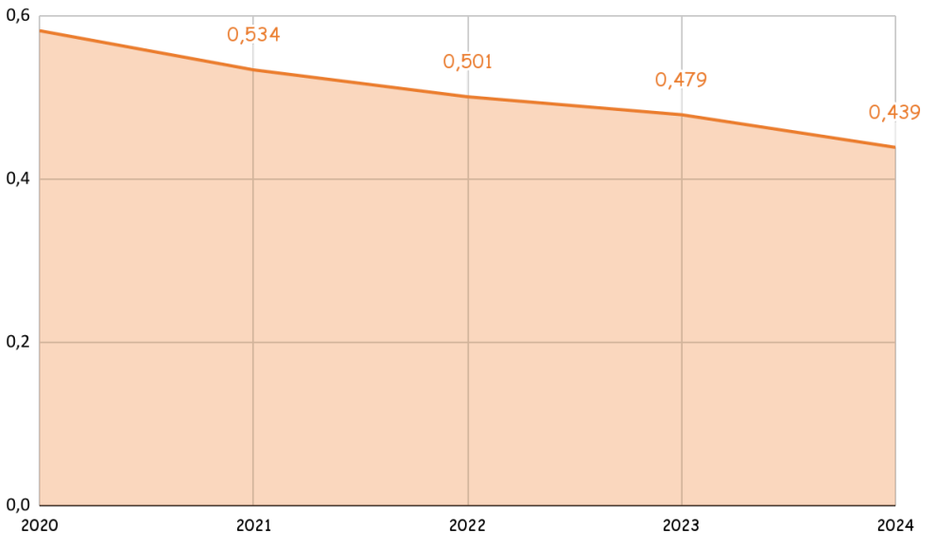
Perubahan iklim merupakan tantangan global yang kian nyata dampaknya di tingkat nasional dan daerah. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, limbah, dan kegiatan industri. GRK yang paling dominan meliputi karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O), yang seluruhnya berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK sesuai dengan target *Nationally Determined Contribution* (NDC), yakni pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK), yang secara teknis diperkuat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).

Di tingkat daerah, penurunan emisi GRK menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) dan memasukkan indikator lingkungan ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penurunan intensitas emisi GRK yakni jumlah emisi GRK yang dihasilkan per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pembangunan rendah karbon di suatu wilayah.

Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah strategis di Jawa Barat, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan energi. Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi GRK di daerah ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam kerangka kebijakan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2020, intensitas emisi tercatat sebesar 0,582 ton CO_2e/1 juta rupiah PDRB, kemudian menurun menjadi 0,534 ton CO_2e pada 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 0,501 ton CO_2e, lalu mencapai 0,479 ton CO_2e pada 2023, dan akhirnya turun ke level 0,439 ton CO_2e pada tahun 2024.



Gambar 2.16 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

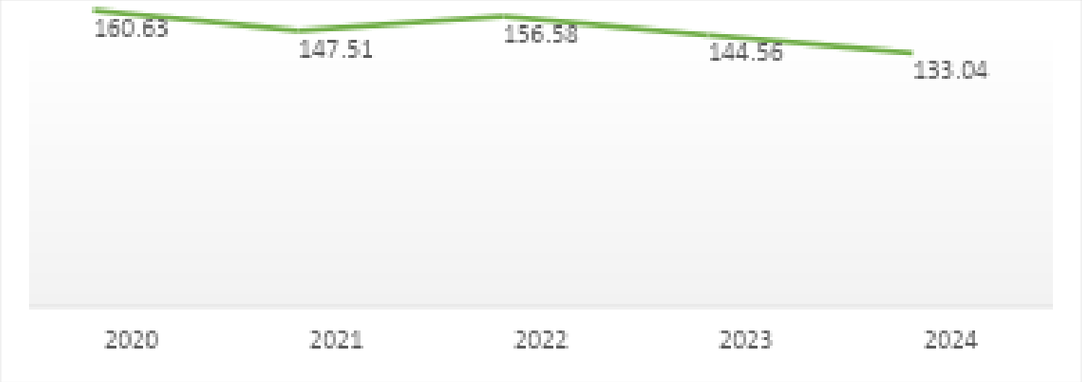
Sumber: Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLHK; diolah dalam SIPD

Tren penurunan intensitas emisi ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan emisi GRK secara proporsional. Dengan kata lain, Kabupaten Cirebon telah mengarah pada pembangunan yang lebih efisien secara karbon (*carbon-efficient development*). Fenomena ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cirebon mulai berhasil menekan emisi dari sektor-sektor utama penyumbang GRK, seperti energi, transportasi, limbah, dan pertanian. Penurunan intensitas juga menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta adopsi teknologi dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

Namun demikian, meskipun capaian ini positif, perlu diwaspadai bahwa keberhasilan penurunan emisi GRK bersifat dinamis dan memerlukan

konsistensi dalam implementasi kebijakan, pendanaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

2.1.1.1.7 Indeks Resiko Bencana



Gambar 2.17 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar 133,04 masuk dalam kategori sedang. Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Berdasarkan data tabel dibawah, tingkat kerawanan bencana yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon adalah golongan Rawan Bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 31.278,9 Ha dan tingkat kerawanan bencana paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah golongan sangat rawan bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 4.160,1 Ha.

Tabel 2.10
Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1.	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2.	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3.	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4.	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5.	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6.	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7.	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8.	Dukuhpuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9.	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10.	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11.	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
12.	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13.	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14.	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15.	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16.	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17.	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18.	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19.	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20.	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21.	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22.	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23.	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24.	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25.	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26.	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27.	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28.	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29.	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30.	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31.	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32.	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33.	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34.	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35.	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36.	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37.	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38.	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39.	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40.	Weru	0	237,7	0	0	237,70
	Kabupaten Cirebon	**7.731,26**	**31.278,90**	**4.160,19**	**25.032,98**	**68.203,33**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPBD (2018), data yang dikelola dalam SIPD

Adapun potensi bencana di Kabupaten Cirebon yang dapat dikelompokan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran) sebagai berikut.

a. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis bencana alam, berikut di bawah ini merupakan data jenis potensi rawan bencana alam berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.11
Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1.	Waled	V	-	V	-
2.	Pasaleman	-	V	-	-
3.	Ciledug	V	V	-	-
4.	Pabuaran	-	-	-	V
5.	Losari	V	V	-	V
6.	Pabedilan	V	V	-	-
7.	Babakan	-	V	-	-
8.	Gebang	V	V	-	-
9.	Karangsembung	V	-	-	V
10.	Karangwareng	-	-	-	-
11.	Lemahabang	V	V	-	-
12.	Susukan Lebak	V	-	-	-
13.	Sedong	V	-	V	-
14.	Astanajapura	V	V	-	V
15.	Pangenan	V	V	-	-
16.	Mundu	V	V	-	-
17.	Beber	V	-	V	-
18.	Greged	-	-	V	-
19.	Talun	-	-	-	-
20.	Sumber	V	-	V	-
21.	Dukupuntang	-	-	V	-
22.	Palimanan	V	-	-	V
23.	Plumbon	V	V	-	-
24.	Depok	V	-	-	-
25.	Weru	V	-	-	-
26.	Plered	V	V	-	-
27.	Tengah Tani	V	V	-	-
28.	Kedawung	V	-	-	-
29.	Gunungjati	-	V	-	-
30.	Kapetakan	V	V	-	-
31.	Suranenggala	V	V	-	-
32.	Klangenan	V	-	-	-
33.	Jamblang	-	-	-	V
34.	Arjawinangun	V	V	-	-
35.	Pangurangan	V	V	-	-
36.	Ciwaringin	V	-	-	-
37.	Gempol	-	-	-	-
38.	Susukan	V	V	-	-
39.	Gegesik	V	V	-	V
40.	Kaliwedi	V	V	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data di atas, jenis bencana alam yang sering melanda setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah kekeringan, hal tersebut dikarenakan dari 40 (empat puluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kecamatan di Kabupaten

Cirebon memiliki rawan bencana kekeringan. Sedangkan, jenis bencana alam yang paling sedikit melanda kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah jenis bencana alam longsor dan angin puting.

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

1) BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana;
2) BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

b. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No	Pos Sektor Jaga	Anggota	MOBIL PEMADAM			Tandon Air	Cakupan Wilayah	
			Mobil Pancar	Mobil Tangki Air	Mobil Komando			
1	DINAS	34			1			
2	SUMBER	20	1	1		1	4	1. KEC. SUMBER 2. KEC. TALUN 3. KEC. DEPOK 4. KEC. DUKUPUNTANG
3	WERU	19	2			1	5	1. KEC. WERU 2. KEC. PLERED 3. KEC. TENGAH TANI 4. KEC. PLUMBON 5. KEC. KEDAWUNG
4	ARJAWINANGUN	15	1			1	5	1. KEC. ARJAWINANGUN 2. KEC. PANGURAGAN 3. KEC. SUSUKAN 4. KEC.KALIWEDI 5. KEC. GEGESIK
5	PALIMANAN	16	1			1	5	1. KEC. PALIMANAN 2. KEC. JAMBLANG 3. KEC. KLANGENAN 4. KEC. CIWARINGIN 5. KEC. GEMPOL

No	Pos Sektor Jaga	Anggota	MOBIL PEMADAM			Tandon Air	Cakupan Wilayah	
			Mobil Pancar	Mobil Tangki Air	Mobil Komando			
6	GUNUNG JATI	18	1			1	3	1. KEC. GUNUNGJATI 2. KEC. SURANENGGALA 3. KEC. KAPETAKAN
7	LEMAHABANG	14	1			1	3	1. KEC. LEMAHABANG 2. KEC. KARANGSEMBUNG 3. KEC. SUSUKAN LEBAK
8	CILEDUG	13		1		1	3	1. KEC. CILEDUG 2. KEC. PASELEMAN 3. KEC. BABAKAN
9	CIKULAK	13	1			1	3	1. KEC. KARANGWARENG 2. KEC. PABUARAN 3. KEC. WALED
10	LOSARI	13	1			1	3	1. KEC. LOSARI 2. KEC. GEBANG 3. KEC. PABEDILAN
11	PANGENAN	17	1			1	3	1. KEC. PANGENAN 2. KEC. ASTANAJAPURA 3. KEC. MUNDU
12	GREGED	13	1			1	3	1. KEC. SEDONG 2. KEC. GREGED 3. KEC. BEBER
	Total	**205**	11	2	1	**11**	**40**	
			14					

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kab Cirebon (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.13
Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Tandon Air (liter)	Sumber Air	Cakupan Pelayanan
1.	Arjawinangun	6.000	Irigasi	Arjawinangun, Ciwaringin, Panguragan, Gegesik, Susukan dan Kaliwedi
2.	Palimanan	90.000	Sumur Bor	Palimanan, Gempol, Klangenan, Jamblang, Depok dan Dukupuntang
3.	Weru	9.000	Sumur Bor	Plumbon, Plered, Weru, Tengah Tani, Kedawung, Talun dan Sumber
4.	Gunung Jati	6.000	PDAM	Kapetakan, Suranenggala dan Gunung Jati
5.	Lemah Abang	6.000	Sumur Bor	Beber, Greeged, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Lemahabang, Sedong, Susukan Lebak dan Karangsambung
6.	Ciledug	8.000	Sumur Bor	Karangwareng, Waled, Pabuaran, Ciledug dan Pasaleman
7.	Losari	6.000	Sumur Bor	Losari, Pabedilan, Babakan dan Gebang

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

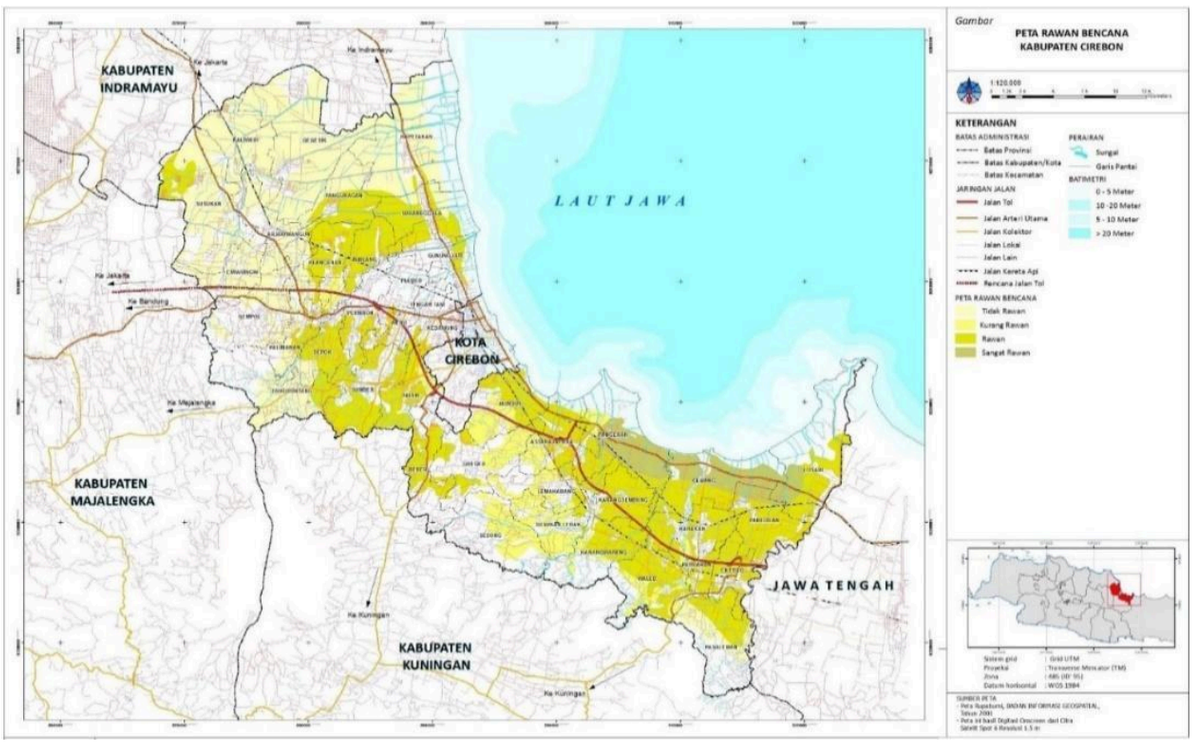
Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1.	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2.	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangenan, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3.	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

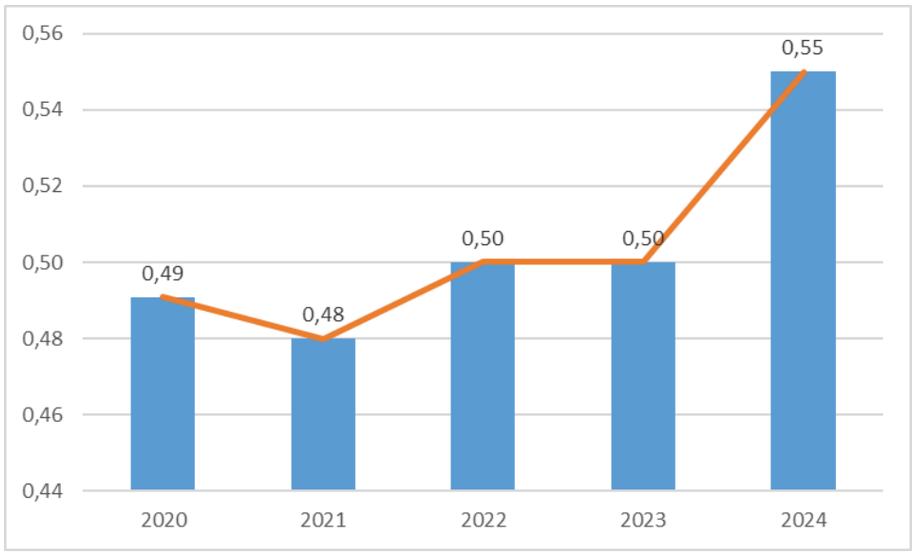
Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2.18 Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.8 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah menggambarkan kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung meningkat dengan nilai terakhir 0,55 yang termasuk dalam kategori "Sedang". Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan, sistem informasi, penanganan tematik, efektivitas pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta sistem pemulihan bencana.



Gambar 2.19 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

2.1.1.2 Kondisi Demografi Daerah

2.1.1.2.1 Jumlah Penduduk

Pembangunan berwawasan trend adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan

laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

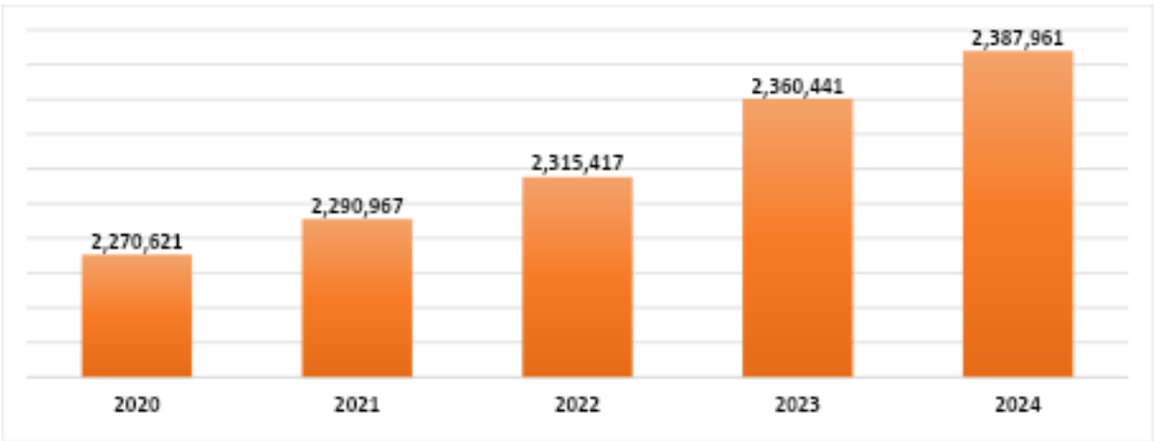
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Penduduk 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Waled	56.013	56.329	56.742	57.652	58.129	2,43
2	Pasaleman	26.528	26.675	26.867	27.295	27.518	1,15
3	Ciledug	45.601	45.931	46.341	47.159	47.625	1,99
4	Pabuaran	36.760	37.058	37.421	38.115	38.524	1,61
5	Losari	62.351	63.191	64.150	65.687	66.746	2,80
6	Pabedilan	58.198	58.873	59.655	60.972	61.840	2,59
7	Babakan	71.288	72.197	73.240	74.942	76.096	3,19
8	Gebang	67.861	68.921	70.116	71.948	73.264	3,07
9	Karangsembung	36.491	36.682	36.936	37.513	37.808	1,58
10	Karangwareng	28.547	28.737	28.976	29.470	29.744	1,25
11	Lemahabang	55.569	56.039	56.608	57.678	58.318	2,44
12	Susukan Lebak	41.147	41.557	42.040	42.898	43.438	1,82
13	Sedong	42.302	42.576	42.923	43.649	44.046	1,84
14	Astanajapura	79.884	80.269	80.791	82.021	82.631	3,46
15	Pangenan	46.870	47.246	47.704	48.585	49.102	2,06
16	Mundu	81.221	81.971	82.867	84.498	85.502	3,58
17	Beber	44.203	45.011	45.911	47.235	48.224	2,02
18	Greged	56.812	57.380	58.052	59.239	59.988	2,51
19	Talun	71.464	72.336	73.341	75.004	76.118	3,19
20	Sumber	96.725	98.371	100.212	102.973	104.997	4,40
21	Dukupuntang	64.980	65.423	65.979	67.116	67.750	2,84
22	Palimanan	61.933	62.560	63.299	64.602	65.426	2,74
23	Plumbon	82.323	83.211	84.250	86.040	87.195	3,65
24	Depok	66.246	67.185	68.252	69.936	71.112	2,98
25	Weru	69.942	70.498	71.178	72.486	73.253	3,07
26	Plered	55.102	55.487	55.968	56.942	57.490	2,41
27	Tengahtani	45.435	45.940	46.529	47.534	48.188	2,02
28	Kedawung	60.933	60.912	60.992	61.602	61.741	2,59
29	Gunungjati	82.442	82.864	83.429	84.724	85.380	3,58
30	Kapetakan	60.975	61.946	63.038	64.705	65.908	2,76
31	Suranenggala	46.081	46.546	47.095	48.063	48.675	2,04
32	Klangenan	52.948	53.119	53.380	54.106	54.423	2,28
33	Jamblang	38.236	38.526	38.882	39.582	39.986	1,67
34	Arjawinangun	70.730	71.522	72.444	74.014	75.038	3,14
35	Panguragan	43.208	43.248	43.362	43.851	44.007	1,84

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Penduduk 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
36	Ciwaringin	38.381	38.394	38.472	38.883	38.998	1,63
37	Gempol	46.230	46.511	46.872	47.645	48.060	2,01
38	Susukan	68.394	68.987	69.702	71.034	71.837	3,01
39	Gegesik	69.355	69.331	69.422	70.116	70.275	2,94
40	Kaliwedi	40.912	41.407	41.979	42.927	43.561	1,82
Kabupaten Cirebon		**2.270.621**	**2.290.967**	**2.315.417**	**2.360.441**	**2.387.961**	**100,00**

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.387.961 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.360.441 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 104.997 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini. Sementara, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 2.489.000 jiwa. Adanya perbedaan data jumlah penduduk Kabupaten Cirebon dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon karena dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menggunakan data dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).



Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.20 menampilkan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024, yang memperlihatkan tren peningkatan jumlah

penduduk dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menggambarkan dinamika demografi yang stabil, didorong oleh faktor kelahiran serta migrasi masuk. Peningkatan dari 2023 ke 2024 sebesar 27.520 jiwa menunjukkan pertumbuhan yang masih berlanjut meski tidak terlalu tajam.

2.1.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.387.961 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.360.441 jiwa. Apabila dibanding tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon naik yakni sebesar 1,35%.

Mencermati dinamika penduduk Kabupaten Cirebon yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi. Artinya, struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak, maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan pada upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi Kecukupan Pangan, Kesehatan, Pendidikan serta pengelolaan jumlah angka pengangguran. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada kesehatan dan pendidikan vokasi atau keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

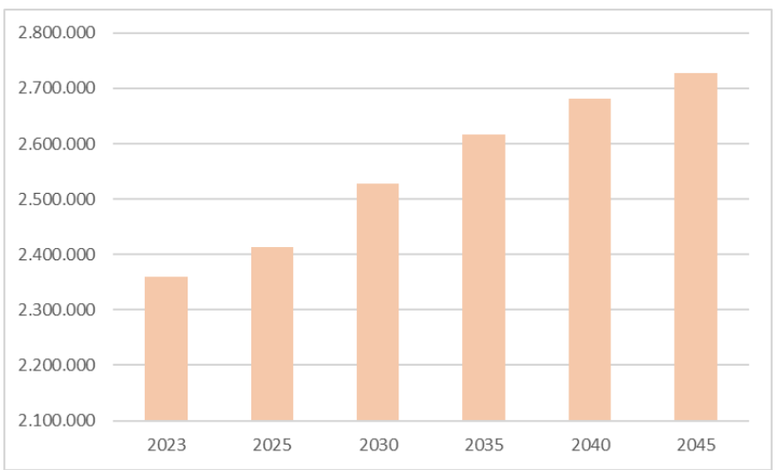
1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Kabupaten Cirebon agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif di berbagai aspek di level nasional maupun internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comfort, vitality and high quality life.*



Gambar 2.21 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Proyeksi demografi merupakan perkiraan yang menggambarkan perubahan struktur penduduk di masa yang akan datang. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi migrasi penduduk. Dari adanya pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang. Berikut disajikan proyeksi penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.



Gambar 2.22 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon di Tahun 2023 sebanyak 2.360.441 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon diperkirakan di Tahun 2025 sebanyak 2.413.810 jiwa yang meningkat hingga Tahun 2045 sebanyak 2.727.616 jiwa. Dimana dinamika akan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon

cenderung terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil proyeksi diproyeksikan.

2.1.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2023 adalah 2.360.441 jiwa, jumlah tersebut kemudian mengalami kenaikan sebesar 27.520 jiwa menjadi 2.387.961 jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 104.997 jiwa atau sekitar 4,40% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon akhir tahun 2024 adalah sebesar 2.218 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan terpadat terdapat ada di Kecamatan Weru sebesar 8.050 jiwa/km^2. Kabupaten Cirebon perlu mempersiapkannya dengan membuat kebijakan pengendalian penduduk dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung laju pertumbuhan penduduk sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk di wilayah Cirebon. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memprioritaskan pembangunan pusat pertumbuhan Sumber, pengembangan wisata lokal berdasarkan potensi wilayah, pengembangan industri di bagian Cirebon Timur. Berikut tabel kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
1	Waled	58.129	30,76	1.890
2	Pasaleman	27.518	41,28	667
3	Ciledug	47.625	14,62	3.258
4	Pabuaran	38.524	9,57	4.025
5	Losari	66.746	47,91	1.393
6	Pabedilan	61.840	25,80	2.397
7	Babakan	76.096	22,16	3.434
8	Gebang	73.264	35,30	2.075
9	Karangsembung	37.808	18,80	2.011
10	Karangwareng	29.744	27,16	1.095

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
11	Lemahabang	58.318	22,63	2.577
12	Susukan Lebak	43.438	18,03	2.409
13	Sedong	44.046	34,40	1.280
14	Astanajapura	82.631	29,15	2.835
15	Pangenan	49.102	36,81	1.334
16	Mundu	85.502	27,49	3.110
17	Beber	48.224	25,62	1.882
18	Greged	59.988	32,20	1.863
19	Talun	76.118	19,53	3.897
20	Sumber	104.997	29,50	3.559
21	Dukupuntang	67.750	37,39	1.812
22	Palimanan	65.426	19,10	3.425
23	Plumbon	87.195	19,01	4.587
24	Depok	71.112	16,36	4.347
25	Weru	73.253	9,10	8.050
26	Plered	57.490	13,22	4.349
27	Tengahtani	48.188	9,75	4.942
28	Kedawung	61.741	10,77	5.733
29	Gunungjati	85.380	22,61	3.776
30	Kapetakan	65.908	67,47	977
31	Suranenggala	48.675	25,92	1.878
32	Klangenan	54.423	20,40	2.668
33	Jamblang	39.986	16,57	2.413
34	Arjawinangun	75.038	24,26	3.093
35	Panguragan	44.007	21,97	2.003
36	Ciwaringin	38.998	19,01	2.051
37	Gempol	48.060	30,70	1.565
38	Susukan	71.837	51,96	1.383
39	Gegesik	70.275	63,74	1.103
40	Kaliwedi	43.561	28,73	1.516
		2.387.961	**1.076,76**	**2.218**

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2024

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Waled	29.494	28.635	58.129	103
2.	Pasaleman	14.243	13.828	27.518	99
3.	Ciledug	24.164	23.461	47.625	103
4.	Pabuaran	19.547	18.977	38.524	103
5.	Losari	34.203	33.207	66.746	101

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
6.	Pabedilan	31.848	30.920	61.840	100
7.	Babakan	39.585	38.432	76.096	98
8.	Gebang	37.731	36.632	73.264	100
9.	Karangsembung	19.374	18.810	37.808	101
10.	Karangwareng	15.018	14.580	29.744	104
11.	Lemahabang	29.445	28.587	58.318	104
12.	Susukan Lebak	21.719	21.086	43.438	106
13.	Sedong	22.239	21.591	44.046	104
14.	Astanajapura	41.316	40.112	82.631	106
15.	Pangenan	25.037	24.308	49.102	102
16.	Mundu	42.960	41.708	85.502	105
17.	Beber	23.653	22.964	48.224	110
18.	Greged	29.849	28.980	59.988	107
19.	Talun	38.432	37.313	76.118	104
20.	Sumber	53.013	51.469	104.997	104
21.	Dukupuntang	34.546	33.540	67.750	102
22.	Palimanan	33.527	32.550	65.426	101
23.	Plumbon	44.025	42.743	87.195	104
24.	Depok	35.905	34.859	71.112	104
25.	Weru	36.274	35.218	73.253	108
26.	Plered	28.885	28.044	57.490	105
27.	Tengahtani	24.212	23.506	48.188	105
28.	Kedawung	31.482	30.565	61.741	102
29.	Gunungjati	43.971	42.690	85.380	100
30.	Kapetakan	33.943	32.954	65.908	100
31.	Suranenggala	25.194	24.460	48.675	99
32.	Klangenan	27.750	26.942	54.423	102
33.	Jamblang	20.389	19.795	39.986	102
34.	Arjawinangun	38.645	37.519	75.038	100
35.	Panguragan	22.551	21.894	44.007	101
36.	Ciwaringin	20.084	19.499	38.998	100
37.	Gempol	24.385	23.675	48.060	103
38.	Susukan	37.370	36.281	71.837	98
39.	Gegesik	35.833	34.790	70.275	102
40.	Kaliwedi	22.661	22.001	43.561	98
	Kab. Cirebon	**1.211.626**	**1.176.335**	**2.387.961**	**103**

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), bahwa hampir semua kecamatan, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon

tahun 2024 adalah 103. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rasio jenis kelamin di tiap kecamatan rata rata diatas 100.

2.1.1.2.5 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu sekitar 0,76% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 0,24%. Namun, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak justru berada pada kategori umur 5–9 tahun, yang berarti akan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui perencanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir tahun 2024.

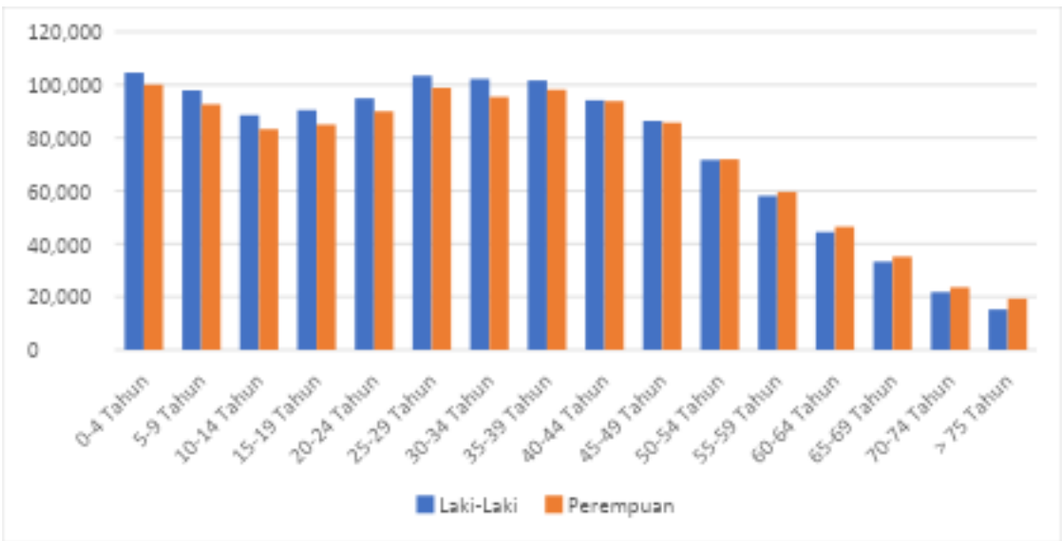
Tabel 2.18
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah			Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
0-4 Tahun	104.598	100.118	204.716	0,09
5-9 Tahun	97.932	92.695	190.267	0,08
10-14 Tahun	88.490	83.268	171.758	0,07
15-19 Tahun	90.360	84.991	175.351	0,07
20-24 Tahun	94.915	89.909	184.842	0,08
25-29 Tahun	103.496	98.976	202.472	0,08
30-34 Tahun	102.193	95.447	197.640	0,08
35-39 Tahun	101.662	98.083	199.745	0,08
40-44 Tahun	94.168	93.921	188.089	0,08
45-49	86.422	85.733	172.155	0,07

Kelompok Umur	Jumlah			Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Tahun				
50-54 Tahun	71.686	71.914	143.600	0,06
55-59 Tahun	58.109	59.612	117.721	0,05
60-64 Tahun	44.442	46.463	90.905	0,04
65-69 Tahun	33.259	35.155	68.414	0,03
70-74 Tahun	21.782	23.582	45.364	0,02
> 75 Tahun	15.244	19.336	34.580	0,01
JUMLAH	**1.208.758**	**1.179.203**	**2.387.961**	**100**

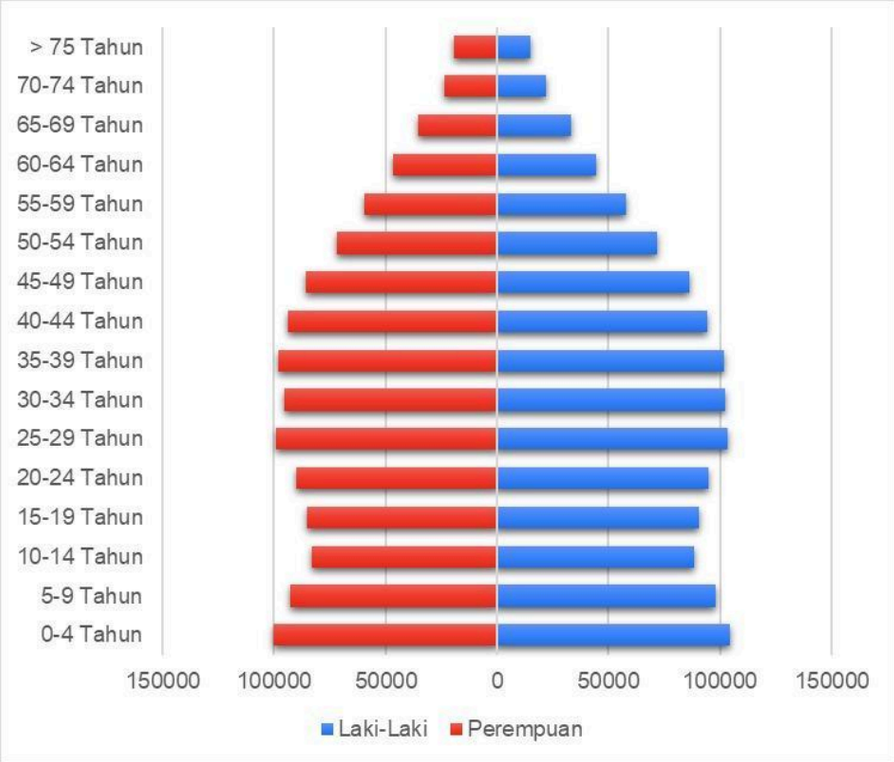
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024.



Gambar 2.23 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2.24 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa)
Sumber : BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.23 dan Gambar 2.24 menampilkan Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) di Kabupaten Cirebon, yang disajikan dalam bentuk batang ganda (laki-laki dan perempuan). Berikut beberapa poin penting dari grafik tersebut:

1. Distribusi Penduduk Merata di Usia Produktif
   Kelompok umur 20-34 tahun menunjukkan jumlah penduduk yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan, menandakan dominasi usia produktif. Ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah.
2. Proporsi Laki-Laki dan Perempuan Relatif Seimbang
   Hampir di semua kelompok umur, selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, menandakan struktur gender yang cukup seimbang.
3. Penurunan Bertahap di Usia Lanjut
   Jumlah penduduk menurun secara konsisten mulai dari usia 50 tahun ke atas, terutama signifikan pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan pola umum piramida penduduk yang mengarah ke bentuk stasioner atau mulai menua.
4. Kelompok Usia Dini Masih Cukup Tinggi
   Kelompok usia 0-4 dan 5-9 tahun juga cukup besar, menunjukkan potensi

kebutuhan jangka panjang untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak.

Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran struktur demografi yang cukup sehat, dengan basis usia muda yang kuat dan proporsi usia produktif yang besar, sangat strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD 2025-2029.

2.1.1.2.6 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Kabupaten Cirebon didapat berdasarkan penduduk usia kerja, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Cirebon. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur di atas 15 tahun ke atas. Berikut Tabel 2.16 yang menunjukkan data jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon dalam angka 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa sebanyak 691.692 orang, disusul sektor industri pengolahan 355.721 orang, dan sektor pertanian 129.370 orang. Secara keseluruhan, terdapat 1.176.783 pekerja yang terdiri dari 733.518 laki-laki dan 443.265 perempuan. Dominasi sektor jasa mencerminkan pergeseran struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke tersier, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis pelayanan dan perdagangan. Ketimpangan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	99.253	30.117	129.370
2	Industri Pengolahan	252.059	103.662	355.721
3	Jasa	382.206	309.486	691.692
	Jumlah	**733.518**	**443.265**	**1.176.783**

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

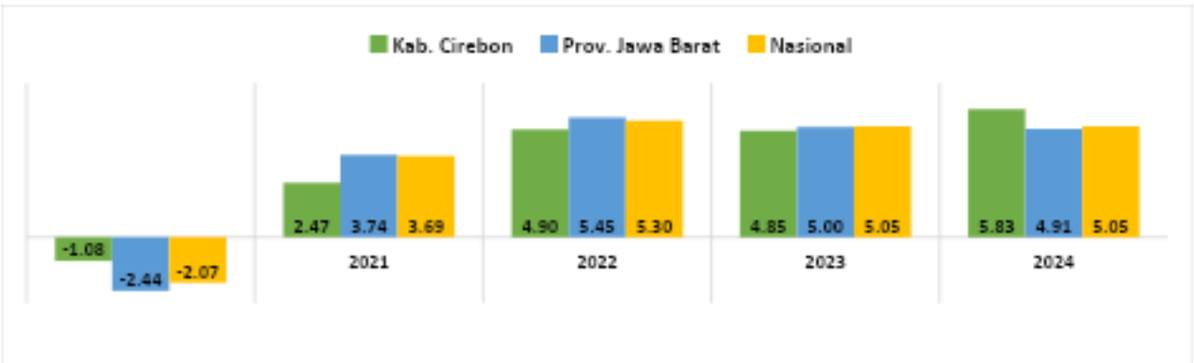
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

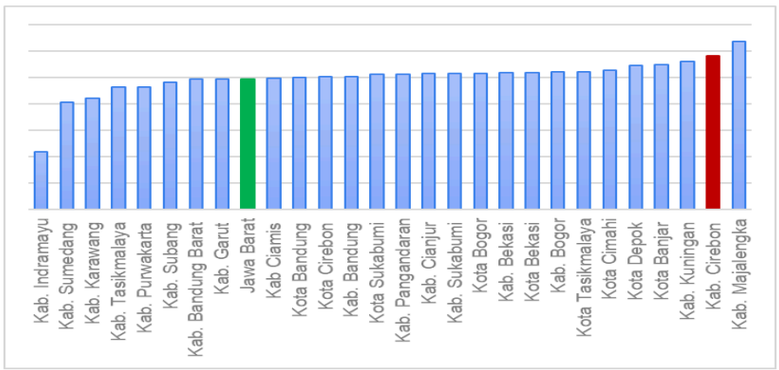
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, hingga mencapai angka minus akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Namun, mulai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren positif dengan pemulihan yang bertahap seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai stimulus ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2020-2024 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tahun 2024, merupakan tahun yang menggembirakan karena baru pada tahun 2024, LPE Kabupaten Cirebon bisa melampaui pertumbuhan ekonomi baik Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja industri, khususnya yang padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi guna mendukung daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2.25 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025, BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; Statistik Indonesia 2025, BPS, data yang dikelola dalam SIPD

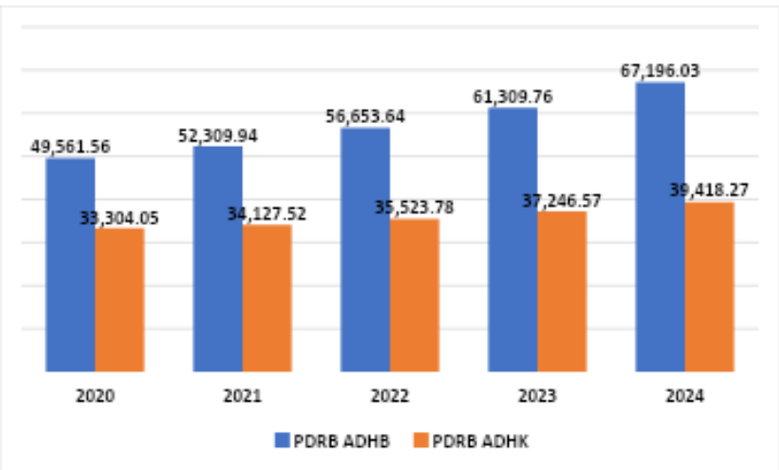


Gambar 2.26 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)

Sumber: BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 19 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan LPE sebesar 5,83 persen setelah Kabupaten Majalengka dengan pertumbuhan sebesar 6,38 persen sedangkan Kabupaten Indramayu adalah Kabupaten dengan pertumbuhan terendah dimana LPEnya hanya sebesar 2,18 persen.

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 39.418,27 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,14 persen.



Gambar 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

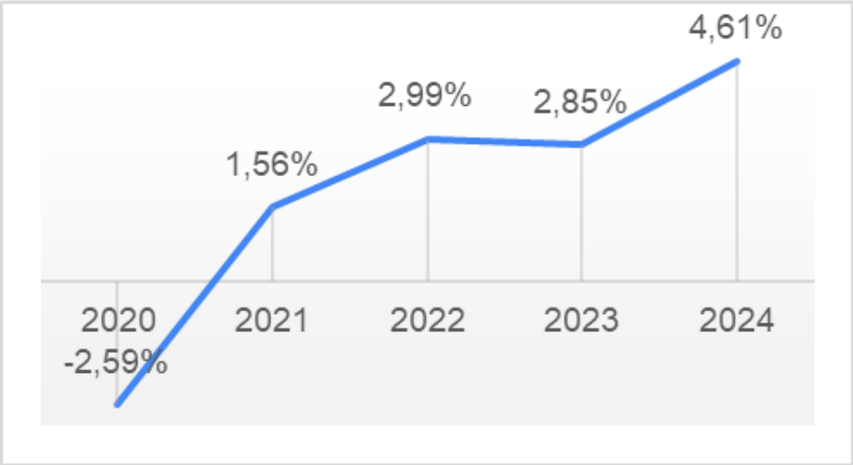
PDRB per kapita:	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (ribu)	Rp	20.130,04	22.833,82	24.468,01	25.148,61	28.193,50
ADHK (ribu)	Rp	12.853,14	14.896,79	15.342,28	15.278,14	16.507,08

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami kenaikan setiap tahun selama 2020–2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan nominal pendapatan masyarakat, meskipun belum tentu mencerminkan daya beli yang meningkat (karena belum memperhitungkan inflasi). Kenaikan paling signifikan terjadi antara 2023 ke 2024 (naik sekitar Rp 3,045 juta atau hampir 12,1%), yang bisa mencerminkan akselerasi ekonomi pada tahun terakhir, mungkin akibat pemulihan pasca pandemi, peningkatan investasi, atau pengaruh inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami pertumbuhan, meskipun sempat stagnan pada 2023. Penurunan tipis dari 2022 ke 2023 (dari 15.342,28 ke 15.278,14 ribu) dapat mengindikasikan: Perlambatan ekonomi riil; Gangguan pada sektor produktif utama; Tekanan inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Namun, pemulihan cukup kuat pada 2024, dengan lonjakan ke 16.507,08 ribu atau tumbuh sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang substansial secara riil, bukan hanya nominal.

Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhannya mencapai -2,59 persen dan terus mengalami percepatan hingga 4,61 persen pada 2024, walaupun sempat mengalami perlambatan laju PDRB pada 2023. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yakni -2,59 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.28 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD

B. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1. Kemiskinan

Angka kemiskinan di suatu wilayah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan, di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin merujuk pada individu yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan sebagai jumlah rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum yang layak. Standar ini didasarkan pada 20% kelompok penduduk tidak miskin terbawah yang disebut sebagai **kelompok acuan**.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah pengeluaran kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 adalah sekitar 12,30 persen (atau setara dengan 271.020 jiwa) dan 2022 sebesar 12,01 persen (atau setara dengan 266.100 jiwa). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang hanya mencapai 8,40 persen di tahun 2021 dan 8,06 persen di tahun 2022, dan Nasional yang juga hanya mencapai 10,14 persen di tahun 2021 dan 9,50

persen di tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 11,00 persen atau setara dengan 245,90 ribu jiwa menurun 3,26 ribu jiwa dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 249,18 ribu jiwa (11,20 persen). Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga tekanan ekonomi bagi kelompok rentan semakin besar. Kondisi ini disebabkan oleh Kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor penurunan angka kemiskinan. Selain itu, inflasi yang cukup terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi dengan tren yang konsisten meningkat menjadi indikator turunnya kemiskinan.

Tabel 2.21
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

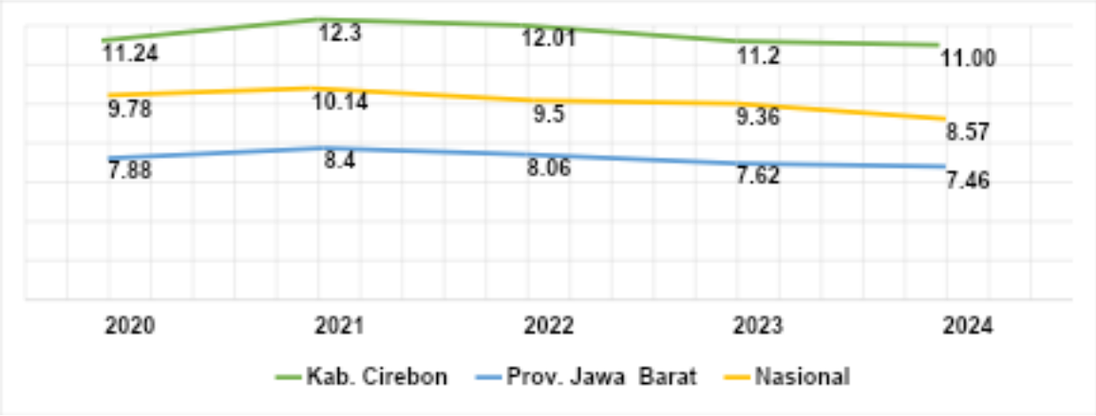
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Presentase
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023	451.853	249,18	11,20
2024	475.046	245,90	11.00

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 271,02 ribu jiwa atau 12,30 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen. Pandemi COVID-19 menjadi alasan logis atas tingginya angka kemiskinan dimana semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan omset dan keuntungan pada pekerjaan non formal memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah.

Garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun demikian, jumlah total dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, namun tren positif mulai terlihat dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat meskipun biaya hidup yang diperlukan untuk memenuhi standar garis kemiskinan terus meningkat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.29 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak kondisi ekonomi saat itu terhadap kelompok masyarakat rentan. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya peluang kerja, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 hingga tahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Hal ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Penurunan ini juga mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, serta dukungan sosial yang lebih baik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Namun, di tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 angkanya turun menjadi 1,98 dan kembali menurun menjadi 1,69 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan

adanya perbaikan ekonomi, peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta membaiknya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Semakin kecilnya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023	1,98	0,53
2024	1,69	0,36

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data tabel 2.21, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang mencerminkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin pada periode tersebut. Namun, mulai tahun 2023, indeks ini menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 nilainya turun menjadi 0,53 dan kembali menurun menjadi 0,36 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2.	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3.	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,53	10,22	10,14
4.	Kabupaten. Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
5.	Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6.	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7.	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8.	Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9.	Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00
10.	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11.	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10
12.	Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13.	Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14.	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15.	Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16.	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18.	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19.	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20.	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
21.	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22.	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23.	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24.	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25.	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26.	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
27.	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
	Provinsi Jawa Barat	**7,88**	**8,40**	**8,06**	**7,62**	**7,64**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 11,00%, hanya

mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit perbaikan, Kabupaten Cirebon justru mengalami penurunan peringkat dalam tingkat kesejahteraan, naik ke posisi keempat sebagai kabupaten termiskin dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, lebih buruk dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat kelima. Kondisi ini menjadi permasalahan yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta filantropi, untuk bersama-sama menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

2. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dianalisis melalui Indeks Gini. Berdasarkan data pada gambar di bawah, terlihat bahwa tren Indeks Gini di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022 yang menunjukkan penurunan sementara. Peningkatan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk semakin melebar, sehingga diperlukan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 0,379 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon lebih baik dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat namun masih diatas indeks gini Nasional, sebagaimana pada grafik sebagai berikut:

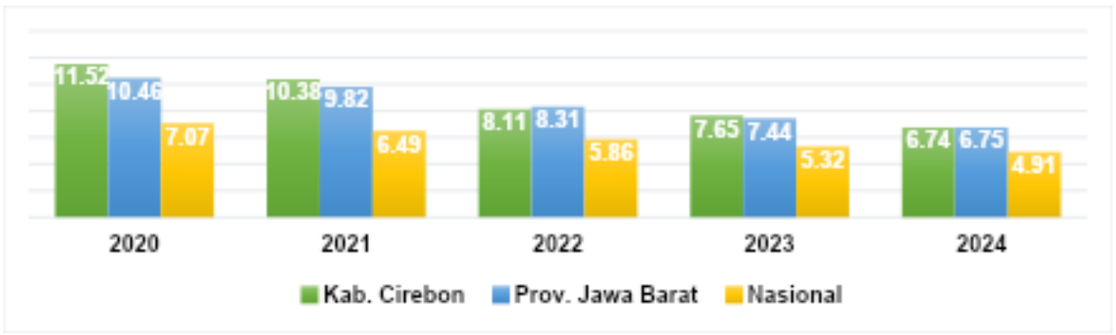


Gambar 2.30 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025; Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon mengalami tren penurunan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, sejalan dengan tren yang terjadi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Cirebon mencapai 11,52 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Namun, sejak tahun 2021, TPT mulai menunjukkan penurunan bertahap, yaitu sebesar 10,38 persen pada 2021, 8,11 persen pada 2022, dan 7,65 persen pada 2023. Tren penurunan ini

mencerminkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut serta upaya penciptaan lapangan kerja yang semakin membaik.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di tahun 2022 dan 2024 berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat dan diatas TPT Nasional, dimana pada tahun 2022 dan 2024 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen dan 6,75 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,86 persen dan 4,91 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 8,11 persen dan 6,74 persen.

Tabel 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2.	Kabupaten Sukabumi	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
3.	Kabupaten Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4.	Kabupaten Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5.	Kabupaten Garut	8,95	8,68	7,60	7,33	6,96
6.	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
8.	Kabupaten Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9.	Kabupaten Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10.	Kabupaten Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11.	Kabupaten Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12.	Kabupaten Indramayu	9,21	8,30	6,49	6,46	6,25
13.	Kabupaten Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14.	Kabupaten Purwakarta	11,07	10,70	8,75	7,72	7,34
15.	Kabupaten Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16.	Kabupaten Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
17.	Kabupaten Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11	6,70
18.	Kabupaten Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19.	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20.	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21.	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,40
22.	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23.	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82
24.	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25.	Kota Cimahi	13,30	13,07	10,77	10,52	8,97
26.	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27.	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
	Provinsi Jawa Barat	**10,46**	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

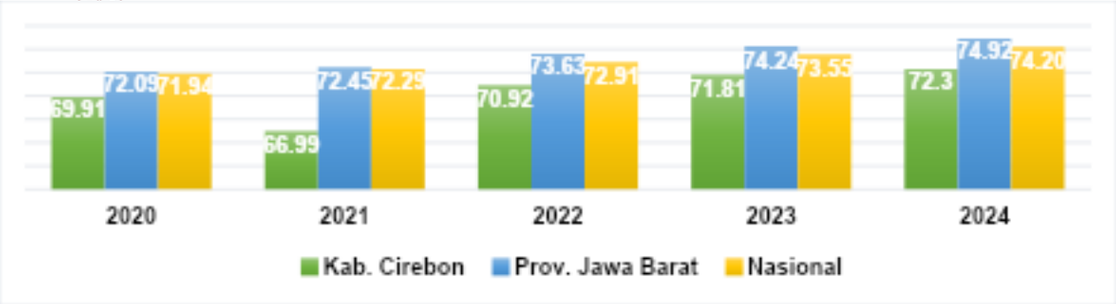
Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2024 menunjukkan angka yang bervariasi antara 1,58 persen sampai dengan 8,97 persen. Selama periode 2020-2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon menunjukkan tren penurunan signifikan dari 11,52% pada 2020 menjadi 6,74% pada 2024, atau turun 4,78 persen. Penurunan ini lebih cepat dibanding rata-rata provinsi yang turun 3,71 persen pada periode yang sama. Capaian TPT tahun 2024 juga berada sedikit di bawah rata-rata Jawa Barat (6,75%), menandakan perbaikan kinerja pasar kerja di daerah. Tren positif ini mengindikasikan membaiknya serapan tenaga kerja dan efektivitas program pengurangan pengangguran, meskipun upaya pemerataan kesempatan kerja di sektor-sektor produktif masih perlu diperkuat.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.32 Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: BPS, Cirebon dalam angka Tahun 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Indonesia dalam Angka 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mencapai 69,91 pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 72,30 pada tahun 2024. Namun, meskipun mengalami tren positif, angka IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 74,20 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92. Kenaikan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi dan nasional, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan yang lebih merata, serta penguatan ekonomi masyarakat agar pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon semakin optimal.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mana capaian kedua indikator tersebut perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, Pembentukan SATGAS untuk sinkronisasi keakuratan data pendidikan secara sistematis, Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif, Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Cirebon, Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan

Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana, Melakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Cirebon dengan pihak swasta (perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Cirebon. Selain itu, perlu melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat, peningkatan dan optimalisasi program beasiswa serta optimalisasi manajemen sekolah untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah.

Kualitas kesehatan ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan daya beli masyarakat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan tersebut erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu diarahkan pada pengembangan wilayah yang selaras dengan potensi lokal masing-masing kecamatan. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga industri kreatif yang memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Pemanfaatan potensi ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sumber pendapatan.

Dari data lima tahun terakhir, peringkat IPM Kabupaten Cirebon, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024, tidak banyak berubah, yakni tetap berada pada peringkat ke-18 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan angka IPM secara absolut, laju peningkatannya masih relatif sejalan atau bahkan sedikit di bawah rata-rata daerah lain, sehingga belum mampu menggeser posisi peringkat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat secara lebih merata, agar capaian IPM tidak hanya meningkat secara nilai, tetapi juga dalam peringkat, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	IPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
NASIONAL		**71,94**	**72,29**	**72,91**	**73,55**	**74,20**
JAWA BARAT		**72,09**	**72,45**	**73,63**	**74,24**	**74,92**
1.	Kabupaten Bogor	70,40	70,60	72,45	73,02	73,36
2.	Kabupaten Sukabumi	66,88	67,07	68,87	69,71	70,18
3.	Kabupaten Cianjur	65,36	65,56	67,55	68,18	68,89
4.	Kabupaten Bandung	72,39	72,73	73,46	74,03	74,59
5.	Kabupaten Garut	66,12	66,45	68,51	69,22	69,91
6.	Kabupaten Tasikmalaya	65,67	65,90	68,45	69,38	69,98
7.	Kabupaten Ciamis	70,49	70,93	72,52	73,12	73,64
8.	Kabupaten Kuningan	69,38	69,71	70,44	70,99	71,56
9.	Kabupaten Cirebon	69,91	69,99	70,92	71,81	72,30
10.	Kabupaten Majalengka	67,59	67,81	70,18	70,76	71,37
11.	Kabupaten Sumedang	71,64	71,80	73,53	74,02	74,57
12.	Kabupaten Indramayu	67,29	67,64	69,52	70,19	70,72
13.	Kabupaten Subang	68,95	69,13	70,54	71,42	72,05
14.	Kabupaten Purwakarta	70,82	70,98	72,89	73,43	73,99
15.	Kabupaten Karawang	70,66	70,94	72,64	73,25	73,82
16.	Kabupaten Bekasi	74,07	74,45	75,60	76,13	76,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	68,08	68,29	69,82	70,33	70,77
18.	Kabupaten Pangandaran	68,06	68,28	70,21	70,57	71,03
19.	Kota Bogor	76,11	76,59	77,68	78,36	79,03
20.	Kota Sukabumi	74,21	74,60	76,24	77,16	77,69
21.	Kota Bandung	81,51	81,96	82,75	83,29	83,75
22.	Kota Cirebon	74,89	75,25	76,89	77,45	78,09
23.	Kota Bekasi	81,50	81,95	82,52	83,06	83,55
24.	Kota Depok	80,97	81,37	82,02	82,53	83,05
25.	Kota Cimahi	77,83	78,06	79,01	79,69	80,30
26.	Kota Tasikmalaya	73,04	73,31	74,84	75,47	76,03
27.	Kota Banjar	71,70	71,92	73,93	74,45	75,01

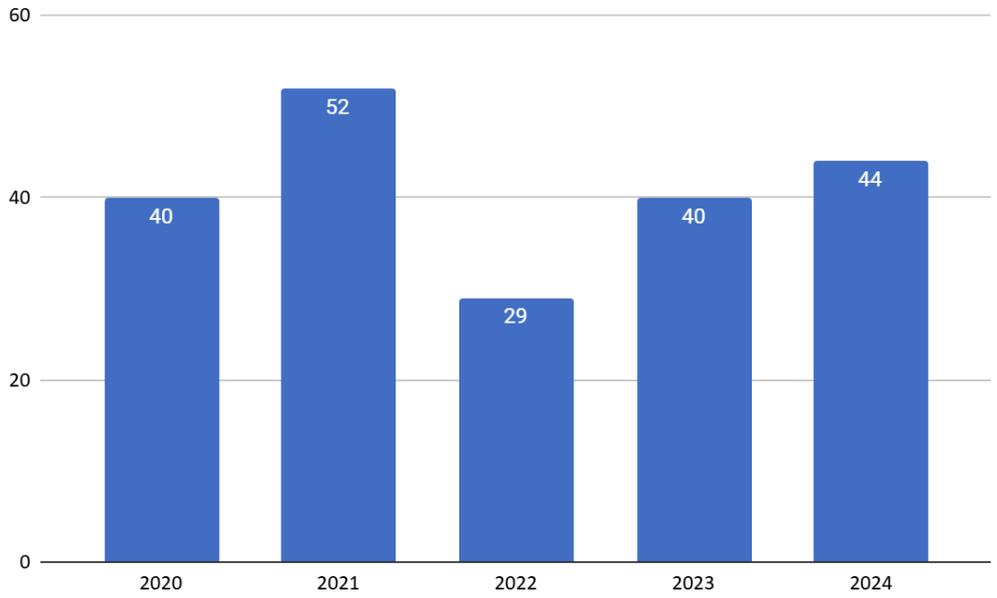
Sumber: BPS, Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas diantara 100.000 kelahiran hidup dalam suatu

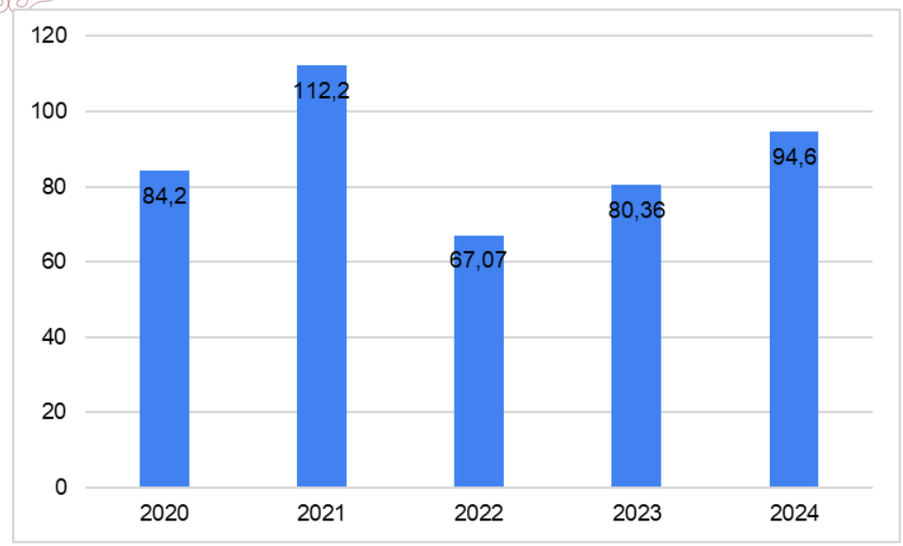
wilayah pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan pelaporan Puskesmas jumlah kematian ibu/maternal (ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas) yang terlaporkan dapat dilihat pada gambar grafik 2.32 berikut:



Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu per Tahun di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024

Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 44 ibu dari dengan penyebab : Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas 17 kasus, perdarahan obstetrik 11 kasus, komplikasi non obstetri 11, infeksi terkait kehamilan 2 kasus, komplikasi obstetrik lain 3 kasus. Sejak tahun 2023, pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan bayi di Indonesia telah menggunakan aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) yaitu Aplikasi kematian ibu dan bayi yang diinput oleh fasilitas kesehatan seluruh Indonesia baik pemerintah maupun swasta, sehingga setiap kasus kematian dapat terlaporkan secara *real-time* dan terverifikasi sesuai wilayah kejadian. Sedangkan untuk capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup dapat dilihat pada gambar berikut.

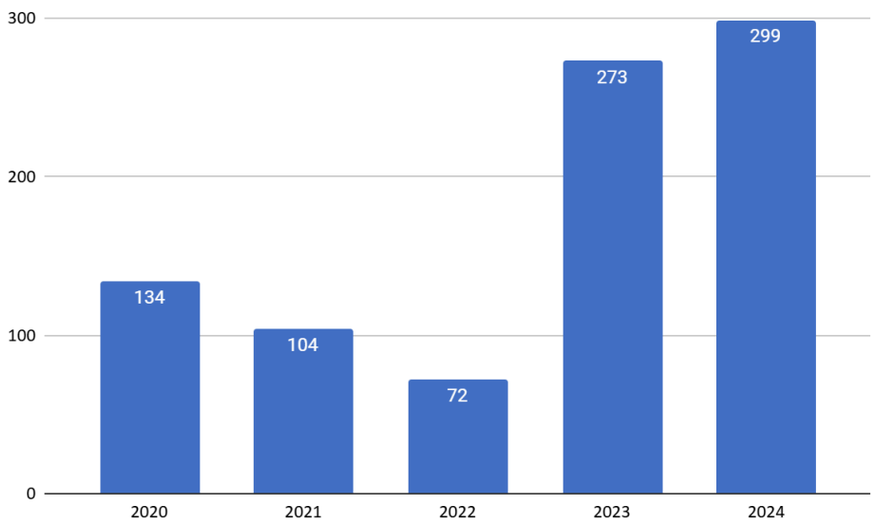


Gambar 2.34 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020-2024 cenderung meningkat, dari 84,2/100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 94,6 pada tahun 2024, beberapa penyebabnya adalah kualitas pelayanan ANC, pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas dengan resiko tinggi kurang optimal, tingginya ibu hamil risti, masih kurangnya keterampilan tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus *emergency*/ kegawatdaruratan maternal, ketersediaan sarana dan prasarana (ketersediaan ICU) masih sangat terbatas dan adanya perubahan sistem pelaporan pencatatan kematian yang berbasis NIK.

B. Angka Kematian Bayi (AKB)



Gambar 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025

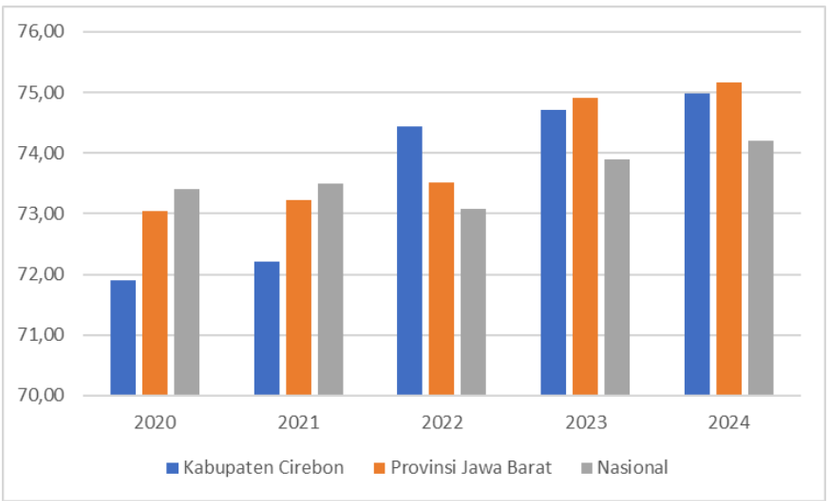
Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.35 diatas. Pada tahun 2024, jumlah kematian bayi mengalami peningkatan. Selain karena secara jumlah bertambah, jumlah lahir hidup sebagai pembaginya jumlahnya turun/berkurang sehingga peningkatan angka kematiannya cukup besar. Data kematian bayi diperoleh dari Aplikasi online MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*), yang diinput oleh seluruh fasilitas kesehatan. Tahun 2024 jumlah kematian bayi yang terlaporkan dalam aplikasi MPDN di wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 299 kasus terdiri dari, 272 kematian Neonatal (usia 0-28 hari) dan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari – 11 bulan) sebanyak 27 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi 7,85 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2023 jumlah kematian bayi yang terlaporkan mencapai 273 kasus terdiri dari 252 kematian Neonatal (usia 0-28 hari) dan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari – 11 bulan) sebanyak 21 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi 6,45 per 1000 kelahiran hidup. Sehingga di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah dan angka kematian bayi. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah *Respiratory and cardiovascular disorders* sebanyak 127 bayi, disusul *Low birth weight and prematurity* (BBLR) sebanyak 64 bayi, *Complications of intrapartum events* 36 bayi, Kelainan kongenital 21 bayi, Infeksi 10 bayi, kondisi neonatal lainnya 7 bayi, *Disorders related to length of gestation and fetal growth* sebanyak 3 bayi, *Miscellaneous* sebanyak 3 bayi (1,1%), dan *Neonatal death of unspecified* cause sebanyak 1 bayi. Sedangkan penyebab kematian *Post Neonatal* sebanyak 27 bayi adalah Penyakit sistem respirasi sebanyak 17 bayi, Penyakit infeksi dan parasit sebanyak 3 bayi, Penyakit sistem saluran cerna sebanyak 2 bayi, Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal sebanyak 2 bayi, Penyakit sistem saraf pusat sebanyak 1 bayi dan tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium abnormal lainnya sebanyak 1 bayi.

C. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu

masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Berdasarkan gambar dibawah, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Cirebon mencapai 75,48 tahun, yang berarti setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga usia 75-76 tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta memperkuat sistem kesehatan daerah guna memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.



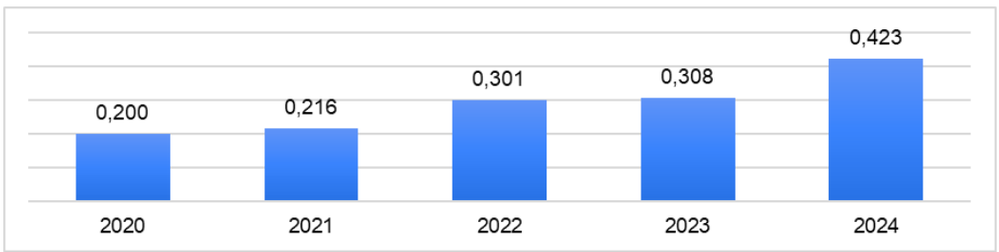
Gambar 2.36 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023 dan 2025; Provinsi Jabar dalam angka Tahun 2023 dan Tahun 2025; Statistik Indonesia 2025

D. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga

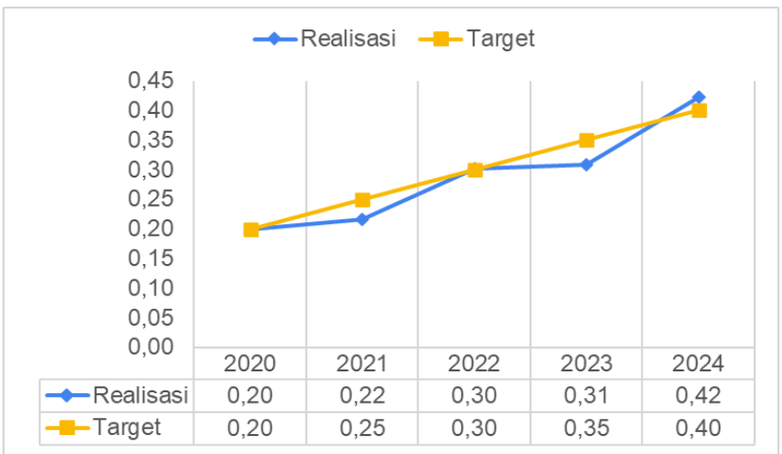
sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.



Gambar 2.37 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.37 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 0,301, kemudian naik tipis menjadi 0,308 pada 2023. Pada tahun 2024, IKS mencapai angka tertinggi yaitu 0,42. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga selama lima tahun terakhir.



	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	0,20	0,22	0,30	0,31	0,42
Target	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40

Gambar 2.38 Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

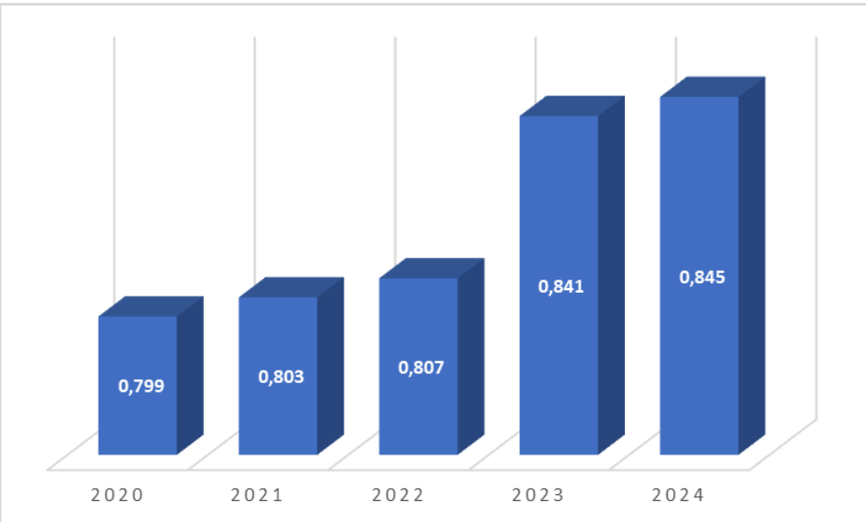
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020, realisasi IKS tercatat sebesar 0,20, sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2021 realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan target (0,22 dibandingkan 0,25), capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi IKS berhasil mencapai target sebesar 0,30. Sementara pada tahun 2023, realisasi sedikit berada di bawah target (0,31 dibandingkan 0,35). Pencapaian yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi IKS mencapai angka 0,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,40. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga di Indonesia, dengan kinerja realisasi yang secara umum mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

E. INDEKS KESEHATAN

Indeks kesehatan adalah alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan suatu populasi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Indeks ini bisa berupa nilai tunggal yang menunjukkan kondisi kesehatan secara umum atau terdiri dari beberapa indikator yang lebih spesifik. Indeks kesehatan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesehatan antar wilayah atau kelompok dalam suatu populasi. Dengan demikian, indeks kesehatan merupakan alat yang penting untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar 2.39 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

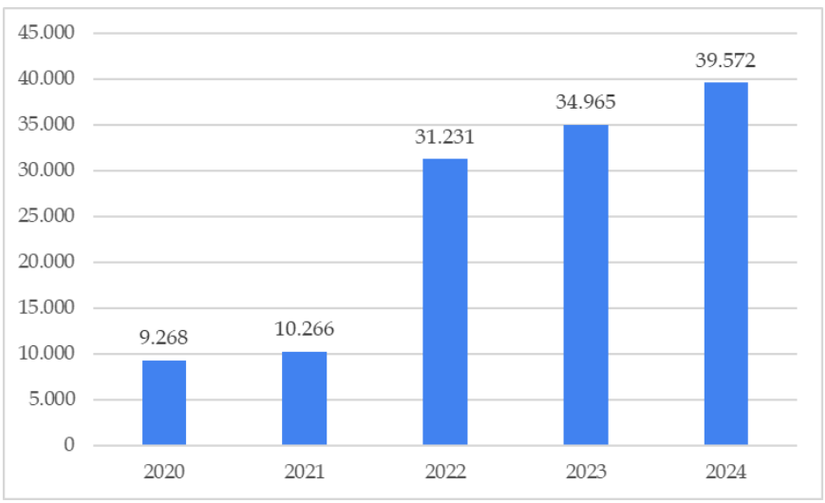
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024), data dikelola Bappelitbangda Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.39 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 0,807, kemudian naik menjadi 0,841 pada 2023. Pada tahun 2024, Indeks Kesehatan mencapai angka tertinggi yaitu 0,845. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kesehatan selama lima tahun terakhir.

F. PENYAKIT MENULAR

a. Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Dalam Juknis Profil Revisi Definisi Operasional/Pengertian orang terduga Tuberculosis (TBC) adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk >2 minggu disertai dengan panas badan. Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberkulosis (register TBC 06).



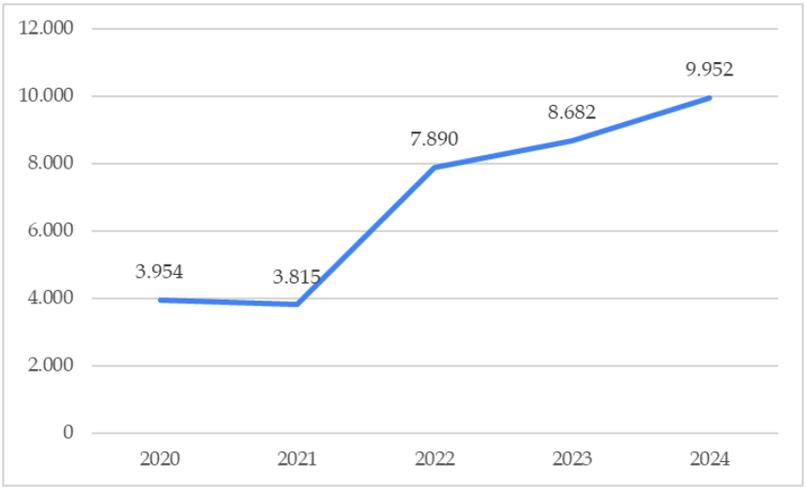
Gambar 2.40 Jumlah Orang Terduga TBC di Kabupaten Cirebon
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2024 mencapai 39.572 orang (78,70 %) dari sasaran terduga yang ada sebanyak 50.281 orang. Tahun 2023 terduga TBC yang mendapat pelayanan sebanyak 34.965 orang (99,89 %) dari sasaran yang ada sebanyak 35.003 orang. Penurunan persentase yang mendapat pelayananan sesuai standar disebabkan peningkatan estimasi jumlah sasaran terduga. Sedangkan secara absolut jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

b. Jumlah Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (*Treatment Coverage*) TC

Treatment Coverage (TC) adalah Jumlah semua kasus Tuberculosis yang ditemukan dan diobati di antara perkiraan jumlah semua kasus Tuberculosis (Insiden Tuberculosis) yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Tahun 2024 jumlah semua kasus Tuberculosis sebanyak 9.952 orang, sedangkan jumlah perkiraan Insiden Tuberculosis (dalam absolut) sebanyak 10.346 orang, maka *Treatment Coverage (TC)* sebesar 96,19 %. Tahun 2023 Jumlah semua kasus 8.682, jumlah perkiraan Insiden *Tuberculosis* dalam absolut sebanyak 7.202, TC tahun 2023 sebesar 120,54 %.

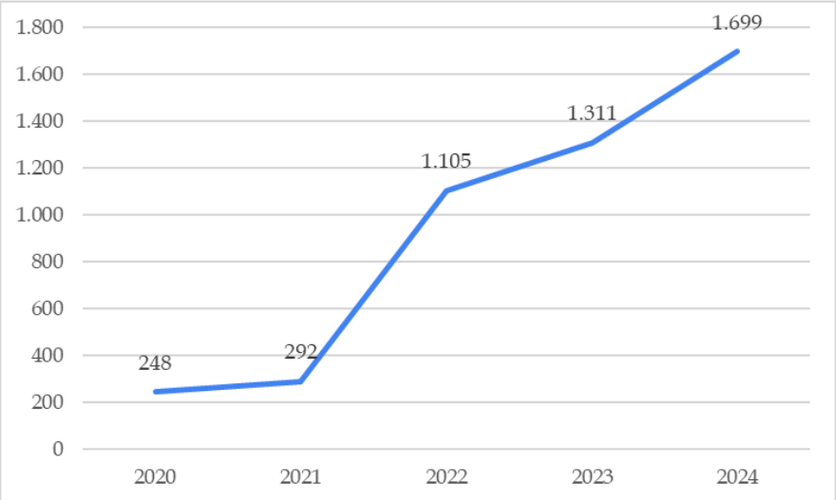


Gambar 2.41 Jumlah Kasus Tuberculosis di Kabupaten Cirebon
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

c. Cakupan Penemuan Kasus TBC Anak

Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis anak adalah jumlah seluruh kasus tuberkulosis anak yang ditemukan di antara perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Jumlah kasus *Tuberculosis* pada anak tahun 2024 sebanyak 1.699 kasus. Jumlah perkiraan insiden *tuberculosis* anak yaitu 12% dari perkiraan keseluruhan kasus (12 % x 10.436). Sehingga cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada anak sebesar 131,5 %. Sebagai perbandingan dengan kondisi tahun 2023 jumlah kasus tuberkulosis pada anak sebanyak 1.311 kasus. Jumlah perkiraan insiden *tuberculosis* anak yaitu 12% dari perkiraan keseluruhan kasus (12 % x 7.202). Sehingga cakupan Tuberkulosis pada anak tahun 2023 sebesar 132,9 %.



Gambar 2.42 Persentase Cakupan Penemuan Kasus TBC Anak di Kabupaten Cirebon

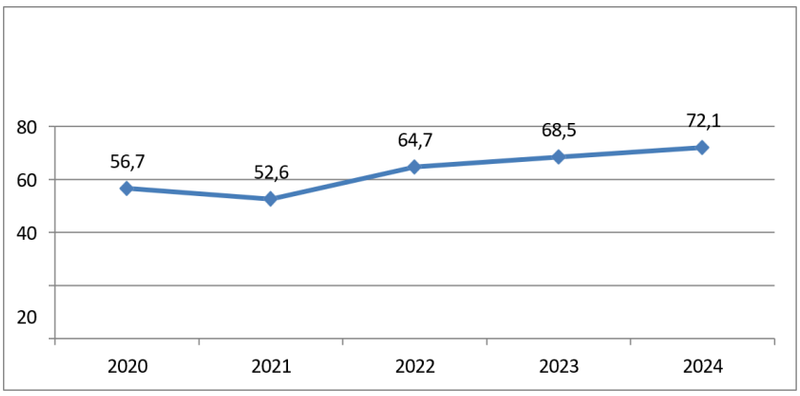
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

d. Pneumonia

Pengertian Pneumonia pada balita yaitu balita yang mengalami batuk dan/atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan nafas, usia 0-2 bulan ≥ 60 kali/menit, usia 2-12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12-59 bulan ≥40 kali/menit. (Definisi Operasional dari Juknis Profil Kesehatan Revisi tahun 2022).

Penemuan penderita Pneumonia pada balita adalah Balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Realisasi penemuan Pneumonia (dalam %) diperoleh dari perhitungan jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikalikan konstanta 100.

Realisasi Penemuan Pneumonia pada penderita balita tahun 2024 mencapai 72,1 % dengan jumlah penemuan sebanyak 7.959 kasus. Mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mencapai 68,5 %. Trend penemuan kasus Pneumonia pada balita dan ditangani di Fasilitas Pelayanan kesehatan (terlaporkan), dapat dilihat pada grafik berikut.

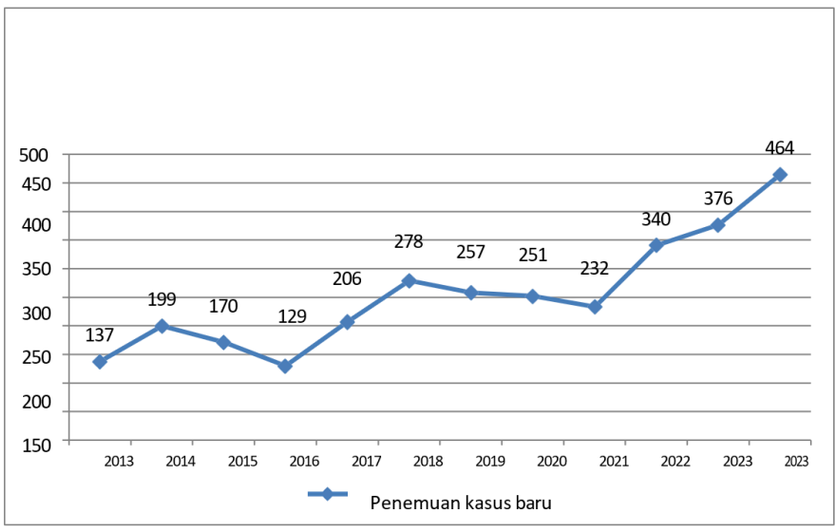


Gambar 2.43 Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

e. HIV/AIDS

Kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test. Jumlah kasus baru HIV tahun 2024 sebanyak 464 kasus, terdiri dari 353 kasus pada jenis kelamin laki-laki (76,1 %) dan 111 kasus perempuan (23,9 %). Kasus HIV pertama kali ditemukan di Kabupaten Cirebon Tahun 2000 sebanyak 3 kasus. *Trend* penemuan jumlah kasus baru HIV di Kabupaten Cirebon dari tahun 2013 -2024 dapat dilihat pada grafik.



Gambar 2.44 Jumlah Penemuan Kasus HIV di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

f. Diare

Penderita diare balita yang dilayani adalah jumlah penderita diare Balita (umur<5 tahun) yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Penderita diare semua umur adalah jumlah penderita diare semua umur yang datang dan dilayani di sarana

kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan angka cakupan maka jumlah penderita dibandingkan dengan angka perkiraan jumlah penderita. Perkiraan jumlah penderita diare semua umur diperoleh dari 10% dikalikan angka kesakitan diare semua umur sebesar 270 per1.000 penduduk (Angka kesakitan nasional hasil survey morbiditas diare). Sedangkan perkiraan diare pada balita adalah 20% dikalikan angka kesakitan diare pada balita (843 per 1.000 penduduk). Pada tahun 2024 ada perubahan target penanganan diare baik semua umur maupun diare pada balitan. Target penanganan kasus Diare Semua umur: 10 % x Jumlah Penduduk x Prevalensi Diare (Prevalensi Diare Semua Umur 8,6 %). Target

Penangnan kasus Diare Balita 20 % x Jumlah Balita x Prevalensi (prevalensi Diare Balita 12,8 %). Sumber : Prevalensi Diare Semua Umur : 8.60% (Data Riskesdas Jawa Barat). Prevalensi Diare Balita : 12.80% Sumber dari Data SSGI (Jawa Barat). Penanganan kasus diare semua umur yang dilayani sebanyak 46.223 orang atau 225 % dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 20.537. Kasus diare pada balita yang dilayani sebanyak 17.510 kasus yaitu 331,9 % dari jumlah perkiraan kasus diare balita 5276. Data tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan angka di tahun 2023. Hal ini disebabkan ada perubahan perhitungan standar target penemuan kasus diare semua umur dan pada balita. Pada tahun 2023 masih menggunakan target penemuan kasus diare menggunakan angka insiden Diare 270/ 1000 penduduk pada kasus diare semua umur, dan 843/1000 penduduk pada kasus diare balita. Kasus yang dilayani sebanyak 45.364 orang atau 71,9 % dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 63.083. Kasus diare pada balita yang dilayani sebanyak 18.460 kasus yaitu 57,7 % dari jumlah perkiraan kasus diare balita 31.978. Capaian pada tahun 2022, kasus diare semua umur yang dilayani 33.049 orang, yaitu 53,3% dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 61.995. Kasus diare pada balita dilayani sebanyak 13.625 kasus atau 43,6% dari jumlah perkiraan kasus diare balita 31.256 orang.

g. Kusta

Pengertian penderita kusta yaitu seseorang yang mempunyai satu dari tanda utama kusta, yaitu :

- Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa;
- Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf;

- Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom;
- Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (*slit skin smear*) (*Sumber: Juknis Profil Kesehatan*).

Ada dua jenis tipe kusta yaitu Tipe *Pausy Basiller* (PB) dan Tipe *Multy Basiller* (MB). Penderita kusta Tipe PB yang mempunyai tanda utama yaitu :

- Jumlah bercak kusta 1-5;
- Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf;

Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif. Penderita kusta MB mempunyai ciri yaitu :

- Jumlah bercak kusta > 5;
- Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf;
- Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif.

Pada tahun 2024, jumlah kasus baru kusta tipe *Pausy Basiler* (PB) atau Kusta Kering ada 2 kasus laki-laki dan 2 kasus perempuan, total 4 kasus PB. Jumlah kasus kusta tipe *Multy Basiler* (MB) atau Kusta Basah sebanyak 176 kasus, terdiri laki-laki 118 kasus (67 %) dan perempuan 58 kasus (33 %). Jadi total kasus baru Kusta PB dan MB pada tahun 2024 sebanyak 180 kasus, menurun dibandingkan kasus baru tahun 2023 yang mencapai 187 kasus.

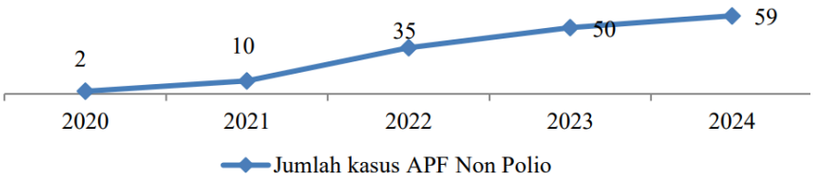
G. PENYAKIT TIDAK MENULAR

a. *Acute Flacid Paralysis* (AFP) Non Polio

Acute Flacid Paralysis (AFP) adalah Kelumpuhan pada anak berusia <15 tahun yang bersifat layuh (*flacid*) terjadi secara akut/mendadak (<14 hari) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa. AFP non Polio Rate adalah Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk berusia <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pada tahun tahun 2024 jumlah kasus AFP Non polio ada 59, dengan jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun sebanyak 583.091 jiwa. Sehingga AFP Non Polio Rate sebesar 10,1 per 100.000 penduduk <15 tahun. Ketentuan WHO, penemuan kasus AFP setiap tahun ditargetkan >2/100.000 penduduk usia <15 tahun. Dibandingkan tahun 2023 penemuan kasus AFP sebanyak 50 kasus, dengan Rate penemuan 8,3 per 100.000 penduduk < 15

tahun. Pencapaian penemuan kasus tahun 2022 sebesar 6,0 /100.000 penduduk < 15 tahun.



Gambar 2.45 Jumlah Kasus AFP Ditemukan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

b. Difteri

Difteri tergolong penyakit menular berbahaya dan sangat beresiko mengancam jiwa penderitanya jika tidaak segera mendapat penanganan. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman *Corynebacterium Diphtheria* ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput bagian dalam saluran pernapasan bagian atas, hidung, dan juga kulit. Jika tidak segera ditangani, bakteri penyebab difteri ini dapat mengeluarkan racun yang merusak organ jantung, ginjal dan otak. Sehingga satu kasus ditemukan di suatu wilayah, maka dapat dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus Difteri di Kabupaten Cirebon. Terakhir ditemukan kasus Difteri tahun 2019 ditemukan ada 1(satu) kasus, di wilayah Kecamatan Waled dan penemuan lebih banyak lagi pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus.

c. Pertusis

Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis* yang menyerang saluran pernafasan dan biasanya terjadi pada anak berusia dibawah 1 tahun.

Pada tahun 2024 kasus Pertusis kembali ditemukan setelah sejak tahun 2021 kasusnya nihil. Tahun 2024 ditemukan sebanyak 8 kasus Pertusis, 5 (lima) kasus pada laki laki dan 3 (tiga) kasus pada perempuan. Penemuan kasus sebelumnya pada tahun 2020 ditemukan 1 (satu) kasus di Kecamatan Sumber wilayah kerja Puskesmas Watubelah. Pada tahun 2019 juga ditemukan 1(satu) kasus di Kecamatan Astanajapura. Tahun 2018, kasus Pertusis ditemukan 1 kasus, terdapat di Kecamatan Dukupuntang, tahun 2017 ditemukan 4 (empat) kasus.

d. Tetanus Neonatorum

Penyakit *Tetanus Neonatorum* adalah Penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (0-28 hari) yang disebabkan oleh *Clostridium tetani*, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ini tidak ditemukan kasus *Tetanus Neonatorum*. Terakhir ditemukan kasus pada tahun 2016 ditemukan 1 (satu) kasus di Kecamatan Arjawinangun.

e. Hepatitis B

Hepatitis B merupakan penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dari golongan virus DNA. Deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan HbsAg. Saat ini program pemerintah untuk deteksi dini Hepatitis B dilakukan pada ibu Hamil dengan menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) HbsAg.

Tahun 2024 jumlah ibu hamil diperiksa Hepatitis B sebanyak 33.900. Proporsi jumlah ibu hamil yang diperiksa 82,2 % dari jumlah sasaran ibu hamil. Yang hasilnya reaktif sebanyak 314 atau 0,9 %. Tahun 2023 proporsi yang reaktif 1,1 %. Tahun 2022 proporsi yang reaktif 1,3 %.

Pada program deteksi dini Hepatitis B, juga dilakukan tindakan lanjutan yaitu mengidentifikasi jumlah bayi yang lahir dari ibu yang diperiksa HBsAg (baik yang menggunakan RDT HBsAg maupun metode lain di daerah) yang hasilnya reaktif dalam kurun waktu yang sama. Tindakan lanjutannya adalah memberikan HBIg (*Hepatitis B Immunoglobulin*) yang merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi yang lahir dari ibu dengan HBSAg reaktif.

Tahun 2024 jumlah bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg reaktif sebanyak 260 dan seluruhnya (100%) mendapatkan HBIg. Jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan jumlahnya. Tahun 2023 jumlahnya 273, tahun 2022 jumlahnya 370 bayi.

f. Campak

Suspek campak adalah penyakit yang sangat menular (infeksius) disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbilivirus, dari keluarga *Paramyxoviridae* yang mudah mati karena panas dan cahaya. Gejala klinis campak adalah demam (panas) dan ruam *(rash)* ditambah dengan batuk/pilek atau mata merah.

Tahun 2024 jumlah suspek campak di Kabupaten Cirebon sebanyak 413 kasus, menurun jumlahnya dari tahun 2023 yang jumlahnya ada 1.093 kasus. Incident Rate (IR) suspek Campak sebesar 16,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan IR tahun 2023 sebesar 10,2 per 100.000 penduduk.

g. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pengertian KLB ditanggulangi <24 Jam Penanggulangan KLB kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa faximili atau telepon.

Penanggulangan KLB adalah upaya yang meliputi penyelidikan epidemiologi; penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat KLB/wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya.

Pengertian KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam adalah Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu.

Jumlah KLB tahun 2024 ada 19 kejadian luar biasa (lima desa terpapar dengan 7 jenis penyakit). Tahun 2024 ada 4 (empat) jenis sebaran kejadian penyakit yang termasuk kategori Kejadian Luar Biasa yaitu Chikungunya, keracunan makanan, Leptospirosis dan Pertusis.

Tabel 2.26
Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Cirebon

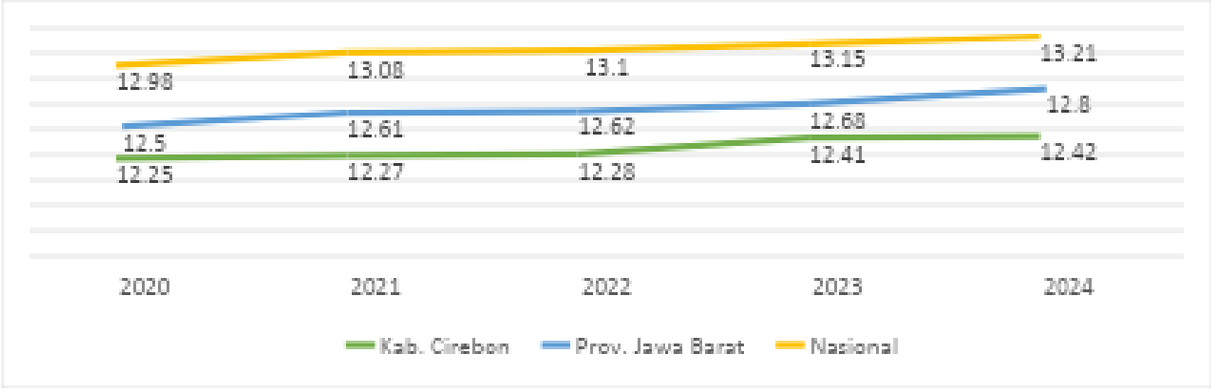
No	Jenis Penyakit	Jumlah Desa Terserang	Jumlah Penderita	Jumlah Kematian	CFR (%)
1	Pertusis	4	8	0	0
2	Keracunan Makanan	2	10	0	0
3	Chikungunya	7	149	0	0
4	Leptospirosis	6	7	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025

2.1.2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Harapan Lama Sekolah

Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 12,42 yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.



Gambar 2.46 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

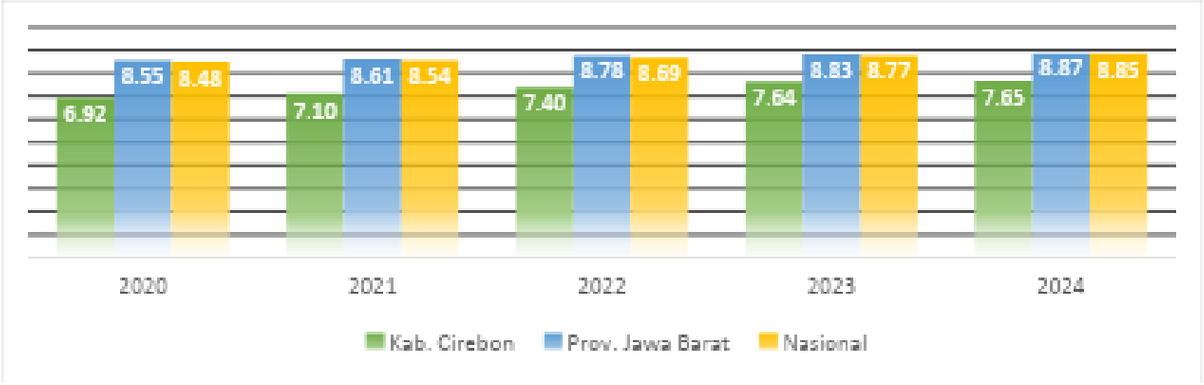
Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional.

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat.

Nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,65 tahun pada tahun 2024 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,65 tahun atau Kelas 2 SMP semester pertama. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional.

Dengan nilai RLS 7,65 tahun Kabupaten Cirebon menempati peringkat 4 terendah dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat, hal ini menjadi permasalahan serius di Kabupaten Cirebon yang perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.



Gambar 2.47 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2025; BPS Provinsi Jabar 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

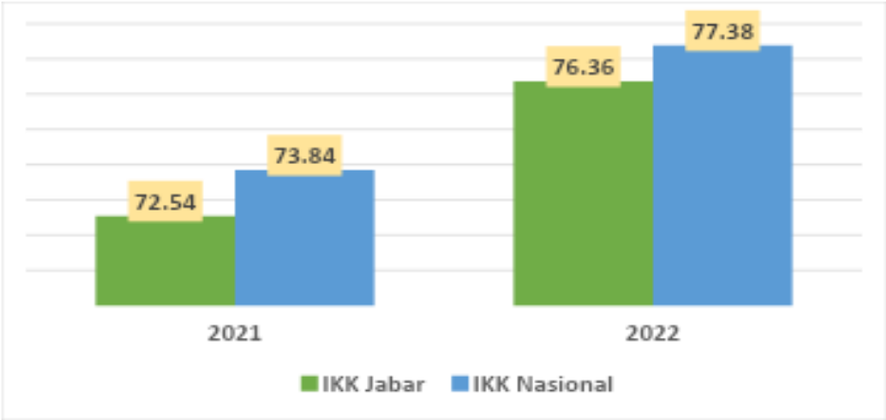
2.1.2.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Kualitas Keluarga

Menurun Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kabupaten Cirebon tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai IKK Provinsi Jawa Barat sebesar 72,54 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% menjadi 76,36. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan perubahan kategori IKK Provinsi Jawa Barat, yang awalnya Provinsi Jawa

Tengah merupakan wilayah cukup responsif gender dan hak anak menjadi wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dari 73,84 pada tahun 2021 menjadi 77,38 pada tahun 2022. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak.



Gambar 2.48 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022

Sumber: Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2022 (65,64) sedikit lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (65,74) namun lebih tinggi daripada IPA Nasional (63,30).

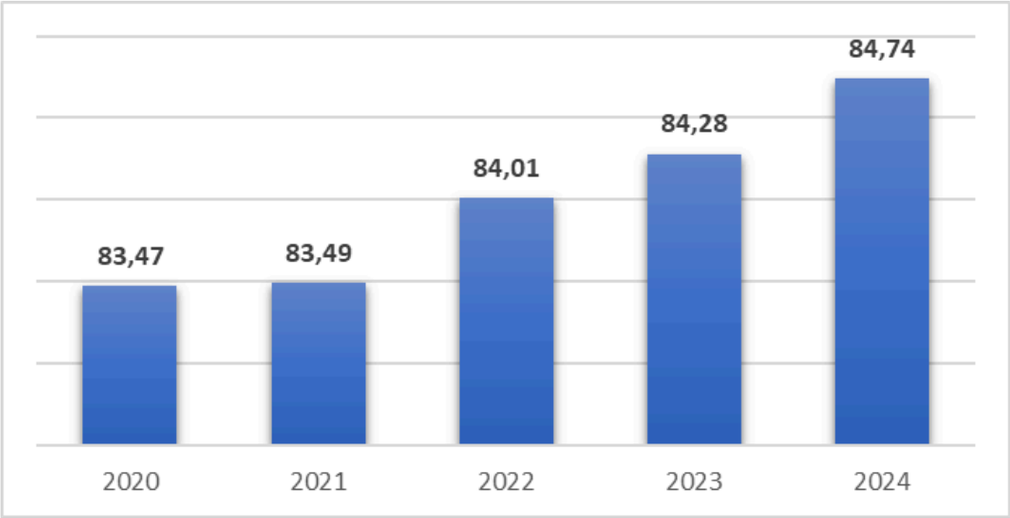
Tabel 2.27
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022

	Tahun 2022		
	IPA	IPHA	IPKA
Kab. Cirebon	65.64	61.77	78.45
Jawa Barat	65.74	62.04	80.13
Nasional	63.30	60.33	75.21

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD

C. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon yang dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional.

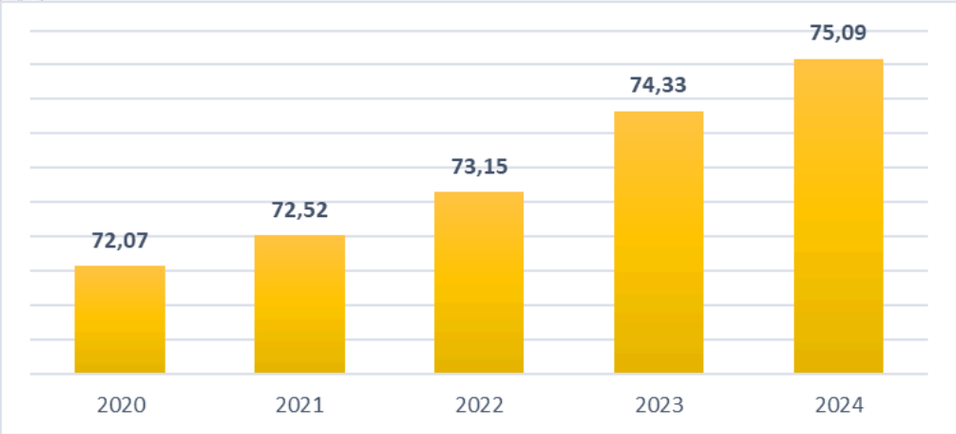


Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi dimana dari tahun tahun 2019 sebesar 83,50. Namun, pada tahun 2020 nilai dari Indeks Pembangunan Gender mengalami sedikit penurunan sebesar 00,03. Selepas mengalami penurunan tersebut nilai Indeks Pembangunan Gender kembali naik dengan signifikan dari tahun 2021 yang mencapai nilai 83,49 dan di tahun 2023 menjadi nilai indeks pembangunan gender tertinggi dengan nilai 84,28.

D. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender.



Gambar 2.50 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Dari data diatas menunjukkan capaian IDG di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019-2022 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian IDG di Kabupaten Cirebon sebesar 75,61 dan merupakan capaian tertinggi dari tahun 2019-2023. Nilai indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Namun, pada tahun 2021-2023 capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Cirebon kembali naik dengan nilai 73,15 dan 74,33.

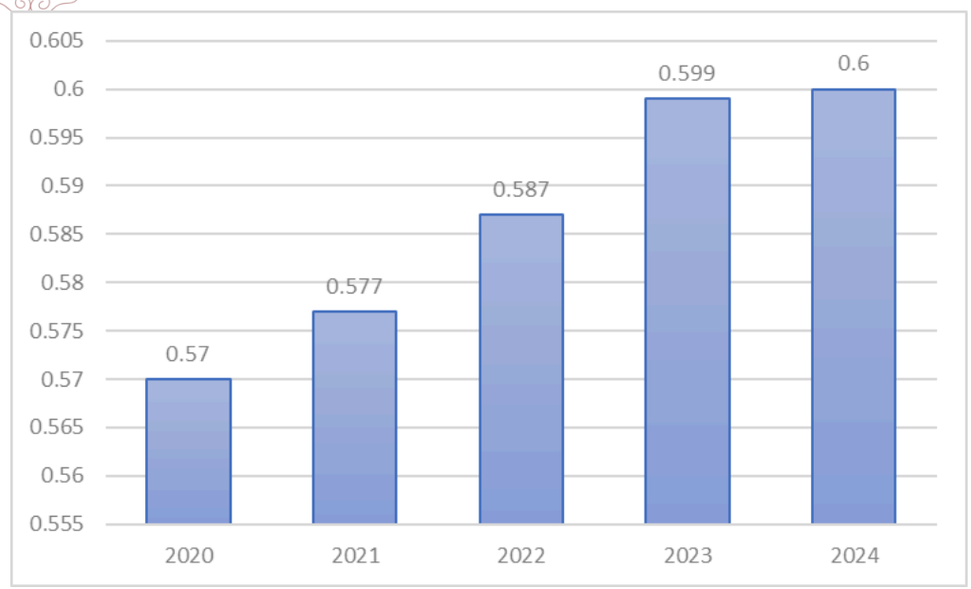
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.3.1.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan ialah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.



Gambar 2.51 Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon , data diolah Bappelitbangda Tahun 2025

Indeks Pendidikan kabupaten Cirebon setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks Pendidikan kabupaten Cirebon 0,570 kemudian nilai tersebut pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,60. Kenaikan tersebut dinilai cukup baik namun nilai tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Perlu adanya beberapa strategi yang dapat meningkatkan HLS dan RLS Kabupaten Cirebon antara lain : (1) upaya peningkatan, pemerataan serta akses Pendidikan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kesehatan; (2) menerapkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari; (3) memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkannya untuk mengatasi hambatan ekonomi; (4) memberikan dukungan sosial dan psikologis berupa dukungan emosional dan psikologis kepada siswa, termasuk konseling dan mentorship; (5) dan lainnya.

B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

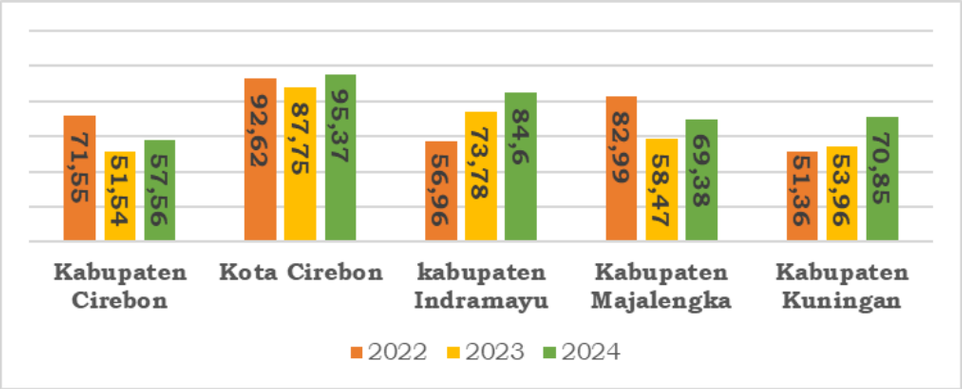
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

a. Pemerataan layanan perpustakaan
b. Ketercukupan koleksi
c. Ketercukupan tenaga perpustakaan
d. Tingkat kunjungan masyarakat per hari

e. Jumlah perpustakaan ber-SNP

f. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi

g. Anggota perpustakaan



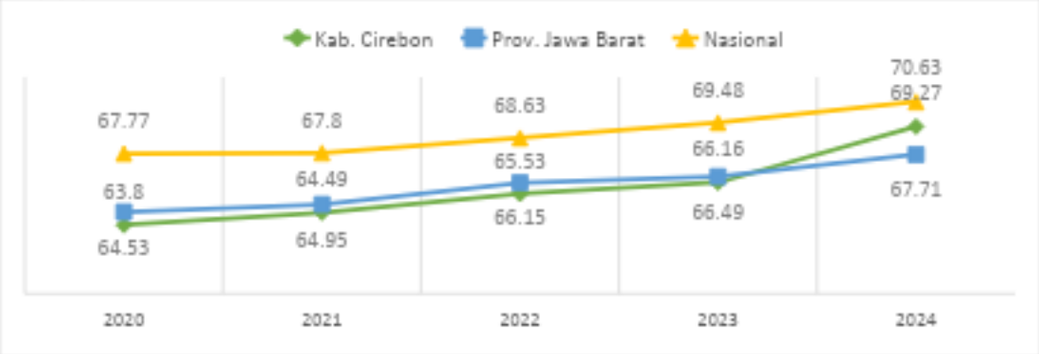
Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024

Sumber: Open Data Jabar, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Cirebon dan daerah sekitarnya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari 51,54 pada tahun 2023 menjadi 57,56 pada tahun 2024. Kota Cirebon mencatat IPLM tertinggi di wilayah ini, meningkat dari 87,75 menjadi 95,37. Peningkatan IPLM ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan akses literasi dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berbagai program penguatan budaya baca, penyediaan fasilitas literasi, serta peningkatan peran komunitas dan lembaga pendidikan menjadi faktor pendorong utama dalam mendorong pertumbuhan indeks literasi di daerah ini.

C. Angkatan Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.



Gambar 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

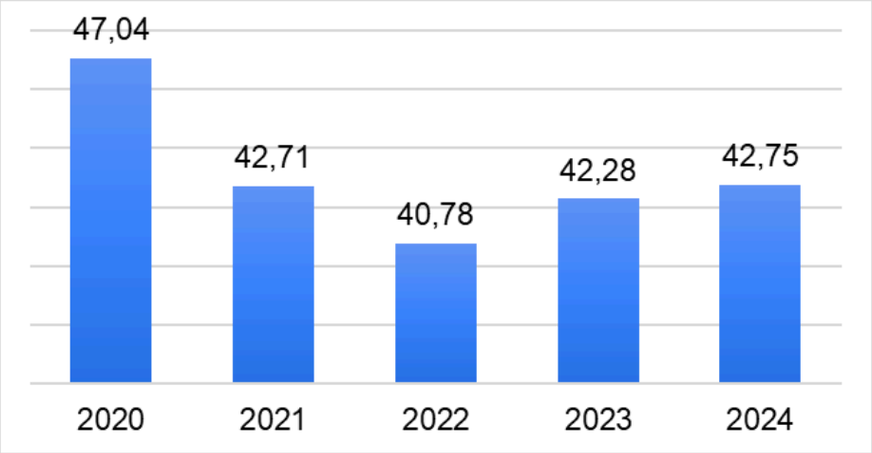
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon secara umum konsisten meningkat. TPAK pada 2024 mencapai 69,27 persen atau meningkat sebesar 3,11 persen dibandingkan 2023 sebesar 66,16 persen. Peningkatan TPAK Kabupaten Cirebon ini didorong oleh adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, adanya pengembangan inkubator bisnis, dan pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Namun TPAK Kabupaten Cirebon tersebut masih berada dibawah TPAK nasional dan TPAK Provinsi Jawa Barat. Hal ini diakibatkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, kurangnya lembaga balai pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, terbatasnya anggaran pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, belum meratanya lapangan kerja, dan masih minimnya akses lapangan kerja di setiap kabupaten/kota.

D. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.



Gambar 2.54 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

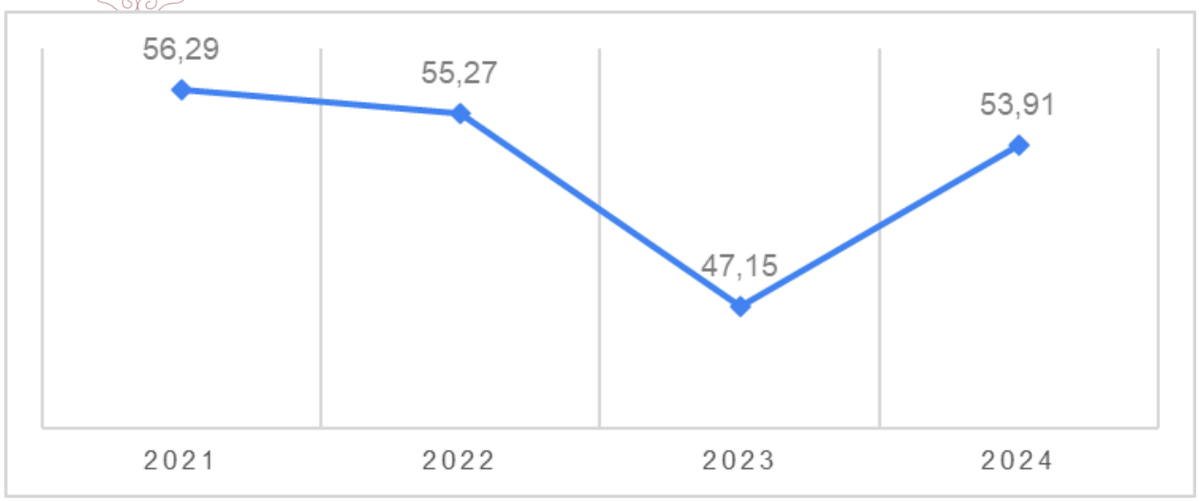
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Dari grafik di atas, terlihat bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, angka ketergantungan tercatat sebesar 42,28, kemudian pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 42,75. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 hingga 43 penduduk usia non-produktif.

Penurunan angka ketergantungan ini sejalan dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kematian, yang merupakan dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan meningkatnya akses pendidikan, khususnya bagi perempuan, yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan angka kematian.

2.1.3.1.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

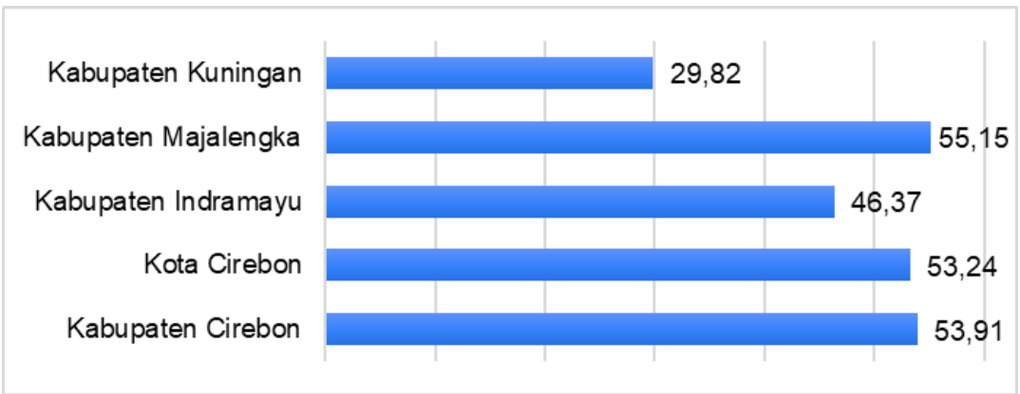
Indeks inovasi daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Perhitungan Indeks inovasi daerah di Kabupaten Cirebon dimulai tahun 2020 dengan nilai sebesar 3145 dengan kategori sangat inovatif. Pada Tahun 2021 ada perubahan rumus dan skala perhitungan Indeks Inovasi Daerah dan perhitungan indeks inovasi daerah Kabupaten Cirebon sebesar 53,91 dan masuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 81,27 dengan kategori sangat inovatif.



Gambar 2.55 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Ciayumajakuning yang tertinggi adalah Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 55,15.



Gambar 2.56 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Capaian inovasi di tingkat Kabupaten Cirebon sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus terdapat peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi

harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

2.1.3.1.3. Sektor Basis dan Non Basis

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat.

Tabel 2.28
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	Rata-Rata	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,816	1,770	1,794	1,793	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	0,932	1,026	0,877	0,945	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,487	0,485	0,489	0,487	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,389	0,407	0,499	0,432	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,096	1,258	1,181	1,178	BASIS
F	Konstruksi	1,338	1,268	1,305	1,304	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,986	0,942	0,950	0,959	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,640	1,728	1,798	1,722	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,130	1,119	1,160	1,136	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,698	0,683	0,794	0,725	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,440	1,496	1,613	1,516	BASIS
L	Real Estate	2,079	2,031	2,027	2,046	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	2,044	2,078	2,206	2,109	BASIS

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	Rata-Rata	Ket
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,490	1,543	1,520	1,518	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,870	1,945	2,110	1,975	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,634	2,615	2,808	2,686	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,773	1,872	1,999	1,881	BASIS

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, Data Diolah, Data yang dikelola dalam SIPD

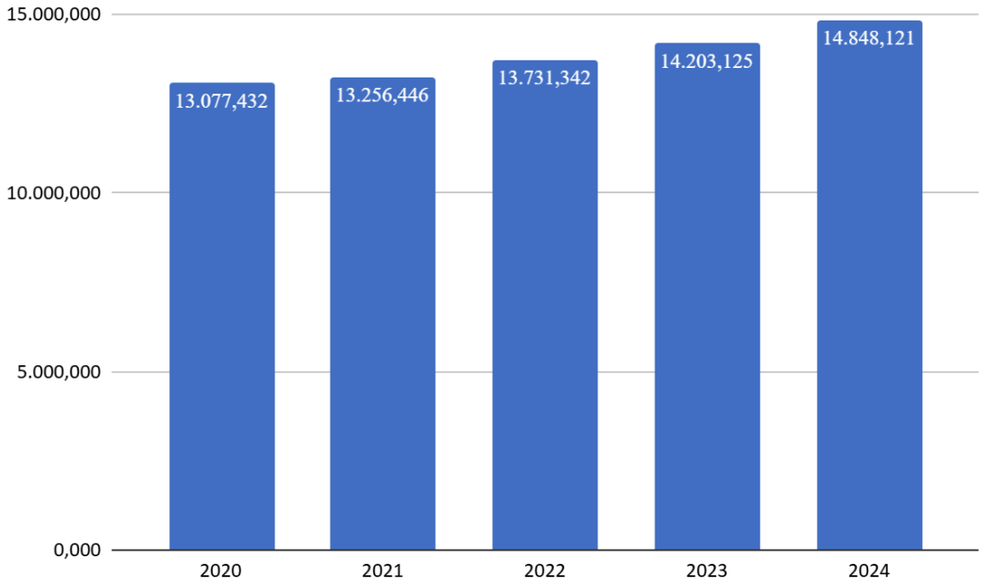
Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sektor Basis
   a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
   b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.
   c. Konstruksi.
   d. Transportasi dan Pergudangan.
   e. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
   f. Jasa Keuangan dan Asuransi.
   g. Real Estate.
   h. Jasa Perusahaan.
   i. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial.
   j. Jasa Pendidikan.
   k. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
   l. Jasa Lainnya.
2. Sektor Non Basis
   a. Pertambangan dan Penggalian.
   b. Industri Pengolahan.
   c. Pengadaan Listrik dan Gas.
   d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
   e. Informasi dan Komunikasi.

2.1.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan,

memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.



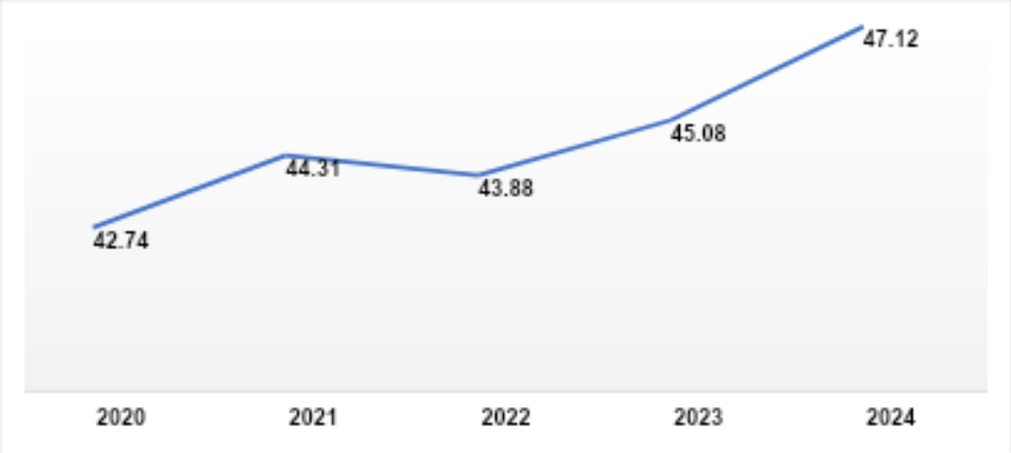
Gambar 2.57 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar diatas, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp 13.077.432, kemudian meningkat menjadi Rp 13.256.446 pada tahun 2021 atau naik sekitar 1,37 persen. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai Rp 13.731.342, tumbuh 3,58 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 kembali mencatat pertumbuhan sebesar 3,44 persen menjadi Rp 14.203.125, dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2024 dengan peningkatan 4,54 persen sehingga mencapai Rp 14.848.121.

Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita setiap tahunnya mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat. Tren positif ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan ini merata di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu.

2.1.3.1.5 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah proporsi dari total pengeluaran per individu dalam suatu populasi yang digunakan untuk membeli barang dan layanan non pangan. Ini mencakup segala sesuatu selain bahan makanan, seperti transportasi, hiburan, pakaian, dan barang-barang lainnya.



Gambar 2.58 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

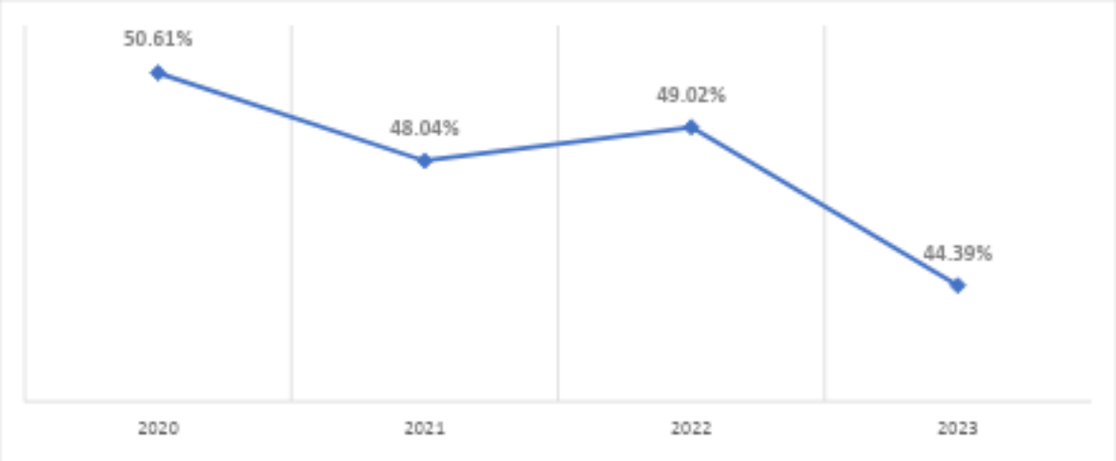
Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita di Kabupaten Cirebon. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika tren konsumsi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita tercatat sebesar 42,74%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44,31%, namun kembali menurun menjadi 43,88% pada tahun 2022. Tren kenaikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 45,08%, hingga mencapai 47,12% pada tahun 2024.

Peningkatan pengeluaran konsumsi non-pangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon semakin mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan selain pangan, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan rekreasi. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli serta peningkatan kesejahteraan, meskipun tetap perlu dianalisis lebih lanjut apakah pertumbuhan ini merata di seluruh kelompok sosial ekonomi.

2.1.3.1.6 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor berkontribusi terhadap ekonomi suatu wilayah. Tingkat rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perdagangan internasional

mempengaruhi kegiatan ekonomi regional. Jika nilai rasio tinggi, itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi wilayah tersebut.



Gambar 2.59 Rasio ekspor dan impor terhadap PDB

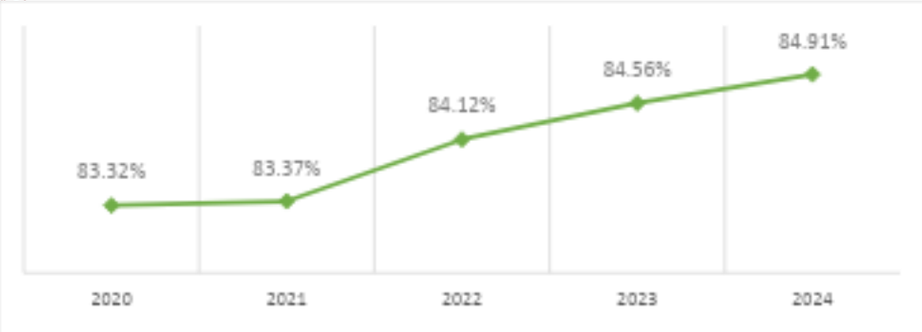
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah, data yang dikelola dalam SIPD

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa rasio impor dan ekspor terhadap PDB memiliki nilai cukup besar yaitu sebesar 56,93 % di awal tahun. Hal ini berarti nilai gabungan dari ekspor dan impor tersebut setara dengan 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Ditahun selanjutnya rasio ini mengalami penurunan menjadi sebesar 50,61% dan turun kembali sebesar 48,04% di tahun ketiga. Namun, ditahun selanjutnya rasio ekspor impor terhadap PDB kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 49,02%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 44,39%.

2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.3.2.1 Tingkat Kemantapan Jalan

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.



Gambar 2.60 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2025, data diolah, yang dikelola dalam SIPD

Tingkat kemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 83,32 persen menjadi 84,91 persen di tahun 2024. Peningkatan kemantapan jalan terjadi berkat adanya dukungan pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan pembangunan berangsur pulih sehingga capaian kemantapan jalan juga meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir.

2.1.3.2.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kabupaten Cirebon tidak memiliki terminal tipe C namun memiliki 3 sub terminal. Selain itu, ketersedian sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon terbilang mencukupi untuk melayani aktivitas Masyarakat Kabupaten Cirebon

Tabel 2.29
Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

Sarana Prasarana/Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Tipe C	0	0	0	0	0
Jumlah Sub Terminal	3	3	3	0	
Jumlah Rambu Lalin	150	168	25	0	
Jumlah Traffic Light	0	0	0	0	0
Jumlah Warning Light	0	8	7	0	
Pembangunan Lampu PJU	4	633	1170	1525	
Pagar Pengaman Jalan	173	226	100	28	
Shelter	4	4	3	0	
Jumlah Trayek Layanan	48	48	48	0	

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.3 Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan kabupaten terhadap jumlah total kawasan kabupaten. Rasio konektivitas kabupaten Cirebon tetap sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 63%.

Tabel 2.30
Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio konektivitas Kabupaten	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.4 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah unit saluran dan struktur yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, administrasi dan penggunaan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2001 tentang irigasi, pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama di mana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, misalnya, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

Tabel 2.31
Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Saluran Irigasi	Panjang (meter)	
	Primer	Sekunder
Kondisi Baik	79.204,0	14.821,0
Belum Ada Senderan	10.271,0	4.531,5
Kondisi Rusak Ringan	35.769,0	4.774,0
Kondisi Rusak Berat	18.708,5	3.305,0

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kondisi saluran irigasi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan irigasi masih dalam kondisi baik. Panjang saluran irigasi primer yang masih berfungsi baik mencapai 79.204 meter, sedangkan saluran sekunder

dalam kondisi baik sepanjang 14.821 meter. Meski demikian, masih terdapat saluran yang belum memiliki senderan sepanjang 10.271 meter (primer) dan 4.531,5 meter (sekunder), yang berpotensi menyebabkan kerusakan saluran akibat erosi atau kebocoran aliran air.

Di sisi lain, kondisi saluran irigasi yang mengalami kerusakan juga cukup signifikan. Saluran irigasi primer yang mengalami kerusakan ringan mencapai 35.769 meter, sedangkan kerusakan berat mencapai 18.708,5 meter. Untuk saluran sekunder, kerusakan ringan dan berat masing-masing tercatat sepanjang 4.774 meter dan 3.305 meter. Data ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur irigasi, sehingga diperlukan intervensi pemerintah daerah dalam bentuk rehabilitasi saluran rusak dan pembangunan senderan, guna mendukung keberlanjutan sistem irigasi dan ketahanan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon.

2.1.3.2.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m^2 per orang; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

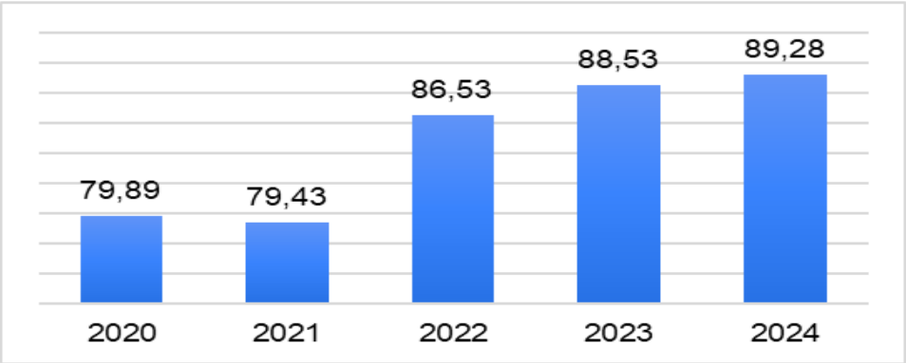
Tabel 2.32
Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,13%	98,34%	98,73 %	99,74%	80,39%
2	Rumah Tangga Bersanitasi	74,9%	72,4%	76,6%	89,42%	89,62%
3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65,1%	76,3%	76,4%	94,89%	98,52%

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.6 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik)

Indeks pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Pada tahun 2023, indeks Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Cirebon meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 sebesar 88,53 menjadi 89,28 di tahun 2024.



Gambar 2.61 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.7 Indeks Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan gambaran ideal dari pembangunan desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, maupun ekologi yang berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat kemandirian desa, pemerintah menggunakan Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai instrumen evaluasi. IDM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Melalui pengukuran tersebut, desa dapat dipetakan statusnya mulai dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Kehadiran IDM menjadi penting karena tidak hanya memberikan gambaran objektif mengenai capaian pembangunan desa, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan

kebijakan, alokasi anggaran, dan strategi pemberdayaan masyarakat desa secara lebih tepat sasaran.

Pengukuran IDM menjadi instrumen penting untuk memantau perkembangan desa dari tahun ke tahun. Melalui IDM, terlihat bagaimana dinamika pembangunan desa di Kabupaten Cirebon menunjukkan arah perubahan yang signifikan, dari kondisi masih terdapat desa tertinggal menuju peningkatan jumlah desa yang maju dan mandiri. Tabel progres IDM berikut memperlihatkan perjalanan transformasi desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.33
Progres Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah Desa	Rata-rata IDM
2020	0	2 Desa (0,49%)	294 Desa (71,36%)	109 Desa (26,46%)	7 Desa (1,70%)	412	0,688 (Berkembang)
2021	0	0	185 Desa (44,90%)	185 Desa (44,90%)	42 Desa (10,19)	412	0,7263 (Maju)
2022	0	0	98 Desa (23,79%)	235 Desa (57,04%)	79 Desa (19,1%)	412	0,7552 (Maju)
2023	0	0	44 Desa (10,68%)	240 Desa (58,25%)	128 Desa (31,07%)	412	0,7805 (Maju)
2024	0	0	20 Desa (4,85%)	232 Desa (56,31%)	160 Desa (38,83%)	412	0,7960 (Maju)

Sumber: Kemendesa PDTT, 2025

Pada tahun 2020, dari total 412 desa, sebagian besar masih berada pada kategori berkembang (294 desa atau 71,36%), dengan 2 desa (0,49%) masih tergolong tertinggal, 109 desa (26,46%) berstatus maju, dan baru terdapat 7 desa mandiri (1,70%). Sementara itu, rata-rata IDM masih berada di kisaran 0,688 (berkembang). Percepatan semakin terlihat di tahun 2021 dengan 42 desa mandiri (10,19%) dan 185 desa maju (44,90%), sementara desa tertinggal sudah tidak ada. Rata-rata IDM juga meningkat menjadi 0,7263 (maju).

Tahun 2022 hingga 2023, capaian terus menunjukkan tren positif. Puncak capaian terlihat di tahun 2024, di mana tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal. Seluruh desa di Kabupaten Cirebon sudah naik kelas menjadi berkembang, maju, atau mandiri. Rinciannya, 20 desa berkembang (4,85%), 232 desa maju (56,31%), dan 160 desa mandiri (38,83%) sudah mencapai status mandiri. Dengan demikian, rata-rata IDM

Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berada pada level 0,7960 (maju), mendekati kategori mandiri secara agregat. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kabupaten Cirebon berhasil melakukan transformasi besar: dari kondisi awal dengan banyak desa berkembang dan 2 desa tertinggal, hingga akhirnya pada tahun 2024 seluruh desa berhasil lepas dari status tertinggal dan hampir 40% desa telah mencapai kategori mandiri.

2.1.3.3 Daya Saing Iklim Investasi

2.1.3.3.1 Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2.34
Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perda Perizinan	1	-	-	1	-
2.	Lama proses perizinan	5	5	5	5	
3.	Penerbitan Perizinan	1.322	1.393	982	158	468
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	88,68	88,90	89,14	92,46	91,27
5.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	3	3	3	1	-
6.	Retribusi perizinan (jutaan)	3.763,88	2.382,23	14.837,76	13.863,30	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Perda perizinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mengeluarkan dokumen perizinan dengan jumlah 9 dokumen serta pada tahun 2020 hanya mengeluarkan 1 dokumen saja. Lama proses perizinan dari tahun 2019-2022 selama 5 hari. Penerbitan perizinan pada tahun 2018 mendapat nilai sebesar 5.870 dan tahun 2022 menjadi 982 yang dimana penerbitan perizinan mengalami penurunan di Kabupaten Cirebon.

Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2018 mendapat nilai 81,30 dan tahun 2022 menjadi 89.14 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor.

2.1.3.3.2 Investasi di Kabupaten Cirebon

Tabel 2.35
Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investor (Perusahaan)	237	383	2.300	28.866	51.304
2.	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.313,27	1.382,34	3.029,23	3.022,47	3.116,26
3.	Laju Investasi (%)	-22,97	5,26	119,14	102,15	96,20
4.	Nilai Investasi (Jutaan)	1.313.272	1.382.344	3.029.228	3.022.466	3.116.260
5.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)					
	Pertanian	30.513	15.049	58.190	39.844	27.379
	Pertambangan	-	-	-	1.201	955.400
	Industri Pengolahan	815.120	830.582	841.455	1.246.095	1.836.322
	Pengadaan Listrik dan Gas	4.150	9.640	1.909.897	933.747	5.638.527
	Pengadaan Air	300	-	-	60.005	23.111
	Bangunan/Konstruksi	10.942	8.564	21.998	56.418	79.931
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	231.302	42.123	67.762	209.277	294.898
	Transportasi dan Pergudangan	47.595	9.475	9.148	66.798	112.148
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.235	3.421	38.391	5.953	29.257
	Informasi dan Komunikasi	11.883	6.116	-	16.306	4.658
	Jasa Keuangan	3.784	-	-	24	36.000
	Real Estate	63.908	260.430	21.424	97.147	322.818
	Jasa Perusahaan	4.875	14.393	-	55.328	49.414
	Jasa Pendidikan	60.503	8.805	-	336	329.796
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.985	169.894	-	223.146	275.771
	Jasa Lainnya	3.175	3.850	60.963	9.831	58.281

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebanyak 237 investor dan terus mengalami kenaikan yaitu tahun 2023 sebanyak 28.866 investor dan tahun 2024 sebanyak 51.304 investor.

Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 1.313,27 Milyar, dan terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 3.029,23 Milyar, namun sedikit mengalami penurunan pada 2023 menjadi Rp. 3.022,47 Miliar dan naik kembali menjadi Rp 3.116,26 pada 2024. Nilai investasi tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata persentase investasi per tahunnya mencapai 45,14% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor Industri Pengolahan sebesar 29,59% dan diikuti oleh sektor Pertambangan sebesar 5,08%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,49%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020-2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.



Gambar 2.62 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

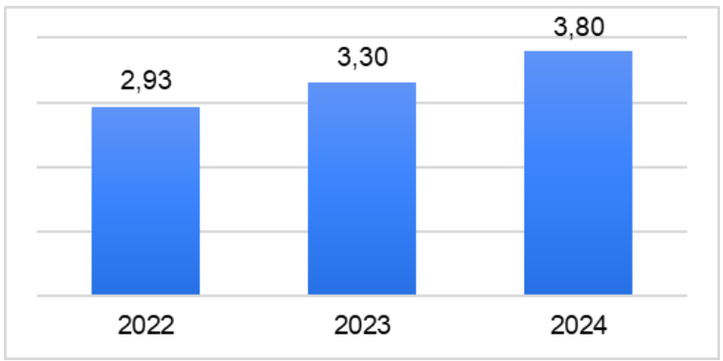
Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Selain itu dalam menghadapi tantangan pembangunan yang ada, perhatian terhadap kawasan strategis seperti Rebana menjadi krusial, mengingat peran vitalnya dalam agenda percepatan pembangunan yang telah diamanatkan secara nasional. Kawasan Rebana adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan rebana dan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Rebana ini meliputi tujuh kabupaten maupun kota, termasuk salah satunya Kabupaten Cirebon yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Namun hingga kini, nilai investasi yang masuk masih tertinggal dibandingkan kawasan industri lama seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Investasi di kawasan Rebana masih relatif kecil. Kabupaten Subang tercatat menerima Rp2,39 triliun, Kabupaten Cirebon Rp878,31 miliar, Kabupaten Majalengka Rp699,57 miliar,

Kabupaten Indramayu Rp362,33 miliar, Kota Cirebon Rp252,46 miliar, dan Kabupaten Kuningan Rp67,54 miliar. Konektivitas infrastruktur yang belum terbangun secara merata hingga kesiapan sumber daya manusia yang masih kurang menjadi penyebab belum optimalnya investasi di kawasan rebana.

2.1.3.3.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari 2,93 pada tahun 2022 menjadi 3,80 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur, inovasi, sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.63 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata Kelola yang baik di Kabupaten Cirebon. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

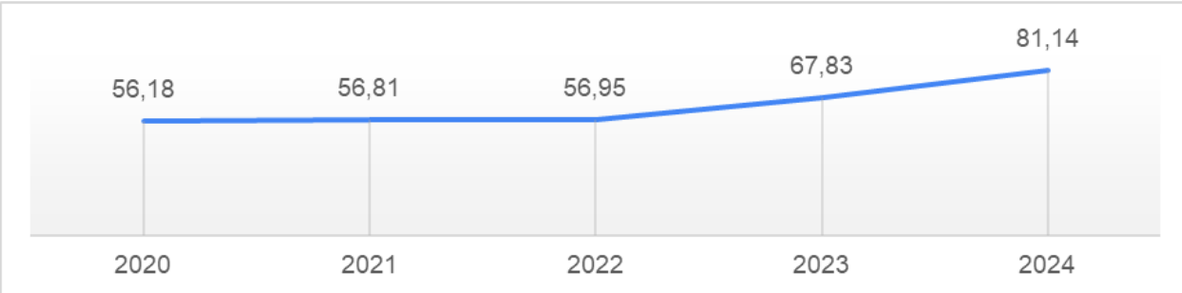
Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini.

2.1.4.1. Reformasi Birokrasi

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Cirebon. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah

pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola" yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum.

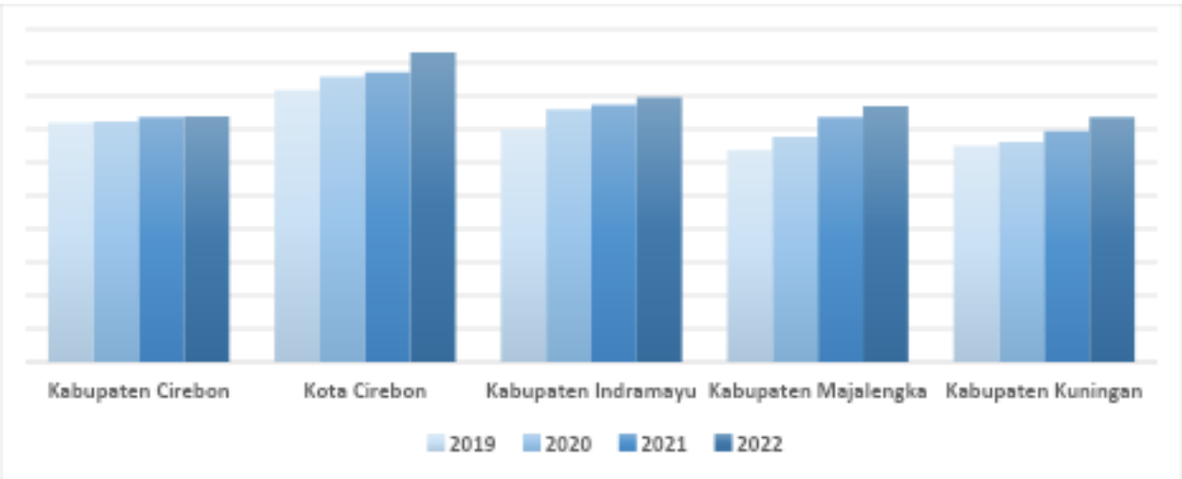
Reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 hanya sebesar 56,18 dengan predikat CC dan pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 81,14 dengan Kategori A-predikat **"Sangat Baik"** yang merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2020-2024.



Gambar 2.64 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kabupaten Cirebon mengindikasikan bahwa Masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.



Gambar 2.65 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024

Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

PROGRES CAPAIAN IRB KAB/KOTA DI JABAR

N0	NAMA INSTANSI PEMERINTAH	CAPAIAN INDEKS RB PEMDA DI JAWA BARAT				
		2020	2021	2022	2023	PREDIKAT
1	KABUPATEN BANDUNG	64,33	63,25	63,32	83,67	A -
2	KOTA BANDUNG	71,75	72,66	75,18	83,58	A -
3	KOTA DEPOK	62,90	63,13	64,78	82,14	A -
4	KABUPATEN SUMEDANG	66,74	68,75	71,81	81,98	A -
5	KABUPATEN KARAWANG	62,20	60,16	63,36	81,50	A -
6	KOTA CIMAHI	59,22	60,01	62,96	81,26	A -
7	KOTA BOGOR	67,01	67,67	70,76	80,97	A -
8	KOTA BANJAR	55,93	57,07	58,76	80,74	A -
9	KOTA BEKASI	66,65	64,75	66,32	78,94	BB
10	KOTA TASIKMALAYA	57,58	60,04	61,70	78,14	BB
11	KABUPATEN SUKABUMI	61,11	62,45	63,00	78,08	BB
12	KABUPATEN BOGOR	67,03	67,97	67,76	78,02	BB
13	KABUPATEN CIAMIS	57,47	59,26	63,59	77,05	BB
14	KOTA SUKABUMI	68,25	67,91	71,05	74,78	BB
15	KABUPATEN PURWAKARTA	60,06	61,41	62,42	74,10	BB
16	KOTA CIREBON	62,84	63,53	66,57	73,91	BB
17	KABUPATEN PANGANDARAN	52,06	53,64	56,48	73,72	BB
18	KABUPATEN MAJALENGKA	53,88	56,84	58,46	73,52	BB
19	KABUPATEN BEKASI	59,66	58,33	59,83	72,96	BB
20	KABUPATEN BANDUNG BARAT	57,60	57,81	60,97	72,27	BB
21	KABUPATEN TASIKMALAYA	54,05	53,86	58,95	71,22	BB
22	KABUPATEN SUBANG	57,20	58,33	58,03	70,86	BB
23	KABUPATEN INDRAMAYU	57,99	58,70	59,84	68,73	B
24	KABUPATEN GARUT	66,25	66,65	68,89	68,50	B
25	KABUPATEN KUNINGAN	53,03	54,75	56,78	68,22	B
26	KABUPATEN CIREBON	56,18	56,81	56,95	67,83	B
27	KABUPATEN CIANJUR	59,65	60,25	62,39	64,86	B
RATA-RATA		60,69	61,33	63,36	75,61	

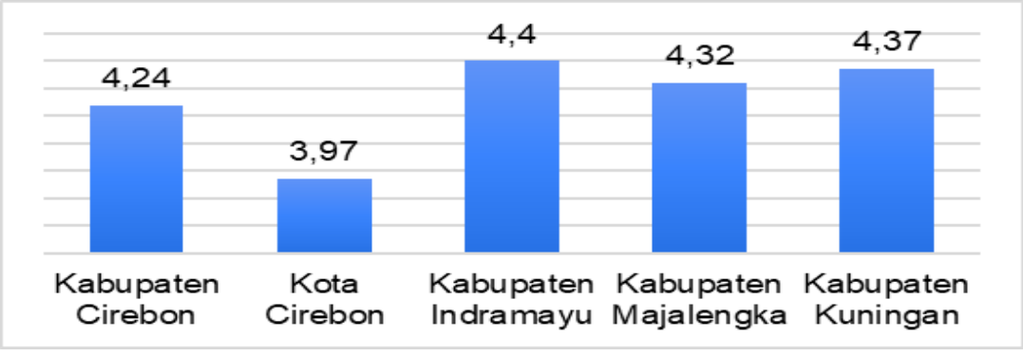
Gambar 2.66 Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023

Sumber : Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2020-2023 dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, *data yang dikelola dalam SIPD*

Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, maka indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon tahun 2021 (56,81) dan 2022 (56,95) relatif rendah dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya yaitu peringkat terendah ketiga dari 27 Kabupaten/kota Di Jawa Barat. Pada tahun 2023 nilai indeks reformasi .birokrasi Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan menjadi 67,83 naik 11 poin. Namun dengan nilai tersebut, justru mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat terendah kedua dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Hal yang membuat lemah adalah nilai indeks reformasi birokrasi tematik yang poinnya 5 dari total nilai 20. Hal ini menjadi permasalahan serius dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan general.

2.1.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Gambar 2.67 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

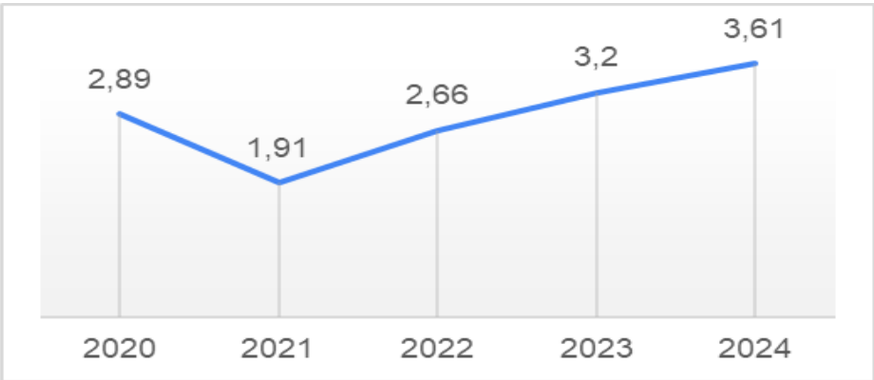
Indeks pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di sekitar di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kabupaten Cirebon juga memperoleh peringkat A- pada tahun 2024 kecuali Kota Cirebon yang memperoleh peringkat B berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah tahun 2024.

Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan

mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

2.1.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0.98 poin menjadi hanya 1,91 dengan predikat cukup. Nilai SPBE meningkat kembali pada tahun 2022, nilai SPBE meningkat menjadi 2,66 dengan predikat baik dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 3,61 dengan predikat **"Sangat Baik"**. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan big data sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

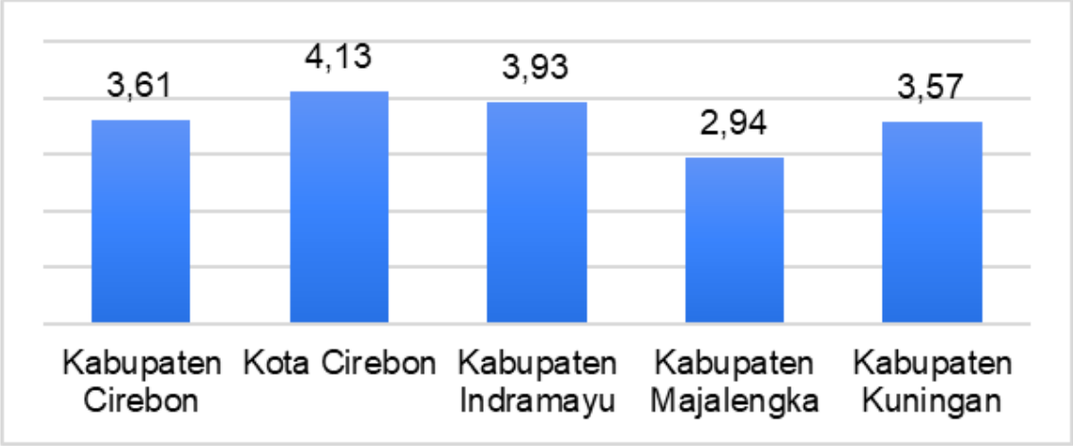


Gambar 2.68 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu memperoleh predikat sangat baik.

Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan adalah pengambilan keputusan oleh stakeholder menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE.

Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE.



Gambar 2.69 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 3,61, menempatkannya di posisi ketiga dibandingkan daerah sekitarnya. Kota Cirebon mencatat nilai tertinggi sebesar 4,13, diikuti Kabupaten Indramayu dengan 3,93. Sementara itu, Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 3,57, sedikit di bawah Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat nilai terendah, yaitu 2,94. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon cukup baik, meskipun masih tertinggal dari Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Perlu adanya penguatan lebih lanjut dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar Kabupaten Cirebon mampu bersaing dan mencapai indeks yang lebih tinggi.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Perubahan dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, telah dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek, yaitu 1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan 2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Oleh karena itu, dilakukan

penyesuaian dalam penyajian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal yang harus diampu oleh Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menindaklanjuti ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan menetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Cirebon serta membentuk Tim Penerapan Standar Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 069/Kep.324-Pem/2022 tanggal 20 Juni 2022. Berikut penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Cirebon.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

2) Pendidikan Dasar

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).

3) Pendidikan Kesetaraan

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.36
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	120.000	75.210	50,14	84.633	83.971	99,22	86.648	70.603	81,48
2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	340.160	278.819	65,57	348.023	341.647	98,17	371.626	354.854	95,49
3	Persentase Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	50.729	15.718	24,79	9.299	8.026	86,31	18.057	15.004	83,09

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat dibagi berdasarkan kewenangan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi terdiri atas:

Tabel 2.37
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	48.402	46.244	76,43	44.132	43.331	98,18	41.098	39.451	95,99
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	46.333	43.185	74,57	43.898	42.687	97,24	41.098	38.096	92,70
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	46.096	43.077	74,84	43.750	42.345	96,79	39.522	37.847	95,76
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	146.117	145.546	79,69	154.850	154.850	100,00	155.269	155.269	100,00
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	331.645	322.796	77,87	353.478	348.745	98,66	353.478	349.949	99,00
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	1.396.479	1.215.635	69,64	976.316	938.435	96,12	976.316	947.515	97,05
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	198.319	161.288	65,06	214.063	189.202	88,39	239.263	234.157	97,87
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	596.367	417.576	56,02	88.047	79.517	90,31	91.709	91.709	100
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	20.674	18.853	72,95	14.055	13.380	95,20	21.087	21.087	100

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	3.183	2.906	73,04	3.194	2.920	91,42	3.200	3.200	100,00
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	31.965	29.899	74,83	35.002	34.705	99,15	50.282	38.909	77,38
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	54.201	48.718	71,91	51.541	47.598	92,35	51.541	51.280	99,49

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut disajikan juga tabel penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diikuti aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.38
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Rumah)	Capaian (Runah)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	770.160	767.807	99,69	2.411.302	2.316.084	96,05	7.624	7.624	100,00
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	770.160	613.703	79,69	2.411.302	2.066.040	85,68	6.208	6.208	100,00

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Tabel 2.39
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Rumah)	Capaian (Rumah)	Capaian (%)	Target (Rumah)	Capaian (Rumah)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	500	0	100,00	1	0	100,00	10	10	100,00

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Rumah)	Capaian (Rumah)	Capaian (%)	Target (Rumah)	Capaian (Rumah)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100,00	0	0	100,00	0	0	100,00

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada.

2) Pelayanan informasi rawan bencana

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.40
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	10	0	0,00	137	137	100,00	137	137	100,00
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100	100	100,00	361	361	100,00
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				59	49	83,05	76	76	100,00
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				134.687	134.687	100,00	190.279	190.279	100,00
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				159	143	89,94	140	140	100,00

F. Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan sosial adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

   Dengan indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabupaten

   Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Tabel 2.41
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Cirebon
Tahun 2022-2024

No	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	272	300	72,53	698	698	100,00	211	211	100,00
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	75	75	100,00	66	66	100,00	56	56	100,00
3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	150	150	100,00	570	570	100,00	570	570	100,00
4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	30	30	100,00	59	59	100,00	59	59	100,00
5	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.499	2.499	100,00	1.930	1.930	100,00	1.930	1.930	100,00

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerja sama Pemerintah Daerah (KSD) adalah kesepakatan antara pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersama. KSD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan keterkaitan antar wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga berfungsi untuk menyelaraskan pembangunan antar daerah, mengoptimalkan sinergi potensi antara daerah, antara daerah dengan pihak ketiga, maupun dengan pemerintah daerah atau lembaga luar negeri, serta mendorong peningkatan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, serta memperkuat sinergi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi di tingkat daerah. Kerja sama ini mencakup bidang keuangan, perbankan, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Beberapa bentuk kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan:

1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PERUMDA BPR) Kabupaten Cirebon

   Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PERUMDA BPR dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendukung inklusi keuangan daerah, serta memperkuat intermediasi keuangan lokal. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui layanan kredit yang lebih mudah dan terjangkau.
2) Bank bcj PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda)

   Kerja sama dengan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), yang merupakan entitas perbankan milik daerah, difokuskan pada optimalisasi layanan perbankan kepada masyarakat dan ASN, penguatan fungsi sosial ekonomi BUMD, serta mendukung program-program keuangan daerah, seperti penyaluran bantuan sosial, penyaluran kredit berbunga ringan, dan pembayaran non-tunai berbasis digital.

3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

Dalam penyediaan layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Cirebon menjalin kemitraan erat dengan PDAM Tirta Jati dalam rangka menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan akses air bersih bagi masyarakat. Kerja sama ini meliputi perluasan cakupan layanan air minum, peningkatan kualitas infrastruktur perpipaan, serta upaya perbaikan manajemen distribusi dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD di Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai kecamatan melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini rencana dan proyek pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Cirebon, baik itu lingkup proyek/program yang dibiayai oleh APBN maupun rencana pembangunan infrastruktur oleh APBD Kabupaten:

2.1.7.1. Proyek/Program Strategis Nasional di Kabupaten Cirebon

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Tabel 3.3 memuat daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung proyek strategis nasional tersebut melalui program/proyek strategis kabupaten, diantaranya pembangunan ekosistem pertanian organik, pembangunan ruang kelas baru, Pembangunan RSUD dengan layanan khusus, Program Sanitasi Lingkungan, peningkatan kondisi jaringan irigasi, serta Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi, akses sentra industri dan akses simpul transportasi)

Tabel 2.42
Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

No	Proyek Strategis Nasional	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat
1	Program Makan Bergizi Gratis	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Pembangunan Ruang Kelas Baru
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	• Pembangunan Unit Sekolah Baru; • Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus
5	Program Penuntasan TBC	Program Sanitasi Lingkungan
	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	• Pendidikan berkarakter; • Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	• Pengamanan Mata Air • Reboisasi hutan dan lahan • Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	• Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; • Normalisasi Sungai dan Muara; • Pengamanan Mata Air; • Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi);
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; • Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)
9	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	• Pembangunan Kampung Adat Nelayan; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi
10	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan
	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi

No	Proyek Strategis Nasional	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat
11	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi
12	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat)
13	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Transformasi Birokrasi
14	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Transformasi birokrasi
15	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir);
16	Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan rumah rakyat miskin
17	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	• Pembangunan TPPAS Regional • Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan financial closed); • Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800-2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); • Pembangunan TPPASR Cirebo Raya denga rencana teknologi WtE/RDF (Progres : penyusunan Kajian FS); • Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres telah tersusun DED Fasilitas pengolah sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) • Pengelolaan Sampah Mandiri

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030

2.1.7.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2024-2044

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, terdapat program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis, antara lain dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.43
Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah
Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati -Trusmi	1. Kecamatan Gunung Jati 2. Kecamatan Weru 3. Kecamatan Tengah Tani 4. Kecamatan Plered
Pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok	1. Kecamatan Mundu 2. Kecamatan Beber 3. Kecamatan Greged
Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor Soekarno	Kecamatan Talun
Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang	Kecamatan Dukupuntang
Pelestarian Cagar Budaya Gunung Singkil	Kecamatan Susukan Lebak
Pelestarian Kantor Kecamatan Lemahabang	Kecamatan Lemahabang
Pelestarian Cagar Budaya Masjid Gamel	Kecamatan Plered
Pelestarian Cagar Budaya Pabrik Gula Karansuwung	Kecamatan Karangsembung
Pelestarian Cagar Budaya Situs Batu Tulis Huludayeuh	Kecamatan Dukupuntang
Pelestarian Stasiun Cangkring	Kecamatan Weru
Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan
Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura	1. Kecamatan Astanajapura; 2. Kecamatan Babakan; 3. Kecamatan Beber: 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Depok; 6. Kecamatan Dukupuntang; 7. Kecamatan Gegesik; 8. Kecamatan Gempol; 9. Kecamatan Greged; 10. Kecamatan Jamblang; 11. Kecamatan Kaliwedi; 12. Kecamatan Karangsembung; 13. Kecamatan Karangwareng; 14. Kecamatan Klangenan; 15. Kecamatan Lemahabang; 16. Kecamatan Mundu; 17. Kecamatan Pabedilan; 18. Kecamatan Pabuaran; 19. Kecamatan Palimanan; 20. Kecamatan Pasaleman; 21. Kecamatan Sedong; 22. Kecamatan Sumber; 23. Kecamatan Susukan; 24. Kecamatan Susukan Lebak; 25. Kecamatan Talun; 26. Kecamatan Waled
Perwujudan Kawasan Pertanian Peternakan	1. Kecamatan Ciledug; 2. Kecamatan Karangwareng; 3. Kecamatan Pasaleman; dan 4. Kecamatan Waled
Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Babakan; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Ciwaringin; 6. Kecamatan Depok, 7. Kecamatan Gebang;

Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah
	8. Kecamatan Gempol; 9. Kecamatan Jamblang; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Lemahabang: 12. Kecamatan Losari; 13. Kecamatan Mundu; 14. Kecamatan Pabedilan; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Palimanan; 17. Kecamatan Pangenan; 18. Kecamatan Plered; 19. Kecamatan Plumbon; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Talun 22. Kecamatan Weru
Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kecamatan Sumber, 2. Kecamatan Kedawung, 3. Kecamatan Talun
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kecamatan Arjawinangun 2. Kecamatan Palimanan 3. Kecamatan Lemahabang 4. Kecamatan Ciledug
Pengembangan Kawasan perdagangan Kedawung	Kecamatan Kedawung
Pengembangan Kawasan perdagangan Sumber	Kecamatan Sumber

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan pada masa RPJMD sebelumnya. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui peraturan Pemerintah ini, struktur belanja daerah yang awalnya diklasifikasi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, dirubah menjadi 4 (empat) akun yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Perubahan struktur belanja ini juga diikuti dengan perubahan dari sisi kodefikasi. Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah dan keuangan daerah, menetapkan struktur kode mulai dari program, kegiatan, sub kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan, organisasi dan termasuk juga kodefikasi fungsi.

Perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah ini penting dicatat ketika melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah sendiri, dalam konteks

penyusunan RPJMD, sangat dibutuhkan untuk melihat kemampuan pendanaan Kabupaten Cirebon untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah memuat analisis terhadap pendapatan, analisis terhadap belanja, dan analisis terhadap pembiayaan. Analisis kinerja masa lalu ini, menjadi acuan untuk melakukan proyeksi kemampuan pendanaan di masa datang.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama beberapa tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

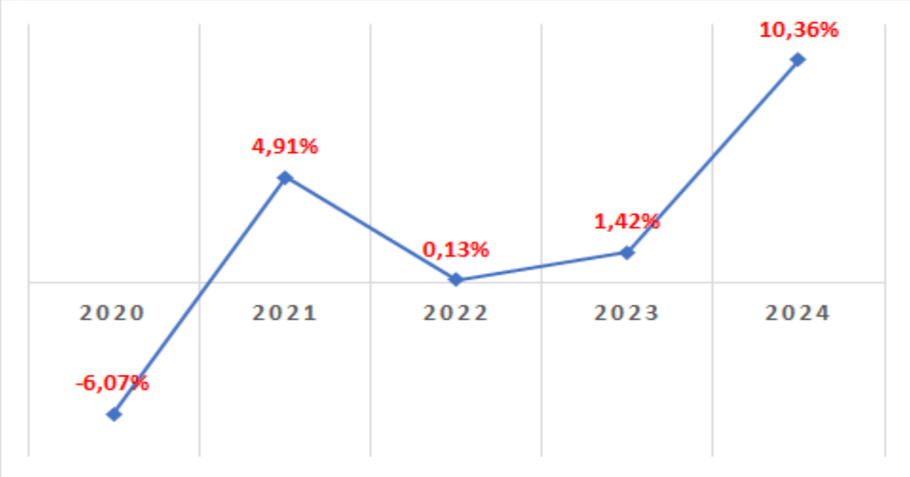
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah.

1) Kinerja pengelolaan Pendapatan Kabupaten Cirebon

Pendapatan daerah dibagi dalam 3 kategori: pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada analisis terkait masing masing kelompok pendapatan. Time frame yang digunakan sebanyak 5 tahun untuk dapat melihat pola pendapatan serta dapat melakukan proyeksi pendapatan dengan lebih akurat.

Pada tahun 2020, Kabupaten Cirebon mencatatkan total pendapatan daerah sebesar 3.770.704.066.601,01 dalam kurun waktu 5 tahun di tahun 2024, total pendapatan Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 4,118,065,753,301.00. Dengan kata lain, dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat peningkatan pendapatan sebesar 17,57%, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 4,20% per tahunnya.



Gambar 2.70 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2020-2024

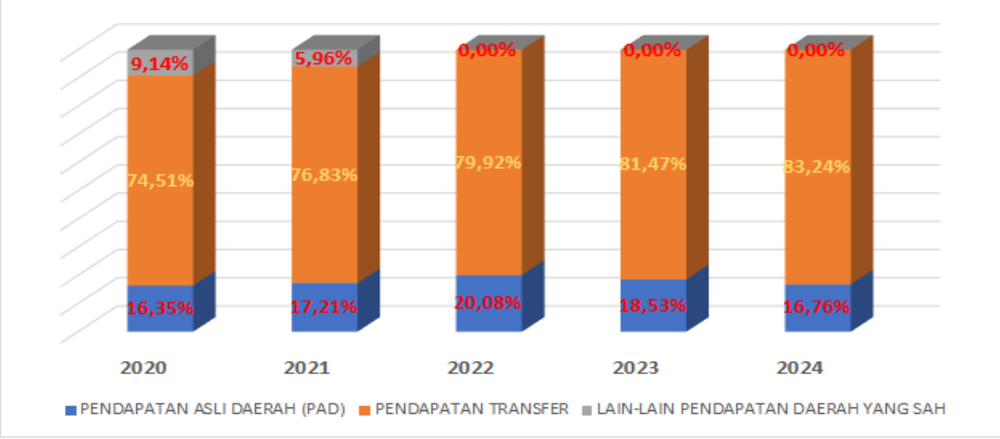
Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Cirebon didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Di setiap tahunnya, lebih dari 70% pendapatan Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Komposisi pendapatan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	**PENDAPATAN**					
4.1	**Pendapatan asli daerah**	**616.573.116.956,01**	**680.580.760.013,27**	**795.263.789.810,52**	**744.524.538.980,82**	**772.488.538.477,28**
4.1.01	Pajak daerah	223.610.292.769,00	263.053.751.571,00	308.442.409.838,00	328.734.776.136,00	348.566.584.116,00
4.1.02	Retribusi daerah	31.122.706.929,00	31.964.789.501,00	27.897.867.887,00	32.401.830.073,00	385.446.568.081,28
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.312.545.336,00	13.072.073.353,00	13.702.211.968,00	14.458.949.796,00	14.683.818.841,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	352.527.571.922,01	372.490.145.588,27	445.221.300.117,52	368.928.982.975,82	23.791.567.439,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.809.568.527.462,00**	**3.039.308.119.975,00**	**3.165.686.559.063,00**	**3.272.743.455.707,00**	**3.692.146.542.020,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.526.434.600.243,00	2.616.119.457.786,00	2.706.565.604.541,00	2.796.514.952.898,00	3.142.049.119.624,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.133.927.219,00	423.188.662.189,00	459.120.954.522,00	476.228.502.809,00	550.097.422.396,00
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**344.562.422.183,00**	**235.799.044.000,00**	**-**	**-**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	233.724.450.000,00	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	110.837.972.183,00	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		235.799.044.000,00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)		**3.770.704.066.601,01**	**3.955.687.923.988,27**	**3.960.950.348.873,52**	**4.017.267.994.687,82**	**4.464.635.080.497,28**

Sumber : LRA Tahun 2020-2023 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

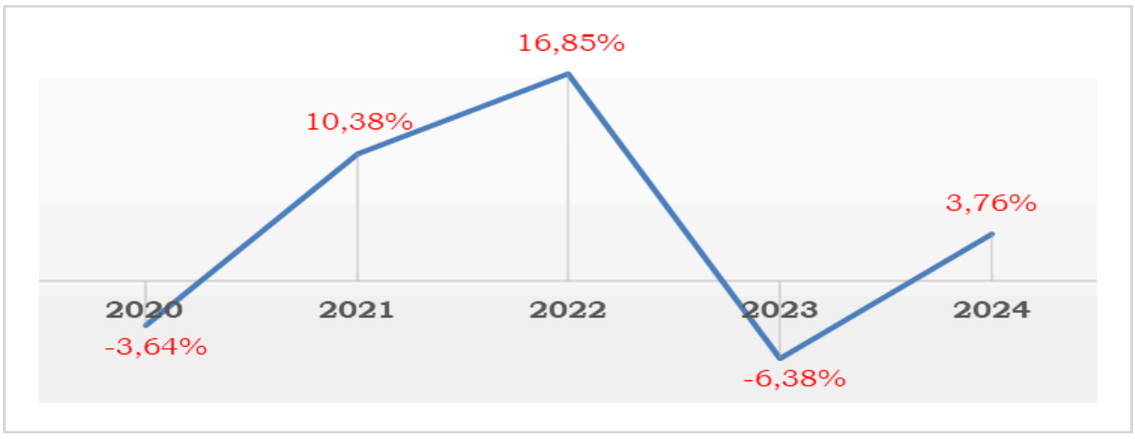
Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari PAD mengalami fluktuasi di tahun 2020 pertumbuhan pendapatan daerah bernilai negatif namun kembali meningkat tahun 2021. di tahun 2022 kembali melambat namun pada tahun berikutnya meningkat sangat tinggi. Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.71 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Daerah Proporsi Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pendapatan Asli Daerah mengalami tren positif meningkat di tiap tahunya Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

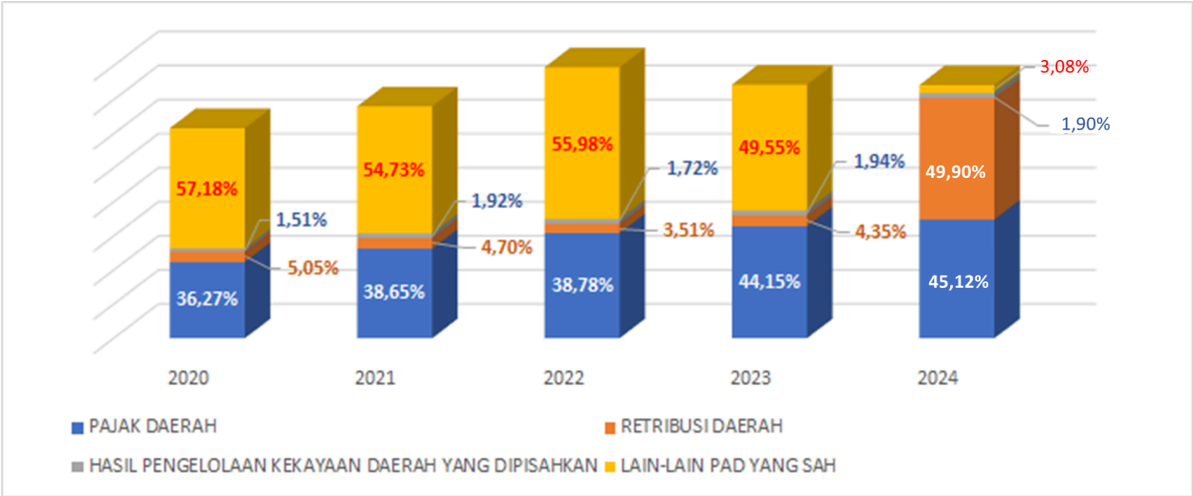


Gambar 2.72 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2018-2023, data yang dikelola dalam SIPD

Pada sektor pendapatan Asli daerah, Kabupaten Cirebon memperlihatkan perkembangan dalam pengelolaan PAD. Di tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp. 616,573,116,956.01 dan pada tahun 2024 realisasi PAD ini meningkat menjadi Rp. 772.488.538.477,28. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan PAD sebesar 25,29%.

Dilihat dari tren pertumbuhan, Pendapatan Asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar rata rata 4,19% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terjadi penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai dengan -3,64% akibat pandemi covid 19. Namun di tahun 2021, Kabupaten Cirebon berhasil mencatatkan pertumbuhan PAD yang positif di angka 10,38%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor pajak yang secara umum dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

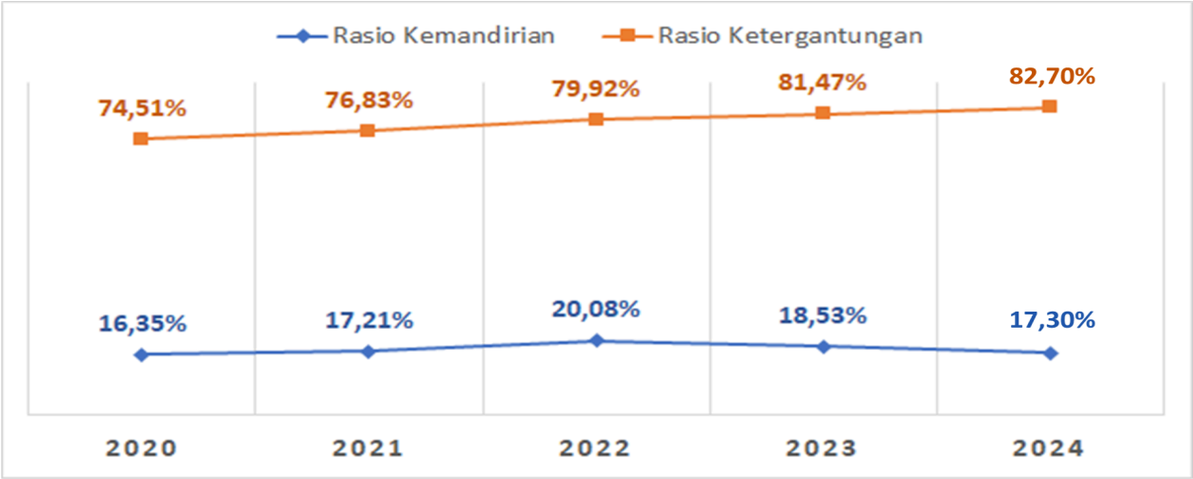


Gambar 2.73
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

Kontribusi utama PAD di Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan pajak daerah. Di tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar Rp 616,57 miliar atau 36,27% dari total PAD di tahun tersebut. Potret ini berubah di tahun 2024. Pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan signifikan dibanding 4 tahun lalu, sehingga Kabupaten Cirebon mampu mencatatkan realisasi pendapatan pajak di tahun 2024 sebesar Rp 348,57 miliar atau sebesar 45,12% dari total Pendapatan Asli daerah. Pendapatan dari pajak ini berkontribusi sebesar 7.86% terhadap total pendapatan daerah Cirebon tahun 2024.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan

pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.



Gambar 2.74 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : Data diolah Bappelitbangda (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 16,35% dikategorikan kemampuannya rendah sekali. kemudian pada tahun berikutnya sempat mengalami peningkatan kemandirian namun pada tahun 2024 kembali turun di angka 17,30%. Kemandirian keuangan kabupaten Cirebon masuk pada kategori "*instruktif*" artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada kabupaten Cirebon pada 2020 dengan besar persentase 74,51% dikategorikan ketergantungan sedang, pada tahun 2024 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami peningkatan

dengan besarnya persentase 82,70% dikategorikan ketergantungan tinggi. Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 79,19% dikategorikan ketergantungannya tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Cirebon masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Berikut ini disajikan grafik rata–rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1) Kinerja pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024

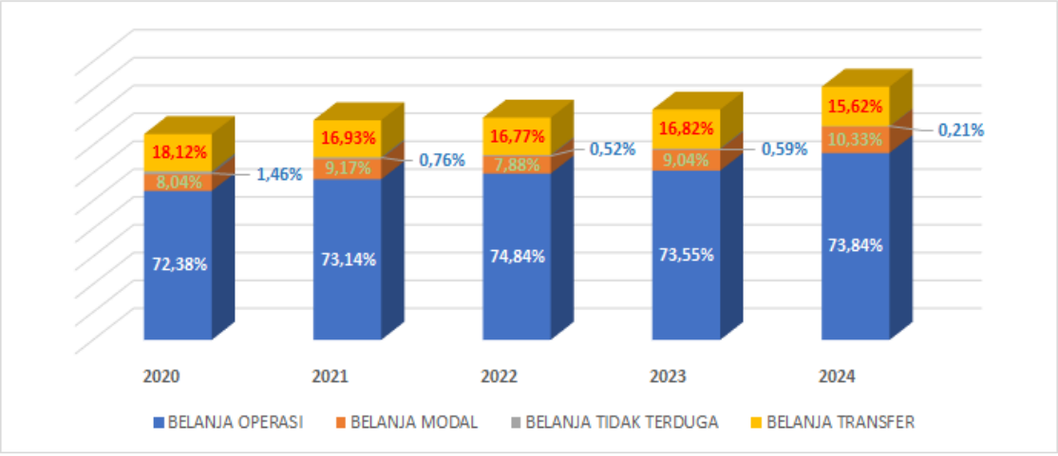
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	**BELANJA**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.673.701.396.925,00**	**2.883.934.084.927,00**	**2.985.149.828.252,00**	**3.039.524.743.697,47**	**3.410.559.545.501,00**
5.1.01	Belanja pegawai	1.779.497.848.207,00	1.662.463.933.066,00	1.561.612.475.084,00	1.609.712.189.701,00	1.849.376.765.355,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.795.538.818,00	1.084.743.606.859,00	1.315.507.381.917,00	1.266.210.801.307,47	1.331.187.948.343,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.483.165.900,00	121.940.891.002,00	83.174.048.251,00	139.814.249.339,00	218.601.651.803,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	924.844.000,00	14.785.654.000,00	24.855.923.000,00	23.787.503.350,00	11.393.180.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**296.952.045.604,00**	**361.539.825.251,00**	**314.155.622.794,00**	**373.623.487.361,00**	**478.767.157.553,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	3.856.430.287,00	2.691.148.916,00	250.600.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.412.280.354,56	128.376.893.068,00	90.156.368.652,00	140.514.929.375,00	148.888.092.294,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.175.480.974,00	83.206.661.924,00	43.119.333.179,00	56.348.808.375,00	115.833.547.378,00

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	72.994.260.369,44	145.616.768.872,00	177.695.224.847,00	175.083.760.411,00	213.012.113.581,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.023.906,00	483.071.100,00	493.547.200,00	1.425.389.200,00	1.033.404.300,00
5.2.06	Belanja Modal BLUD	-	-	-		
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**53.968.319.820,00**	**29.784.447.691,00**	**20.656.013.104,00**	**24.313.927.365,00**	**9.344.507.869,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.986.319.820,00	29.784.447.691,00	20.656.013.104,00	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**669.574.737.908,00**	**667.552.823.974,00**	**668.961.158.476,00**	**695.288.264.205,00**	**709.885.059.607,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.867.504.952,00	27.316.112.874,00	24.700.989.476,00	28.784.091.205,00	34.252.775.007,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	642.707.232.956,00	640.236.711.100,00	644.260.169.000,00	666.504.173.000,00	675.632.284.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)		**3.694.214.500.257,00**	**3.942.811.181.843,00**	**3.988.922.622.626,00**	**4.132.750.422.628,47**	**4.608.556.270.530,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**76.489.566.344,01**	**1.287.674.214.527,00**	**(27.972.273.752,00)**	**(115.482.427.940,65)**	**(143.921.190.032,72)**

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Realisasi Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.694,21 miliar meningkat menjadi Rp. 4.608,55 miliar di tahun 2024.

Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.75 Proporsi Masing- Masing Komponen Belanja Daerah Kabupaten CirebonTahun 2020-2024

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

2) Analisis Celah Fiskal Tahun 2020-2024

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia. Berdasarkan data

yang diperoleh, tren celah fiskal dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berikut adalah rincian data celah fiskal dari tahun 2020 hingga 2024:



Gambar 2.76 Celah Fiskal Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024 (Data diolah 2025), yang dikelola dalam SIPD

Nilai celah fiskal (*fiscal gap*) yang dimiliki Kabupaten Cirebon relatif tinggi hal itu menunjukan bahwa tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal tidak berjalan seimbang. Dengan meningkatnya celah fiskal hampir setiap tahunnya hal tersebut menunjukan bahwa kapasitas fiskal daerah tersebut tidak cukup untuk menutupi besarnya kebutuhan fiskal, Kabupaten Cirebon juga menerima dana perimbangan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kapasitas fiskal merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana perimbangan. Apabila kapasitas fiskal yang dimiliki daerah kecil maka bantuan dana perimbang nya pun besar, begitu pula sebaliknya.

Dengan tingginya nilai celah fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon juga menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon belum bisa menciptakan kemandirian daerah dalam hal keuangan hal tersebut disebabkan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang tergolong tinggi. Dengan rendahnya nilai kapasitas fiskal daerah yang dimiliki sehingga daerah tersebut terus mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat, hal tersebut juga menunjukan Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menjalankan konsep desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

3) Kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan Pembangunan daerah. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46
Hasil Analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024 (audited)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	288.834.438.356,06	365.329.668.174,07	378.206.410.319,34	344.957.927.434,86	184.475.499.831,21
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	40.000.000.000,00
6.1.03	Penerimaan Piutang Daerah					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**288.834.438.356,06**	**365.329.668.174,07**	**378.206.410.319,34**	**344.957.927.434,86**	**224.475.499.831,21**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		-	-	-	-

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024 (audited)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	**40.000.000.000,00**	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		-	5.276.261.600,00	4.999.999.663,00	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	**5.276.261.600,00**	**44.999.999.663,00**	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (6.1-6.2)		**288.834.438.356,06**	**365.329.668.174,07**	**372.930.148.719,34**	**299.957.927.771,86**	**224.475.499.831,21**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		**288.834.438.356,06**	**365.324.004.700,07**	**372.930.148.719,34**	**184.475.499.831,21**	**80.554.309.798,49**

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 80.554.309.798,49 merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan Tahun 2024 adalah senilai Rp 40.000.000.000,00 dikurangi dengan jumlah belanja Rp 143.921.190.032,72 ditambah dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp 184.475.499.831,21 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 0,00.

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 2.47
Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	300.461.473.382,00	300.819.842.653,00	232.484.503.018,00	126.026.094.434,00	38.755.724.764,00	-34,41%
Kas di Bendahara Pengeluaran	196.855.282,00	-	520.468,00	-	-	-
Kas di BLUD	33.201.262.064,07	59.252.574.230,34	112.382.266.300,86	51.512.729.181,21	34.661.704.463,49	20,31%
Kas Dana BOS	1.404.689.622,00	76.135.449,00	90.637.648,00	79.079.064,00	0,00	-47,07%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.681.432.863,00	18.057.857.987,00	-	-	-	-
Kas Lainnya	-	-	-	6.857.597.152,00	-	-
Kas Dana BOSP	-	-	-	-	76.511.267,00	-
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	7.060.369.304,00	-
Piutang Pajak Daerah	81.502.715.912,50	84.506.640.332,50	91.116.986.190,50	94.605.736.132,50	113.408.970.132,50	8,80%
Piutang Retribusi Daerah	3.854.137.000,00	1.789.850.250,00	46.635.000,00	46.635.000,00	3.660.732.206,00	1915,51%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	4.785.180.999,00	14.459.082.286,94	14.683.818.841,00	15.111.908.406,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	33.204.444.664,00	110.266.913.540,00	8.758.412.747,28	13.965.499.397,00	6.772.465.178,00	35,45%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.808.836.714,00	27.395.947.433,00	-	-	20.086.855.000,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	18.709.104.016,00	29.971.859.887,00	24.813.936.419,00	14.937.828.270,00	12.960.076.119,00	-
Piutang Pendapatan Lainnya	1.871.359.509,00	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya	2.198.236.135,00	510.423.050,00	510.423.050,00	558.583.050,00	510.423.050,00	-18,99%
Penyisihan Piutang	(53.628.801.297,41)	(58.487.470.110,72)	(63.155.791.416,82)	-	-	7,02%
Beban Dibayar Dimuka	1.597.295.066,64	1.477.031.291,76	1.448.120.562,00	845.554.763,55	849.388.931,06	-12,66%
Persediaan	66.512.942.245,07	58.798.705.242,69	49.431.947.893,85	43.415.760.836,61	57.637.452.766,78	-1,74%
JUMLAH ASET LANCAR	**536.575.983.177,87**	**639.221.492.234,57**	**472.387.680.167,61**	**301.171.819.182,03**	**240.416.507.673,36**	-18,46%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.099.219.101,00	7.049.459.198,00	7.127.734.804,00	7.160.297.203,00	6.570.930.686,00	24,36%
Investasi Jangka Panjang Permanen	162.000.945.275,17	156.709.973.232,48	163.619.546.828,87	198.881.017.482,16	200.351.638.478,46	7,96%

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**169.100.164.376,17**	**163.759.432.430,48**	**170.747.281.632,87**	**206.041.314.685,16**	**206.922.569.164,46**	8,38%
ASET TETAP						
Tanah	517.118.488.387,50	493.824.718.866,50	553.277.798.623,30	578.445.158.914,30	683.911.267.414,30	7,27%
Peralatan dan Mesin	968.951.924.847,90	1.088.721.689.338,16	1.151.880.888.991,41	1.249.483.790.579,97	1.360.219.682.427,55	8,88%
Gedung dan Bangunan	1.717.013.576.398,14	1.785.223.134.098,46	1.884.471.379.491,46	2.098.357.958.411,48	2.263.876.068.204,93	7,18%
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.366.679.541.930,50	2.545.083.698.908,42	2.759.533.511.415,42	2.986.258.170.632,45	3.228.553.228.262,45	8,07%
Aset Tetap Lainnya	290.390.555.706,09	293.135.483.628,09	293.356.828.268,09	294.355.453.468,09	232.832.567.027,09	-24,66%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.860.760.869,36	285.673.596.973,36	230.083.030.562,36	183.480.025.233,04	198.973.608.662,04	-8,52%
Akumulasi Penyusutan	(2.315.684.976.151,29)	(2.566.857.855.688,96)	(2.811.247.120.309,49)	3.076.172.700.995,73	(3.363.391.465.397,61)	9,78%
JUMLAH ASET TETAP	**3.832.329.871.988,20**	**3.924.804.466.124,03**	**4.061.356.317.042,55**	**4.314.207.856.243,60**	**4.604.974.956.600,75**	4,68%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	40.000.000.000,00	0,00	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	40.000.000.000,00	**0,00**	-
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	13.287.663.014,00	13.384.193.454,00	13.346.393.454,00	0,00	-
Aset Tidak Berwujud	9.712.933.849,65	40.333.200.494,69	43.081.769.080,69	46.955.014.250,69	30.310.060.279,50	73,90%
Aset Lain-lain	123.981.472.094,67	124.162.298.016,07	95.769.007.687,80	82.709.549.136,13	201.212.859.280,88	26,73%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(95.821.523.530,75)	(31.730.852.135,69)	(35.553.500.726,26)	(39.025.244.304,69)	(23.745.860.949,50)	-21,06%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	(51.562.247.544,01)	(60.333.977.249,51)	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	13.117.976.670,00	21.797.469.000,00	1.324.259.000,00	-
JUMLAH ASET LAINNYA	**133.694.405.944,32**	**146.052.309.389,07**	**129.799.446.166,23**	**122.809.955.197,61**	**148.767.340.361,37**	3,36%
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	**13.346.393.454,00**	-
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	13.346.393.454,00	-
JUMLAH ASET	**4.671.700.425.486,57**	**4.873.837.700.178,15**	**4.834.290.725.009,26**	**4.984.230.945.308,40**	**5.214.427.767.253,94**	2,69%

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	616.045.039,00	-	-	-		
Pendapatan Diterima Dimuka	2.672.256.716,42	3.153.919.179,33	2.709.230.939,67	2.901.411.235,34	3.179.530.723,34	5,15%
Utang Belanja	68.167.209.532,33	142.936.142.943,34	77.763.951.339,24	62.347.101.596,80	85.919.795.369,36	18,43%
Utang Jangka Pendek Lainnya	398.532.400,00	2.157.651.919,00	-	6.962.916.795,00	4.748.383.000,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**71.854.043.687,75**	**148.247.714.041,67**	**80.473.182.278,91**	**72.211.429.627,14**	**93.847.709.092,70**	17,85%
JUMLAH KEWAJIBAN	**71.854.043.687,75**	**148.247.714.041,67**	**80.473.182.278,91**	**72.211.429.627,14**	**93.847.709.092,70**	17,85%
EKUITAS						
EKUITAS	4.599.846.381.798,82	4.725.589.986.136,48	4.753.817.542.730,35	4.912.019.515.681,26	5.120.580.058.161,24	2,63%
JUMLAH EKUITAS	**4.599.846.381.798,82**	**4.725.589.986.136,48**	**4.753.817.542.730,35**	**4.912.019.515.681,26**	**5.120.580.058.161,24**	2,63%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.671.700.425.486,57**	**4.873.837.700.178,15**	**4.834.290.725.009,26**	**4.984.230.945.308,40**	**5.214.427.767.253,94**	2,69%

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.48
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (Current ratio)	7,47	4,31	5,87	4,07	2,32
2	Rasio Cepat (quick ratio)	6,54	3,92	5,26	3,47	1,67
3	Rasio Total Utang Terhadap Aset	0,015	0,03	0,017	0,014	0,017
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,016	0,031	0,017	0,015	0,017

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Hasil perhitungan rasio keuangan yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yaitu:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 7,47 dan sampai dengan periode tahun 2024 mencapai sebesar 2,32.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. *Quick ratio* pada tahun 2020 sebesar 6,54 dan pada tahun 2024 *quick ratio* sebesar 1,67. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut:

1) Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,015 dan pada tahun 2024 sebesar 0,017 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

2) Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, Dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebesar 0,016 serta periode tahun 2024 sebesar 0,017. Dari perhitungan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Cirebon periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

a) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Di samping itu, retribusi daerah dan penetapan tarif seharusnya tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan sesuai dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

1) ***Perbaikan Manajemen.*** Setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat direalisasikan melalui perbaikan manajemen. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur (biaya dan waktu).
2) ***Peningkatan Investasi.*** Peningkatan investasi daerah dapat didorong dengan membangun iklim usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan:
   a. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
   b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi;
   c. Menyederhanakan prosedur perizinan;
   d. Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih;
   e. Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
   f. Menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja;
   g. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
   h. Meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.
3) ***Optimalisasi Aset Daerah.*** Penggunaan aset daerah ditingkatkan untuk menambah PAD dengan perbaikan administrasi aset, peningkatan perputaran (*turn over*), dan bekerjasama dengan swasta. Perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru diperlukan dalam rangka optimalisasi aset daerah.

b) **Peningkatan Dana Perimbangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah ditargetkan tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada kebijakan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian upaya untuk peningkatan pendapatan dari pendapatan transfer tetap dilakukan melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan dari dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

2. Kebijakan Belanja

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia dan terbatas harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah harus tepat sasaran dan diupayakan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah.

b) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, peningkatan daya beli, kesehatan, dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon.

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang meliputi masukan, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung difokuskan pada belanja modal daripada belanja pegawai.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja daerah ditatausahakan, dipublikasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi dilaksanakan agar masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran, dan hasilnya.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah dan Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Atau secara ringkas adalah merupakan komitmen perusahaan dan BUMN untuk berperan serta dalam pembangunan daerah berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Dimana program tersebut dibiayai oleh perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Pembiayaan Program Kepedulian Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya program ini di bagi menjadi 1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan 2. Program Bina Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah: a. mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon; b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon; c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang: a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Bina lingkungan, d. Peningkatan daya beli, e. Sosial, f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi

penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 2.49
Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.716.071.212.577,00	1.662.463.933.066,00	1.561.612.475.084,00	1.609.712.189.701,00	1.849.376.765.355,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	876.226.057.315,00	857.082.099.427,00	894.405.161.471,00	950.155.217.343,00	1.135.280.675.723,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	295.013.329.500,00	292.579.252.493,00	314.395.445.600,00	307.564.190.264,00	347.908.912.500,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	348.802.450.684,00	417.946.669.554,00	312.396.295.275,00	303.425.660.714,00	318.345.168.457,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.020.775.783,00	38.551.655.193,00	38.341.763.244,00	46.280.690.269,00	45.888.052.409,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	418.798.291,00	637.716.190,00	749.627.494,00	980.461.111,00	727.896.266,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.233.120.000,00	1.233.120.000,00	1.233.120.000,00	1.233.120.000,00	1.200.360.000,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	62.153.423.350,00	-	-	-	-
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	103.203.257.654,00	54.433.420.209,00	91.062.000,00	72.850.000,00	25.700.000,00

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 hal tersebut disesuaikan dengan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 2.50
Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Cirebon

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)
1	Tahun Anggaran 2020	1.716.071.212.577,00	3.694.214.500.257,00
2	Tahun Anggaran 2021	1,662,463,933,066.00	3,942,811,181,843.00
3	Tahun Anggaran 2022	1,561,612,475,084.00	3.994.198.884.226,00
4	Tahun Anggaran 2023	1.609.712.189.701,00	4.087.750.422.965,47
5	Tahun Anggaran 2024	1.849.376.765.355,00	4.608.556.270.530,00

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan biaya pegawai secara bertahap. Di tahun 2020, belanja pegawai mencapai 46.45% dari total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan). Proporsi ini menurun di tahun 2021 menjadi 42,16%, dan pada tahun 2022 proporsi belanja pegawai tersebut menyentuh angka 39,10%. Pada tahun 2023,

proporsi belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja Kembali mengalami sedikit penurunan, menjadi 39,38%. Pada tahun 2024, proporsi belanja pegawai Kembali mengalami peningkatan, menjadi 40,67%. Meskipun begitu, proporsi belanja pegawai ini sesungguhnya sudah hampir mencapai titik ideal yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

2.2.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Cirebon ditinjau berdasarkan surplus maupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah.

Tabel 2.51
Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi
2020	(287,834,438,356.06)	76,551,711,514.01
2021	(364,324,004,700.07)	12,876,742,145.27
2022	(372,929,902,319.00)	(27,972,221,284.48)
2023	(299.957.927.434,86)	(115.482.427.940,65)
2024	(224.475.499.831,00)	(143.921.190.032,72)

Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon dalam periode tahun 2020-2024 berfluktuasi mengalami surplus/defisit sesuai tabel diatas terjadi kabupaten Cirebon mengalami peningkatan defisit setiap tahun

2.2.4 Kerangka Pendanaan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode 2026-2030 bergantung pada anggaran selama dua tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Prioritas pendanaan pembangunan periode 2026 sampai dengan 2030 diarahkan pada:

1. Pendanaan untuk pemenuhan standar pelayananan minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2. Pencapaian target yang belum terpenuhi pada periode RPJMD sebelumnya
3. Dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas provinsi sebagai bentuk sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan.

Tabel 2.52
Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

No	RINCIAN	APBD 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4	**PENDAPATAN**	**4.628.091.592.372,00**	**4.795.642.946.112,03**	**4.958.838.281.499,95**	**5.132.447.545.352,15**	**5.317.375.676.281,07**	**5.514.326.889.267,14**
4,1	**PAD**	**1.067.915.168.215,00**	**1.201.933.890.059,45**	**1.273.844.031.008,21**	**1.352.187.967.254,84**	**1.437.595.758.040,69**	**1.490.843.120.192,04**
4.1.01	Pajak Daerah	587.949.082.583,00	624.316.255.052,33	686.747.880.557,56	755.422.668.613,32	830.964.935.474,65	861.743.191.884,23
4.1.01.09.	*Pajak Reklame*	*6.758.000.000,00*	*7.176.011.285,04*	*7.893.612.413,54*	*8.682.973.654,90*	*9.551.271.020,39*	*9.905.042.227,75*
4.1.01.12.	*Pajak Air Tanah*	*4.913.725.440,00*	*5.217.660.433,42*	*5.739.426.476,76*	*6.313.369.124,43*	*6.944.706.036,88*	*7.201.932.225,33*
4.1.01.13.	*Pajak Sarang Burung Walet*	*54.000.000,00*	*57.340.131,61*	*63.074.144,77*	*69.381.559,24*	*76.319.715,17*	*79.146.534,52*
4.1.01.14.	*Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*	*12.590.400.000,00*	*13.369.170.240,18*	*14.706.087.264,20*	*16.176.695.990,62*	*17.794.365.589,68*	*18.453.454.226,74*
4.1.01.15.	*Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)*	*105.552.250.000,00*	*112.081.109.375,73*	*123.289.220.313,31*	*135.618.142.344,64*	*149.179.956.579,10*	*154.705.459.231,19*
4.1.01.16.	*Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*	*106.901.081.138,00*	*113.513.371.504,75*	*124.864.708.655,23*	*137.351.179.520,75*	*151.086.297.472,82*	*156.682.409.420,60*
4.1.01.19.	*Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	*153.246.995.412,00*	*162.725.979.354,06*	*178.998.577.289,47*	*196.898.435.018,42*	*216.588.278.520,26*	*224.610.529.865,67*
4.1.01.20.	*Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*	*118.753.341.099,00*	*126.098.744.578,64*	*138.708.619.036,50*	*152.579.480.940,16*	*167.837.429.034,17*	*174.053.989.090,33*
4.1.01.21.	*Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*	*79.179.289.494,00*	*84.076.868.148,90*	*92.484.554.963,79*	*101.733.010.460,17*	*111.906.311.506,19*	*116.051.229.062,09*
4.1.02	Restribusi	455.372.410.642,00	516.465.036.553,17	524.212.012.101,47	532.075.192.282,99	540.056.320.167,23	560.059.561.204,38
4.1.02.01.	*Retribusi Jasa Umum*	*433.691.075.488,00*	*491.874.939.983,54*	*499.253.064.083,30*	*506.741.860.044,54*	*514.342.987.945,21*	*533.393.828.347,28*
4.1.02.02.	*Retribusi Jasa Usaha*	*6.475.335.154,00*	*7.344.064.174,40*	*7.454.225.137,01*	*7.566.038.514,07*	*7.679.529.091,78*	*7.963.972.520,62*
4.1.02.03.	*Retribusi Perizinan Tertentu*	*15.206.000.000,00*	*17.246.032.395,23*	*17.504.722.881,16*	*17.767.293.724,38*	*18.033.803.130,25*	*18.701.760.336,48*
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.853.360.903,00	18.294.195.793,42	19.382.859.648,75	20.536.308.477,58	21.758.397.549,65	22.564.310.663,74
4.1.03.02.	*Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD*	*15.853.360.903,00*	*18.294.195.793,42*	*19.382.859.648,75*	*20.536.308.477,58*	*21.758.397.549,65*	*22.564.310.663,74*
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	8.740.314.087,00	42.858.402.660,53	43.501.278.700,44	44.153.797.880,94	44.816.104.849,16	46.476.056.439,70
4.1.04.01.	*Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan*	*500.000.000,00*	*2.451.765.590,68*	*2.488.542.074,54*	*2.525.870.205,66*	*2.563.758.258,75*	*2.658.717.751,85*
4.1.04.05.	*Jasa Giro*	*3.564.123.887,00*	*17.476.792.614,15*	*17.738.944.503,37*	*18.005.028.670,91*	*18.275.104.100,98*	*18.951.998.896,32*
4.1.04.07.	*Pendapatan Bunga*	*4.656.190.200,00*	*22.831.773.832,07*	*23.174.250.439,55*	*23.521.864.196,14*	*23.874.692.159,08*	*24.758.991.081,46*
4.1.04.08.	*Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah*	*20.000.000,00*	*98.070.623,63*	*99.541.682,98*	*101.034.808,23*	*102.550.330,35*	*106.348.710,07*

No	RINCIAN	APBD 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.546.737.384.157,00**	**3.593.709.056.052,58**	**3.684.994.250.491,73**	**3.780.259.578.097,32**	**3.879.779.918.240,37**	**4.023.483.769.075,08**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.947.759.000,00	3.074.087.879.856,21	3.136.390.943.000,83	3.200.352.723.839,20	3.266.030.437.816,25	3.387.001.513.688,63
4.2.01.05.	*Dana Desa*	*476.017.395.745,17*	*445.190.923.054,44*	*454.213.683.390,03*	*463.476.660.040,19*	*472.988.138.973,87*	*490.507.229.850,68*
4.2.01.07.	*Dana Bagi Hasil (DBH)*	*104.438.184.282,80*	*97.674.858.269,00*	*99.654.451.273,57*	*101.686.747.721,23*	*103.773.565.553,00*	*107.617.252.901,02*
4.2.01.08.	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	*1.824.901.145.021,78*	*1.706.722.133.470,68*	*1.741.312.561.918,98*	*1.776.823.904.248,65*	*1.813.287.926.261,46*	*1.880.450.616.714,80*
4.2.01.09.	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	*881.591.033.950,26*	*824.499.965.062,08*	*841.210.246.418,26*	*858.365.411.829,15*	*875.980.807.027,92*	*908.426.414.222,13*
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	259.789.625.157,00	519.621.176.196,37	548.603.307.490,90	579.906.854.258,12	613.749.480.424,12	636.482.255.386,46
4.2.02.01.	*Pendapatan Bagi Hasil*	*237.371.049.460,00*	*474.780.406.803,51*	*501.261.521.731,83*	*529.863.725.316,62*	*560.785.898.150,31*	*581.556.945.672,66*
4.2.02.02.	*Bantuan Keuangan*	*22.418.575.697,00*	*44.840.769.392,87*	*47.341.785.759,07*	*50.043.128.941,50*	*52.963.582.273,81*	*54.925.309.713,80*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.439.040.000,00**	-	-	-	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	13.439.040.000,00	-	-	-	-	-
5	**BELANJA**	**4.728.637.373.172,00**	**4.955.027.358.658,54**	**5.151.430.877.110,07**	**5.338.055.558.162,82**	**5.549.054.743.424,63**	**5.775.034.781.630,15**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**3.372.410.263.004,00**	**3.729.416.173.854,60**	**3.787.095.745.467,39**	**3.849.064.429.304,86**	**3.915.922.159.710,21**	**4.075.394.408.620,67**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.080.541.333.289,00	2.117.942.266.515,00	2.128.531.977.847,57	2.139.174.637.736,81	2.149.870.510.925,50	2.237.421.966.562,44
5.1.02	Belanja Barang Jasa	1.171.273.028.116,00	1.418.401.617.789,37	1.439.926.762.653,31	1.461.778.565.253,40	1.483.961.982.828,13	1.544.394.939.625,40
5.1.05	Belanja Hibah	111.205.967.599,00	168.859.642.394,17	194.551.001.257,30	224.151.203.647,96	258.254.965.392,75	268.772.156.093,63
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.389.934.000,00	24.212.647.156,06	24.086.003.709,20	23.960.022.666,69	23.834.700.563,84	24.805.346.339,22
5,2	**BELANJA MODAL**	**399.332.697.004,00**	**472.387.312.375,50**	**542.559.867.179,05**	**586.473.463.389,04**	**634.490.324.662,14**	**660.329.346.700,64**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000,00	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.278.475.786,00	79.419.648.691,43	83.390.631.126,00	87.560.162.682,30	91.938.170.816,42	95.868.080.568,46
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.750.581.318,00	41.015.829.144,97	42.041.224.873,59	43.092.255.495,43	44.169.561.882,82	46.057.595.878,33
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.843.389.600,00	351.635.054.313,21	386.798.559.744,53	425.478.415.718,98	468.026.257.290,88	488.032.104.007,28
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	893.536.300,00	316.780.225,89	329.451.434,93	342.629.492,32	356.334.672,02	371.566.246,57
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	716.714.000,00	–	-	-	-	-

No	RINCIAN	APBD 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
5,3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**235.694.286.000,00**	**82.364.220.147,94**	**108.611.799.393,59**	**143.223.877.386,61**	**188.866.027.155,30**	**196.557.418.573,43**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	235.694.286.000,00	82.364.220.147,94	108.611.799.393,59	143.223.877.386,61	188.866.027.155,30	196.557.418.573,43
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**721.200.127.164,00**	**670.859.652.280,50**	**713.163.465.070,05**	**759.293.788.082,31**	**809.776.231.896,98**	**842.753.607.735,42**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37.051.670.264,00	60.279.169.887,57	72.053.958.557,47	86.128.806.244,10	102.953.000.966,87	107.145.665.153,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	684.148.456.900,00	610.580.482.392,93	641.109.506.512,58	673.164.981.838,21	706.823.230.930,12	735.607.942.582,03
	Surplus/defisit	**(100.545.780.800,00)**	**(159.384.412.547,00)**	**(192.592.595.610,13)**	**(205.608.012.810,67)**	**(231.679.067.143,56)**	**(180.707.892.363,01)**
6	**PEMBIAYAAN**	**100.545.780.800,00**	**159.384.412.547,00**	**192.592.595.610,13**	**205.608.012.810,67**	**231.679.067.143,56**	**180.707.892.363,01**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**106.545.780.800,00**	**165.384.412.546,51**	**232.592.595.610,13**	**245.608.012.810,67**	**241.679.067.143,56**	**220.707.892.363,01**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	106.545.780.800,00	165.384.412.546,51	232.592.595.610,13	245.608.012.810,67	171.679.067.143,56	220.707.892.363,01
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	70.000.000.000,00	-
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		-	30.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0	30.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : RAPBD 2025, data diolah Bappelitbangda 2025, data yang dikelola dalam SIPD

2.2.5 Alternatif Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. Walau demikian, peluang untuk sumber-sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon periode Tahun 2025-2026 telah mengidentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD Kabupaten Cirebon, antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Cirebon selain bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

b. APBD Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota khususnya di wilayah perbatasan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten Cirebon sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota wilayah perbatasan, sehingga antara Kabupaten Cirebon dan kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Program Kepedulian Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk

tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan dan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Alternatif pembiayaan yang bersumber dari dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi :

1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; dan
2. Program Bina Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah:

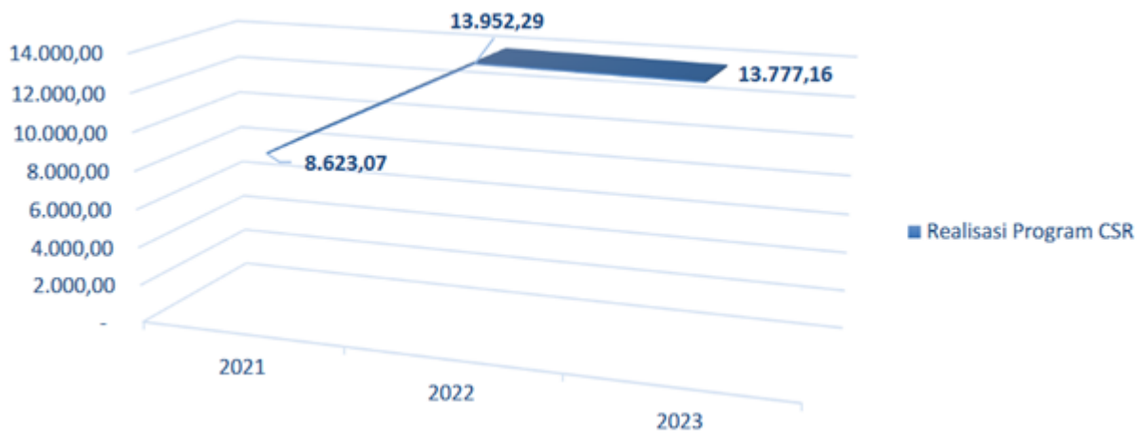
1. mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon;

2. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;
3. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Bina lingkungan;
4. Peningkatan daya beli;
5. Sosial;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.77 Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023

d. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiayaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan. Yang akan direncanakan melalui skema ini difokuskan pada penyediaan air minum atau air bersih, penerangan jalan umum dan pengelolaan sampah.

e. Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah Penduduk kabupaten Cirebon yang cukup besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar

seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Substansi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang adalah memastikan berbagai persoalan dasar pembangunan dapat teridentifikasi dengan baik, dan *urgen* untuk ditangani selama periode RPJMD ke depan. Persoalan dasar sebagaimana dimaksud tidak hanya yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan saat ini, tetapi juga yang berpotensi menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Sedangkan perumusan isu strategis secara substansial bertujuan menghimpun berbagai hal penting, baik yang berupa permasalahan pembangunan, peluang dan tantangan masa depan menjadi rumusan kalimat yang jelas dan tegas, sehingga memastikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Adapun rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Terdapat 4 (empat) aspek/kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum yang disajikan pada bagian berikutnya. Berbagai rumusan permasalahan pembangunan daerah tersebut dihasilkan dari Kertas Kerja Masalah-Akar Masalah sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 2.53 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Aspek Geografi dan Demografi		
Belum Optimalnya Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan
		Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan
		Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK
		Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT
		Keterbatasan cakupan pelayanan datelaahn pengelolaan sampah
		pengelolaan kawasan hutan belum optimal
ketahanan dan kemandirian pangan daerah belum terwujud	belum optimalnya penanganan ketahanan pangan	Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (Daya beli) dan Fisik
		Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
		Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen
		Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		Masih terdapat desa rentan rawan pangan
		Lahan pertanian yang sebelumnya seluas 51.000 Ha menjadi sekitar 48.000 Ha di dokumen RTRW tahun 2024-2044
Belum optimalnya mitigasi bencana	Tingginya risiko dan ancaman bencana	Kurangnya intensitas sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun perangkat daerah.
		Persentase indeks risiko bencana meningkat di setiap tahun sehingga perlu adanya mitigasi bencana **(SDG's)**
		Peningkatan laju indeks risiko bencana daerah pada 5 tahun terakhir **(SDG's)**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
	belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	Belum terbangunya Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang Respresentatif
		Kurangnya Pos Sektor jaga cakupan ketersediaan Pos sektor jaga baru mencapai 25 %
		Belum Optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebakaran (SKIK)
		Minimnya sarana dan prasarana pemadaman dan penanggulangan kebakaran
		terbatasnya personil pemadam kebakaran
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
Relatif tingginya kemiskinan	tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia	belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah
		SDM Aparatur di perangkat Daerah sebagian belum profesional dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
		Kurangnya keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh penduduk miskin untuk bersaing di peluang kerja di perusahaan atau di sektor formal
		Belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas yang miskin dan rentan dasarnya dan inklusivitas **(SDG's)**
	Data kemiskinan belum terpadu	Belum adanya data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang valid dapat dipertanggungjawabkan by name by addres sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan
		Data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang ada pada tiap dinas kadang berbeda datanya
	masih tingginya jumlah PPKS	belum optimalnya Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan kompetensi/keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar
		rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
		kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
	belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih	minimnya pelibatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
		sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud	Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian	Belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah
		Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah
		Masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian
		Produksi ikan mengalami penurunan
		Kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di sektor pertanian **(SDG's)**
		Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian **(SDG's)**
	Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing	Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
		Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		Kerjasama dan promosi wisata masih kurang
		Menurunnya jumlah wisatawan selama 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2020 dan 2021 **(SDG's)**
		Kurangnya tingkat pembangunan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner **(SDG's)**
		Kurangnya fasilitas penunjang wisata yang kurang memadai (akses jalan, kebersihan, penerangan jalan) **(SDG's)**
	Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan
		Distribusi pangan ke masyarakat belum merata
		Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras.
	Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Masih banyak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Belum optimalnya peningkatan kemantapan jalan
		Masih tingginya kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH)
		Cakupan pelayanan air yang belum optimal
	belum optimalnya pengembangan industri	Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan bahan baku
		Belum berkembangnya produk-produk olahan berbahan baku lokal
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri
		kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk industri
		Kurangnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Penerapan dan Keberlanjutan standardisasi dan sertifikasi produk industri
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industri
		Belum terintegrasinya data dan informasi industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan industri
		Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan industri
	belum optimalnya perkembangan UMKM	Pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global
		terbatasnya pada akses permodalan
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat,	relatif rendahnya angka harapan hidup	belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan
		Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% sedangkan UHC seharusnya diatas 90% sehingga belum UHC
		Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% dengan Jumlah kepesertaan BPJS di Kab Cirebon sudah mencapai 99,60 % hingga sudah mencapai UHC, namun keaktifan peserta BPJS seharusnya diatas 80% kalau kurang dari itu akan mempengaruhi layanan UHC
		Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Jumlah kematian ibu sd bulan Desember 2024 adalah 36/38108*100.000 KH=94,5/100.000KH)
		Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Angka kematian bayi sd Desember 2024 adalah 256/38108*1000 KH=6,7/1000KH)
		Adanya angka kematian dari beberapa kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia (tenaga Kesehatan) tidak seimbang **(SDG's)**
	belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang berkualitas belum optimal
		Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular cenderung meningkat.
		Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama dan FKRTL untuk UKP dan UKM belum terpenuhi sarana prasarana serta penunjang sesuai standar.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		Kapasitas SDMK belum merata di FKTP dan FKRTL (jumlah, jenis dan kualitas, dan distribusi antar faskes dan antar wilayah).
		Status Gizi masyarakat belum optimal (Stunting, Anemia, KEK).
		Akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan sarana sanitasi dasar yang sehat belum merata/ kurang. (Air Bersih, Jamban sehat, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah)
		Budaya PHBS di masyarakat kurang
Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB	Masih Banyaknya PUS yang Tidak Ingin Punya Tapi Tidak ber-KB
		Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang MKJP, serta Kurangnya Dukungan Internal Maupun Eksternal
		Kepesertaan KB Kabupaten Cirebon masih rendah karena fertility rate Kabupaten Cirebon sudah di angka 2,19 %
		masih Banyaknya Kampung KB yang Stratanya Tingkat Dasar
	belum optimalnya pemberdayaan keluarga	lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga
	belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga	Masih Tingginya Angka Kemiskinan, Pernikahan Dini dan Rendahnya Akseptor KB
		Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan, Usia, Status Pekerjaan dan Persetujuan dari Pasangan
Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan	belum optimalnya perlindungan perempuan	meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh perempuan
	belum optimalnya pemberdayaan perempuan	kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara merata;
		belum adanya kesempatan yang sama untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak;
		masih terdapatnya pola pemikiran masyarakat yang membatasi jenjang pendidikan untuk perempuan;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		belum adanya kebijakan yang menyeluruh untuk kesetaraan gender sampai tingkat Desa/Kelurahan.
	belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak	peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon baru memperoleh kategori Pratama namu belum semua sekolah dan pesantren menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)
Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Aspek Daya Saing Daerah		
Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	belum optimalnya kualitas pendidikan	Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok
		masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan
		kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terkualifikasi baik
		sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah
		Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Sedangkan masih belum meratanya rasio guru PNS di tingkat SD dan SMP, tidak berbanding lurus dengan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya sekitar 200 guru
	rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
		Kondisi akses, mutu dan tata kelola pendidikan masih rendah
		RLS yang masih dibawah rata-rata provinsi
		adanya keterbatasan secara ekonomi
		masih tingginya angka pernikahan dini
	belum optimalnya kemampuan literasi	rendahnya minat baca masyarakat
		belum optimalnya layanan perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah	belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA
		Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan
		Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
		Pengawasan dan penertiban bangunan
		Keterbatasan pelayanan informasi jasa konstruksi
		Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur (mis. uji konstruksi dalam penanganan jalan)
		Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon
		Belum optimalnya penanganan permukiman pada kawasan strategis
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat.	Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman
		Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi
	belum optimalnya infrastruktur perhubungan	Meningkatnya hambatan lalu lintas akibat aktivitas di pusat-pusat kegiatan (komersil)
		Perencanaan prasarana dan sarana jalan kurang berjalan
		Angkutan umum kalah bersaing dari angkutan online dan sepeda motor yang lebih praktis
		belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas
		belum optimalnya belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan
	belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas	Pendataan Belum Optimal dalam pengelolaan database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Keterbatasan pembiayaan/anggaran penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan PSU
		Masih banyaknya RTLH yang belum teridentifikasi dan tertangani

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
		Belum tertibnya administrasi pertanahan
		Pembangunan infrastruktur kesehatan terkendala oleh status kepemilikan tanah
Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan.	belum optimalnya pengembangan budaya	pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli cirebon.
		Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah
		Kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat (ritus, adat istiadat, kesenian dan kesusastraan)
		Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian daerah
	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah	Belum optimalnya media promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan
		Masih rendahnya apresiasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap kunjungan wisatawan
		Belum optimalnya pelaksanaan event rutin tingkat nasional
		Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif
		Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		Belum ditetapkannya rencana induk pembangunan pariwisata kab/kota
		Tidak adanya aset destinasi pariwisata pemerintah daerah untuk dikembangkan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana menuju destinasi wisata
		Masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tempat wisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial	Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal	Belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat
		Kegiatan MTQ di kecamatan pelaksanaannya masih belum optimal, bentuknya masih seremonial.
		Kegiatan dan personil linmas masih terbatas
		Upaya penegakan Perda belum optimal
	Belum terciptanya kondusifitas wilayah	Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila.
		Melemahnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Akibat Pesatnya Pertumbuhan Perekonomian dan Industri
		Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan/Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
		Masih Belum Optimalnya Partisipasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Parpol
		Urgensi Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Hal Yang Dapat Mengganggu Stabilitas Keamanan di Daerah
Belum optimalnya investasi di daerah	kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah	Belum optimalnya promosi investasi dilakukan.
		Belum optimalnya regulasi kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal.
		Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan.
		Investor tidak nyaman, pindah ke daerah lain sekitar Cirebon karena adanya demo dari tenaga kerja serta harga lahan melonjak.
Belum optimalnya inovasi daerah	Kinerja inovasi daerah yang belum optimal	Kabupaten Cirebon memiliki indeks inovasi daerah sebesar 47,15 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69,15 dengan kategori sangat inovatif.
		Belum optimalnya sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan
		Minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk manajemen pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Aspek Pelayanan Umum		
Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata.	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal
		Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		SDM (kuantitas dan kualitas sdm yang masih kurang) dan prasarana wajib ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
		Belum ada standar kompetensi jabatan untuk pengelompokan jabatan
	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan
		Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik
		Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon
		Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD
	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi masih belum optimal	Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon (3,55) dan Kabupaten Indramayu (3,53) memperoleh predikat sangat baik.
	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal	Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
		Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal
		Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah
		Peningkatan ADD tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
	Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan	Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa
		Terdapat 10 Kecamatan yang belum memiliki alat cetak pelayanan kependudukan
		Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan
	Pendapatan daerah belum optimal	pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rendah
		rasio kemandirian daerah kemampuannya rendah sekali dan rasio ketergantungan daerah termasuk kedalam kategori tinggi

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (2024). Data yang dikelola dalam SIPD

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah maupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Informasi ini tergambar pada subbab 2.2 dan subbab 2.3 tentang kondisi daerah dan keuangan daerah, yang dikerucutkan menjadi permasalahan pembangunan daerah.

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku.

Isu-isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di level yang berbeda, antara lain: (1) isu strategis dinamika global yang berpengaruh terhadap Kabupaten Cirebon, (2) Isu strategis dari RPJMN 2025-2029, (3) Isu strategis dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, (4) Isu strategis dari Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045, dan (5) isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030

2.3.2.1 Isu Global

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu.

Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen

penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon.

Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup Masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

Ketahanan Pangan. Presidency G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi,

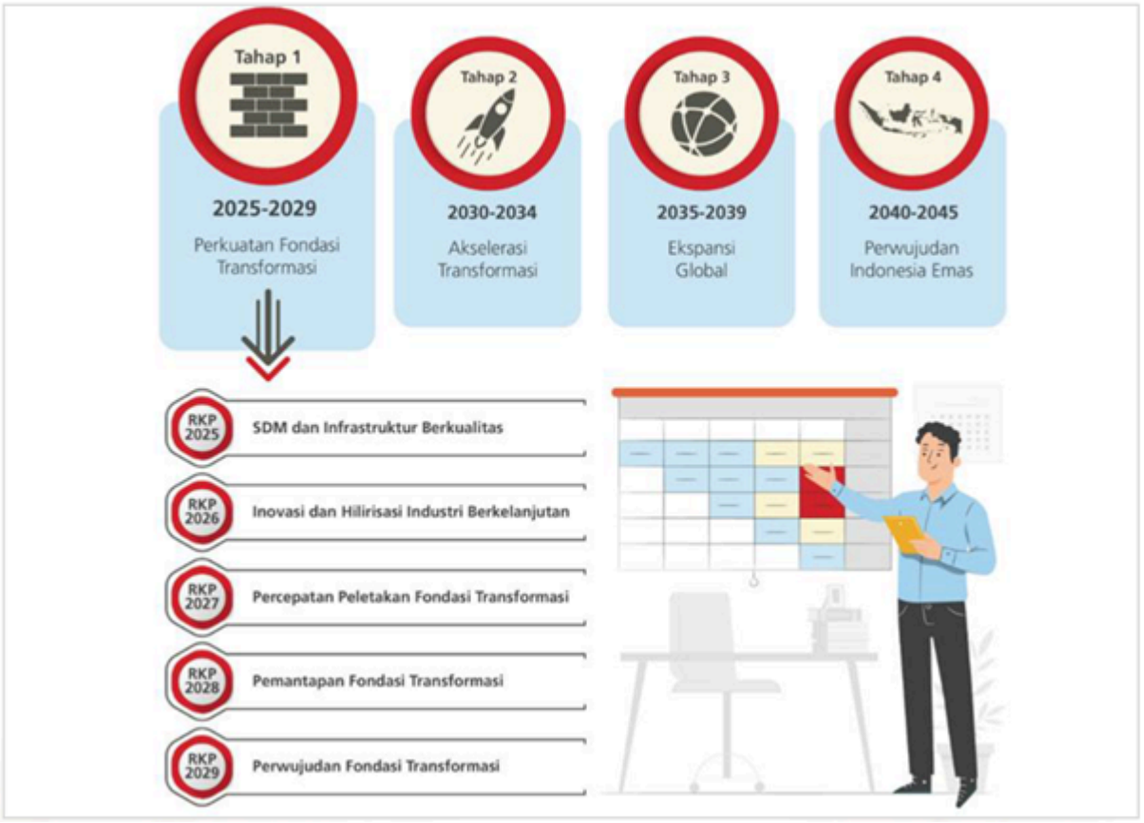
termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan merupakan dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN adalah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya.

RPJMN bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dokumen ini juga merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menyusun rencana aksi untuk implementasi kebijakan dan strategi. RPJMN diadopsi oleh pemerintah sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN, terdapat indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan hasil pembangunan yang dicapai, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerah otonom masing-masing, sehingga pada setiap urusan dan sub-urusan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota telah dipetakan kewenangannya masing-masing. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat secara langsung menentukan batasan-batasan untuk menghindari eksploitasi sumber daya. Meskipun demikian, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat bahwa eksternalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar bagi daerah untuk menjalankan urusannya, namun tetap harus memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan dengan pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi landasan utama, dengan fokus untuk mencapai Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di *breakdown* kedalam arah pembangunan jangka menengah yang kemudian dikerucutkan ke dalam tema RKP 2025-2029. Berikut merupakan tahapan / periodisasi pembangunan jangka menengah dalam RPJPN 2025-2045:



Gambar 2.78 Periodesasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Tema RPJMN 2025-2029, "Perkuatan Pondasi Transformasi," menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam membangun pondasi yang kokoh untuk transformasi Indonesia menuju visi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Setiap tahunnya, tema-tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengarahkan fokus strategis dan prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan ini. Pada tahun 2025, tema "SDM dan Infrastruktur Berkualitas" menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tahun berikutnya, 2026, difokuskan pada "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan," yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan industri hilir yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik. Tahun 2027 mengangkat tema "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi," di mana pemerintah akan mempercepat langkah-langkah strategis untuk meletakkan fondasi transformasi yang lebih kuat. Pada tahun 2028, tema "Pemantapan Fondasi Transformasi" akan memastikan bahwa fondasi yang telah diletakkan semakin kuat dan siap mendukung transformasi besar-besaran di tahun-tahun mendatang. Akhirnya, pada tahun 2029, tema "Perwujudan Fondasi Transformasi" akan menandai

pencapaian visi besar melalui fondasi transformasi yang sudah matang dan siap untuk membawa Indonesia menuju era baru.

Hal tersebut tentunya selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Cirebon yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang mana memiliki tema "**Penguatan Pondasi Transformasi dan tata kelola sistem Sosial, Ekonomi, dan pemerintahan**". Fokus arah kebijakan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 selaras dengan fokus agenda pembangunan nasional 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 2.79 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 2.54

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1	Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2	IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3	Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
4	Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
5	Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6	Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7	Integrasi domestik terbatas	a. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Kualitas SDM yang makin rendah	a. Kualitas pendidikan yang masih rendah. b. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9	Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11	Pembangunan belum berkelanjutan	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
		energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12	Tata Kelola pemerintahan belum optimal	a. Regulasi yang berlebih *(hyper regulation)* dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13	Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
14	Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan-an dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan

upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yang juga sebagai Prioritas Nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 2.80 Visi Misi Presiden

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Isu pembangunan sangat penting sebagai pengarah pembangunan kewilayahan, sehingga potensi wilayah dapat dimaksimalkan. Adapun isu pembangunan di wilayah jawa antara lain:

1. Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.
2. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).
3. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antar kawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
4. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan utara Jawa.
5. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.
6. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
7. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
8. Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

Selain isu pembangunan terdapat pemetaan potensi wilayah jawa sebagai berikut:

1. Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional.
2. Potensi ketahanan energi Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB. Potensi clean energy berupa energi surya (640,3

GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW).

3. Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.
4. SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.
5. Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.
6. Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama.
7. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa.
8. Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan".

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Gambar 2.81 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

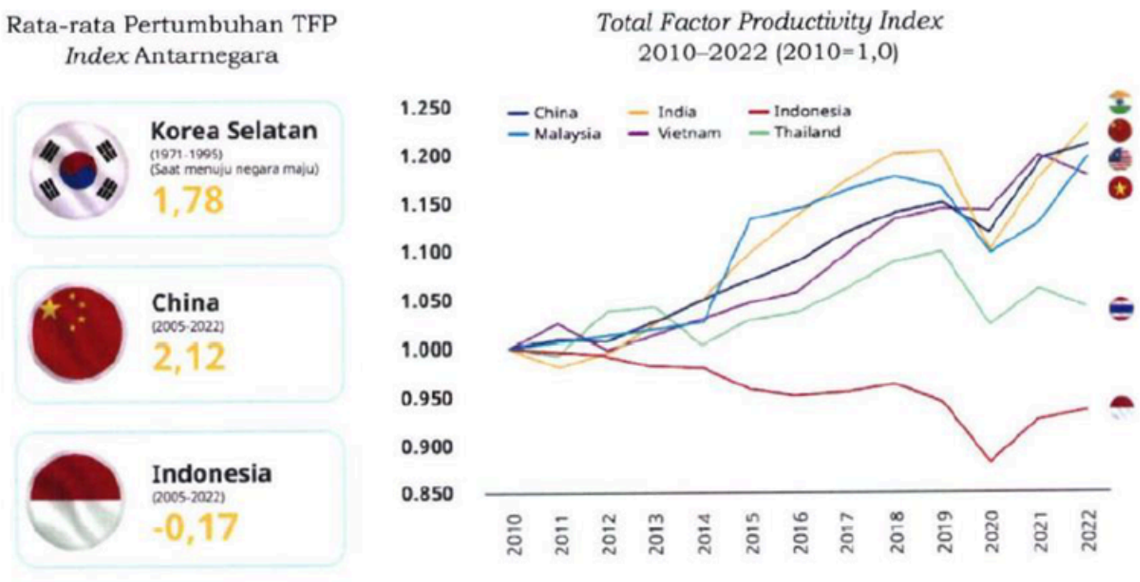
Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas indonesia yang tercermin dari *total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu

2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan' teknologi, dan inovasi yang tertinggal, gcrta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2OlO, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2Ol0-2O15. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,O persen selama tahun 2015-2019 dan 5,O5 persen pada tahun 2023.



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan otonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024|, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.6O0 per pekerja. Angka

tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.1O0 pcr pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$O.2OO per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) scbesar 369,3 pada tahun 2o22. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak Pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2O19-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon

kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan keda. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan,2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi l,4O persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim' hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian

Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (intergovernmental *Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (united Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri yang terletak di Kecamatan Palimanan saat ini sudah sangat terbatas untuk menampung sampah dari wilayah barat Kabupaten Cirebon maka perlu dilakukan pembukaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di wilayah barat yang sebelumnya telah dilakukan study kelayakan, walaupun wilayah timur Kabupaten Cirebon telah dilayani oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg di Kecamatan Karangwareng perlu diupayakan peningkatan pengelolaan sampah dengan opsi penerapan teknologi. Menyikapi hal tersebut, selain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memprakarsai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah (TPPAS) Cirebon Raya, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg juga didorong untuk menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui metode refuse derived fuel (RDF) seiring telah adanya MoU dengan PT. Indocement terkait pemanfaatan hasil dari pengelolaan dengan metode refuse derived fuel (RDF) yang direncanakan menyerap sampah 500 ton/hari dengan menghasilkan briket RDF 150 ton/hari. Fasilitas ini dirancang dengan pendekatan waste to energy, yakni mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai IKLH.

Dalam pengelolaan sampah tidak luput juga upaya penanganan dengan pelibatan masyarakat melalui program unggulan kampung bersih dimana pemerintah desa dapat berperan penuh dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, hal ini dilakukan penguatan melalui penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di seluruh desa dengan mengoptimalkan peran masyarakat baik individu, rumah tangga dan kelembagaan serta dilakukan pendampingan secara berkala. Selaras dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah proses komposting yang dihasilkan dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memanfaatkan pupuk organik guna menunjang kebutuhan pupuk untuk keperluan pertanian.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2O22 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya dam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global, Salah satu tantangan geopolitik yang Perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudra Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (international Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G2O, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan

berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic Dry Index Level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2O2l dan 2O22. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari I8O negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan

data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

A. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma green dan blue economy yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan green and blue economy.

2. Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia:

a. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

b. Relevansi Keterampilan

Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

c. Inovasi dan Kreativitas

Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktor-faktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.

d. Kesejahteraan dan Motivasi

Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

e. Pemberdayaan dan Keterlibatan

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.

f. Adaptasi terhadap Perubahan

Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar :

a. Akses yang Tidak Merata

Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

b. Dampak pada Kualitas Hidup

Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.

c. Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.

d. Inklusivitas Sosial

Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.

e. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.

f. Pemerataan Pembangunan

Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

g. Tantangan Finansial

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.

Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

4. Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan

iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Pondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.

Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

a. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain, mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

b. Over eksploitasi Sumber Daya

Salah satu masalah utama adalah over exploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrim cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

d. Manajemen Sumber Daya

Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.

e. Kehidupan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

f. Kolaborasi Global

Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

g. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam pembangunan. perencanaan

Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

5. Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang:

a. Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan

Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

b. Perlindungan Lingkungan

Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.

c. Keadilan Sosial

Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

d. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.

e. Penggunaan Lahan yang Efisien

Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

f. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

g. Kolaborasi Antar Pemerintah

Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

6. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabel pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

c. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

d. Efisiensi dan Efektivitas

Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

e. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

f. Inovasi dan Teknologi

Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

g. Kolaborasi dan Kemitraan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

B. RTRW KABUPATEN CIREBON 2024-2044

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan dan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur yang integratif dan inklusif.

Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
    a. pengembangan sistem pelayanan perkotaan dalam upaya mendukung pengembangan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan regional Cirebon Raya;
    b. pemantapan peran kecamatan di Wilayah Kabupaten sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
    c. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang integratif dan berkelanjutan; dan
    d. pengembangan Struktur Ruang antar Wilayah untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

2. Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
   b. pengembangan Kawasan Pertanian untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk meningkatkan daya saing Kawasan;
   d. pengembangan Kawasan Pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan antar pusat aktivitas pariwisata;
   e. pengembangan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan, dan mandiri;
   f. pengembangan Kawasan pesisir dan laut sesuai potensi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat; dan
   g. optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berupa pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

C. KLHS RPJMD KABUPATEN CIREBON 2025-2029

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah.

KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Data dan informasi, hasil analisis, serta

rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dijelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Selain itu KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, dapat diketahui kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten Cirebon. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup, maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Cirebon, meliputi:

a. Daya dukung air tahun 2030 di Kabupaten Cirebon menunjukkan kebutuhan air sebesar 661.656.040 m3/tahun. Sedangkan ketersediaan air di Kabupaten Cirebon 1.324.991.935 m3/tahun, sehingga daya dukung air di Kabupaten Cirebon belum terlampaui.
b. Daya dukung pangan tahun 2030 di Kabupaten Cirebon menunjukkan kebutuhan pangan sebesar 1.026.351.784.840 kkal/tahun. Sedangkan ketersediaan pangan di Kabupaten Cirebon 921.836.500.000 kkal/tahun, sehingga daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon akan terlampaui.
c. Jasa Ekosistem meliputi:
    - Jasa ekosistem penyedia air

      JE penyedia air adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa penyediaan air untuk para pemanfaatnya. Secara umum kondisi JE penyedia air di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayahnya berada pada kelas jasa ekosistem penyediaan air sedang dengan luasan mencapai 83.574,47 ha atau sekitar 78%.
    - Jasa ekosistem penyedia pangan

      JE penyedia pangan memiliki definisi ketersediaan tanaman (serealia dan non serealia) dan hewan yang dapat dimakan, dengan indikator keadaannya adalah stok total dan rata-rata (dalam kg/ha). Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun atau unit lainnya). Secara umum kondisi JE penyedia pangan di Kabupaten Cirebon dikategorikan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
    - Jasa ekosistem pengatur tata air

      JE pengatur tata air yaitu siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Secara umum kondisi JE pengatur tata air di Kabupaten Cirebon berada pada kelas sedang dengan luasan sebesar 83.687,56 ha atau sekitar 78%.
    - Jasa ekosistem pengatur iklim

      JE pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologi. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi, sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi. Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang dengan luasan sebesar 78.971,66 ha atau sekitar 74%.
    - Jasa ekosistem mitigasi perlindungan bencana banjir

JE pengatur mitigasi bencana banjir memiliki definisi bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap banjir. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha atau sekitar 92%.

- Jasa ekosistem pengatur mitigasi bencana kebakaran

  JE pengatur mitigasi bencana kebakaran di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha atau sekitar 79% dari luasan Kabupaten Cirebon.
- Jasa ekosistem pengatur mitigasi bencana longsor

  JE pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha atau sekitar 92%.

Berdasarkan kewenangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), wilayah kabupaten memiliki kewenangan terhadap 16 TPB/SDGs, kecuali TPB/SDGs 14 yakni untuk tujuan Ekosistem Laut. Dalam pelaksanaannya, TPB/SDGs 7 yakni energi bersih dan terjangkau menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cirebon melakukan upaya pencapaian terhadap 15 TPB/SDGs.

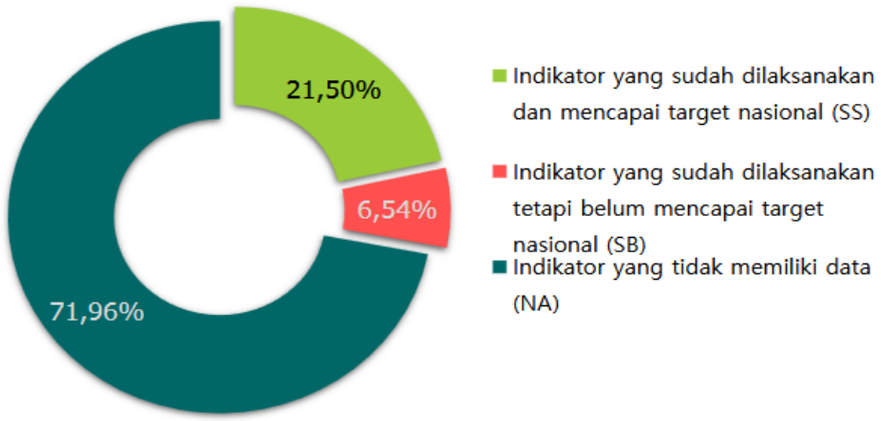


Gambar 2.82 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

Dari 214 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, terdapat 21,50% dari 214 indikator TPB di Kabupaten Cirebon yang telah

mencapai target nasional, 6,54% dari 214 indikator TPB yang belum mencapai target nasional, dan 71,96% dari 214 indikator yang belum tersedia datanya. Terdapat 3 (tiga) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu "telah mencapai target", "belum mencapai target", dan "tidak ada data". Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Kategori "telah mencapai target" dan "belum mencapai target" diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.



Gambar 2.83 Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Indikator TPB dibedakan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu (1) pembangunan sosial, (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan lingkungan, (4) pembangunan hukum dan tata kelola. Berdasarkan pilar pembangunan, diketahui capaian indikator TPB Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- TPB pilar sosial di Kabupaten Cirebon, sebanyak 25 indikator sudah mencapai target nasional, 9 indikator belum mencapai target nasional, dan 63 indikator belum ada data atau NA.
- TPB pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon, sebanyak 10 indikator sudah mencapai target nasional, 2 indikator belum mencapai target nasional, dan 39 indikator belum ada data atau NA.
- TPB pilar lingkungan di Kabupaten Cirebon, sebanyak 5 indikator sudah mencapai target nasional, 2 indikator belum mencapai target nasional, dan 40 indikator belum ada data atau NA.

- TPB pilar tata kelola dan hukum di Kabupaten Cirebon, sebanyak 6 indikator sudah mencapai target nasional, 1 indikator belum mencapai target nasional, dan 12 indikator belum ada data atau NA.

Isu – isu strategis terpilih Kabupaten Cirebon didasarkan pada crosscutting GAP capaian TPB, keterkaitan TPB dengan isu muatan RTRW Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu muatan KLHS RTRW Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu perubahan KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon, dan rekomendasi isu berdasarkan peserta KP-1 sehingga dihasilkan isu TPB yaitu:

1) TPB 9 industri, inovasi dan Infrastruktur
2) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
4) TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
5) TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
6) TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim
7) TPB 1 Tanpa Kemiskinan
8) TPB 2 Tanpa Kelaparan

Hasil identifikasi target-target TPB yang berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kedekatan temanya. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya duplikasi analisis pada target-target yang memiliki tema yang sama namun terdapat pada beberapa TPB. Setelah target-target TPB tersebut dikelompokkan, kemudian dilakukan perumusan kalimat isu PB strategis di Kabupaten Cirebon, yaitu:

1) Kurang optimalnya pengembangan di sektor industri;
2) Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk semua golongan;
3) Kurang optimalnya pengembangan di sektor pariwisata;
4) Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman;
5) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi;
6) Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku;
7) Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian;
8) Tingginya risiko dan ancaman bencana

D. ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045

Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Cirebon 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Isu strategis Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1) Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).
2) Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.
3) Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal.
5) Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko.
6) Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup.
7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah.
8) Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat.

2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensial menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah di masa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis rencana jangka menengah Kabupaten Cirebon merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon.

1. Penguatan budaya masyarakat

Penguatan nilai budaya masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal di Cirebon dapat dilakukan melalui berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah membangun sinergitas yang nyata antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pelestarian serta pemanfaatan budaya asli Cirebon. Selain itu, percepatan pembentukan desa atau kampung budaya juga menjadi langkah penting, didukung dengan kemudahan akses untuk mendorong partisipasi masyarakat. Upaya lainnya adalah meningkatkan sinergi dalam pembangunan sektor pariwisata, terutama melalui koordinasi, kerja sama, dan promosi wisata budaya unggulan Cirebon dalam bentuk paket dan event, sehingga potensi budaya lokal dapat dikenalkan secara luas dan berkelanjutan.

2. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup pemenuhan gizi ibu sejak masa kehamilan sebagai langkah awal pencegahan stunting, serta perluasan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok daerah. Selain itu, peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM di bidang pendidikan juga diperkuat dengan pengembangan kemampuan *life skill* dan manajemen pendidikan berbasis teknologi. Di bidang kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu perlu diintegrasikan dengan program seperti Kartu PEPEK, disertai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta penguatan fungsi UKBM seperti Posyandu dan Posbindu. Penguatan kualitas gizi dan keberagaman pangan melalui pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) juga menjadi prioritas, didukung oleh peningkatan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan kualitas layanan puskesmas serta RSUD. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menciptakan SDM yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi

3. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha. Selain itu, akses terhadap rumah layak huni juga harus diperluas, seiring dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan.

Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan menjadi aspek krusial yang harus dijamin, didukung dengan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau. Terakhir, penguatan hubungan industrial sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Penguatan dan kerukunan umat beragama

Penguatan dan kerukunan umat beragama merupakan pondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan terhadap pelayanan keagamaan serta penguatan peran organisasi keagamaan dalam membangun moral dan spiritual masyarakat. Selain itu, kesalehan sosial juga perlu ditumbuhkan melalui perilaku tolong-menolong, saling menghargai, tenggang rasa, empati, dan kepedulian terhadap situasi sosial di lingkungan sekitar. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

5. Penguatan kemandirian ekonomi daerah

Penguatan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan, terutama di sektor pertanian, serta peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan fasilitas layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang mendukung kemandirian petani. Di sektor kelautan dan perikanan, penting untuk memperluas cakupan binaan kelompok nelayan melalui diversifikasi produk perikanan menuju agroindustri, sambil menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan teknologi perikanan. Kemitraan strategis dengan sektor swasta juga perlu ditingkatkan guna memperbesar skala ekonomi dan mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan ekspor.

6. Penguatan Sistem Pangan Daerah

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penguatan sistem pangan daerah menjadi penting untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan gangguan

distribusi pangan. Ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun juga menghadapi tantangan terkait ketersediaan dan distribusi pangan, yang dapat mempengaruhi inflasi. Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, serta melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM).

7. Tata kelola pemerintahan

Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dinamis, penataan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan *Smart Governance* yang unggul. Selain itu, diperlukan penguatan organisasi, penerapan sistem merit secara konsisten, dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pengembangan *corporate university*. Perencanaan dan pengawasan pembangunan juga harus dilakukan secara terpadu dan transparan berbasis teknologi informasi, didukung oleh penataan proses bisnis serta peningkatan keterbukaan informasi. Pelayanan publik pun ditingkatkan melalui optimalisasi administrasi kependudukan, perizinan, pelayanan DPRD, hingga layanan publik di tingkat kecamatan agar masyarakat memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan pemerintah.

8. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat terhadap berbagai resiko menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan demokratis. Upaya ini mencakup penguatan kebebasan dan kesetaraan dalam berdemokrasi, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi untuk mendorong partisipasi publik yang sehat. Di sisi lain, penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan hukum terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas Satpol PP, koordinasi antar instansi, serta penegakan Perda dan Perkada secara tegas. Dalam menghadapi potensi bencana, strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan terus dikembangkan, termasuk peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan korban bencana. Respon cepat dalam penanganan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi

bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap aman, tertib, dan tentram dalam kondisi apa pun.

9. Pembangunan infrastruktur

Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini mencakup perluasan konektivitas antara lokasi strategis, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang tepat sasaran. Layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni terus ditingkatkan, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sistem irigasi dan drainase yang memadai. Selain itu, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan kawasan hijau, serta pengolahan limbah dan sampah menjadi perhatian utama guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan lahan tidur dan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menurunkan emisi karbon juga menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dang tangguh terhadap perubahan iklim.

Tabel 2.55
Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Keanekaragaman budaya lokal seperti seni tari, musik tradisional, upacara adat, dan kerajinan tangan yang masih hidup di tengah masyarakat; Eksistensi komunitas budaya dan sanggar seni yang aktif; Daya tarik budaya sebagai aset pariwisata berbasis kearifan lokal.	belum optimalnya pengembangan budaya Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah	Kurang optimalnya pengembangan di sektor pariwisata		Pariwisata Di Bawah Potensinya	Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup	**Penguatan budaya masyarakat**
Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, bonus demografi, serta minat generasi muda dalam inovasi dan teknologi.	belum optimalnya kualitas pendidikan		Demografi Global	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).	**Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia**
	rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah			Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
	belum optimalnya kemampuan literasi					
	Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan dan olahraga					
	relatif rendahnya angka harapan hidup					
	belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi					
	belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB					
Ketersediaan program bantuan sosial, potensi pertanian lokal, industri rumahan, serta dukungan LSM dan CSR perusahaan.	tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia	Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk semua golongan	Urbanisasi Dunia	Kemiskinan	Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.	**Percepatan penanggulangan kemiskinan**
	masih tingginya jumlah PPKS			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	
	Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal			Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		
	belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga			Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	kerja terdidik dan terlatih					
	belum optimalnya pemberdayaan keluarga					
	belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga					
Kekuatan kelembagaan lokal seperti Linmas, Karang Taruna, FKPM, dan tokoh adat yang dapat digerakkan sebagai agen ketertiban; Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungan sosial; Tersedianya teknologi informasi untuk sistem pelaporan cepat (early warning system); Kemitraan strategis dengan TNI, Polri untuk mitigasi risiko sosial dan bencana alam.	Tingginya risiko dan ancaman bencana	Tingginya risiko dan ancaman bencana	Perubahan Iklim	Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko	**Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat**
	belum optimalnya penanganan bencana kebakaran					
	belum optimalnya perlindungan perempuan					
	belum optimalnya pemberdayaan perempuan					
	belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan sistem pangan daerah didukung oleh lahan produktif, petani lokal, komoditas unggulan, UMKM pangan, serta infrastruktur dan teknologi, dengan dukungan kebijakan dan kearifan lokal untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.	belum optimalnya penanganan ketahanan pangan	TPB 2 Tanpa Kelaparan	Ketahanan Pangan	Mencapai swasembada pangan, energi dan air		**Penguatan Sistem Pangan Daerah**
Keberagaman agama yang telah hidup rukun, peran aktif tokoh agama, dan nilai-nilai toleransi yang kuat di masyarakat.	Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal Belum terciptanya kondusifitas wilayah					**Penguatan dan kerukunan umat beragama;**
Potensi UMKM, koperasi, sektor informal, pariwisata lokal, sumber daya alam, serta dukungan terhadap ekonomi digital dan pasar lokal.	Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian	Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian	Perdagangan Internasional	Produktivitas Rendah	Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing	**Penguatan kemandirian ekonomi daerah**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing			IPTEKIN dan Riset Lemah	Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	
	Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama			Deindustrialisasi Dini		
	Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat			Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil		
	belum optimalnya pengembangan industri	Kurang optimalnya pengembangan di sektor industri;		Integrasi domestik terbatas		
	belum optimalnya perkembangan UMKM					
	kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kemauan pemerintah daerah untuk membangun aplikasi layanan digital; SDM muda yang memiliki keterampilan IT dan bisa dilibatkan sebagai relawan digital; Dukungan dari pemerintah pusat dan program digitalisasi nasional.	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah		Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas pemerintahan belum optimal	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal	**Tata kelola pemerintahan**
	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
	Tata kelola pemerintahan belum memanfaatkan TIK secara optimal guna mendukung pelayanan publik		Disrupsi Teknologi	Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah		
	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal					
	Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan					
	Pendapatan daerah belum optimal					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Letak geografis strategis, potensi sektor pariwisata dan pertanian, sumber daya alam yang mendukung pembangunan fisik serta Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan.	belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi	Perubahan Iklim	Ekonomi laut belum optimal	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat	**Pembangunan infrastruktur**
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat.	Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman		Pembangunan belum berkelanjutan	Keberlanjutan Penataan Ruang	
	belum optimalnya infrastruktur perhubungan	Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku		Krisis Lingkungan	Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	
	belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas					
	belum optimalnya kualitas lingkungan hidup					

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (2024). Data yang dikelola dalam SIPD

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. Rumusan Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini dirumuskan berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **H. Imron** dan **H. Agus Kurniawan Budiman** yang telah dilantik pada secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Secara substansi, maka Visi, Misi dan Program Kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

3.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perwujudan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara substantif, visi tersebut mencerminkan arah dan tujuan pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Sebagai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, visi yang diusung menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan visi kepala daerah terpilih, visi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dalam periode RPJMD 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON BERSIH, INOVATIF, MAJU, AGAMIS DAN AMAN"

Cirebon BERIMAN
(Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman)



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

Visi pembangunan Kabupaten Cirebon ini merupakan gambaran komprehensif tentang arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Visi ini lahir dari pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta tantangan yang dihadapi daerah, sekaligus menjawab aspirasi luhur masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Setiap kata dalam visi bukan sekadar kata-kata, melainkan mengandung makna dan nilai yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah strategis pembangunan Kabupaten Cirebon. Visi ini menjadi landasan kokoh yang menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon yang bersih dalam tata kelola pemerintahan, inovatif dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, maju dalam berbagai aspek kehidupan, berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

Makna mendalam dari setiap kata dalam visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 yang menjadi semangat dan panduan dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik adalah sebagai berikut:

- ***Bersih***, mencerminkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Pelayanan publik merupakan titik strategis dalam memulai pengembangan dan penerapan *good and clean government*. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. *Good and clean government* akan mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Pemerintahan yang bersih juga dapat mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat serta meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan.
- ***Inovatif***, memiliki makna ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah. Pemerintahan yang inovatif ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan riset. Sementara itu, masyarakat yang inovatif ditunjukkan melalui kreativitas dan adaptasi dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, dan budaya guna meningkatkan

daya saing daerah. Dengan membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

- ***Maju***, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan berkelanjutan berbasis teknologi modern dan kearifan budaya lokal. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan yang merata, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Modernisasi di Kabupaten Cirebon harus berjalan selaras dengan pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Cirebon dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan karakter yang telah diwariskan.
- ***Agamis***, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki keimanan, taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip ini diwujudkan melalui penguatan pendidikan keagamaan, pembinaan moral, serta pengamalan ajaran agama yang toleran dan inklusif. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kehidupan beragama yang harmonis, termasuk dengan mendukung sarana dan prasarana ibadah, membina lembaga keagamaan, serta mendorong implementasi nilai-nilai etika dan akhlak dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang berkarakter, berintegritas, serta mampu menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan sejahtera.
- ***Aman***, memiliki makna bahwa pemerintah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam dan konflik sosial. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan suasana yang kondusif bagi masyarakat melalui peningkatan sistem keamanan terpadu, optimalisasi peran aparat penegak hukum, serta pemberdayaan

masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga menjadi prioritas dengan memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya.

Secara keseluruhan, visi "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman***" merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih baik di masa depan. Untuk mencapai visi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar setiap aspek pembangunan dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :

1) Misi Kesatu : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "*Bersih*". Dalam pelaksanaannya, misi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan secara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengedepankan keterbukaan informasi publik.

2) Misi Kedua : ***Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "*Inovatif*". Peningkatan daya saing daerah menjadi prioritas dalam misi ini, dengan menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, pengembangan pasar yang adaptif, serta penciptaan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan, percepatan digitalisasi layanan publik dan ekonomi, serta penguatan jejaring kerja antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
3) Misi Ketiga : ***Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "*Maju*". Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi yang berbasis pada inklusivitas menjadi salah satu prioritas utama, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas manusia juga menjadi perhatian utama dalam misi ini. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pelestarian dan penguatan budaya lokal menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang maju, berdaya saing, namun tetap memiliki identitas dan jati diri yang kuat.
4) Misi Keempat **: *Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "*Agamis*". Fokus utama dari misi ini adalah membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, baik di lingkungan aparatur pemerintahan maupun masyarakat luas. Pembangunan ketahanan sosial berbasis nilai-nilai religius menjadi aspek penting, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan menjalankan keyakinannya, sekaligus menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman agama. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan di lingkungan aparatur pemerintah agar

dapat menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan integritas, etika, dan nilai-nilai spiritual.

5) Misi Kelima **: *Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "*Aman*". Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk bencana dan degradasi lingkungan. Dalam pelaksanaannya, misi ini diarahkan pada pembangunan ketahanan sosial dan keamanan guna menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus utama dalam misi ini.



Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan arsitektur kinerja yang menghubungkan visi, misi, hingga program pembangunan. Dalam arsitektur ini, tujuan dan sasaran RPJMD

dirumuskan berdasarkan capaian strategis yang mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah. Sebagai dasar evaluasi kinerja, setiap tujuan dan sasaran dalam RPJMD harus memenuhi prinsip terukur (*measurable*). Hal ini direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan bupati, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, perencanaan dan implementasi pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cirebon, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2029.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon, ditandai dengan:

1) Peningkatan Pendapatan per Kapita
2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

3) Kerjasama Daerah Skala Regional dan dengan Dunia Internasional Meningkat
4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5) Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

1 Peningkatan Pendapatan per Kapita

INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2030
1 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	8,16
2 PDRB Perkapita (Rp Juta)	29,25	48,40
3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39	20,41

2 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2030
4 Tingkat Kemiskinan (%)	10,70	8,10
5 Rasio gini (Indeks)	0,355	0,343
6 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	2,32	2,33

3 Kerjasama Daerah Skala Regional dan dengan Dunia Internasional Meningkat

INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2030
7 Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2	4

4 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2030
8 Indeks Pembangunan Manusia	73,02	75,98

5 Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2030
9 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	5,37	8,22
10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,08	66,30

Gambar 3.2 Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

Sumber: RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Cirebon, yang menggambarkan pola intervensi pembangunan secara berjenjang dan sistematis. Cascading tujuan dan sasaran menunjukkan keterkaitan antar program serta mekanisme intervensi yang harus dilakukan dengan indikator keberhasilan yang terukur. Setiap sasaran pembangunan didukung oleh intervensi program prioritas, yang terdiri dari berbagai program pembangunan daerah dengan keterlibatan lintas perangkat daerah dan lintas urusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

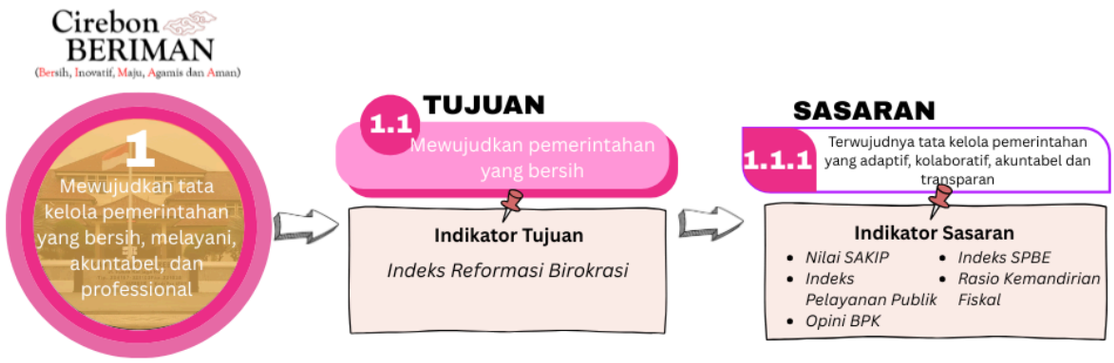
Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Berikut

merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 yang diikuti dengan gambar arsitektur kinerja Cirebon:



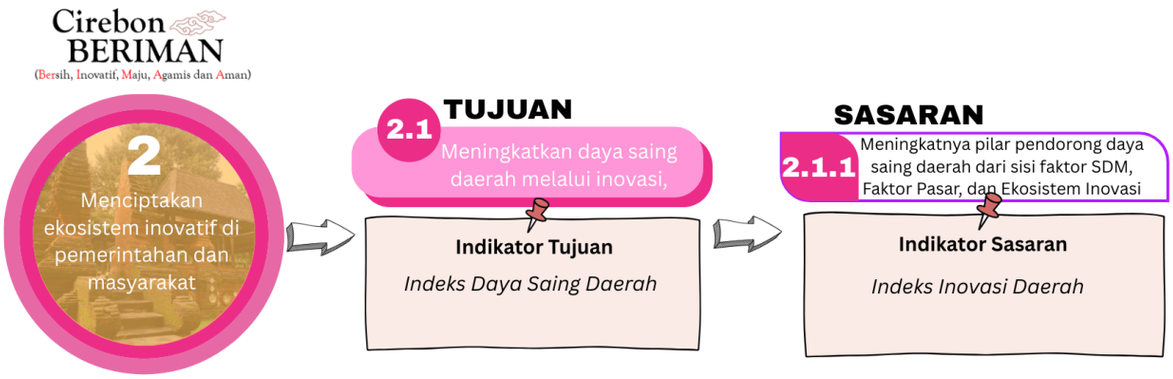
Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut:

1. Perwujudan Misi 1 : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan professional,** memiliki tujuan yaitu:
   a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, dengan sasaran yaitu:
      1) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kolaboratif, akuntabel dan transparan.



Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Logis Misi 1
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

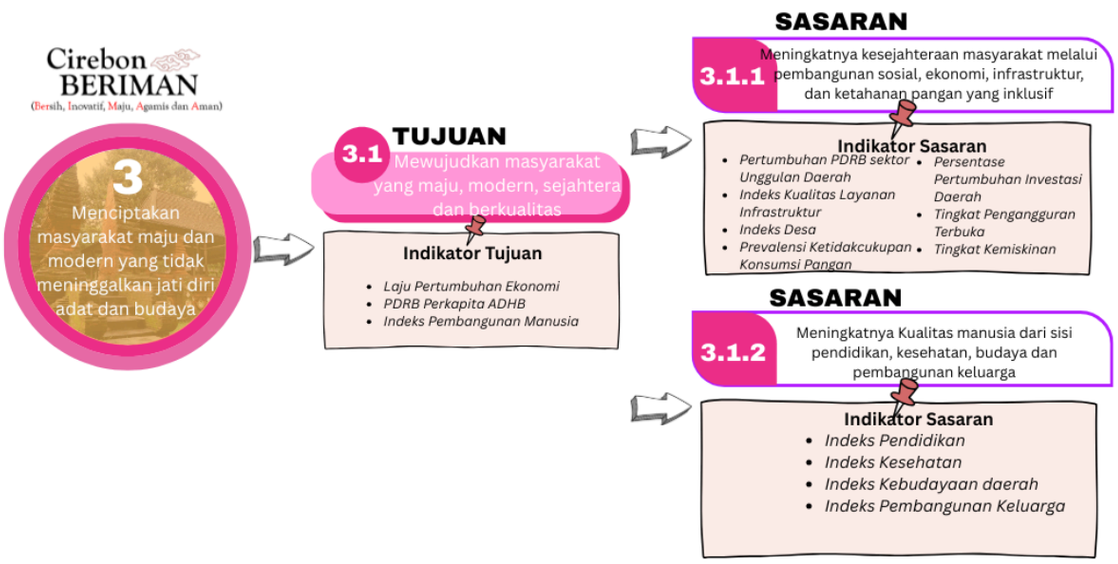
2. Perwujudan Misi 2 : **Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat,** memiliki tujuan yaitu:
   a. Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi, dengan sasaran yaitu:
      1) Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, faktor pasar, dan ekosistem inovasi.



Gambar 3.4 Kerangka Berpikir Logis Misi 2

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

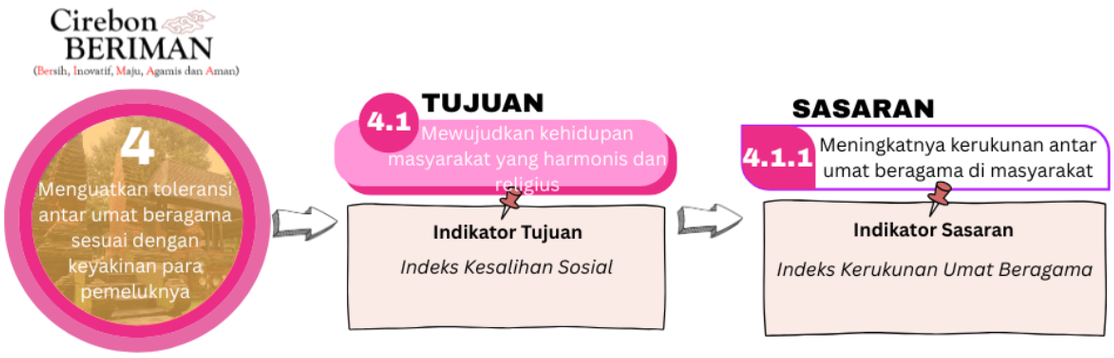
3. Perwujudan Misi 3 : **Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya,** memiliki tujuan yaitu:
   a. Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas, dengan sasaran yaitu:
      1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif.
      2) Meningkatnya kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan pembangunan keluarga



Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Logis Misi 3

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

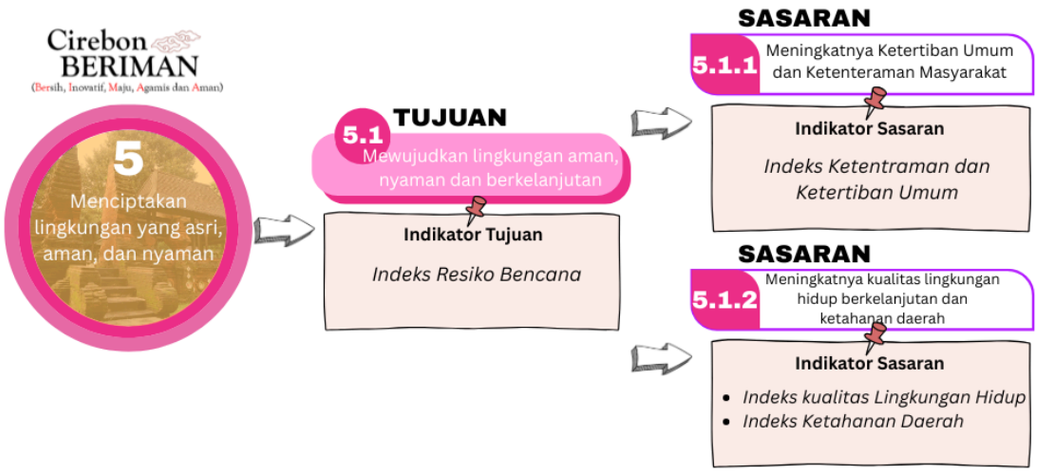
4. Perwujudan Misi 4 : **Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya,** memiliki tujuan yaitu:
   a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius, dengan sasaran yaitu:
      1) Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat.



Gambar 3.6 Kerangka Berpikir Logis Misi 4

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

5. Perwujudan Misi 5 : **Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman,** memiliki tujuan yaitu:
   a. Mewujudkan lingkungan aman dan nyaman, yang didukung, dengan sasaran yaitu:
      1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
      2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah

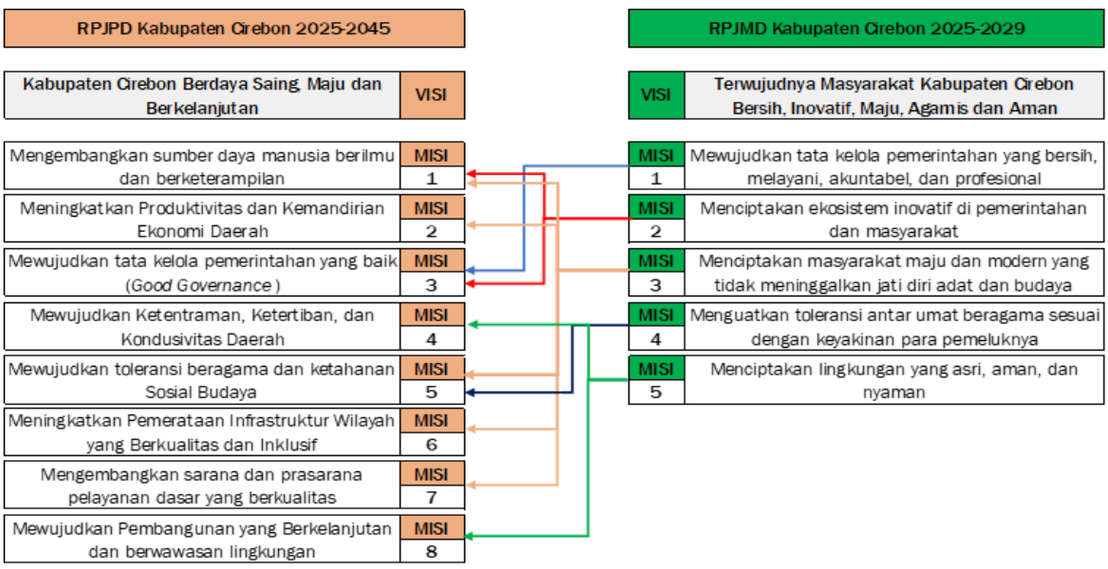


Gambar 3.7 Kerangka Berpikir Logis Misi 5

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

3.1.4 Keselarasan Visi-Misi Bupati Cirebon Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

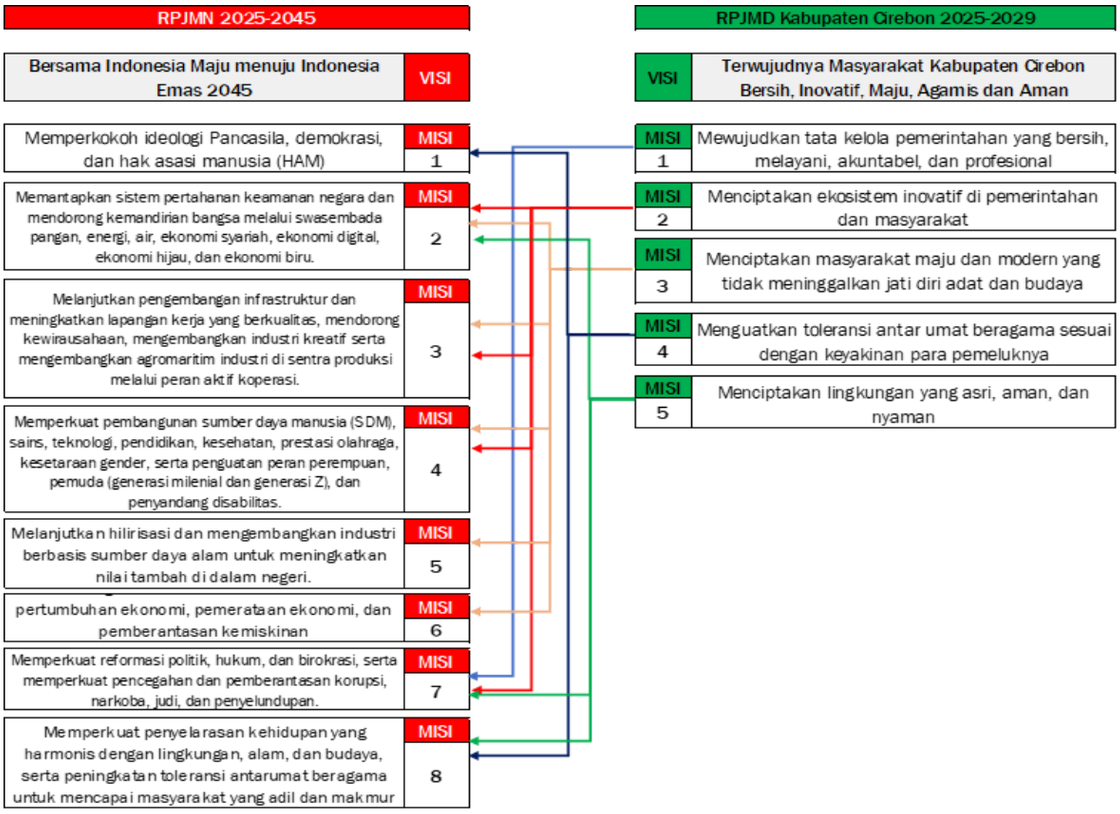
RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 pada gambar berikut ini :



Gambar 3.8 Skema keterkaitan Visi-Misi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

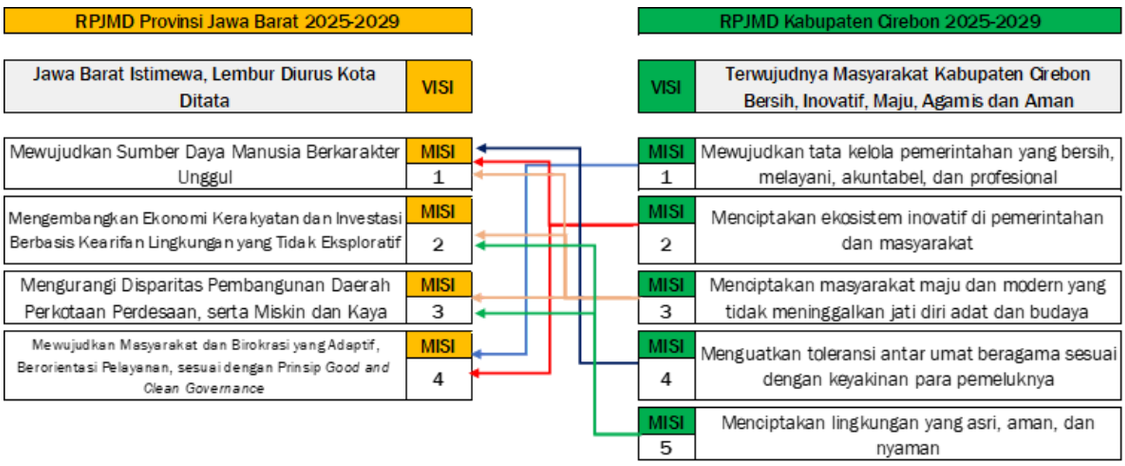
RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 juga harus mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2025-2029. Keselarasan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah pada visi dan misi daerah yang mendukung visi nasional dan astacita. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui Gambar berikut ini :



Gambar 3.9 Skema keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah pada misi dan visi. Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 3.10 Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

RPJMD Kabupaten merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan agar sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dari RPJMD, masing-masing perangkat daerah menyusun Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang lebih operasional, berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja). Lebih lanjut, rencana kerja seluruh perangkat daerah dihimpun, diintegrasikan, dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten, yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. RKPD memuat prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif, serta menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD tahun berjalan. Dengan demikian, RPJMD memberikan arah strategis lima tahunan, Renstra Perangkat Daerah menerjemahkannya ke lingkup teknis perangkat daerah, dan RKPD memastikan bahwa setiap tahun langkah-langkah operasional yang diambil tetap berada dalam jalur pencapaian target RPJMD.

Visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional**	**1.1**	**Mewujudkan pemerintahan Bersih**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**81,14**	**82,31**	**83,48**	**84,66**	**85,83**	**87,00**	**88,17**	**88,17**		
		1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel dan transparan	Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Nilai SAKIP	Nilai	66,20	68,50	69,20	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00	• Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; • Inspektorat	• Dinas Komunikasi dan Informatika, • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Seluruh Perangkat Daerah
					Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,24	4,30	4,35	4,41	4,46	4,52	4,58	4,58	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
					Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat
					Indeks SPBE	Poin	3,61	3,71	3,81	3,91	4,00	4,10	4,20	4,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); • Seluruh Perangkat daerah
					Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	16,76	17,51	18,26	19,00	19,75	20,50	21,25	21,25	Badan Pendapatan Daerah	• Badan Keuangan dan Aset Daerah, • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Kesehatan, • Dinas Lingkungan Hidup, • Dinas Perhubungan, • Dinas Perdagangan dan Perindustrian, • Dinas Ketenagakerjaan, • Dinas Pertanian, • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, • Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat**	**2.1**	**Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi,**		**Indeks Daya Saing Daerah**	**Poin**	**3,80**	**3,94**	**4,08**	**4,22**	**4,36**	**4,50**	**4,65**	**4,65**		
		2.1.1	Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari	Daya saing daerah berbasis kualitas	Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,91	62,00	62,57	63,14	63,70	64,27	66,66	66,66	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	• Sekretariat Daerah;

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
			sisi faktor SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi	SDM, inovasi, dan produktivitas											Pengembangan Daerah,	• Seluruh perangkat Daerah
3	**Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya**	**3.1**	**Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,83**	**5,32**	**6,37**	**7,68**	**7,83**	**8,16**	**8,16**	**8,16**		
					PDRB Perkapita ADHB	**Rp Juta**	**28,14**	**29,25**	**32,19**	**35,03**	**38,17**	**41,72**	**45,60**	**45,60**		
					Indeks Pembangunan Manusia	**Poin**	**72,30**	**73,02**	**73,62**	**74,20**	**74,79**	**75,40**	**75,98**	**75,98**		
		3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif.	Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses layanan dasar serta infrastruktur	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	3,79	3,84	4,06	4,28	4,49	4,71	4,92	4,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian; • Dinas Pertanian • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,74	6,65	5,74	5,48	5,43	5,37	5,29	5,29	Dinas Ketenagakerjaan	• Dinas Pemuda dan Olahraga; • Seluruh dinas Ekonomi; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkat Kemiskinan	Persen	11,00	10,70	10,10	9,80	9,20	8,60	8,10	8,10	Dinas Sosial	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Dinas Kesehatan; • Dinas Pendidikan, • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman														
														• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah	Persen	2,68	4,93	5,63	6,45	6,87	7,27	7,58	7,58	• Dinas Pertanian; • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; • Dinas Perdagangan dan Perindustrian; • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; • Sekretariat Daerah(Perekonomian) • Dinas Ketenagakerjaan
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	88,93	89,23	89,81	90,22	90,62	91,03	91,46	91,46	• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, • Dinas Perhubungan	• Dinas Komunikasi dan Informatika; • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Indeks Desa	Poin	N/A	78,89	81,39	83,89	86,39	88,89	91,39	91,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Kecamatan; • Sekretariat Daerah (bagian pemerintahan) • Dinas Sosial
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	5,65	5,61	5,57	5.54	5.24	4.90	4.49	4.49	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	• Dinas Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Sosial • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pendidikan

Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman															
															• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Perhubungan • Kecamatan
		3.1.2	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga	Kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berbudaya, dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Poin	0,600	0,609	0,615	0,621	0,626	0,632	0,637	0,637	Dinas Pendidikan	• Dinas Perpustakaan; • Dinas Pemuda dan Olahraga
					Indeks Kesehatan	Poin	0,846	0,848	0,853	0,856	0,860	0,864	0,867	0,867	Dinas Kesehatan	• Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Dinas Pemuda dan Olahraga
					Indeks Kebudayaan daerah	Poin	45,67	46,87	47,76	48,66	49,56	50,45	51,35	51,35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	Sekretariat Daerah (perekonomian)
					Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	62,2	63,5	64,8	66,1	67,2	68,3	69,4	69,4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Dinas Pendidikan, • Dinas Sosial • Sekretariat Daerah • Dinas Ketenagakerjaan • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, • Dinas Kesehatan, • Sekretariat Dewan

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
																• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, • Dinas Komunikasi dan Informatika;
4	**Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya**	**4.1**	**Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius**		**Indeks Kesalihan Sosial**	Poin	N/A	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,03	84,03		
		4.1.1	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	74,79	74,95	75,10	75,26	75,42	75,57	75,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Sekretariat Daerah • Kecamatan
5	**Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman**	**5.1**	**Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan**		**Indeks Resiko Bencana**	**Poin**	**133,04**	**129,72**	**126,39**	**123,07**	**119,74**	**116,42**	**113,09**	**113,09**		
		5.1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kriminalitas	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	52,19	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,01	58,01	Satuan Polisi Pamong Praja	• Kecamatan, • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah	kualitas lingkungan hidup yang terjaga, berkelanjutan, serta meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54,55	63,08	63,33	63,59	63,84	64,09	66,30	66,30	Dinas Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah (Perekonomian dan SDA); • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Kerangka Nasional dan Provinsi

3.2.1.1 Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Kabupaten Cirebon

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 3.11 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029

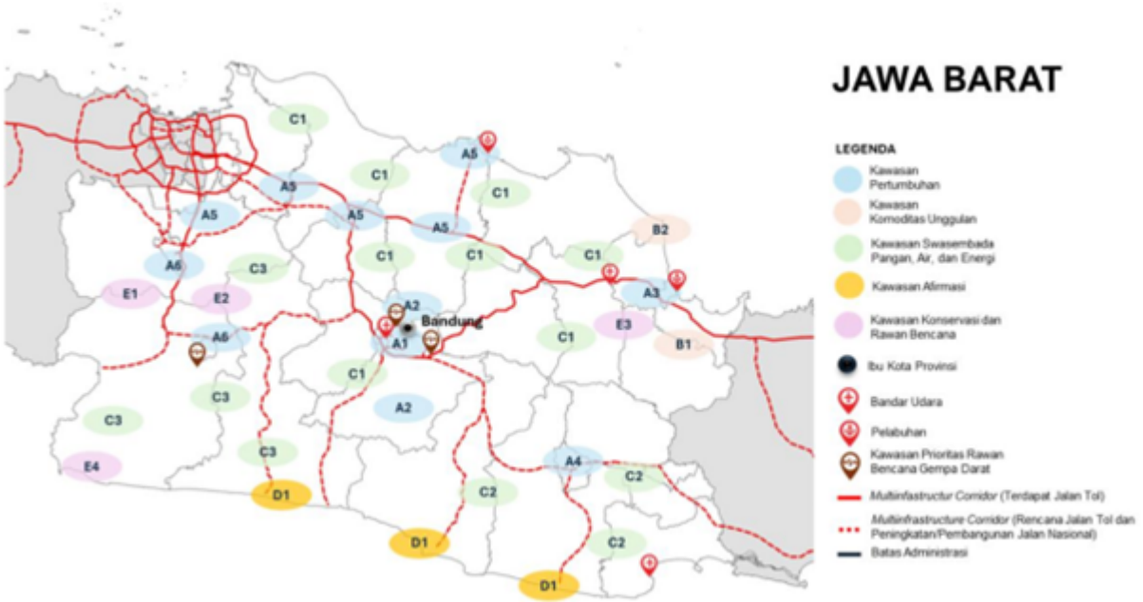
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK	IKLH Daerah	TPT (%)
JAWA BARAT									
2025	5,10	59,60	12,72	5,85 - 6,46	0,383 – 0,390	0,57	6,61	64,06	6,42 - 6,99
2030	6,06	91,57	12,20	2,57 - 3,52	0,379 - 0,418	0,60	12,68	65,32	5,86 – 6,87
KABUPATEN CIREBON						*IPM			
2025	5,32	29,25	2,32	10,70	0,355	73,02	5,37	63,08	6,65
2030	8,16	45,60	2,33	8,10	0,343	75,98	8,22	66,30	5,29

Gambar 3.12 Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Cirebon Periode RPJMD 2025–2030

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2030

Dengan target Pertumbuhan ekonomi 8%, Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan fokus Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati; Kawasan Komoditas Unggulan dengan fokus Komoditas Unggulan Tebu Cirebon-Majalengka dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon; Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi dengan fokus Swasembada Pangan, Air dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) sebagaimana pemetaan berikut:



Gambar 3.13 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Jawa Barat

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada kewilayahan, dimana pembangunan kewilayahan berfokus pada pengembangan suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.



Gambar 3.14 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Barat

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati; Kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi dengan prioritas intervensi sebagai berikut:

- ❖ Indikasi Intervensi Kawasan Perkotaan cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati
  - Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon, antara lain melalui:
    - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
    - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan

- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cirebon (PHTC)
- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gunung Jati Cirebon (PHTC)
- Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya
- Pengembangan SPAM Regional Cirebon Raya
- Pengembangan koridor industri Cirebon-Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan)
- Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik
- Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang
- Pengembangan Kertajati Aerocity
- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
- Pengembangan kota agropolitan Cirebon
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah

❖ Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Cirebon-Majalengka

- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu)
- Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu)
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu)
- Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu)
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu

❖ Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon:

- Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan
- Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Indramayu-Cirebon
- Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
- Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
- Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat
- Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
- Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
- Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
- Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu-Cirebon

❖ Indikasi Intervensi Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung,

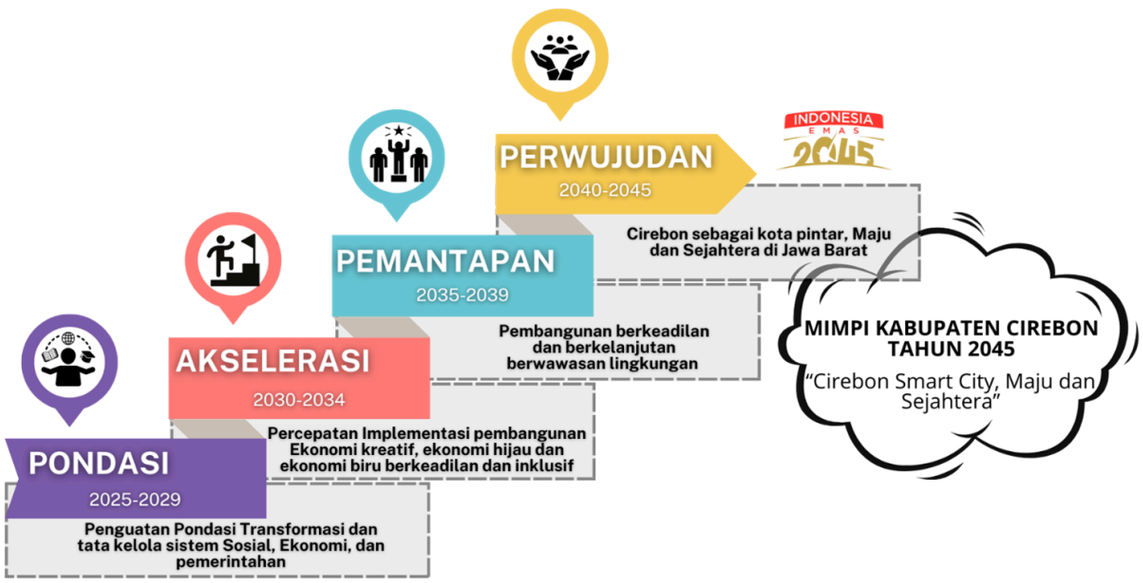
DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, Situ Cipanunjang-Cileunca

- Pembangunan infrastruktur PLTA PS Upper Cisokan
- Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur
- Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha
- Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang-Windu
- Pembangunan infrastruktur PLTP Tangkubanparahu
- Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas
- Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam rencana komprehensif melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam melaksanakan misi isu strategis daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Arah kebijakan selanjutnya diuraikan ke dalam strategi sebagai rencana tindakan komprehensif dan langkah/upaya dari pelaksanaan kebijakan, untuk kemudian diimplementasikan menjadi program prioritas pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) yang dirumuskan dengan tema "Penguatan Pondasi Transformasi dan Tata Kelola Sistem Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan" sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.15 Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

Upaya penguatan fondasi dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi meliputi:

1. Perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan vokasional adaptif;
2. Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (berakhlak);
4. Peningkatan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
5. Peningkatan toleransi beragama dan kohesi sosial budaya;
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sesuai potensi dan kebutuhan;
8. Penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Dengan berpedoman pada Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) serta mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2025-2030, arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
1	**Mewujudkan pemerintahan Bersih**					
1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan	Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dan efektif	1	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*)	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			2	Penataan peraturan perundang undangan	Sekretariat Daerah	Diskominfo
			3	Pengembangan *smart governance* yang unggul	Sekretariat Daerah	Diskominfo
			4	penguatan dan penataan organisasi	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			5	Penerapan sistem merit secara konsisten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah
			6	peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan *Corporate university*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
			7	Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah
			8	penguatan budaya kerja pemerintahan menjadi basis utama perubahan kinerja pemerintahan	Sekretariat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			9	perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasi teknologi informasi	Bappeda, BKAD, Diskominfo, dan Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			10	Penataan proses bisnis SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	Diskominfo	Sekretariat Daerah, DPMPTSP dan Disdukcapil
			11	peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh Kecamatan
			12	peningkatan layanan dan kemudahan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			13	peningkatan layanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
			14	Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Seluruh Kecamatan	Diskominfo
			15	Digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			16	Monitoring dan pengendalian dalam rangka pengambilan kebijakan (*evidence based policy*)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
			17	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal;	Badan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi**					
2.1	Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi	Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan SDM berkualitas, penguatan pasar yang kompetitif, serta pembangunan ekosistem inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi	1	Implementasi penataan kawasan kecamatan berdasarkan analisis perekonomian kawasan dan pasar, sosial budaya dan kependudukan, tata bangunan dan lingkungan dan citra kawasan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Sekretariat Daerah
			2	Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
			3	Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			4	Peningkatan kerjasama	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat Daerah
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			6	Pengembangan aplikasi terkait kepegawaian (SIPEKA, ELMU, SIMPEG, Manajemen talenta) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Diskominfo
3	**Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas**					
3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi,	Akselerasi penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan jaring sosial serta	1	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
	infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif.	pemberdayaan kesejahteraan masyarakat				Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
			3	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
			4	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Pemuda dan Olahraga; Seluruh dinas Ekonomi; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Perempuan dan Perlindungan Anak
			5	peningkatan fasilitas olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			6	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	Dinas Sosial	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Ketenagakerjaan
			7	peningkatan akses terhadap rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
			8	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			9	mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan
		Peningkatan infrastruktur pendukung potensi unggulan ekonomi dalam rangka menunjang iklim investasi dan kemajuan ekonomi daerah	1	Peningkatan pemanfaatan ruang dan perencanaan sesuai dengan rencana Tata ruang wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			2	Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perhubungan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; DPMPTSP
			3	Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan
			4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup
			5	Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat
			6	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian
			7	Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perhubungan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
			8	Peningkatan nilai tambah petani melalui hilirisasi produk unggulan pertanian berupa dukungan sarpras pasar	Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			9	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			10	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			11	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk produk perikanan menuju agroindustri perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			12	peningkatan ilmu dan teknologi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pendidikan: Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			13	Pengembangan ekonomi hijau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
			14	pengembangan ekonomi biru	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan
			15	peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; DPMPTSP; Sekretariat

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Daerah(Perekonomian); Dinas Ketenagakerjaan
			16	meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (*public private partnership*) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; DPMPTSP; Sekretariat Daerah(Perekonomian); Dinas Ketenagakerjaan
			17	pengembangan ekonomi Orange	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			18	peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal	1	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm
			2	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm; Diskominfo
			3	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian
			4	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Dinas Pertanian	Badan Pendapatan Daerah; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Tata Ruan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.2	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga	Akselerasi kolaborasi Pentahelix dalam peningkatan pemerataan pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan kualitas keluarga	1	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3	peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			4	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Sosial; Diskominfo; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			5	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; DPPKBP3A
			6	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial;
			7	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; DPPKBP3A; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; DPMD; Dinas Pendidikan; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			8	penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial;
			9	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			10	perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	DP2KBP3A	Dinas Sosial
			11	pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP2KBP3A	Dinas Sosial
			12	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	DP2KBP3A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan
			13	penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Penguatan karakter wisata berbasis kearifan budaya dan berkelanjutan	1	percepatan rintisan desa/ kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Diskominfo
			2	Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3	peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Diskominfo; Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			4	peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan
			5	peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan
			6	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; DPMPTSP; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			7	peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Umum dan Tata Ruang; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4	**Mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan kesetaraan**					
4.1	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketakwaan aparatur serta masyarakat melalui integrasi nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan keagamaan di masyarakat yang integratif dan menyeluruh	1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Sekretariat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bakesbangpol; Diskominfo
			2	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Sekretariat Daerah	Bakesbangpol; DP2KBP3A; Diskominfo
			3	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan; DP2KBP3A; Diskominfo; Sekretariat DPRD; Dinas Sosial
5	**Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan**					
5.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satpol PP; BPBD; Dinas Sosial; Diskominfo
			2	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Bakesbangpol; Dinas Perhubungan; Diskominfo; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			3	Peningkatan penegakan perda dan perkada	Satpol PP	Sekretariat Daerah; Diskominfo; Bakesbangpol; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			4	Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Satpol PP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; BPBD; Dinas Sosial

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			5	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Bakesbangpol; Sekretariat Daerah; Diskominfo
5.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1	peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian;Diskominfo
			2	peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
			3	penataan alun alun kecamatan sebagai RTH dan ruang Interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alarm dan non alam	1	pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	BPBD	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Satpol PP; Dinas Sosial; Diskominfo
			2	peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	BPBD	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			3	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			4	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial	BPBD; Dinas Kesehatan;
			5	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	Dinas Sosial	BPBD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			6	pengembangan skema pelaporan mitigasi bencana Geo-tagging untuk memberikan informasi bencana yang lebih akurat dan presisi	BPBD	Diskominfo; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Sosial

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan tahunan periode 2026-2030. Pentahapan pembangunan tahunan pada tahun pertama (2026) berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan dasar-dasar pengembangan SDM dan kewilayahan. Pada tahun kedua dan seterusnya barulah dilakukan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan sektor unggulan daerah, inovasi, sumber daya manusia unggul dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.16 Tematik Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut:

- Tahun 2026 : Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar
- Tahun 2027 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- Tahun 2028 : Penguatan sumber daya manusia unggul
- Tahun 2029 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Tahun 2030 : Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon

Berdasarkan arah kebijakan, strategi dan pentahapan pembangunan tahunan periode 2026-2030, ditentukan tema atau fokus pembangunan tahunan. Tema tahunan pada RPJMD 2025-2029 ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tahap I pada RPJPD Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2029. Tema pembangunan tahunan Kabupaten Cirebon 2026-2030 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.17 Tema dan Tahap Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025

Adapun pentahapan pembangunan diuraikan ke dalam arah kebijakan sebagai acuan pemrograman dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	**Peningkatan pertumbuhan ekonomi**	**Penguatan sumber daya manusia unggul**	**Peningkatan kesejahteraan masyarakat**	**Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon**
Misi untuk mewujudkan Cirebon Beriman	*"Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik."*	*"Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem hilirisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan."*	*"Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Kreatif, Inovatif dalam bingkai kesetaraan."*	*"Penguatan Kehidupan yang Harmonis antar masyarakat, Umat Beragama, Lingkungan Alam dan Budaya untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur."*	*"Mewujudkan Cirebon yang Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman melalui Ketahanan Sosial dan Lingkungan."*
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional	Pengembangan *smart governance* yang unggul	peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan *Corporate university*	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*)	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*)	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*)
	penguatan dan penataan organisasi	Penerapan sistem merit secara konsisten	penguatan budaya kerja pemerintahan menjadi basis utama perubahan kinerja pemerintahan	Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Penataan proses bisnis SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasi teknologi informasi	Monitoring dan pengendalian dalam rangka pengambilan kebijakan (*evidence based policy*)	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal;	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal;
	Peningkatan layanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD				
	Penataan peraturan perundang undangan	peningkatan layanan dan kemudahan perijinan	Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
	Digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik	peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat	Implementasi penataan kawasan kecamatan berdasarkan analisis perekonomian kawasan dan pasar, sosial budaya dan kependudukan, tata bangunan	Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah
		Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah	Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah	Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah	Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	**Peningkatan pertumbuhan ekonomi**	**Penguatan sumber daya manusia unggul**	**Peningkatan kesejahteraan masyarakat**	**Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon**
	dan lingkungan dan citra kawasan.	Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah	Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah	Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah	Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah
	Pengembangan aplikasi terkait kepegawaian (SIPEKA, ELMU, SIMPEG, Manajemen talenta) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir ASN	Peningkatan kerjasama			
Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon
	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi
	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester
	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha
	peningkatan akses terhadap rumah layak huni	peningkatan akses terhadap rumah layak huni	peningkatan akses terhadap rumah layak huni	peningkatan fasilitas olahraga	peningkatan fasilitas olahraga
	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
	pemberdayaan masyarakat dan desa	pemberdayaan masyarakat dan desa	pemberdayaan masyarakat dan desa	mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam	mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Penguatan sumber daya manusia unggul	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon
				pembangunan desa (desa inklusif)	pembangunan desa (desa inklusif)
	Peningkatan pemanfaatan ruang dan perencanaan sesuai dengan rencana Tata ruang wilayah	Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran	Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni
	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas
	Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa	Peningkatan nilai tambah petani melalui hilirisasi produk unggulan pertanian berupa dukungan sarpras pasar	Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan
		Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT			
	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk produk perikanan menuju agroindustri perikanan	peningkatan ilmu dan teknologi perikanan	pengembangan ekonomi biru	pengembangan ekonomi biru	pengembangan ekonomi biru

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	**Peningkatan pertumbuhan ekonomi**	**Penguatan sumber daya manusia unggul**	**Peningkatan kesejahteraan masyarakat**	**Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon**
	meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (*public private partnership*) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal	peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif	Pengembangan ekonomi hijau	Pengembangan ekonomi hijau	Pengembangan ekonomi hijau
		peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor	pengembangan ekonomi Orange	pengembangan ekonomi Orange	pengembangan ekonomi Orange
	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online
	peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online				
	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)
	penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)
	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya
	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Penguatan sumber daya manusia unggul	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon
	pemenuhan hak dan perlindungan anak	pemenuhan hak dan perlindungan anak	perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	percepatan rintisan desa/ kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon	Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan	Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan	Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan
			peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata	peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata	peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata
			peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya	peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya	peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya
	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata	peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan
	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat
	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau
	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun
Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat

Misi Pembangunan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Penguatan sumber daya manusia unggul	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon
dengan keyakinan para pemeluknya	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah
	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman	Peningkatan penegakan perda dan perkada	Peningkatan penegakan perda dan perkada	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	penataan alun alun kecamatan sebagai RTH dan ruang Interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	pengembangan skema pelaporan mitigasi bencana Geo-tagging untuk memberikan informasi bencana yang lebih akurat dan presisi	pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana
	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana
	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana

3.2.3 Lokus Pembangunan

Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 dilakukan secara strategis dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Proses ini didasarkan pada pendekatan analitis terhadap dokumen-dokumen sektoral dan spasial yang mampu mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.

Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, kontekstual, dan berbasis kewilayahan, sehingga setiap intervensi yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal, tingkat urgensi, serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, penetapan lokus pembangunan wilayah diselaraskan secara konsisten dengan visi dan misi pembangunan daerah, guna memastikan setiap intervensi pembangunan berkontribusi langsung terhadap tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025–2029. Visi-misi ini menjadi fondasi normatif dalam menyusun arah dan prioritas pembangunan di tingkat wilayah. Terdapat lima dimensi utama yang menjadi landasan dalam menentukan lokus pembangunan wilayah, yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui optimalisasi potensi unggulan sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, perikanan, UMKM, serta industri yang tersebar di berbagai kecamatan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi, termasuk wilayah dengan prevalensi kemiskinan ekstrem, risiko stunting, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, serta minimnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal dan rentan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, dengan menetapkan wilayah-wilayah prioritas dengan tingkat pendidikan dan kapasitas yang relatif rendah untuk pengembangan layanan pendidikan, pelatihan vokasi, serta pusat-pusat inovasi dan kewirausahaan.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, melalui pembangunan infrastruktur kelembagaan dan digitalisasi layanan publik, khususnya di pusat-pusat administratif kecamatan yang memiliki peran strategis sebagai simpul pelayanan.
5. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang mengalami tekanan lingkungan tinggi dan kawasan ekosistem penting seperti hutan, kawasan pesisir, dan daerah resapan air, industri, pertambangan dan lain-lain.

Setiap wilayah dalam Kabupaten Cirebon dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian kelima dimensi tersebut. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga mendorong akselerasi pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal, dengan prinsip keadilan spasial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokus pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Cirebon :

Tabel 3.4 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cirebon

No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah	Dasar Penetapan
1	Pertumbuhan Ekonomi	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah	Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati -Trusmi	1. Kecamatan Gunung Jati 2. Kecamatan Weru 3. Kecamatan Tengah Tani 4. Kecamatan Plered	RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044
			Pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok	1. Kecamatan Mundu 2. Kecamatan Beber 3. Kecamatan Greged	
			Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor Soekarno	Kecamatan Talun	
			Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang	Kecamatan Dukupuntang	

No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah	Dasar Penetapan
		belum optimalnya pengembangan budaya	Pelestarian Cagar Budaya Gunung Singkil	Kecamatan Susukan Lebak	RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044
			Pelestarian Kantor Kecamatan Lemahabang	Kecamatan Lemahabang	
			Pelestarian Cagar Budaya Masjid Gamel	Kecamatan Plered	
			Pelestarian Cagar Budaya Pabrik Gula Karangsuwung	Kecamatan Karangsembung	
			Pelestarian Cagar Budaya Situs Batu Tulis Huludayeuh	Kecamatan Dukupuntang	
			Pelestarian Stasiun Cangkring	Kecamatan Weru	
		Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian	Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044
			Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura	1. Kecamatan Astanajapura; 2. Kecamatan Babakan; 3. Kecamatan Beber: 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Depok; 6. Kecamatan Dukupuntang; 7. Kecamatan Gegesik; 8. Kecamatan Gempol; 9. Kecamatan Greged; 10. Kecamatan Jamblang; 11. Kecamatan Kaliwedi; 12. Kecamatan Karangsembung; 13. Kecamatan Karangwareng; 14. Kecamatan Klangenan; 15. Kecamatan Lemahabang; 16. Kecamatan Mundu; 17. Kecamatan Pabedilan; 18. Kecamatan Pabuaran; 19. Kecamatan Palimanan; 20. Kecamatan Pasaleman; 21. Kecamatan Sedong; 22. Kecamatan Sumber; 23. Kecamatan Susukan; 24. Kecamatan Susukan Lebak; 25. Kecamatan Talun; 26. Kecamatan Waled	
			Perwujudan Kawasan Pertanian Peternakan	1. Kecamatan Ciledug; 2. Kecamatan Karangwareng; 3. Kecamatan Pasaleman; dan 4. Kecamatan Waled	

No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah	Dasar Penetapan
		belum optimalnya pengembangan industri	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Babakan; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Ciwaringin; 6. Kecamatan Depok, 7. Kecamatan Gebang; 8. Kecamatan Gempol; 9. Kecamatan Jamblang; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Lemahabang: 12. Kecamatan Losari; 13. Kecamatan Mundu; 14. Kecamatan Pabedilan; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Palimanan; 17. Kecamatan Pangenan; 18. Kecamatan Plered; 19. Kecamatan Plumbon; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Talun 22. Kecamatan Weru	RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044
		Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kecamatan Sumber, 2. Kecamatan Kedawung, 3. Kecamatan Talun	RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044
			Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kecamatan Arjawinangun 2. Kecamatan Palimanan 3. Kecamatan Lemahabang 4. Kecamatan Ciledug	
			Pengembangan Kawasan perdagangan Kedawung	Kecamatan Kedawung	
			Pengembangan Kawasan perdagangan Sumber	Kecamatan Sumber	
2	Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Masih tingginya jumlah PPKS	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Terpadu	Kabupaten Cirebon	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon
		Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Kabupaten Cirebon	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon

No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Program Utama	Lokus Pembangunan Wilayah	Dasar Penetapan
		Risiko stunting di Kabupaten Cirebon cukup tinggi	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Kabupaten Cirebon	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon
		belum optimalnya ketahanan pangan daerah dari aspek ketersediaan dan distribusi pangan yang B2SA	Peningkatan akses pangan dan perbaikan infrastruktur	1. Kecamatan Astanajapura 2. Kecamatan Beber 3. Kecamatan Depok 4. Kecamatan Gebang 5. Kecamatan Gegesik 6. Kecamatan Gempol 7. Kecamatan Jamblang 8. Kecamatan Karangwareng 9. Kecamatan Klangenan 10. Kecamatan Lemahabang 11. Kecamatan Mundu 12. Kecamatan Pasaleman 13. Kecamatan Sedong 14. Kecamatan Susukan Lebak 15. Kecamatan Talun 16. Kecamatan Weru	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
3	Sumber Daya Manusia	rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Kabupaten Cirebon	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cirebon
4	Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Kabupaten Cirebon	RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045
5	Lingkungan Hidup	Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman	Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Layak dan Aman	Kabupaten Cirebon	KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030
		Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku	Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	Kabupaten Cirebon	KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030
		Tingginya risiko dan ancaman bencana	Pengurangan Risiko Bencana dan Peningkatan Mitigasi	Kabupaten Cirebon	KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030
		Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian	Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian	Kabupaten Cirebon	KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030

3.2.4 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis, terukur, dan adaptif. Pemerintah Daerah telah menyusun Register Risiko dan Rencana Pengendalian sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta pedoman teknis BPKP dan Inspektorat Daerah.

Register risiko disusun dengan mengidentifikasi potensi risiko utama pada setiap program dan kegiatan prioritas, beserta penyebab, status risiko (*controllable*/*uncontrollable*), tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat dampaknya (impact) terhadap pencapaian sasaran. Penilaian risiko dilakukan dengan metode skoring, di mana risiko dinilai dalam skala 1 hingga 5 untuk masing-masing aspek kemungkinan dan dampak. Skor akhir diperoleh dari hasil perkalian kemungkinan (K) x dampak (D) dan diklasifikasikan dalam kategori risiko: Sangat Rendah (1-2), Rendah (3-4), Moderat (5-9), Tinggi (10-16) dan Ekstrim (di atas 16).

Sebagai contoh, risiko “Ketimpangan pembangunan wilayah dan ketidakmerataan program” dinilai memiliki kemungkinan 4 (sering terjadi) dan dampak 5 (sangat tinggi), sehingga total skor risikonya adalah 20 dan dikategorikan sebagai ekstrim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dirumuskan rencana pengendalian berupa perluasan cakupan program sosial, perencanaan berbasis spasial.

Setiap risiko juga dilengkapi dengan rencana pengendalian dalam bentuk penyusunan regulasi, SOP, penguatan kelembagaan, serta pelibatan pemangku kepentingan terkait. Jadwal pelaksanaan pengendalian dirancang sesuai tingkat urgensi dan kesiapan program, yang diklasifikasikan ke dalam jangka pendek (1-2 tahun), menengah (2-3 tahun), dan panjang (4-5 tahun). Melalui pendekatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon mampu mengidentifikasi secara dini potensi risiko yang menghambat pencapaian program pembangunan, serta melaksanakan mitigasi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.5 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Infrastruktur Pengendalian	Jadwal Pengembangan		Penanggung Jawab
						Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			Target Waktu	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan adaptif, akuntabel dan transparan	Rendahnya kinerja birokrasi dan resistensi terhadap perubahan digital	Kurangnya kapasitas ASN dan sistem belum terintegrasi	C	Lambatnya reformasi, turunnya indeks SPBE/SAKIP	4	4	16	Tinggi	Peningkatan kompetensi ASN, integrasi sistem pelayanan publik	SOP Reformasi Birokrasi Digital, Perda SPBE	P-M	Dapat dimulai melalui pelatihan sejak awal RPJMD dan regulasi digitalisasi	Sekda, BKPSDM, Diskominfo
2	Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi	Minimnya inovasi daerah dan keterbatasan kolaborasi riset	Belum kuatnya jejaring inovasi dan rendahnya insentif	C	Daya saing daerah stagnan, indeks inovasi rendah	3	3	9	Moderat	Pendirian pusat inovasi, kemitraan dengan perguruan tinggi	MoU Perguruan Tinggi, SK Bupati Pusat Inovasi	M	Perlu waktu konsolidasi, pendanaan, dan kerja sama lintas sektor	Bappelitbangda, Diskominfo, Disperindag
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur dan ketahanan pangan yang inklusif	Ketimpangan pembangunan wilayah dan ketidakmerataan program	Alokasi anggaran dan infrastruktur belum proporsional	C	Ketimpangan sosial-ekonomi, capaian pembangunan tidak merata	4	5	20	Ekstrim	Perluasan cakupan program sosial, perencanaan berbasis spasial	Peta Program Sosial Berbasis GIS, Regulasi Afirmasi Daerah Prioritas	P-M	Dimulai dari pemutakhiran data terpadu dan zonasi pembangunan inklusif	Bappelitbangda, Dinsos, DPUTR
		Rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha tani	Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian	C/UC	Produktivitas pertanian tidak optimal dan daya saing produk pertanian daerah menjadi rendah	4	4	16	Tinggi	1. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian 2. Peningkatan dan perbaikan jalan usaha tani 3. Pembangunan gudang dan	- Sistem informasi spasial lahan dan irigasi - Database infrastruktur pertanian berbasis desa - Peraturan daerah/kepala	P-J	- Perlu integrasi dengan program nasional dan provinsi seperti pembangunan irigasi tersier (Kementan/PU) - Pendanaan dapat bersumber dari APBD, DAK fisik,	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Infrastruktur Pengendalian	Jadwal Pengembangan		Penanggung Jawab
						Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			Target Waktu	Keterangan	
										rumah pascapanen 4. Penguatan kelembagaan petani melalui pelatihan dan pendampingan	daerah yang mengatur prioritas infrastruktur pertanian - Kelembagaan penyuluh pertanian terpadu (BPP) dan kelompok tani aktif		atau skema KPBU - Disarankan pelibatan partisipatif masyarakat tani dalam tahap perencanaan dan pengawasan proyek	
4	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kesetaraan gender	Ketimpangan kualitas layanan dasar antar wilayah	Distribusi SDM dan infrastruktur belum merata	C	IPM rendah, kesenjangan akses layanan	4	5	20	Ekstrim	Redistribusi tenaga layanan dasar, pembangunan terpadu	SK Redistribusi Tenaga, Roadmap Pembangunan Terpadu	P	Perlu integrasi lintas OPD sejak awal RPJMD	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan
5	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Rendahnya partisipasi dalam pembinaan keagamaan	Minimnya program terpadu dan dukungan kelembagaan	C	Lemahnya penghayatan nilai-nilai moral dan spiritual	2	3	6	Moderat	Penguatan program keagamaan, kolaborasi dengan tokoh agama	SK Forum Tokoh Agama, Panduan Kegiatan Pembinaan Rohani	P-M	Penyusunan bisa dilakukan cepat, pelaksanaan kolaboratif tahunan	Bag. Kesra, Kemenag, MUI Daerah
6	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Potensi konflik sosial dan gangguan keamanan	Lemahnya deteksi dini dan koordinasi antar instansi	C	Terganggunya stabilitas sosial dan kenyamanan warga	3	4	12	Tinggi	Penguatan Satpol PP, FKDM, forum komunikasi masyarakat	SOP Deteksi Dini Konflik, SK FKDM	P	SOP bisa disusun cepat, penting sebagai infrastruktur awal ketertiban	Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Infrastruktur Pengendalian	Jadwal Pengembangan		Penanggung Jawab
						Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			Target Waktu	Keterangan	
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Menurunnya kualitas air, udara, dan meningkatnya risiko bencana	Alih fungsi lahan, penanganan sampah belum optimal	C/UC	Turunnya IKLH, kerentanan terhadap banjir/abrasi	5	5	25	Ekstrim	Pengembangan TPPAS, reboisasi, pemetaan risiko	Masterplan TPPAS, Peta Daerah Rawan, Rencana Aksi Reboisasi	M-J	Perlu kajian teknis, pembiayaan besar, dan dukungan lintas pemerintah	DLH, BPBD, DPUTR

3.3 Program Prioritas

3.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Untuk menindaklanjutinya, maka dibuat prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon yang diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Adapun uraian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial
4. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja;
5. Penguatan sistem pangan daerah dan Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (Garam);
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dengan isu strategis pembangunan daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Tahun 2025-2029

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029		Isu Strategis	
PK 1	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;	IS 1	Penguatan nilai budaya masyarakat
		IS 4	Penguatan dan kerukunan umat beragama;
PK 2	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;	IS 8	Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
PK 3	peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	IS 2	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
PK 4	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja	IS 3	Percepatan penanggulangan kemiskinan
PK 5	Penguatan sistem pangan daerah dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (Garam)	IS 6	Penguatan Sistem Pangan Daerah
		IS 5	Penguatan kemandirian ekonomi daerah
PK 6	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien	IS 9	Pembangunan infrastruktur
PK 7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	IS 7	Tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Prioritas pembangunan nasional atau disebut dengan Asta Cita merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2024-2029. Delapan agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (Asta Cita), prioritas Provinsi Jawa Barat (4 Prioritas Pembangunan) dan Prioritas

Kabupaten Cirebon (PK), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Cirebon yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Asta Cita yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan (4 Prioritas Pembangunan) Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon

Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon
ASTA CITA 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	**PP 1:** Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul.	**PK 1:** Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi.
ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	**PP 3:** Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya.	**PK 2:** Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.
ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**PP 2:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.	**PK 6:** Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien.
ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	**PP 1:** Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul.	**PK 3:** Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial.

Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon
ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**PP 2:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.	**PK 5:** Penguatan sistem pangan daerah dan Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (garam).
ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	**PP 2:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.	**PK 4:** Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja.
ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	**PP 4:** Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip *good and clean governance.*	**PK 7:** Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.
ASTA CITA 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**PP 2:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.	**PK 2:** Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar

dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Kepmendagri 900. 1-2850 Tahun 2024, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.18 Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politiknya sebagai berikut:

- **CIREBON BERSIH**
  1. Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (s*mart government*)
  2. Peningkatan alokasi dana pembangunan desa dan kelurahan (desa & Kelurahan)
  3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah (pendapatan asli daerah)
  4. Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi
- **CIREBON INOVATIF**
  1. Penyelenggaraan forum ilmiah/event/gelar karya/Festival Inovasi, riset unggulan, lomba inovasi
  2. Kampung pintar dan inovatif
- **CIREBON MAJU**
  1. Kampung Sehat

2. Kampung literasi
3. Penyelenggaran forum investasi dan kewirausahaan tingkat nasional (seminar, temu bisnis, pameran produk, dll)
4. Penataan dan Pengembangan infrastruktur dasar kawasan peruntukan industri
5. Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon produk kreatif skala Regional dan nasional (Kemilau Batik Trusmi, Gerabah, Rotan, dll)
6. Pengembangan kawasan wisata tematik
7. Penataan infrastruktur pertanian (saluran irigasi dan jalan usaha tani)
8. Pengembangan sentra produksi garam dan produk turunan garam
9. Betonisasi jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)
10. Pengembangan PJU Pintar (smart PJU) basis digital/teknologi informasi penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED, Meterisasi Smart Kwh
11. Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)
12. Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani
13. Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan
14. Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah
15. Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal
16. Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan
17. Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)
18. Cirebon Investment Summit
19. Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional
20. Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus(BKK) dan pola magang ketenagakerjaan
21. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
22. Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru
23. Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)
24. Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas

❖ **CIREBON AGAMIS**

1. Penyelenggaraan forum ilmiah, dialog, kebangsaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan agama dengan para tokoh agama dan masyarakat
2. Pembangunan dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta pengembangan gedung untuk penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sebagai tempat kajian keilmuan Alquran dan alhadist
3. Penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat
4. Penyelenggaraan kegiatan Kampung Mengaji dan pengajian ASN, perangkat desa, organisasi wanita, PKK dan dharma wanita
5. Program beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk anak yatim serta penghafal Quran, disertai jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid, dan imam mushola.
6. Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat.

❖ **CIREBON AMAN**

1. Kampung bersih
2. Modernisasi pengolahan sampah
3. Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir
4. Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air
5. Pengembangan sistem informasi manajemen mitigasi kebencanaan, keselamatan dan Lingkungan Hidup basis IT
6. Cirebon Bebas Banjir: Sumur Resapan, kolam retensi/embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana

Tabel 3.9 Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2026-2030

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman										
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional	1.1	Mewujudkan pemerintahan Bersih					**Indeks Reformasi Birokrasi**			
			1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel dan transparan	Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan	a.	Indeks Pelayanan Publik	Mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Layanan Publik Basis Digital/Teknologi Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan
									Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
								Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
									Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						b.	Opini BPK	Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital (Smart Government)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
									Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
									Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						c.	Indeks SPBE	Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital (*Smart Government*)	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
									Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika
									Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						d.	Rasio Kemandirian Fiskal	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Pendapatan Asli Daerah)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
									Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
									Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat	2.1	Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi,					**Indeks Daya Saing Daerah**			
			2.1.1	Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor	Daya saing daerah berbasis kualitas SDM,	a.	Indeks Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Forum Ilmiah/Event/Gelar Karya/Festival Inovasi,	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
				SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi	inovasi, dan produktivitas			Riset Unggulan dan Lomba Inovasi		Pengembangan Daerah
									Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
								Kampung Pintar Dan Inovatif	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya	3.1	Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas					**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
							PDRB Perkapita ADHB			
							Indeks Pembangunan Manusia			
			3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif.	Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses layanan dasar serta infrastruktur	a.	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Penyelenggaran Forum Investasi Dan Kewirausahaan Tingkat Nasional (Seminar, Temu Bisnis, Pameran Produk, Dll)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								Cirebon Investment Summit	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						b.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus (BKK) dan pola magang ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
								Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				c. Tingkat Kemiskinan		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				d. Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah	Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional (Pameran Kemilau Batik Trusmi Dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Dll)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
					Pengembangan Kawasan Wisata Tematik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
					Pengembangan Sentra Produksi Garam Dan Produk Turunan Garam	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)		
					Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)		
					Akselerasi Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas		
					Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
					Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				e. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
								Kawasan Peruntukan Industri		
								Betonisasi Jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
								Pengembangan PJU Pintar (Smart PJU) Basis Digital/Teknologi Informasi, Penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED Meterisasi Smart Kwh	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
						f.	Indeks Desa	Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						g.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
								Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
									Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			3.1.2	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga	Kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berbudaya, dan berdaya saing	a.	Indeks Pendidikan	Kampung Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
									Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
									Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
									Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
									Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
						b.	Indeks Kesehatan	Kampung Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						c.	Indeks Kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
									Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
									Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
						d.	Indeks Pembangunan Keluarga		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPKBP3A
									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPKBP3A
									Program Pengendalian Penduduk	DPPKBP3A
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBP3A
									Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKBP3A
Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan	4.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang					**Indeks Kesalihan Sosial**			

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
keyakinan para pemeluknya		harmonis dan religius	4.1.1	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, serta meningkatnya ketahanan spiritual dan	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Penyelenggaraan forum ilmiah, dialog, kebangsaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan agama dengan para tokoh agama dan masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
								Pembangunan dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta pengembangan gedung untuk penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sebagai tempat kajian keilmuan Alquran dan alhadist		
								Penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat		
								Penyelenggaraan kegiatan Kampung Mengaji dan pengajian ASN, perangkat desa, organisasi wanita, PKK dan dharma wanita		
								Program beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk anak yatim serta penghafal Quran, disertai jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi guru		

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
								ngaji, imam masjid, dan imam mushola.		
								Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat		
									Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman	5.1	Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan					**Indeks Resiko Bencana**			
			5.1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kriminalitas	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
									Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
			5.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah	kualitas lingkungan hidup yang terjaga, berkelanjutan, serta meningkatnya ketahanan terhadap	a.	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kampung Bersih (Pesona Kasih = Pengelolaan Sampah Organik-Anorganik Kampung Bersih)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

VISI/ MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMEN 900	PERANGKAT DAERAH
					bencana dan perubahan iklim			Modernisasi Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
								Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
								Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air		
						b.	Indeks Ketahanan Bencanan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Kebencanaan Dan Keselamatan Basis IT	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
								Cirebon Bebas Banjir: Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
									Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
									Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026-2030

Program Prioritas Kepala Daerah	2026	2027	2028	2029	2030
VISI 1 : CIREBON BERSIH					
Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital (*Smart Government*)	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi
Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	424	424	424	424	424
Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Pendapatan Asli Daerah)	7%	7%	7%	7%	7%
Mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Layanan Publik Basis Digital/Teknologi Informasi	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec
VISI 2 : CIREBON INOVATIF					
Penyelenggaraan Forum Ilmiah/Event/Gelar Karya/Festival Inovasi, Riset Unggulan dan Lomba Inovasi	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
Kampung Pintar Dan Inovatif	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa
VISI 3 : CIREBON MAJU					
Kampung Sehat	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa
Kampung Literasi	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional (Pameran Kemilau Batik Trusmi Dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Dll)	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
Penyelenggaran Forum Investasi Dan Kewirausahaan Tingkat Nasional (Seminar, Temu Bisnis, Pameran Produk, Dll)	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
Pengembangan Kawasan Wisata Tematik	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan
Pengembangan Sentra Produksi Garam Dan Produk Turunan Garam	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even
Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi
Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi
Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan	1 BUMD	-	-	-	-

Program Prioritas Kepala Daerah	2026	2027	2028	2029	2030
Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi
Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal	40 kecamatan	40 kecamatan	40 kecamatan	40 kecamatan	40 kecamatan
Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Cirebon Investment Summit	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even
Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar
Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus (BKK) dan pola magang ketenagakerjaan	job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagakerjaan 10 perusahaan di dalam negeri	job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagakerjaan 10 perusahaan di dalam negeri	job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagakerjaan 10 perusahaan di dalam negeri	job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagakerjaan 10 perusahaan di dalam negeri	job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagakerjaan 10 perusahaan di dalam negeri
Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru	1 Kali	-	-	-	-
Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Kawasan Peruntukan Industri	88%	89%	91%	93%	95%
Betonisasi Jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)	88%	89%	91%	93%	95%
Pengembangan PJU Pintar (Smart PJU) Basis Digital/Teknologi Informasi, Penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED Meterisasi Smart Kwh	500 titik 1000 lampu 100 Kwh	500 titik 1000 lampu 100 Kwh	500 titik 1000 lampu 100 Kwh	500 titik 1000 lampu 100 Kwh	500 titik 1000 lampu 100 Kwh
VISI 4 : CIREBON AGAMIS					

Program Prioritas Kepala Daerah	2026	2027	2028	2029	2030
Penyelenggaraan forum ilmiah, dialog, kebangsaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan agama dengan para tokoh agama dan masyarakat	1 FUU	1 FUU	1 FUU	1 FUU	1 FUU
Pembangunan dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta pengembangan gedung untuk penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sebagai tempat kajian keilmuan Alquran dan alhadist	40 kec	40 kec	40 kec	40 kec	40 kec
Penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec
Penyelenggaraan kegiatan Kampung Mengaji dan pengajian ASN, perangkat desa, organisasi wanita, PKK dan dharma wanita	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec	40 Kec
Program beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk anak yatim serta penghafal Quran, disertai jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid, dan imam mushola.	80 Penerima Beasiswa 412 Desa	85 Penerima Beasiswa 412 Desa	90 Penerima Beasiswa 412 Desa	95 Penerima Beasiswa 412 Desa	100 Penerima Beasiswa 412 Desa
Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang
VISI 5 : CIREBON AMAN					
Kampung Bersih (Pesona Kasih = Pengelolaan Sampah Organik-Anorganik Kampung Bersih)	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa
Modernisasi Pengolahan Sampah	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	1 lokasi
Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Kebencanaan Dan Keselamatan Basis IT	-	2 aplikasi	-	-	-
Cirebon Bebas Banjir:	50 Titik ✔	50 Titik ✔	50 Titik ✔	50 Titik ✔	50 Titik ✔

Program Prioritas Kepala Daerah	2026	2027	2028	2029	2030
Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa

3.3.2 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 turut mendukung berbagai program prioritas nasional yang merujuk pada RPJMN 2025-2029. Adapun beberapa program prioritas nasional yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

1) Makan Bergizi Gratis

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Program MBG dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dukungan Kabupaten Cirebon terhadap program ini:

1. Sektor Ekonomi: mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok. Sehingga, lebih banyak pihak terkait distribusi dan produksi pangan bergizi.
2. Sektor Kesehatan: mendorong upaya makan bergizi secara teratur kepada kelompok rentan serta keamanan pangan yang dikonsumsi.
3. Sektor Pendidikan: mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
4. Sektor Ketahanan Pangan: memperkuat produksi pangan lokal untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.
5. Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif.

2) Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses

pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung), tetapi juga ditambah dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup (life skills), serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan Sekolah Terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai Centre of Excellence, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual. Melalui excellence of thought (keunggulan dalam pemikiran) dan excellence of character (keunggulan dalam karakter). Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, Tangguh mentalnya dan kuat karakternya.

Kabupaten Cirebon mendukung sekolah rakyat melalui penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik.

3) Koperasi Merah Putih

Koperasi merah putih merupakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa akan dilakukan Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat sendiri akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 5.877 unit, untuk percepatan pembentukan koperasi ini terdapat Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah perdesaan, beberapa permasalahan tersebut adalah pendapatan penduduk desa masih minim, kurangnya lapangan kerja di desa, tidak stabilnya harga bahan pokok, fasilitas Kesehatan masih terbatas, dan juga terjebak hutang pinjaman online/rentenir. Unit usaha yang terdapat pada koperasi merah putih ini terdiri dari beberapa unit usaha, yaitu: kantor koperasi, toko sembako, aktivitas simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, gudang penyimpanan dan juga penyediaan logistik desa.

Dalam pendirian koperasi merah putih terdapat 3 mode, yaitu : (1). Membangun koperasi baru, (2). Mengembangkan koperasi yang sudah ada, (3). Revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Terkait pendanaan untuk percepatan pembentukan koperasi merah putih ini dibebankan pada : APBN, APBD, APBDes, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan Jawa Barat dalam pembentukan koperasi merah putih ini adalah :

1. Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
2. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pada tiap daerah dalam pelaksanaan pembentukan 5.877 koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
3. Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat.

Sedangkan dukungan Kabupaten Cirebon dalam pembentukan Koperasi merah putih ini adalah :

1. Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
2. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembentukan 424 koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Cirebon; dan
3. Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

4) Pembangunan 3 Juta Rumah

Dukungan Kabupaten Cirebon terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan nasional adalah dengan melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal secara masif dan berkelanjutan, mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah yaitu:

1. Mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia secara signifikan.

2. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Memastikan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sasaran program 3 juta rumah ini meliputi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Pegawai negeri, TNI/Polri, pekerja sektor informal, serta generasi muda (milenial) yang belum memiliki rumah.
3. Daerah dengan kepadatan tinggi dan backlog perumahan yang tinggi, termasuk kawasan kumuh.

Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memiliki sejumlah dampak strategis:

1. Penurunan backlog nasional secara progresif, menuju target ideal ketersediaan hunian.
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, sehat, dan aman.
3. Penguatan pusat pertumbuhan kota berkelanjutan, melalui integrasi perumahan dengan infrastruktur dasar dan tata ruang.

Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029, Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan Dukungan Program Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029, Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan Dukungan Program Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	• Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan • Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan • Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal • Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif	Kabupaten Cirebon (40 Kecamatan)
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Pembangunan Ruang Kelas Baru	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	• Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP) • Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP • Pengadaan Meubelair pada Tingkat PAUD, SD dan SMP	Kabupaten Cirebon (40 Kecamatan)
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	• Pembangunan Unit Sekolah Baru; • Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik.untuk Sekolah Rakyat	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan tenaga kesehatan	Kabupaten Cirebon
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Program Sanitasi Lingkungan	DAS Citarum, serta kabupaten/kota yang belum ODF *(Open Defecation Free)*	Program Sanitasi Lingkungan dan Kampung Sehat	Kabupaten Cirebon
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	• Pendidikan berkarakter; • Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat	Kota Depok dan 27 Kab/kota di Jawa Barat	Pendidikan berkarakter;	Kabupaten Cirebon
7	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	• Pengamanan Mata Air • Reboisasi hutan dan lahan • Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai	Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya	• Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air • Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir	Kabupaten Cirebon
8	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	• Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; • Normalisasi Sungai dan Muara; • Pengamanan Mata Air; • Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi);	Kabupaten/kota di WS Citarum,Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan-Cilaki	• Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani) • Normalisasi Sungai; • Pembangunan/rehabilitasi embung; • Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis (Jalan menuju sentra produksi);	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
9	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; • Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	Kabupaten di wilayah REBANA, Cekungan Bandung (Kab. Bandung, Bandung Barat), Bodebek (Kabupaten Bogor) dan Kabupaten/kota Jawa Barat Bagian Selatan	• Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; • Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; • Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis (Jalan menuju sentra produksi) • Program pengembangan komoditas sapi pedaging dan sapi perah	Kabupaten Cirebon
10	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	• Pembangunan Kampung Adat Nelayan; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di Pesisir Utara dan Selatan jawa barat	• Program pengembangan Perikanan Budidaya • Pengembangan ekonomi biru	Kabupaten Cirebon
11	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, **Jawa Barat**, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah	Dukungan untuk normalisasi Sungai dan Muara pada Wilayah Sungai kewenangan pusat dan Normalisasi Sungai dan muara di WS Provinsi	Kabupaten/kota di Pantura Jawa Barat	• Normalisasi sungai • Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir • Pengembangan ekonomi biru	Kabupaten Cirebon
12	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan	Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	• Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; • Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; • Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur di kawasan	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
					industri (Jalan menuju sentra produksi) • Pengembangan komoditas tebu	
13	Pembentukan Koperasi Merah Putih	Nasional	• Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi • Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pada tiap daerah dalam pelaksanaan pembentukan 5.877 koperasi desa/kelurahan merah putih • Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat	27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat	• Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi • Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembentukan 424 koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Cirebon • Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi	Kabupaten Cirebon
14	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, **Jawa Barat (Bekasi)**, dan Sulawesi Tenggara (Palu)	• Program Energi ramah lingkungan; • Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan;	Kabupaten/kota Bodebek (Kabupaten Bekasi), Cekungan Bandung	• Program Energi ramah lingkungan; • Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan;	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
15	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	Papua, Sumatera, **Jawa**, dan Nusa Tenggara	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	• Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; • Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; • Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur di kawasan industri (Jalan menuju sentra produksi) • Hilirisasi komoditas pertanian • Pengembangan Ekonomi Hijau	Kabupaten Cirebon
16	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, **Jawa Barat**, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan	• Program pengembangan Perikanan Budidaya • Pengembangan ekonomi biru • Pengembangan Komoditas Rumput Laut	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
17	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat)	Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan, serta Kota Cirebon dan Kota Bandung	Dukungan terhadap Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat)	Kabupaten Cirebon
18	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Program Transformasi Birokrasi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	• Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (*smart government)* • Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi • Pengembangan PJU Pintar (smart PJU) basis digital/teknologi informasi penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED, Meterisasi Smart Kwh • Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional	Kabupaten Cirebon
19	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Transformasi birokrasi		• Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (*smart government)* • Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi	Kabupaten Cirebon
20	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir);	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur industri;	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
21	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat;	penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu)	Kabupaten Cirebon
22	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), **Jawa Barat (Bekasi, Bandung)**, Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado)	• Pembangunan TPPAS Regional • Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan-*financial closed*); • Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800- 2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); • Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres : penyusunan Kajian FS); • Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres	Kabupaten Bandung, Cirebon, Karawang	• Dukungan Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi WtE/RDF; • Pemberdayaan pengelolaan persampahan di Kecamatan • Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Kabupaten Cirebon

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon	Lokasi
			telah tersusun DED Fasilitas pengolah sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) • Pengelolaan Sampah Mandiri			

3.3.3 Kolaborasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari rencana dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, antara lain tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 3.12 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM/ PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN			
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/ Kota	BADAN USAHA
A	**BINA MARGA**				
1.	Rekonstruksi Jalan Lingkar Utara Jawa Barat		v	v	
B	**PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**				
1.	Pembangunan Rumah Rakyat Miskin				
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	v	v	v	v
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh di luar Kewenangan Provinsi	v	v	v	v
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Kumuh	v	v	v	v
2.	Penyediaan Air Minum				
-	SPAM REGIONAL JATIGEDE	v	v	v	v
3.	Pengelolaan Sampah				
-	TPPAS CIREBON RAYA	v	v	v	v
-	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah mandiri	v	v	v	v
C	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
1.	100% Elektrifikasi				
-	Listrik Per Kapita di kawasan perdesaan	v	v	v	v
-	pembangunan PLTS ATAP SMK	v	v	v	v
-	pembangunan PLTS ATAP gedung	v	v	v	v
D	**SUMBER DAYA AIR**				
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Cai Ngalir)	v	v	v	v

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah dan Pendanaan

Rencana Program Perangkat Daerah dan Pendanaan memegang peran penting dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029. Bagian ini bukan hanya daftar program, melainkan juga peta jalan yang mengaitkan setiap program pembangunan dengan kebutuhan pendanaan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, dokumen ini memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana program-program tersebut akan didanai, menjadikannya landasan kuat untuk menyusun kebijakan belanja daerah setiap tahunnya.

Berbeda dengan bab sebelumnya yang fokus pada program prioritas, bab ini menyajikan seluruh program yang dirumuskan oleh perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) mereka. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif, dan target perangkat daerah yang bertanggung jawab. Sebelum menentukan anggaran belanja, pemerintah daerah akan mengacu pada Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang telah dihitung di Bab II, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini dirancang untuk memastikan setiap program dapat berjalan dengan optimal. Dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, diharapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dokumen ini menjadi panduan bagi semua perangkat daerah untuk melaksanakan tugas mereka dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Kerangka pendanaan untuk RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis keuangan daerah yang mencakup berbagai sumber pendanaan, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber utama pendanaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.
2. Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah : Termasuk didalamnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
3. Pinjaman, Hibah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama antar daerah, skema investasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) : Sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis, terutama yang memerlukan investasi besar.
4. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan di level desa/kelurahan melalui dana swadaya masyarakat.

Dalam kerangka pendanaan ini, prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada:

1. Pembangunan Infrastruktur: Memperbaiki dan membangun fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal : Mendukung program-program yang dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan UMKM, sektor industri, pertanian, perikanan dan pariwisata.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup: Mengalokasikan dana untuk program-program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

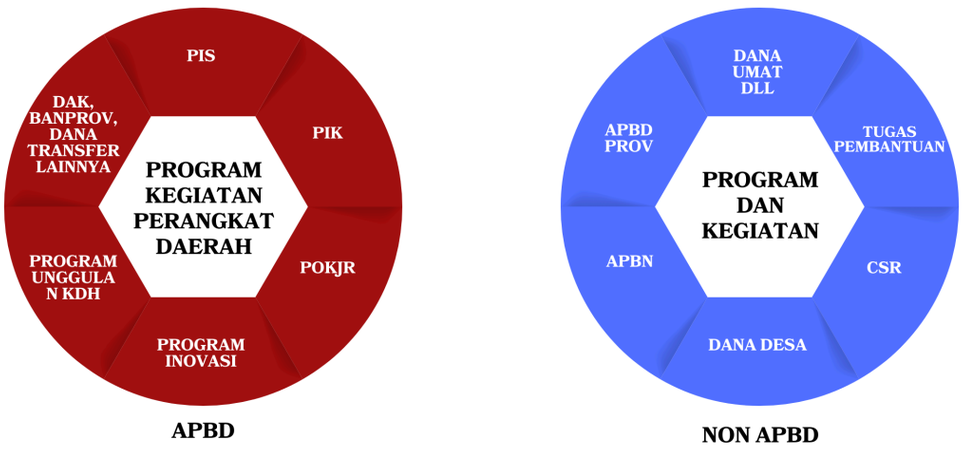
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang

melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Cirebon memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,057 yang termasuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah, Kabupaten Cirebon telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten Cirebon juga melalui

optimalisasi pendanaan non APBD. Kebijakan kolaborasi pendanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai rencana program pembangunan yang akan dilakukan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Harapannya, dana dapat dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga target indikator program dapat tercapai dan pada akhirnya berdampak pada capaian indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan. Rincian detail program perangkat daerah, indikator kinerja serta target dan pagu anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.723.746.358.799		5.326.707.465.638		5.711.299.697.053		5.874.616.034.120		6.158.672.597.286		27.795.042.152.896	
01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.273.804.752.900		2.378.283.888.420		2.486.225.482.592		2.603.014.296.943		2.725.260.244.075		12.466.588.664.930	
01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 POIN	100	1.167.680.659.200	100	1.226.199.462.720	100	1.287.673.103.592	100	1.352.235.952.551	100	1.420.014.332.106	100	6.453.803.510.169	DINAS PENDIDIKAN
01.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang TK / PAUD	70,03 Persen	72	39.780.124.000	75	43.088.484.000	77	46.391.959.500	79	49.803.104.812	80	53.318.988.301	80	232.382.660.613	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	100 Persen	100	843.921.260.700	100	878.026.064.700	100	914.592.765.700	100	954.197.329.700	100	995.460.885.400	100	4.586.198.306.200	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	100 Persen	100	196.159.350.000	100	202.582.072.000	100	209.215.281.000	100	216.269.761.000	100	223.597.110.000	100	1.047.823.574.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase penduduk yang melanjutkan pendidikan pada program Kesetaraan Kejar Paket A/B/C sampai tamat	97 Persen	98	22.996.399.000	98,25	24.999.994.000	98,5	24.849.895.800	98,75	26.901.682.880	99	29.162.489.268	99	128.910.460.948	DINAS PENDIDIKAN
01.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0 Persen	100	2.566.960.000	100	2.632.811.000	100	2.686.477.000	100	2.728.416.000	100	2.770.237.000	100	13.384.901.000	DINAS PENDIDIKAN
01.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Guru layak mengajar pada jenjang pendidikan dasar	0 Persen	98,37	400.000.000	98,78	420.000.000	99,18	441.000.000	99,59	463.050.000	100	486.202.000	100	2.210.252.000	DINAS PENDIDIKAN
01.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki izin kelayakan penyelenggaraan pendidikan	100 Persen	100	300.000.000	100	335.000.000	100	375.000.000	100	415.000.000	100	450.000.000	100	1.875.000.000	DINAS PENDIDIKAN
01.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.401.857.495.658		1.657.487.003.453		1.951.743.936.779		2.051.773.522.457		2.102.067.743.809		9.164.929.702.156	
01.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 POIN	85	566.485.781.347	85,5	614.644.363.000	86	667.094.675.000	86,5	724.483.559.000	87	786.664.061.000	87	3.359.372.439.347	DINAS KESEHATAN
		Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai	84 Persen	85	153.184.984.651	86	157.694.825.486	87	162.337.438.240	88	167.116.731.783	89	172.130.233.736	89	812.464.213.896	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled														
		Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Arjawinangun	84 Persen	85	85.600.000.000	86	86.700.000.000	87	87.500.000.000	88	88.200.000.000	89	89.100.000.000	89	437.100.000.000	DINAS KESEHATAN
01.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	106,01 Per 100.000 KH	105,41	30.970.554.100	103,58	32.790.811.329	98,39	34.727.672.030	91,86	36.796.670.736	86,25	38.807.996.113	86,25	174.093.704.308	DINAS KESEHATAN
		Insidens TB per 100.000 penduduk	405 Per100.000	370	7.553.976.640	319	7.961.939.054	283	8.393.075.771	255	8.856.708.083	234	9.327.241.236	234	42.092.940.784	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi (0-11 bulan)	95 Persen	96	4.243.793.060	97	4.474.854.754	98	4.719.517.996	99	4.978.464.379	100	5.252.689.645	100	23.669.319.834	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi obesitas >= 18 tahun	23,04 Persen	23,04	1.097.763.300	23,04	1.167.755.600	23,04	1.248.223.130	23,04	1.334.923.037	23,04	1.428.387.072	23,04	6.277.052.139	DINAS KESEHATAN
		Persentase Universal Health Coverage (UHC)	99 Persen	99	191.312.131.200	99	203.624.434.000	99	218.169.730.000	99	234.078.835.000	99	251.780.131.000	99	1.098.965.261.200	DINAS KESEHATAN
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100 Persen	100	5.039.336.700	100	5.668.270.000	100	6.247.596.000	100	6.882.356.000	100	7.578.092.000	100	31.415.650.700	DINAS KESEHATAN
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Mutu	70 Persen	73	10.139.224.700	76	15.243.657.514	79	16.758.890.037	82	18.425.489.239	85	20.258.583.950	85	80.825.845.440	DINAS KESEHATAN
		Persentase Capaian SPM RSUD Arjawinangun	93,88 Persen	93,9	2.800.000.000	94,1	172.675.000.000	94,3	377.185.500.000	94,7	379.806.550.000	95	324.257.205.000	95	1.256.724.255.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase Capaian SPM RSUD Waled	93,16 Persen	90	342.200.000.000	91	353.700.000.000	92	365.950.000.000	93	379.300.000.000	94	393.860.000.000	94	1.835.010.000.000	DINAS KESEHATAN
01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	12,75 Persen	13	553.598.800	13,25	592.955.000	13,5	635.252.000	13,75	680.778.000	14	729.859.000	14	3.192.442.800	DINAS KESEHATAN
01.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmalkes dan UMOT mendapat pembinaan	30 Persen	30	15.452.900	30	16.998.000	30	18.698.000	30	20.567.000	30	22.624.000	30	94.339.900	DINAS KESEHATAN
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan pembinaan	65 Persen	65,5	25.545.000	67	28.097.000	70	30.907.000	72	33.998.000	75	37.399.000	75	155.946.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berPHBS	76 Persen	77	635.353.260	78	503.042.716	79	726.761.575	80	777.892.200	81	833.241.057	81	3.476.290.808	DINAS KESEHATAN
01.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				767.202.707.700		969.758.399.000		953.674.939.700		898.811.787.300		1.001.718.636.600		4.591.166.470.300	
01.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai iKM DPUTR	89 Poin	89,5	53.543.185.000	90	61.843.462.700	91	58.524.238.400	92	59.331.465.400	93	59.948.518.400	93	293.190.869.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	38,93 Persen	39,03	139.519.635.000	50,94	148.570.544.000	63,76	146.201.544.000	74,06	144.787.544.000	85,61	142.490.544.000	85,61	721.569.811.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	93,37 Persen	93,55	45.869.932.000	93,37	48.622.128.000	93,91	51.539.456.000	94,09	54.631.824.000	94,27	57.909.732.000	94,27	258.573.072.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	9,09 Persen	36,36	15.900.000.000	45,45	6.254.000.000	54,55	6.629.240.000	63,64	7.026.994.000	72,73	7.448.613.000	72,73	43.258.847.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh Sambungan pengolahan air limbah	90,5 Persen	91,38	27.559.796.000	92,26	31.673.384.000	93,14	33.033.787.000	94,02	31.105.014.000	94,9	28.431.314.000	94,9	151.803.295.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran	6,5 Persen	7,49	15.399.660.000	8,14	16.300.000.000	8,79	17.300.000.000	9,44	18.320.000.000	10,09	19.500.000.000	10,09	86.819.660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan PBG	17,33 Prosen	17,33	31.335.000.000	17,33	33.200.100.000	17,33	35.192.106.000	17,33	37.303.632.600	17,33	39.541.851.000	17,33	176.572.689.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase dokumen kebijakan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan	14,29 Persen	28,57	1.082.500.000	42,86	1.250.000.000	57,14	1.250.000.000	71,43	1.250.000.000	85,71	1.250.000.000	85,71	6.082.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi Jalan Baik	62,45 Persen	63,72	432.964.062.300	64,99	617.024.564.300	66,26	598.835.364.300	67,54	539.728.860.300	68,81	639.705.608.700	68,81	2.828.258.459.900	DINAS PEKERJAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																UMUM DAN TATA RUANG
01.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	24,32 Persen	29,58	945.864.000	34,84	1.001.116.000	40,11	1.059.608.000	45,37	1.121.530.000	50,63	1.187.087.000	50,63	5.315.205.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen kebijakan RDTR yang ditetatapkan	28,57 Persen	42,86	3.083.073.400	57,14	4.019.100.000	71,43	4.109.596.000	85,71	4.204.923.000	100	4.305.368.500	100	19.722.060.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
01.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				168.439.253.300		197.443.177.600		198.065.369.600		199.881.624.600		199.906.468.600		963.735.893.700	
01.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPKPP	75 Poin	75	10.435.268.300	80	10.511.237.600	80	10.615.482.600	80	10.714.442.600	80	10.822.626.600	80	53.099.057.700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemukiman yang tertata	97,97 Persen	98	825.000.000	98,1	833.000.000	98,2	844.000.000	98,3	854.000.000	98,5	863.000.000	98,5	4.219.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	66,71 Persen	68,64	86.736.662.000	70,58	115.150.000.000	72,51	115.150.000.000	74,45	116.350.000.000	76,38	116.150.000.000	76,38	549.536.662.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase meningkatnya jumlah unit Rumah Layak Huni yang layak dan sehat	98,58 Persen	98,63	68.250.000.000	98,68	68.250.000.000	98,74	68.250.000.000	98,79	68.250.000.000	98,84	68.250.000.000	98,84	341.250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
01.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU.	100 Persen	100	2.192.323.000	100	2.698.940.000	100	3.205.887.000	100	3.713.182.000	100	3.820.842.000	100	15.631.174.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				85.060.535.241		99.514.554.165		97.116.400.382		96.361.751.820		104.636.646.202		482.689.887.810	
01.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Satpol PP	87,97 Poin	88,3	22.351.077.000	88,6	23.423.016.000	88,9	24.495.549.000	89,2	25.569.760.000	89,5	26.648.730.000	89,5	122.488.132.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	85,5	20.898.185.241	86	32.478.475.165	86,5	27.538.681.382	87	26.360.598.820	87,5	30.182.711.202	87,5	137.458.651.810	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Nilai IKM BPBD	85 Nilai	87,15	19.884.114.000	89,4	21.069.845.000	91,7	20.806.888.000	93,25	19.538.744.000	95	20.735.196.000	95	102.034.787.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda/Perkada Yang ditegakan	81 Persen	81,25	1.312.027.000	81,5	1.377.629.000	81,75	1.446.512.000	82	1.518.839.000	82,25	1.594.782.000	82,25	7.249.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan	76,55 Persen	76,7	4.205.553.000	76,9	4.415.081.000	77,25	4.635.086.000	77,5	4.866.091.000	77,75	5.108.647.000	386,1	23.230.458.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Prosentase cakupan Perlindungan Masyarakat	8,26 Persen	16,96	2.248.579.000	25,47	2.323.508.000	33,96	2.400.684.000	42,45	2.480.219.000	49,54	2.562.230.000	168,38	12.015.220.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Capaian layanan penanggulangan bencana	0 Persen	100	5.045.000.000	100	5.025.000.000	100	5.155.000.000	100	5.115.000.000	100	5.475.000.000	100	25.815.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan kebakaran dan nonkebakaran yang dilayani secara response time 15 menit	92 Persen	92,5	9.116.000.000	93	9.402.000.000	93,5	10.638.000.000	94	10.912.500.000	94,5	12.329.350.000	94,5	52.397.850.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
01.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				27.381.614.000		24.220.443.000		24.473.568.000		24.773.051.000		25.082.858.000		125.931.534.000	
01.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Poin	85	16.051.240.000	85	12.797.503.000	85	13.016.934.000	85	13.281.538.000	85	13.495.222.000	85	68.642.437.000	DINAS SOSIAL
01.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif berperan dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial	0 Persen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 Persen	100	4.603.000.000	100	4.603.000.000	100	4.603.000.000	100	4.603.000.000	100	4.603.000.000	100	23.015.000.000	DINAS SOSIAL
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0 Persen	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	1.200.000.000	DINAS SOSIAL
01.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial	100 Persen	100	2.440.000.000	100	2.440.000.000	100	2.440.000.000	100	2.440.000.000	100	2.490.000.000	100	12.250.000.000	DINAS SOSIAL
01.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100	1.177.573.000	100	1.187.573.000	100	1.197.573.000	100	1.207.573.000	100	1.227.573.000	100	5.997.865.000	DINAS SOSIAL
		Persentase DTSEN Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem yang tervalidasi	100 Persen	100	950.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.950.000.000	DINAS SOSIAL
01.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	100	754.373.000	100	772.467.000	100	791.466.000	100	811.415.000	100	832.361.000	100	3.962.082.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dasar dalam penanganan bencana	100 Persen	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	1.080.000.000	DINAS SOSIAL
01.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	99 Persen	100	449.428.000	100	463.900.000	100	468.595.000	100	473.525.000	100	478.702.000	100	2.334.150.000	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				671.031.676.920		716.747.559.720		728.123.477.401		773.014.719.888		791.669.371.982		3.680.586.805.911	
02.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				39.127.923.000		40.153.882.000		41.210.248.000		42.296.853.000		43.412.786.000		206.201.692.000	
02.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Persen	80	28.453.526.000	80	29.363.216.000	80	30.295.040.000	80	31.250.875.000	80	32.229.500.000	80	151.592.157.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
02.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase Kegiatan RTKD yang dilaksanakan	80 Persen	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	1.000.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
02.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	1,5 Persen	1,6	7.639.901.000	1,7	7.699.440.000	1,8	7.764.415.000	1,9	7.832.639.000	2	7.904.275.000	2	38.840.670.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
02.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.	72 Persen	73	2.361.324.000	74	2.399.393.000	75	2.439.366.000	76	2.481.338.000	77	2.525.408.000	77	12.206.829.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
02.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	100 Persen	100	473.172.000	100	491.833.000	100	511.427.000	100	532.001.000	100	553.603.000	100	2.562.036.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
02.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.560.427.684		6.091.889.470		6.652.151.217		7.231.714.038		7.670.085.643		33.206.268.052	
02.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada setiap lembaga pemerintah	13,93 Persen	14,73	879.676.097	15,53	927.871.130	16,34	981.674.543	17,14	1.038.259.897	17,94	1.092.874.387	17,94	4.920.356.054	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perlindungan korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan	4,41 Persen	5,21	1.230.798.000	6,01	1.341.743.000	6,81	1.456.586.000	7,62	1.578.420.000	8,42	1.712.344.000	8,42	7.319.891.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang terlatih pemberdayaan perempuan	0,15 Persen	0,18	284.306.400	0,25	303.409.340	0,31	323.955.674	0,38	346.067.141	0,45	369.875.256	0,45	1.627.613.811	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Elemen Data Gender Dan Anak Yang Valid Dan Disajikan	73,1 Persen	74,15	130.824.000	75,2	137.366.000	76	144.235.000	76,8	151.447.000	80,25	159.020.000	80,25	722.892.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentasi Jumlah lembaga layanaan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak	20 Persen	25	982.816.061	30	1.076.000.000	35	1.179.200.000	40	1.292.520.000	45	1.416.972.000	45	5.947.508.061	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	80 Persen	82	2.052.007.126	85	2.305.500.000	90	2.566.500.000	95	2.825.000.000	100	2.919.000.000	100	12.668.007.126	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PERLINDUNGAN ANAK
02.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				26.431.928.000		31.312.173.100		26.831.585.840		27.374.945.688		29.417.904.630		141.368.537.258	
02.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) DKPP	87,5 Poin	88	19.173.246.000	88,25	21.820.572.200	88,5	17.557.450.240	88,75	18.219.402.088	89	19.433.567.705	89	96.204.238.233	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase jumlah cadangan pangan	51,45 Persen	60	750.000.000	70	1.300.000.000	80	1.400.000.000	90	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	6.350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Coefisien Variasi (CV) harga beras medium di tingkat Konsumen	10 Persen	10	4.100.161.000	10	4.852.536.000	10	4.105.065.000	10	3.376.199.000	10	3.669.067.000	10	20.103.028.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Persentase Konsumsi Pangan B2SA	81 Persen	82	508.521.000	83	839.939.900	84	918.826.600	85	1.027.541.600	86	1.106.609.300	86	4.401.438.400	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	0,34 Persen	5,9	110.000.000	4,72	150.000.000	3,54	175.000.000	2,36	200.000.000	1,18	225.000.000	1,18	860.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan	92 Persen	93	1.790.000.000	94	2.349.125.000	95	2.675.244.000	96	3.101.803.000	97	3.533.660.625	97	13.449.832.625	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.650.000.000		1.650.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		8.475.000.000	
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	prosentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	2.575.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase data objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti	0 Persen	5	250.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	1.400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																DAN PERTANAHAN
2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase surat keterangan penetapan lokasi yang terbit	100 Persen	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah dalam satu wilayah kabupaten	100 Persen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				164.481.022.440		167.929.763.969		171.948.945.976		176.320.576.685		180.983.207.762		861.663.516.832	
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	71,2 Poin	80,5	38.136.198.100	82,5	38.289.211.910	84,5	38.457.444.501	86,5	38.642.421.951	88,5	38.845.805.747	88,5	192.371.082.209	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingungan hidup yang telah disusun dan ditetapkan	100 Persen	100	1.382.696.400	100	1.413.861.250	100	1.448.142.585	100	1.485.852.054	100	1.527.332.469	100	7.257.884.758	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Pencemar kurang dari 10	0 Indeks	9	28.289.314.200	9	28.454.055.820	9	28.634.697.602	10	28.832.802.262	10	29.050.084.788	10	143.260.954.672	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	7,6 Persen	7,98	13.464.446.600	8,36	13.795.891.260	8,7	14.160.480.386	9,12	14.561.528.425	9,5	15.002.681.267	9,5	70.985.027.938	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	50 Persen	50	284.949.100	52,25	313.444.010	54,5	344.788.411	56,75	379.267.253	59	417.193.977	59	1.739.642.751	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100	334.322.500	100	347.754.750	100	362.530.225	100	378.783.248	100	396.661.572	100	1.820.052.295	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Perusahaan/pelaku usaha yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	0 Persen	20	350.000.000	40	350.000.000	60	350.000.000	80	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0 Persen	30	124.238.600	30	136.662.460	30	150.328.706	30	165.361.577	30	181.897.734	30	758.489.077	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100 Persen	100	217.611.400	100	239.372.540	100	263.309.794	100	289.640.773	100	318.604.851	100	1.328.539.358	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terolah	12,11 Persen	0,08	81.897.245.540	0,08	84.589.509.969	0,08	87.777.223.766	0,08	91.234.919.142	0,08	94.892.945.357	0,08	440.391.843.774	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.489.423.217		21.152.704.038		22.699.182.038		24.367.732.038		25.954.759.038		114.663.800.369	
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	87,5 Poin	88	18.141.324.217	88,25	18.544.746.038	88,5	19.969.621.038	88,75	21.394.590.038	90	22.843.805.038	90	100.894.086.369	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA	55 Persen	60	33.000.000	63	35.000.000	65	40.000.000	68	45.000.000	70	50.000.000	70	203.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El"	99,4 Persen	99,45	1.188.447.000	99,5	1.263.170.000	99,55	1.338.430.000	99,6	1.427.353.000	99,7	1.518.072.000	497,8	6.735.472.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosentase aktifasi layanan IKD	6 Persen	9	45.912.000	11	48.208.000	12	50.619.000	14	53.150.000	15	55.808.000	15	253.697.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0 - 18 tahun	97 Persen	98	24.000.000	98,25	28.000.000	98,5	33.000.000	99	36.000.000	99,5	40.000.000	99,5	161.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rata-rata prosentase relisasi akta-aktapenacatatan sipil yang diterbitkan (akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan, pengsahan dan pengangkatan anak)	60 Persen	80	521.288.000	83	561.354.000	86	612.173.000	90	663.782.000	93	726.222.000	93	3.084.819.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase desa/kelurahan yang terintegrasi pelayanan dengan Disdukcapil	32,08 Persen	43,87	0	44	110.000.000	44,25	65.000.000	44,5	128.000.000	44,75	70.000.000	44,75	373.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	30 Persen	35	78.818.000	37	82.759.000	39	86.897.000	41	91.242.000	43	95.805.000	43	435.521.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik dan menghasilkan pengolahana dan penyajian data kependudukan yang akurat	95 Persen	96	407.565.000	96,2	427.944.000	96,5	449.342.000	96,8	471.810.000	97	495.401.000	97	2.252.062.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase elemen Data Profil Kependudukan yang disajikan secara valid dan dapat dipertangungjawabkan	99 Persentase	99	49.069.000	99,2	51.523.000	99,4	54.100.000	99,7	56.805.000	100	59.646.000	100	271.143.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				26.932.197.100		29.189.766.000		29.631.303.000		31.598.329.000		32.064.224.000		149.415.819.100	
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,59 Nilai	92,6	8.994.152.000	92,65	9.545.351.000	92,7	9.963.385.000	92,75	10.380.309.000	92,8	10.749.985.000	92,8	49.633.182.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitasi tentang Penyelenggaraan Penataan Desa	80 Persen	81	330.944.000	82	374.992.000	83	419.493.000	84	464.468.000	85	509.942.000	85	2.099.839.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	30 Persen	20	1.232.968.000	20	1.292.118.000	20	1.353.476.000	20	1.417.151.000	20	1.483.260.000	100	6.778.973.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tepat waktu	20,1 Persen	22,1	11.824.893.000	24,1	13.126.592.000	26,1	12.746.750.000	28,1	13.940.041.000	30,1	13.655.758.000	30,1	65.294.034.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Jumlah Desa yang Bumdesnya sudah berbadan hukum	25 Persen	30	250.000.000	35	260.000.000	40	270.000.000	45	280.000.000	50	250.000.000	50	1.310.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya dibina	24 Persen	24	4.299.240.100	26	4.590.713.000	28	4.878.199.000	30	5.116.360.000	32	5.415.279.000	32	24.299.791.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				33.057.964.000		36.509.016.000		40.107.535.600		44.012.441.860		48.189.334.445		201.876.291.905	
2.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A	90,2 Poin	90,3	22.626.060.000	90,35	24.888.666.000	90,4	27.377.532.600	90,45	30.115.285.860	90,5	33.126.814.445	90,5	138.134.358.905	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	21 Tahun	20,8	5.345.416.000	20,4	5.773.337.000	20	6.233.754.000	19,6	6.726.168.000	19,2	7.237.825.000	19,2	31.316.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,9 Persen	65	2.411.488.000	65,1	2.810.138.000	65,3	3.136.774.000	65,5	3.471.213.000	65,8	3.798.605.000	65,8	15.628.218.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Presentase kehamilan tidak direncanakan	16,8 Persen	16,4	543.500.000	16,1	618.500.000	15,8	694.354.000	15,5	761.897.000	15,2	844.567.000	15,2	3.462.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kenaikan strata Kampung Keluarga Berkualitas	22 Persen	33	1.853.000.000	44	2.074.875.000	55	2.292.869.000	66	2.516.513.000	77	2.730.839.000	77	11.468.096.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya fasilitator sebaya bagi poktan khususnya remaja	212 Kelompok	257	278.500.000	297	343.500.000	337	372.252.000	377	421.365.000	417	450.684.000	417	1.866.301.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				132.143.029.851		152.200.412.233		158.482.225.225		180.086.017.599		172.015.266.486		794.926.951.394	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	77,1 Poin	77,6	37.440.437.251	77,67	38.740.261.128	77,73	40.104.630.786	77,79	41.536.769.078	77,85	43.040.050.933	77,85	200.862.149.176	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	50,5 Persen	51	2.640.142.800	51,21	2.770.651.590	51,43	17.903.618.847	51,66	18.051.572.172	51,91	18.202.653.421	51,91	59.568.638.830	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan	80,63 Persen	84	90.095.418.800	88	93.624.116.265	92	98.305.323.029	96	103.220.590.655	100	108.381.621.407	100	493.627.070.156	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kepemilikan KIR / Wajib Uji	0,2 Persen	0,22	1.967.031.000	0,24	17.065.383.250	0,26	2.168.652.563	0,28	17.277.085.694	0,3	2.390.940.725	0,3	40.869.093.232	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				26.728.500.000		29.540.000.000		32.608.500.000		35.971.950.000		39.647.158.000		164.496.108.000	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	90,5 poin	90,6	12.080.000.000	90,7	13.288.000.000	90,8	14.616.800.000	90,85	16.078.480.000	90,9	17.686.328.000	90,9	73.749.608.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	81 Persen	81,1	4.648.500.000	81,2	5.252.000.000	81,3	5.891.700.000	81,4	6.583.470.000	81,5	7.319.830.000	81,5	29.695.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penyelenggaraan TIK	3,05 Poin	3,12	7.300.000.000	3,2	8.030.000.000	3,28	8.833.000.000	3,35	9.716.300.000	3,4	10.687.930.000	3,4	44.567.230.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Nilai Penyelenggara SPBE	3,05 Poin	3,12	500.000.000	3,2	550.000.000	3,28	605.000.000	3,35	665.500.000	3,4	732.050.000	3,4	3.052.550.000	DINAS KOMUNIKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																DAN INFORMATIKA
		Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	4,67 Poin	4,67	1.500.000.000	4,67	1.650.000.000	4,67	1.815.000.000	4,67	1.996.500.000	4,67	2.196.150.000	4,67	9.157.650.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Nilai Penerapan Manajemen SPBE	2,4 Poin	2,45	350.000.000	2,5	385.000.000	2,55	423.500.000	2,6	465.850.000	2,65	512.435.000	2,65	2.136.785.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Nilai Perencanaan Strategis SPBE	3,3 Poin	3,35	350.000.000	3,4	385.000.000	3,45	423.500.000	3,5	465.850.000	3,6	512.435.000	3,6	2.136.785.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				28.580.718.000		19.543.779.000		19.362.138.000		19.821.261.000		21.637.874.000		108.945.770.000	
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Koperasi dan UKM	76 Nilai	71	21.875.000.000	72	13.125.000.000	73	12.830.000.000	74	13.130.000.000	75	14.831.380.000	75	75.791.380.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	14,1 Persen	20	49.650.000	20	53.100.000	20	55.490.000	20	59.650.000	20	63.760.000	20	281.650.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	14,26 Persen	20	167.950.000	20	181.367.000	20	195.451.000	20	209.779.000	20	222.453.000	20	977.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	4,95 Persen	20	239.909.000	20	252.821.000	20	265.897.000	20	270.897.000	20	286.897.000	20	1.316.421.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang di berikan Dukungan fasilitasi Pelatihan	40,98 Persen	10	647.747.000	10	680.136.000	10	714.144.000	10	749.852.000	10	787.346.000	10	3.579.225.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	6,55 Persen	20	147.192.000	20	148.195.000	20	154.552.000	20	162.280.000	20	170.394.000	20	782.613.000	DINAS KOPERASI DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	0,3 Persen	0,3	4.053.270.000	0,3	3.937.684.000	0,3	3.955.354.000	0,35	4.020.490.000	0,35	4.028.915.000	1,6	19.995.713.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM	0,2 Persen	0,2	1.400.000.000	0,2	1.165.476.000	0,25	1.191.250.000	0,25	1.218.313.000	0,25	1.246.729.000	1,15	6.221.768.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16.250.837.000		14.080.378.000		14.584.909.000		15.111.415.000		15.660.992.000		75.688.531.000	
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DPMPTSP	91,3 Poin	91,35	11.680.554.000	91,4	11.246.237.000	91,45	11.638.557.000	91,5	12.048.741.000	91,55	12.477.682.000	91,55	59.091.771.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Investasi	100 Persen	100	887.466.000	100	933.840.000	100	971.534.000	100	1.010.612.000	100	1.051.143.000	500	4.854.595.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100 Persen	100	1.710.000.000	100	405.758.000	100	425.046.000	100	444.799.000	100	465.039.000	500	3.450.642.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	87 Persen	89	858.862.000	91	893.306.000	93	928.972.000	95	965.922.000	97	1.004.219.000	465	4.651.281.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.	100 Persen	100	860.000.000	100	334.584.000	100	340.814.000	100	347.355.000	100	354.223.000	500	2.236.976.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persen	100	253.955.000	100	266.653.000	100	279.986.000	100	293.986.000	100	308.686.000	500	1.403.266.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				118.922.574.000		123.625.941.000		126.266.214.000		129.106.500.000		133.046.800.000		630.968.029.000	
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dispora	79,25 Poin	79,3	12.187.574.000	79,4	12.280.941.000	79,5	12.371.214.000	79,6	12.461.500.000	79,7	12.551.800.000	79,7	61.853.029.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang memiliki daya saing	24,11 Persen	24,11	9.745.000.000	24,17	9.745.000.000	24,21	9.745.000.000	24,24	9.745.000.000	24,3	9.745.000.000	24,3	48.725.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang di bina	16,11 Persen	16,53	74.240.000.000	16,81	78.650.000.000	17,09	81.200.000.000	17,37	83.950.000.000	17,65	87.700.000.000	17,65	405.740.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pembinaan terhadap induk organisasi olahraga rekreasi	14,29 Persen	21,43	8.000.000.000	21,43	8.200.000.000	21,43	8.200.000.000	28,57	8.200.000.000	28,57	8.300.000.000	28,57	40.900.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase partisipasi pemuda yang aktif dalam kepramukaan	5,7 Persen	5,77	14.750.000.000	5,84	14.750.000.000	5,9	14.750.000.000	5,97	14.750.000.000	6,11	14.750.000.000	29,59	73.750.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				950.000.000		1.045.000.000		1.149.500.000		1.264.450.000		1.390.895.000		5.799.845.000	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	80 Persen	80	950.000.000	80	1.045.000.000	80	1.149.500.000	80	1.264.450.000	80	1.390.895.000	80	5.799.845.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000		4.884.080.000	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	2,8 Poin	3	800.000.000	3,2	880.000.000	3,4	968.000.000	3,6	1.064.800.000	3,8	1.171.280.000	3,8	4.884.080.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				10.655.000.000		22.463.500.000		13.366.500.000		13.939.000.000		14.873.000.000		75.297.000.000	
2.22.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disbudpar	70,55 Persen	75	8.650.000.000	76	20.243.500.000	77	10.906.500.000	78	11.239.000.000	79	11.928.000.000	79	62.967.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	1,46 Persen	5,34	400.000.000	6,49	475.000.000	7,63	550.000.000	8,78	625.000.000	9,92	700.000.000	9,92	2.750.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	45 Persen	17	1.350.000.000	18	1.375.000.000	18	1.500.000.000	18	1.625.000.000	19	1.750.000.000	19	7.600.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 Persen	9	150.000.000	9	190.000.000	9	225.000.000	10	260.000.000	10	300.000.000	10	1.125.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	10 Persen	10	105.000.000	13	180.000.000	16	185.000.000	19	190.000.000	22	195.000.000	22	855.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.822.040.000		2.031.895.000		2.243.242.500		2.456.156.625		2.519.434.605		11.072.768.730	
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	21,24 Persen	21,86	1.072.213.000	22,51	1.190.825.000	23,17	1.310.367.500	23,85	1.430.886.625	24,55	1.552.432.605	24,55	6.556.724.730	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase perpustakaan pada tingkat SMP yang ber SNP	47,06 Persen	57,35	624.827.000	67,65	686.070.000	77,94	747.875.000	88,24	810.270.000	100	873.285.000	100	3.742.327.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno yang dilestarikan	28,57 Persen	42,86	125.000.000	57,14	155.000.000	71,43	185.000.000	85,71	215.000.000	100	93.717.000	100	773.717.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				16.448.092.628		17.347.459.910		18.286.297.005		19.265.577.355		20.289.370.373		91.636.797.271	
2.24.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disarpus	90 Poin	91	15.772.154.628	91,5	16.637.719.910	92	17.541.065.005	92,5	18.483.079.355	93	19.467.742.373	93	87.901.761.271	DINAS KEARSIPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif dan in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	22,22 Persen	37,78	131.801.000	53,33	138.392.000	68,89	145.313.000	84,44	152.580.000	100	160.210.000	100	728.296.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase OPD yang nilai Audit Sistem Kearsipan Internal miminal baik	54,79 Persen	64,38	70.963.000	73,97	74.512.000	83,56	78.238.000	91,78	82.150.000	100	86.258.000	100	392.121.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	46,71 Persen	57,37	213.477.000	68,03	224.152.000	78,69	235.361.000	89,34	247.130.000	100	259.488.000	100	1.179.608.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik kemudian, dialihmediakan, diautentifikasi dan ditetapkan hasil alih medianya	16,27 Persen	26,93	259.697.000	37,58	272.684.000	48,24	286.320.000	58,9	300.638.000	69,56	315.672.000	69,56	1.435.011.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				303.770.052.000		325.618.728.880		349.397.085.294		371.336.661.366		390.333.501.730		1.740.456.029.270	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				34.100.000.000		41.860.857.000		47.843.650.000		53.397.933.000		58.533.590.000		235.736.030.000	
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	37.634 Ton	37,692	7.350.000.000	37,758	9.645.857.000	37,897	11.324.650.000	38,012	12.667.933.000	38,312	14.478.590.000	38,312	55.467.030.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	49.709 Ton	52,194	16.650.000.000	54,335	19.765.000.000	54,912	22.194.000.000	55,953	24.630.000.000	56,065	26.260.000.000	56,065	109.499.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Laju pertumbuhan pelaku usaha yang taat pada aturan	3 Prosen	3,77	1.500.000.000	4,54	2.450.000.000	5,3	2.925.000.000	6,07	3.350.000.000	6,83	3.670.000.000	6,83	13.895.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	13,33 Kg/Kapita/Tahun	13,76	8.600.000.000	14,24	10.000.000.000	14,74	11.400.000.000	15,3	12.750.000.000	15,37	14.125.000.000	15,37	56.875.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.515.000.000		8.345.000.000		10.355.000.000		12.865.000.000		14.415.000.000		51.495.000.000	
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	34,48 Persen	14,29	3.425.000.000	20	5.350.000.000	25,71	6.725.000.000	31,43	8.100.000.000	37,14	9.500.000.000	37,14	33.100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 Persen	10	1.700.000.000	10	2.300.000.000	10	2.850.000.000	10	3.400.000.000	10	3.950.000.000	10	14.200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	20 Persen	20	150.000.000	40	425.000.000	60	475.000.000	80	1.025.000.000	100	575.000.000	100	2.650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	7,94 Persen	10,2	240.000.000	11,48	270.000.000	12,76	305.000.000	14,03	340.000.000	15,31	390.000.000	63,78	1.545.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				147.345.893.000		151.500.691.880		161.098.402.054		168.007.936.286		174.918.700.030		802.871.623.250	
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian	87 Poin	87,25	47.122.847.000	87,5	49.419.003.000	87,75	54.718.019.000	88	60.042.035.000	88,25	65.365.202.000	88,25	276.667.106.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi gabah kering giling	561.634 Ton	589,561	1.550.000.000	617,575	1.700.000.000	645,676	1.860.000.000	673,864	2.030.000.000	702,139	2.200.000.000	702,139	9.340.000.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah produksi mangga	48.629 Ton	48,823	11.226.460.000	49,214	11.622.275.000	49,608	11.726.500.000	50,104	11.829.075.000	50,605	11.918.332.500	50,605	58.322.642.500	DINAS PERTANIAN
		Jumlah produksi tebu	20.424 Ton	20,506	720.000.000	20,588	720.000.000	20,67	720.000.000	20,753	720.000.000	20,836	720.000.000	20,836	3.600.000.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelahiran ternak sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB)	200 Ekor	400	830.117.600	700	871.623.480	700	915.204.654	700	960.964.886	700	1.009.013.130	3,2	4.586.923.750	DINAS PERTANIAN
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tanam padi	92.435 Ha	94,937	58.143.767.000	99,289	59.282.706.000	103,64	63.154.842.000	107,991	64.276.835.000	112,342	65.410.427.000	112,342	310.268.577.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pemotongan ternak ruminansia di Rumah Potong Hewan	6.563 Ekor	6,57	21.555.056.400	6,588	21.555.056.400	6,606	21.555.056.400	6,624	21.555.056.400	6,643	21.555.056.400	6,643	107.775.282.000	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular dan/atau zoonosis	0 Persen	2	1.200.000.000	2	1.280.000.000	2	1.345.000.000	2	1.410.000.000	2	1.475.000.000	2	6.710.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase keberhasilan panen padi	99,79 Persen	99,81	4.450.000.000	99,82	4.475.000.000	99,83	4.500.000.000	99,84	4.550.000.000	99,85	4.600.000.000	99,85	22.575.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	353 Kelompok	363	547.645.000	373	575.028.000	383	603.780.000	393	633.970.000	403	665.669.000	403	3.026.092.000	DINAS PERTANIAN
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				96.644.447.000		101.780.366.000		106.214.294.240		111.176.490.080		114.792.069.700		530.607.667.020	
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,1 Poin	83,5	21.518.945.000	83,75	21.902.043.000	83,8	22.644.221.000	83,9	23.016.483.000	84	23.742.833.000	84	112.824.525.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	0 Persen	100	501.092.000	100	640.190.000	100	741.531.240	100	873.537.080	100	1.011.241.700	100	3.767.592.020	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	22,22 Persen	100	63.284.016.000	100	66.660.718.000	100	69.053.755.000	100	72.463.943.000	100	73.892.141.000	100	345.354.573.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3,5 Poin	3,5	1.379.092.000	3,5	1.980.547.000	3,5	2.277.075.000	3,5	2.593.679.000	3,5	2.910.563.000	3,5	11.140.956.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	358.214.660 Juta USD	467	3.900.000.000	490	4.050.000.000	515	4.175.000.000	541	4.300.000.000	568	4.550.000.000	2,581	20.975.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	70 Prosentase	100	1.261.302.000	100	1.496.868.000	100	1.622.712.000	100	1.778.848.000	100	1.885.291.000	100	8.045.021.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/dilaksanakan	16,6 Persen	70	4.800.000.000	70	5.050.000.000	70	5.700.000.000	70	6.150.000.000	70	6.800.000.000	70	28.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				20.052.921.000		22.014.433.000		23.762.488.000		25.759.887.000		27.538.255.000		119.127.984.000	
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1,68 Persen	1,72	18.368.835.000	1,77	20.029.867.000	1,81	21.566.862.000	1,85	23.364.708.000	1,89	24.926.494.000	9,04	108.256.766.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Perusahaan Industri yang Terawasi di SIINAS	0,22 Persen	2,22	676.941.000	2,27	807.145.000	2,32	937.921.000	2,37	967.916.000	2,42	1.068.273.000	11,6	4.458.196.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Perusahaan Industri yang Terdaftar di SIINAS	2,17 Persen	12,9	1.007.145.000	13,3	1.177.421.000	13,7	1.257.705.000	14,1	1.427.263.000	14,5	1.543.488.000	68,5	6.413.022.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				111.791.000		117.381.000		123.251.000		129.415.000		135.887.000		617.725.000	
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan wilayah transmigrasi lokal	20 Persen	25	111.791.000	30	117.381.000	35	123.251.000	40	129.415.000	45	135.887.000	45	617.725.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				283.529.353.190		329.813.931.109		370.475.720.800		417.141.403.378		475.626.058.917		1.876.586.467.394	
04.01.	SEKRETARIAT DAERAH				169.829.274.000		194.243.844.000		221.348.625.000		253.101.598.000		295.182.273.000		1.133.705.614.000	
04.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Poin	88,75	68.131.193.000	89	83.539.814.000	89,25	101.623.818.000	89,5	123.692.403.000	89,75	150.182.598.000	89,75	527.169.826.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Persen	100	43.560.000.000	100	47.613.000.000	100	52.068.650.000	100	56.967.081.000	100	62.352.433.000	100	262.561.164.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	0 Persen	100	13.531.565.000	100	15.561.299.000	100	16.339.364.000	100	17.202.441.000	100	23.223.296.000	100	85.857.965.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Tingkat Kematangan/Maturitas Organisasi Perangkat Daerah	0 Poin	28,1	352.773.000	28,2	370.412.000	28,3	388.933.000	28,4	408.380.000	28,5	428.799.000	28,5	1.949.297.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai Evaluasi Mandiri RB General	0 Nilai	68	435.074.000	68,5	456.828.000	69	479.669.000	69,5	503.653.000	70	528.835.000	70	2.404.059.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Opini Ombudsman	0 Nilai	93,75	286.331.000	94	300.648.000	94,25	315.680.000	94,5	331.464.000	94,75	348.037.000	94,75	1.582.160.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	0 Poin	100	194.148.000	100	203.856.000	100	214.049.000	100	224.752.000	100	235.990.000	100	1.072.795.000	SEKRETARIAT DAERAH
04.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0 Persen	100	1.963.582.000	100	1.449.068.000	100	1.540.560.000	100	1.638.529.000	100	1.743.491.000	100	8.335.230.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0 Persen	100	30.194.841.000	100	32.304.581.000	100	34.519.810.000	100	36.845.801.000	100	39.288.092.000	100	173.153.125.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	0 Persen	100	1.520.000.000	100	1.590.000.000	100	1.670.000.000	100	1.750.000.000	100	1.840.000.000	100	8.370.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	0 Persen	100	5.420.368.000	100	5.962.405.000	100	6.508.645.000	100	7.059.510.000	100	7.615.461.000	100	32.566.389.000	SEKRETARIAT DAERAH
04.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	0 Persen	100	1.724.669.000	100	2.125.704.000	100	2.636.594.000	100	3.130.446.000	100	3.713.390.000	100	13.330.803.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	0 Persen	100	555.885.000	100	611.500.000	100	672.650.000	100	739.915.000	100	813.906.000	100	3.393.856.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Tingkat Kematangan UKPBJ	0 Poin	75	1.958.845.000	77	2.154.729.000	79	2.370.203.000	81	2.607.223.000	83	2.867.945.000	83	11.958.945.000	SEKRETARIAT DAERAH
04.02.	SEKRETARIAT DPRD				113.700.079.190		135.570.087.109		149.127.095.800		164.039.805.378		180.443.785.917		742.880.853.394	
04.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat DPRD	84,88 Poin	84,9	73.018.653.620	85	90.820.518.982	85,1	99.902.570.869	85,2	109.892.827.955	85,3	120.882.110.749	85,3	494.516.682.175	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ketercapaian Raperda yang Dibahas	95 Persen	96	16.010.743.940	96,5	17.611.818.334	97	19.373.000.164	97,5	21.310.300.181	98	23.441.330.201	98	97.747.192.820	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Ketercapaian Publikasi Kegiatan DPRD di Masyarakat	80 Persen	85	14.658.224.570	86	16.124.047.027	87	17.736.451.728	88	19.510.096.900	89	21.461.106.590	89	89.489.926.815	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Ketercapaian Pengawasan Urusan Pemerintahan, Pengawasan DPRD dan Pembahasan Kebijakan Anggaran	80 Persen	85	10.012.457.060	86	11.013.702.766	87	12.115.073.039	88	13.326.580.342	89	14.659.238.377	89	61.127.051.584	SEKRETARIAT DPRD
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.007.066.573.396		1.014.272.194.340		1.019.465.942.843		1.030.283.255.008		1.040.646.419.692		5.111.734.385.279	
05.01.	PERENCANAAN				19.936.043.000		21.321.823.000		22.753.465.000		24.235.262.000		25.690.874.000		113.937.467.000	
05.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bapperida	86,05 Nilai	87,2	15.156.776.000	87,5	16.337.317.000	88	17.543.766.000	89	18.744.987.000	90	19.963.318.000	90	87.746.164.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
05.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah	100 Persen	100	2.362.381.000	100	2.452.724.000	100	2.561.099.000	100	2.674.892.000	100	2.794.376.000	100	12.845.472.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
05.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0 Persen	100	771.886.000	100	789.282.000	100	808.600.000	100	827.883.000	100	848.180.000	100	4.045.831.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0 Persen	100	755.000.000	100	852.500.000	100	950.000.000	100	1.047.500.000	100	1.195.000.000	100	4.800.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0 Persen	100	890.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	100	940.000.000	100	890.000.000	100	4.500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
05.02.	KEUANGAN				948.720.646.524		950.984.164.376		949.886.302.214		955.429.405.335		961.392.979.969		4.766.413.498.418	
05.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM BKAD	82 Nilai	82	15.775.000.000	82,5	16.405.000.000	84	13.040.000.000	84,5	13.170.000.000	86	13.300.000.000	86	71.690.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25 Poin	83,8	48.184.993.524	84,1	49.448.618.376	84,3	51.251.129.214	84,6	56.165.712.335	84,9	61.571.371.969	84,9	266.621.825.418	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	15 Nilai	15	3.255.000.000	15	3.255.000.000	15	3.255.000.000	15	3.255.000.000	15	3.255.000.000	15	16.275.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Indeks Penyerapan Anggaran dalam APBD	15 Nilai	15	861.275.000.000	15	861.275.000.000	15	861.275.000.000	15	861.275.000.000	15	861.275.000.000	15	4.306.375.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100	1.930.000.000	100	1.930.000.000	100	1.930.000.000	100	1.930.000.000	100	1.930.000.000	100	9.650.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
05.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentse Penambahan Nilai Aset Tetap	6,74 Persen	6,74	8.025.000.000	6,84	8.025.000.000	6,94	8.025.000.000	7,04	8.025.000.000	7,14	8.025.000.000	7,14	40.125.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
05.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	5 Persen	5	10.191.653.000	5	10.559.026.000	5	11.019.327.000	5	11.513.304.000	5	11.936.449.000	5	55.219.759.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.03.	KEPEGAWAIAN				27.769.486.332		32.029.808.424		36.839.777.089		40.777.189.133		44.071.167.183		181.487.428.161	
05.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM BKPSDM	83 Poin	84	21.730.810.132	85	25.216.934.274	86	28.382.407.347	87	31.847.495.735	88,31	34.626.117.766	88,31	141.803.765.254	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi pada Penerapan sistem merit	88,5 Poin	91	1.128.064.100	91	1.325.414.160	91	1.502.355.576	91	1.637.591.135	91	1.786.350.247	91	7.379.775.218	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai aspek promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	32,5 Poin	35	1.793.813.700	35	1.973.195.070	35	2.234.536.074	35	2.447.989.682	35	2.682.788.650	35	11.132.323.176	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai aspek manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, serta perlindungan dan pelayanan pada penerapan sistem merit	107,5 Poin	108	674.665.200	108	902.131.720	108	1.086.344.892	108	1.167.979.381	108	1.257.777.320	108	5.088.898.513	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai aspek pengembangan karir pada penerapan sistem merit	86,5 poin	91	2.442.133.200	92	2.612.133.200	93	3.634.133.200	94	3.676.133.200	95	3.718.133.200	95	16.082.666.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.930.397.540		6.981.398.540		6.981.398.540		6.981.398.540		6.981.398.540		34.855.991.700	
05.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi pengembangan karir pada penerapan sistem merit	86,5 Poin	91	6.930.397.540	92	6.981.398.540	93	6.981.398.540	94	6.981.398.540	95	6.981.398.540	95	34.855.991.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.710.000.000		2.955.000.000		3.005.000.000		2.860.000.000		2.510.000.000		15.040.000.000	
05.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian yang dihasilkan	0 Persen	100	2.450.000.000	100	1.805.000.000	100	1.615.000.000	100	1.630.000.000	100	1.240.000.000	100	8.740.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.05.03.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil inovasi yang didiseminasikan	0 Persen	100	1.260.000.000	100	1.150.000.000	100	1.390.000.000	100	1.230.000.000	100	1.270.000.000	100	6.300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				50.042.746.000		52.657.134.000		55.311.793.000		64.061.734.000		59.496.973.000		281.570.380.000	
06.01.	INSPEKTORAT DAERAH				50.042.746.000		52.657.134.000		55.311.793.000		64.061.734.000		59.496.973.000		281.570.380.000	
06.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Persen	89,2	31.292.746.000	89,4	32.832.134.000	89,6	34.436.793.000	89,8	42.011.734.000	90	36.296.973.000	90	176.870.380.000	INSPEKTORAT
06.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	63 Persen	72	14.200.000.000	72,5	14.875.000.000	73	15.525.000.000	73,5	16.200.000.000	74	16.850.000.000	74	77.650.000.000	INSPEKTORAT
06.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,17 Skor	3,2	4.550.000.000	3,21	4.950.000.000	3,22	5.350.000.000	3,23	5.850.000.000	3,24	6.350.000.000	3,24	27.050.000.000	INSPEKTORAT
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				174.488.903.758		181.308.031.254		185.853.894.143		196.430.585.482		206.292.682.318		944.374.096.955	
07.01.	KECAMATAN				174.488.903.758		181.308.031.254		185.853.894.143		196.430.585.482		206.292.682.318		944.374.096.955	
07.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.736.396.000	77	3.774.098.000	78	2.955.204.000	79	3.087.027.000	80	3.226.692.000	80	15.779.417.000	KECAMATAN WALED
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	82,5 Poin	83	2.604.292.000	84	3.089.262.000	84,5	3.259.106.000	85	3.435.142.000	85	3.615.706.000	85	16.003.508.000	KECAMATAN CILEDUG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.731.353.000	77	2.840.932.000	78	2.956.200.000	79	3.076.595.000	80	3.202.901.000	80	14.807.981.000	KECAMATAN LOSARI
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	4.284.548.000	77	3.453.636.000	78	3.599.681.000	79	3.661.201.000	80	3.823.126.000	80	18.822.192.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,82 Poin	83,85	2.769.180.000	83,87	3.098.583.000	83,9	3.234.003.000	84	3.375.741.000	84,15	3.524.108.000	84,15	16.001.615.000	KECAMATAN BABAKAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	82 Poin	83	2.651.930.000	83,5	2.800.083.000	84	2.949.046.000	84,5	3.104.105.000	85	3.266.569.000	85	14.771.733.000	KECAMATAN GEBANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	0 Poin	60	2.887.185.000	62	2.995.574.000	63	3.109.653.000	64	3.224.187.000	65	3.344.448.000	65	15.561.047.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	78 Poin	78,5	2.558.908.000	79	2.829.148.000	80	2.753.087.000	81	2.733.224.000	82	2.869.870.000	82	13.744.237.000	KECAMATAN LEMAHABANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	94 Poin	95	4.909.677.000	96	2.560.083.000	97	2.617.045.000	98	2.789.855.000	99	2.878.806.000	99	15.755.466.000	KECAMATAN SUSUKANLEBAK
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	92 Poin	93	2.594.134.000	94	2.736.696.000	95	2.885.037.000	96	3.039.445.000	97	3.200.221.000	97	14.455.533.000	KECAMATAN SEDONG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	83,82 Poin	84	4.751.985.000	85	2.892.976.000	86	3.039.023.000	87	3.190.427.000	88	3.348.506.000	88	17.222.917.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82 Persen	100	2.663.189.000	100	2.770.806.000	100	2.883.795.000	100	3.002.422.000	100	3.126.971.000	100	14.447.183.000	KECAMATAN PANGENAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	85,5 Poin	86	3.488.907.000	86,5	3.605.929.000	87	3.628.884.000	87,5	3.657.986.000	88	3.792.545.000	88	18.174.251.000	KECAMATAN MUNDU
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	83 Poin	84	2.822.680.000	85	3.305.744.000	86	3.571.822.000	87	3.837.914.000	88	4.104.020.000	88	17.642.180.000	KECAMATAN BEBER
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	70 Poin	71	2.467.088.000	72	2.483.523.000	73	2.647.268.000	74	2.712.588.000	75	2.970.762.000	75	13.281.229.000	KECAMATAN TALUN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	92 Poin	93	18.280.148.120	94	21.084.228.132	95	21.956.440.246	96	25.173.623.869	97	26.390.501.956	97	112.884.942.323	KECAMATAN SUMBER
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	68,5 Poin	69,2	4.306.166.000	69,5	2.415.207.000	70	2.529.675.000	79,63	2.654.844.000	82,43	2.786.996.000	82,43	14.692.888.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	80 Poin	81	2.564.055.000	82	2.873.644.000	83	2.981.222.000	84	3.094.039.000	85	3.213.358.000	85	14.726.318.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	100 Poin	100	2.890.625.000	100	2.999.508.000	100	3.113.630.000	100	3.233.253.000	100	3.358.652.000	100	15.595.668.000	KECAMATAN PLUMBON
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.799.906.000	77	2.898.277.000	78	3.001.567.000	79	3.110.021.000	80	3.223.898.000	80	15.033.669.000	KECAMATAN DEPOK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,82 Poin	84	2.805.555.000	85	3.018.899.000	86	3.240.753.000	87	3.468.494.000	88	5.702.426.000	88	18.236.127.000	KECAMATAN WERU
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	83,82 Poin	83,85	3.113.102.000	83,87	3.218.959.000	83,9	3.329.744.000	84	3.445.703.000	84,15	3.567.295.000	84,15	16.674.803.000	KECAMATAN KEDAWUNG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.850.456.000	77	2.962.536.000	78	3.080.370.000	79	3.204.249.000	80	3.333.468.000	80	15.431.079.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	83,82 Poin	86	3.614.857.000	86,5	3.730.407.000	87	2.943.175.000	87,5	3.065.690.000	88	2.702.802.800	88	16.056.931.800	KECAMATAN KAPETAKAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	82,5 Poin	83	2.213.373.600	84	2.405.602.600	84,5	2.405.602.600	85	2.405.602.600	86	2.405.602.600	86	11.835.784.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	76 Poin	77	3.467.646.000	78	3.597.781.000	79	3.733.874.000	80	3.876.222.000	81	4.025.137.000	81	18.700.660.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Indek Kepuasan Masarakat Kecamatan (IKM)	85,5 Poin	86	2.805.057.000	86,5	3.177.771.000	87	3.408.007.000	87,5	3.950.340.000	88	4.286.074.000	88	17.627.249.000	KECAMATAN PANGURAGAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	85,5 Poin	86	2.600.016.000	86,5	3.136.472.000	87	2.882.425.000	87,5	3.037.149.000	88	3.583.933.000	88	15.239.995.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.786.388.000	77	2.894.215.000	78	3.006.432.000	79	3.125.312.000	80	3.250.134.000	80	15.062.481.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 Poin	97	3.812.918.000	98	4.270.800.000	97	4.471.900.000	98	4.572.500.000	99	4.673.600.000	99	21.801.718.000	KECAMATAN GEGESIK
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.776.903.400	77	2.798.667.000	78	2.907.902.000	79	3.022.812.000	80	3.143.236.000	80	14.649.520.400	KECAMATAN KALIWEDI
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.332.954.000	77	2.435.134.000	78	2.623.420.000	79	2.817.118.000	80	3.041.396.000	80	13.250.022.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	83,5 Poin	84	2.751.828.000	85	2.924.096.000	85	3.020.977.000	85	3.122.702.000	85	3.229.513.000	85	15.049.116.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	3.223.903.000	77	3.335.500.000	78	3.452.678.000	79	3.575.714.000	80	3.704.902.000	80	17.292.697.000	KECAMATAN GEMPOL
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	94 Poin	96,5	2.538.890.000	97	3.137.883.000	97,5	3.270.606.000	98	3.415.041.000	98,5	3.567.499.000	98,5	15.929.919.000	KECAMATAN PASALEMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	3.113.567.000	77	3.230.396.000	78	3.353.069.000	79	3.481.874.000	80	3.617.120.000	80	16.796.026.000	KECAMATAN PLERED
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	82 Poin	83	2.088.778.000	84	2.227.507.000	85	2.356.345.000	86	2.490.441.000	87	2.629.655.000	87	11.792.726.000	KECAMATAN PABUARAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	80 Poin	81	2.854.691.000	82	3.086.102.000	83	3.291.073.000	84	3.499.013.000	85	3.705.530.000	85	16.436.409.000	KECAMATAN GREGED
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	85 Poin	86	2.654.398.000	87	2.751.500.000	88	2.952.800.000	89	3.075.300.000	90	3.197.000.000	90	14.630.998.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Poin	76	2.563.184.000	77	2.682.532.000	78	2.806.896.000	79	2.936.580.000	80	3.074.898.000	80	14.064.090.000	KECAMATAN SURANENGGALA
07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	23,27 Persen	25,44	372.512.000	27,17	376.638.000	28,9	380.971.000	30,63	385.521.000	32,36	390.299.000	32,36	1.905.941.000	KECAMATAN WALED
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	12 Persen	20	243.034.000	25	250.587.000	27,5	257.518.000	30	265.846.000	35	275.590.000	35	1.292.575.000	KECAMATAN CILEDUG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	19 Persen	20	146.832.000	21	153.965.000	22	161.664.000	23	169.749.000	24	178.237.000	24	810.447.000	KECAMATAN LOSARI
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	11,59 Persen	12,56	125.831.000	13,53	132.125.000	14,5	138.733.000	15,47	145.671.000	16,44	152.956.000	16,44	695.316.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukann di Kecamatan	22 Persen	23	141.717.000	24	144.803.000	25	148.044.000	26	151.447.000	27	155.020.000	27	741.031.000	KECAMATAN BABAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	13 Persen	20	133.475.000	25	141.151.000	27	149.110.000	30	157.367.000	35	165.938.000	35	747.041.000	KECAMATAN GEBANG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	16 Persen	19,21	370.000.000	22,42	370.000.000	25,63	370.000.000	28,84	370.000.000	32,04	370.000.000	32,04	1.850.000.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukann di Kecamatan	100 Persen	100	127.107.000	100	133.465.000	100	140.140.000	100	147.149.000	100	154.508.000	100	702.369.000	KECAMATAN LEMAHABANG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	21 Persen	23	184.971.000	24	192.472.000	25	200.348.000	26	208.618.000	27	217.301.000	27	1.003.710.000	KECAMATAN SUSUKANLEBAK
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukann di Kecamatan	100 Persen	100	178.590.000	100	193.021.000	100	207.673.000	100	222.558.000	100	237.687.000	100	1.039.529.000	KECAMATAN SEDONG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	11,59 Persen	100	160.608.000	100	166.889.000	100	173.385.000	100	180.105.000	100	187.061.000	100	868.048.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	11,59 Persen	12,56	168.162.000	13,53	176.572.000	14,5	185.402.000	15,47	194.673.000	16,44	204.409.000	16,44	929.218.000	KECAMATAN PANGENAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	32,46 Persen	38,11	283.416.000	43,94	291.588.000	49,76	300.168.000	55,59	309.177.000	61,45	318.637.000	61,45	1.502.986.000	KECAMATAN MUNDU
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi	100 Persen	100	181.000.000	100	186.000.000	100	191.000.000	100	196.000.000	100	201.000.000	100	955.000.000	KECAMATAN BEBER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kependudukan di Kecamatan														
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	50 Persen	60	190.022.000	70	199.526.000	75	209.505.000	80	219.981.000	90	230.981.000	90	1.050.015.000	KECAMATAN TALUN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukan di Kecamatan	100 Persen	100	431.093.665	100	452.649.248	100	475.283.161	100	499.048.619	100	524.002.950	100	2.382.077.643	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukann di Kecamatan	32,28 Persen	38,11	115.604.000	43,94	121.387.000	49,76	127.459.000	55,59	133.834.000	61,45	140.528.000	61,45	638.812.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	42,01 Persen	43,58	380.862.000	45,15	383.406.000	46,72	386.077.000	48,29	388.881.000	49,85	391.826.000	49,85	1.931.052.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukann di Kecamatan	100 Persen	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	1.900.000.000	KECAMATAN PLUMBON
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	23,27 Persen	25,44	360.000.000	27,17	360.000.000	28,9	360.000.000	30,63	360.000.000	32,36	360.000.000	32,36	1.800.000.000	KECAMATAN DEPOK
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukann di Kecamatan	86 Persen	100	155.304.000	100	164.871.000	100	174.716.000	100	184.853.000	100	195.297.000	100	875.041.000	KECAMATAN WERU
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi	15,36 Persen	17,23	360.000.000	19,09	360.000.000	20,96	360.000.000	22,82	360.000.000	24,69	360.000.000	24,69	1.800.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kependudukan di Kecamatan														
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	11,59 Persen	12,56	120.598.000	13,53	126.629.000	14,5	132.962.000	15,47	139.612.000	16,44	146.596.000	16,44	666.397.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukann di Kecamatan	86 Persen	87	242.000.000	88	247.000.000	89	270.000.000	90	283.000.000	91	306.000.000	91	1.348.000.000	KECAMATAN KAPETAKAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	97 Persen	20	135.237.200	25	135.237.200	28	135.237.200	30	135.237.200	36	135.237.200	36	676.186.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	11 Persen	11,5	172.459.000	12	175.333.000	12,6	178.351.000	13,3	181.520.000	14,5	184.847.000	14,5	892.510.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	32,28 Persen	38,11	156.640.000	43,94	160.222.000	49,76	169.859.000	55,59	175.052.000	61,45	183.805.000	61,45	845.578.000	KECAMATAN PANGURAGAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukann di Kecamatan	32,28 Persen	38,11	242.000.000	43,94	248.000.000	49,76	264.000.000	55,59	290.000.000	61,45	316.000.000	61,45	1.360.000.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	23,27 Persen	25,44	152.110.000	27,17	157.216.000	28,9	162.578.000	30,63	168.208.000	32,36	174.120.000	32,36	814.232.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 Persen	100	831.781.000	100	970.000.000	100	980.000.000	100	980.000.000	100	980.000.000	100	4.741.781.000	KECAMATAN GEGESIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	100 Persen	100	213.215.000	100	218.228.000	100	226.641.000	100	235.475.000	100	244.750.000	100	1.138.309.000	KECAMATAN KALIWEDI
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	24 Persen	20	150.398.000	21	157.919.000	22	165.816.000	23	174.109.000	24	182.816.000	24	831.058.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	0 Persen	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.700.000.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	4,99 Persen	7,7	360.000.000	10,42	360.000.000	13,13	360.000.000	15,84	360.000.000	18,56	360.000.000	18,56	1.800.000.000	KECAMATAN GEMPOL
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukann di Kecamatan	97 Persen	23	130.000.000	24	171.000.000	25	183.000.000	26	201.000.000	27	215.000.000	27	900.000.000	KECAMATAN PASALEMAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	4,41 Persen	7,08	370.000.000	9,76	370.000.000	12,43	370.000.000	15,11	370.000.000	17,78	370.000.000	17,78	1.850.000.000	KECAMATAN PLERED
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	81 Persen	100	125.000.000	100	133.500.000	100	142.000.000	100	151.500.000	100	160.000.000	100	712.000.000	KECAMATAN PABUARAN
		Persentase Capaian Pelayanan Publik administrasi kependudukann di Kecamatan	100 Persen	100	173.157.000	100	174.815.000	100	176.557.000	100	178.386.000	100	180.306.000	100	883.221.000	KECAMATAN GREGED

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	40 Persen	45	200.000.000	47	265.000.000	50	275.000.000	53	275.000.000	55	275.000.000	55	1.290.000.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan	11,59 Persen	12,56	214.636.000	13,53	225.370.000	14,5	236.640.000	15,47	248.474.000	16,44	260.900.000	16,44	1.186.020.000	KECAMATAN SURANENGGALA
07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	94 Persen	95	450.000.000	96	450.000.000	97	450.000.000	98	450.000.000	99	450.000.000	99	2.250.000.000	KECAMATAN WALED
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	97 Persen	97,5	119.908.000	98	172.654.000	98,5	180.088.000	99	185.719.000	100	193.056.000	100	851.425.000	KECAMATAN CILEDUG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	188.913.000	100	190.659.000	100	191.492.000	100	192.417.000	100	193.438.000	100	956.919.000	KECAMATAN LOSARI
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	92 Persen	93	192.085.000	94	196.690.000	95	201.526.000	96	206.603.000	97	211.934.000	97	1.008.838.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/ diberdayakan	97 Persen	97,5	151.000.000	98	178.867.000	98,5	184.461.000	99	192.185.000	99,5	200.045.000	99,5	906.558.000	KECAMATAN BABAKAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	16 Persen	20	127.976.000	25	133.126.000	30	138.483.000	35	144.058.000	40	149.862.000	40	693.505.000	KECAMATAN GEBANG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	16,67 Persen	33,33	350.000.000	50	350.000.000	66,67	350.000.000	83,33	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	109.036.000	100	114.239.000	100	119.702.000	100	125.438.000	100	131.461.000	100	599.876.000	KECAMATAN LEMAHABANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	97.843.000	100	106.736.000	100	115.823.000	100	120.115.000	100	129.621.000	100	570.138.000	KECAMATAN SUSUKANLEBAK
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	500.000.000	KECAMATAN SEDONG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	93 Persen	100	142.000.000	100	166.000.000	100	172.000.000	100	178.000.000	100	184.000.000	100	842.000.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	92 Persen	93	89.703.000	94	93.689.000	95	97.774.000	96	101.963.000	97	106.262.000	97	489.391.000	KECAMATAN PANGENAN
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	100 Persen	100	63.902.000	100	65.348.000	100	66.867.000	100	68.461.000	100	70.135.000	100	334.713.000	KECAMATAN MUNDU
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	115.000.000	100	136.000.000	100	147.000.000	100	158.000.000	100	169.000.000	100	725.000.000	KECAMATAN BEBER
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	50 Persen	60	102.925.000	70	108.072.000	75	113.476.000	80	119.150.000	85	125.108.000	85	568.731.000	KECAMATAN TALUN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	252.000.000	100	48.350.000	100	280.195.000	100	295.535.750	100	311.776.638	100	1.187.857.388	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Kelurahan Berdaya	75 Persen	80	12.688.785.973	85	13.213.817.274	90	13.779.350.136	95	14.398.438.644	100	15.035.389.674	100	69.115.781.701	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	100 Persen	100	190.947.000	100	195.520.000	100	200.221.000	100	184.808.000	100	209.036.000	100	980.532.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	20 Persen	40	350.000.000	60	350.000.000	80	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	100 Persen	100	249.600.000	100	251.580.000	100	253.659.000	100	255.842.000	100	258.135.000	100	1.268.816.000	KECAMATAN PLUMBON
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	16,67 Persen	33,33	350.000.000	50	350.000.000	66,67	350.000.000	83,33	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN DEPOK
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	80 Persen	100	97.561.000	100	101.940.000	100	106.438.000	100	111.061.000	100	115.815.000	100	532.815.000	KECAMATAN WERU
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	16,67 Persen	33,33	350.000.000	50	350.000.000	66,67	350.000.000	83,33	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	153.742.000	100	156.430.000	100	159.252.000	100	162.216.000	100	165.328.000	100	796.968.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	80 Persen	90	210.000.000	92	214.000.000	93	217.000.000	94	220.000.000	100	223.000.000	100	1.084.000.000	KECAMATAN KAPETAKAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	97 Persen	97,5	2.042.400	98	77.042.400	98,5	77.042.400	99	77.042.400	100	77.042.400	100	310.212.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.300.000.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilakukan	100 Persen	100	125.500.000	100	145.000.000	100	151.000.000	100	152.300.000	100	157.000.000	100	730.800.000	KECAMATAN PANGURAGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan/Diperdayakan														
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dilakukan Pembinaan/Diberdayakan	100 Persen	100	250.000.000	100	256.000.000	100	262.000.000	100	268.000.000	100	274.000.000	100	1.310.000.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	190.682.000	100	192.717.000	100	194.853.000	100	197.096.000	100	199.451.000	100	974.799.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	705.000.000	KECAMATAN GEGESIK
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	183.428.000	100	185.100.000	100	186.855.000	100	188.698.000	100	190.633.000	100	934.714.000	KECAMATAN KALIWEDI
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	178.834.000	100	181.776.000	100	184.865.000	100	188.109.000	100	191.515.000	100	925.099.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	250.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.650.000.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN GEMPOL
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/ diberdayakan	98 Persen	98	195.000.000	98,5	232.000.000	99	245.000.000	99,5	260.000.000	100	275.000.000	100	1.207.000.000	KECAMATAN PASALEMAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	16,67 Persen	33,33	400.000.000	50	400.000.000	66,67	400.000.000	83,33	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000	KECAMATAN PLERED

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	82 Persen	100	90.000.000	100	101.000.000	100	112.000.000	100	123.000.000	100	134.000.000	100	560.000.000	KECAMATAN PABUARAN
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	110.000.000	100	142.756.000	100	143.644.000	100	144.577.000	100	145.556.000	100	686.533.000	KECAMATAN GREGED
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	1.170.000.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	167.918.000	100	171.315.000	100	174.882.000	100	178.627.000	100	182.559.000	100	875.301.000	KECAMATAN SURANENGGALA
07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	94 Persen	95	170.654.000	96	173.687.000	97	176.872.000	98	180.217.000	99	183.729.000	99	885.159.000	KECAMATAN WALED
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	97 Persen	97,5	42.608.000	98	92.174.000	98,5	96.783.000	99	101.623.000	99,5	106.705.000	99,5	439.893.000	KECAMATAN CILEDUG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	44.442.000	100	46.665.000	100	48.999.000	100	51.449.000	100	54.022.000	100	245.577.000	KECAMATAN LOSARI
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	94 Persen	95	73.905.000	96	77.601.000	97	81.482.000	98	85.557.000	99	89.836.000	99	408.381.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan	97 Persen	97,5	99.648.000	98	104.632.000	98,5	109.864.000	99	115.358.000	99,5	121.127.000	99,5	550.629.000	KECAMATAN BABAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP														
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	15 Persen	20	92.174.000	30	96.783.000	40	101.623.000	50	106.705.000	60	112.042.000	60	509.327.000	KECAMATAN GEBANG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	20 Persen	30	210.000.000	50	210.000.000	70	210.000.000	90	210.000.000	100	210.000.000	100	1.050.000.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG
		Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	82.505.000	100	86.631.000	100	90.963.000	100	95.512.000	100	100.288.000	100	455.899.000	KECAMATAN LEMAHABANG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	0 Persen	100	66.532.000	100	69.860.000	100	73.354.000	100	77.023.000	100	80.875.000	100	367.644.000	KECAMATAN SUSUKANLEBAK
		Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	80.602.000	100	84.633.000	100	88.865.000	100	93.309.000	100	97.976.000	100	445.385.000	KECAMATAN SEDONG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	93 Persen	100	94.615.000	100	98.846.000	100	103.189.000	100	107.649.000	100	112.232.000	100	516.531.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi	94 Persen	95	110.987.000	96	116.537.000	97	122.364.000	98	128.483.000	99	134.909.000	99	613.280.000	KECAMATAN PANGENAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ke Satpol PP Kabupaten Cirebon														
		Persentase jumlah pelanggar PERDA yag didata dan dilaporkan/dikordinasikan ke Satpol PP	100 Persen	100	80.646.000	100	84.679.000	100	88.914.000	100	93.361.000	100	98.030.000	100	445.630.000	KECAMATAN MUNDU
		Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	50.000.000	100	107.500.000	100	115.125.000	100	122.882.000	100	130.777.000	100	526.284.000	KECAMATAN BEBER
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	50 Persen	60	63.209.000	70	66.370.000	80	69.689.000	85	73.174.000	90	76.833.000	90	349.275.000	KECAMATAN TALUN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	151.008.000	100	158.559.000	100	166.487.000	100	174.813.000	100	183.555.000	100	834.422.000	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP	100 Persen	100	89.126.000	100	93.583.000	100	98.263.000	100	103.177.000	100	108.337.000	100	492.486.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	20 Persen	30	200.000.000	50	200.000.000	70	200.000.000	90	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	1.050.000.000	KECAMATAN PLUMBON
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang	20 Persen	30	200.000.000	50	202.500.000	70	205.125.000	90	207.882.000	100	210.777.000	100	1.026.284.000	KECAMATAN DEPOK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon														
		Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP	80 Persen	100	89.431.000	100	93.903.000	100	98.599.000	100	103.530.000	100	108.708.000	100	494.171.000	KECAMATAN WERU
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	20 Persen	30	199.294.000	50	201.759.000	70	204.347.000	90	207.065.000	100	209.919.000	100	1.022.384.000	KECAMATAN KEDAWUNG
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan	100 Persen	100	91.476.000	100	96.050.000	100	100.853.000	100	105.897.000	100	111.193.000	100	505.469.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP	80 Persen	100	129.166.000	100	131.625.000	100	140.207.000	100	143.918.000	100	147.764.000	100	692.680.000	KECAMATAN KAPETAKAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	97 Persen	97,5	3.024.600	98	3.024.600	98,5	3.024.600	99	3.024.600	100	3.024.600	100	15.123.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	149.332.000	100	151.799.000	100	154.389.000	100	157.109.000	100	159.965.000	100	772.594.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Presentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikordinasi Ke Satpol PP	100 Persen	100	41.000.000	100	84.975.000	100	87.649.000	100	92.786.000	100	97.426.000	100	403.836.000	KECAMATAN PANGURAGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP	100 Persen	100	122.000.000	100	126.000.000	100	130.000.000	100	134.000.000	100	138.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	93.442.000	100	98.115.000	100	103.021.000	100	108.173.000	100	113.583.000	100	516.334.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasikan ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	450.000.000	KECAMATAN GEGESIK
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	74.037.000	100	77.739.000	100	81.626.000	100	85.709.000	100	89.996.000	100	409.107.000	KECAMATAN KALIWEDI
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	77.758.000	100	81.646.000	100	85.729.000	100	90.016.000	100	94.518.000	100	429.667.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	950.000.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	KECAMATAN GEMPOL
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang	98 Persen	98	41.621.000	98,5	96.203.000	99	101.014.000	99,5	106.066.000	100	111.371.000	100	456.275.000	KECAMATAN PASALEMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP														
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	20 Persen	30	200.000.000	50	202.500.000	70	205.125.000	90	207.882.000	100	210.777.000	100	1.026.284.000	KECAMATAN PLERED
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	105.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	145.000.000	100	625.000.000	KECAMATAN PABUARAN
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP	100 Persen	100	50.940.000	100	53.488.000	100	56.163.000	100	58.972.000	100	61.922.000	100	281.485.000	KECAMATAN GREGED
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon.	100 Persen	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	820.000.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	92.708.000	100	97.344.000	100	102.212.000	100	107.324.000	100	112.692.000	100	512.280.000	KECAMATAN SURANENGGALA
07.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	94 Persen	95	111.667.000	96	112.251.000	97	112.864.000	98	113.508.000	99	114.184.000	99	564.474.000	KECAMATAN WALED
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	97 Persen	97,5	52.969.000	98	126.418.000	98,5	129.989.000	99	133.689.000	100	139.524.000	100	582.589.000	KECAMATAN CILEDUG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan	100 Persen	100	150.000.000	100	160.850.000	100	170.743.000	100	180.681.000	100	190.666.000	100	852.940.000	KECAMATAN LOSARI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pemerintahan umum yang dilaksanakan														
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	94 Persen	95	130.000.000	96	130.000.000	97	130.000.000	98	130.000.000	99	130.000.000	99	650.000.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	96 Persen	96,5	80.000.000	97	120.000.000	98	122.000.000	99	124.000.000	99,5	125.000.000	99,5	571.000.000	KECAMATAN BABAKAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	96 Persen	96,5	109.825.000	97	113.817.000	97,5	116.908.000	98	121.104.000	98,5	125.410.000	98,5	587.064.000	KECAMATAN GEBANG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	24.645.000	100	25.628.000	100	26.660.000	100	27.743.000	100	28.881.000	100	133.557.000	KECAMATAN LEMAHABANG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	KECAMATAN SUSUKANLEBAK
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	850.000.000	KECAMATAN SEDONG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	93 Persen	100	130.000.000	100	139.000.000	100	148.000.000	100	157.000.000	100	169.000.000	100	743.000.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	94 Persen	95	149.000.000	96	149.000.000	97	149.000.000	98	149.000.000	99	149.000.000	99	745.000.000	KECAMATAN PANGENAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000	KECAMATAN MUNDU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	40.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	380.000.000	KECAMATAN BEBER
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	125.000.000	100	137.500.000	100	151.250.000	100	166.375.000	100	183.012.500	100	763.137.500	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	100	64.085.000	100	69.790.000	100	75.530.000	100	81.307.000	100	87.123.000	100	377.835.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	0	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	132.000.000	100	134.000.000	100	136.000.000	100	138.000.000	100	670.000.000	KECAMATAN PLUMBON
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN DEPOK
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	81 Persen	82	74.000.000	83	80.000.000	84	86.000.000	85	92.000.000	86	98.000.000	86	430.000.000	KECAMATAN WERU
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	110.482.000	100	112.007.000	100	113.608.000	100	115.289.000	100	117.054.000	100	568.440.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	81 Persen	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	450.000.000	KECAMATAN KAPETAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	97 Persen	97,5	50.000.000	98	120.000.000	98,5	120.000.000	99	120.000.000	100	120.000.000	100	530.000.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.750.000.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Prosentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	0 Persen	100	50.000.000	100	52.000.000	100	54.000.000	100	56.000.000	100	58.000.000	100	270.000.000	KECAMATAN PANGURAGAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	100	92.000.000	100	96.000.000	100	100.000.000	100	104.000.000	100	108.000.000	100	500.000.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	400.000.000	KECAMATAN GEGESIK
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN KALIWEDI
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	57.956.000	100	58.354.000	100	58.772.000	100	69.211.000	100	69.672.000	100	313.965.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	50.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	370.000.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	KECAMATAN GEMPOL
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan	96 Persen	98	70.000.000	98,5	148.000.000	99	157.000.000	99,5	166.000.000	100	177.000.000	100	718.000.000	KECAMATAN PASALEMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pemerintahan umum yang dilaksanakan														
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	KECAMATAN PLERED
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	150.000.000	100	170.000.000	100	190.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	950.000.000	KECAMATAN PABUARAN
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	50.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	250.000.000	100	645.000.000	KECAMATAN GREGED
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	550.000.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	100.581.000	100	101.611.000	100	102.692.000	100	103.827.000	100	105.019.000	100	513.730.000	KECAMATAN SURANENGGALA
07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	34 Persen	35	25.000.000	36	45.000.000	37	25.000.000	38	65.000.000	39	25.000.000	39	185.000.000	KECAMATAN WALED
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	30	16.400.000	35	36.720.000	40	17.056.000	50	42.409.000	60	17.780.000	60	130.365.000	KECAMATAN CILEDUG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	40	75.000.000	50	75.000.000	60	75.000.000	70	75.000.000	80	75.000.000	80	375.000.000	KECAMATAN LOSARI
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	25	60.000.000	30	60.000.000	35	60.000.000	40	60.000.000	45	60.000.000	45	300.000.000	KECAMATAN PABEDILAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	25	25.000.000	30	110.000.000	35	35.000.000	40	160.000.000	45	45.000.000	45	375.000.000	KECAMATAN BABAKAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	30	24.000.000	40	50.000.000	50	26.000.000	55	57.000.000	60	28.000.000	60	185.000.000	KECAMATAN GEBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terpenuhinya jumlah desa yang penetapan RKPDes dan APBDes Tepat Waktu	25 Persen	25	30.000.000	25	60.000.000	25	30.000.000	25	60.000.000	25	30.000.000	25	210.000.000	KECAMATAN KARANGSEMBUNG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	0	0	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	32.000.000	KECAMATAN LEMAHABANG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	200.000.000	KECAMATAN SEDONG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	25	20.000.000	30	40.000.000	35	20.000.000	40	20.000.000	45	20.000.000	45	120.000.000	KECAMATAN ASTANAJAPURA
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	25	40.000.000	30	40.000.000	35	40.000.000	40	40.000.000	45	40.000.000	45	200.000.000	KECAMATAN PANGENAN
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	26	20.000.000	27	32.754.000	30	20.000.000	33	33.000.000	35	20.000.000	35	125.754.000	KECAMATAN MUNDU
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	0	100	65.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	20.000.000	100	130.000.000	KECAMATAN BEBER
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	0 Persen	100	12.000.000	100	13.200.000	100	14.520.000	100	30.972.000	0	34.069.200	100	104.761.200	KECAMATAN SUMBER
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	0 Persen	25	1.727.000	25	101.814.000	37,5	1.905.000	37,5	102.001.000	50	2.102.000	50	209.549.000	KECAMATAN DUKUPUNTANG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	30	50.000.000	30	250.000.000	KECAMATAN PALIMANAN
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	32.905.000	100	67.051.000	100	39.204.000	100	71.365.000	100	43.534.000	100	254.059.000	KECAMATAN PLUMBON
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	60.000.000	16,67	60.000.000	16,67	60.000.000	16,67	60.000.000	16,67	60.000.000	16,67	300.000.000	KECAMATAN DEPOK
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	81 Persen	82	46.200.000	83	58.400.000	84	70.600.000	85	147.800.000	86	97.200.000	86	420.200.000	KECAMATAN WERU
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	25	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	25	60.000.000	37,5	60.000.000	37,5	300.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	30	60.000.000	30	300.000.000	KECAMATAN GUNUNGJATI
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	81 Persen	82	26.000.000	83	26.000.000	84	26.000.000	85	26.000.000	90	26.000.000	90	130.000.000	KECAMATAN KAPETAKAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	30	10.850.800	30	10.850.800	40	10.850.800	50	10.850.800	60	10.850.800	60	54.254.000	KECAMATAN KLANGENAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	30 Persen	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	40	10.000.000	40	50.000.000	KECAMATAN ARJAWINANGUN
		Presentase Jumlah Desa Yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	25	0	25	66.500.000	27	20.000.000	27,5	35.000.000	50	30.000.000	50	151.500.000	KECAMATAN PANGURAGAN
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu	25 Persen	25	46.200.000	37,5	118.400.000	37,5	70.600.000	50	142.800.000	50	93.000.000	50	471.000.000	KECAMATAN CIWARINGIN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	30	60.000.000	30	300.000.000	KECAMATAN SUSUKAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000	KECAMATAN GEGESIK
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	25	60.000.000	30	60.000.000	35	60.000.000	40	60.000.000	45	60.000.000	45	300.000.000	KECAMATAN KALIWEDI
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	45	45.000.000	45	45.000.000	45	45.000.000	45	45.000.000	45	45.000.000	45	225.000.000	KECAMATAN KARANGWARENG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	30.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	30	60.000.000	30	270.000.000	KECAMATAN TENGAH TANI
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	300.000.000	KECAMATAN GEMPOL
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	25	25.000.000	30	150.000.000	35	35.000.000	40	120.000.000	45	45.000.000	45	375.000.000	KECAMATAN PASALEMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	300.000.000	KECAMATAN PLERED
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	60.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	145.000.000	100	155.000.000	100	620.000.000	KECAMATAN PABUARAN
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	5.000.000	100	40.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	100	65.000.000	KECAMATAN GREGED
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	45 Persen	45	60.000.000	50	60.000.000	55	60.000.000	60	60.000.000	65	60.000.000	65	300.000.000	KECAMATAN JAMBLANG
		Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	20 Persen	20	0	20	30.000.000	20	0	20	30.000.000	30	0	30	60.000.000	KECAMATAN SURANENGGALA
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				40.276.250.000		34.966.250.000		35.746.250.000		35.346.250.000		36.496.250.000		182.831.250.000	
08.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				40.276.250.000		34.966.250.000		35.746.250.000		35.346.250.000		36.496.250.000		182.831.250.000	
08.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bakesbangpol	74 Persen	75	12.133.000.000	75,5	8.823.000.000	76	9.603.000.000	76,5	9.203.000.000	77	10.403.000.000	77	50.165.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase lembaga/organisasi terkait yang bermitra dalam pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	6,3 Persen	12,4	9.368.250.000	12,4	9.368.250.000	12,4	9.368.250.000	12,4	9.368.250.000	12,4	9.368.250.000	12,4	46.841.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Partai Politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilihan/Pemilihan Umum, Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik	28 Persen	28	7.555.000.000	28	7.555.000.000	28	7.555.000.000	28	7.555.000.000	28	7.555.000.000	28	37.775.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dari basic data Ormas pada bulan	20,14 Persen	20,14	1.100.000.000	20,14	1.100.000.000	20,14	1.100.000.000	20,14	1.100.000.000	0	1.100.000.000	20,14	5.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		februari 2025 sebanyak 278														
08.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase lembaga/organisasi terkait yang bermitra di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	21,15 Persen	19,23	1.420.000.000	19,23	1.420.000.000	19,23	1.420.000.000	21,15	1.420.000.000	21,15	1.370.000.000	21,15	7.050.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Jumlah pencegahan konflik (Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama) yang terjadi di Wilayah Kabupaten Cirebon	8,3 Persen	8,3	8.700.000.000	16,6	6.700.000.000	8,3	6.700.000.000	16,6	6.700.000.000	16,6	6.700.000.000	16,6	35.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH					6.910.115.838.063		7.457.498.415.941		7.714.242.288.534		8.003.937.838.242		8.440.766.914.925		38.526.561.295.705	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode 2025-2029, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah guna memberikan gambaran mengenai capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengukuran ini mencakup beberapa indikator utama, yaitu Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pada Tabel 4.2, diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator demografi, indikator ekonomi makro, indikator kemiskinan, serta indikator ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai gambaran umum kondisi sosial dan ekonomi daerah yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, pada Tabel 4.3, diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030. IKU Daerah ini secara berjenjang akan dicapai melalui dukungan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian IKU Daerah memiliki peran lebih dominan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi pembangunan daerah.

Pada Tabel 4.4, diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang mencerminkan capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Cirebon selama periode 2026-2030. Pengukuran ini menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

4.2.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon

Indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dan terukur pada seluruh dimensi pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial. Data baseline tahun 2024 menjadi titik awal yang merepresentasikan kondisi aktual daerah, sementara target tahunan hingga tahun 2030 dirancang sebagai arah transformasi menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon menunjukkan tren perbaikan yang positif dan konsisten selama periode 2025-2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,57 menjadi 74,66, mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan meningkat dari 5,32% menjadi 8,16 %, mencerminkan pemulihan dan penguatan sektor ekonomi strategis, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, umkm, pariwisata dan industri di Kawasan Industri dan Kawasan Rebana. Di sisi lain, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka menurun signifikan, masing-masing dari 11,00% menjadi 8,10%, dan dari 6,65% menjadi 6,42%, seiring penguatan program perlindungan sosial dan peningkatan keterkaitan dunia kerja dengan pendidikan. Secara keseluruhan, tren indikator makro ini mendukung arah strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Keberhasilan pencapaian target akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, integrasi lintas sektor, dan penguatan sistem pemantauan berbasis kinerja.

Tabel 4.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	6,37	7,68	7,83	8,16	8,16
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	29,25	32,19	35,03	38,17	41,72	45,60
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	Persen	2.32	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,70	10,10	9,80	9,20	8,60	8,10
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,65	5,74	5,48	5,43	5,37	5,29
6	Indeks Gini	Angka	0,355	0,354	0,351	0,347	0,345	0,343
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,02	73,62	74,20	74,79	75,40	75,98

No	Indikator Makro	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO_2Eq/ Miliar	5.37	5.80	6.28	6.97	7.67	8.22
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,08	63,33	63,59	63,84	64,09	66,30
10	Prevalensi Stunting	Persen	17,00	16,22	14,69	13,38	12,25	11,28

Sumber: Hasil Pengolahan Data Indikator Makro BPS

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sejumlah indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai alat ukur pencapaian kinerja selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Indikator-indikator ini tidak hanya merefleksikan capaian teknokratis, tetapi juga menjadi representasi kualitas tata kelola, kapasitas birokrasi, serta keberhasilan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,31	83,48	84,66	85,83	87,00	88,17
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,94	4,08	4,22	4,36	4,50	4,65
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	6,37	7,68	7,83	8,16	8,16
4	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	29,25	32,19	35,03	38,17	41,72	45,60
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,70	10,10	9,80	9,20	8,60	8,10
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	3,84	4,06	4,28	4,49	4,71	4,92
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,65	5,74	5,48	5,43	5,37	5,29
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,02	73,62	74,20	74,79	75,40	75,98
9	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,03
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	129,72	126,39	123,07	119,74	116,42	113,09

Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,61	5,57	5.54	5.24	4.90	4.49
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	23,11	26,95	30,79	34,64	38,48	42,33
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	63,08	63,33	63,59	63,84	64,09	66,30
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	15,59	21,33	26,70	32,08	37,45	42,83
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	3,33	3,77	4,27	9,29	10,52	13,49
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	74,06	75,50	81,10	84,86	94,11	100,00
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)	Ton Co2eg	680,865.95	754,272.25	835,506.54	934,360.60	1,053,392.45	1,185,902.52
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,61
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Gini	Angka	0,355	0,354	0,351	0,347	0,345	0,343
2	Indeks Kesehatan	Angka	0,848	0,853	0,856	0,860	0,864	0,867
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,17	75,46	75,65	75,93	76,21	76,41
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	106,01	105,41	103,58	98,39	91,86	86,25
5	Angka Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	13,5	13	12,5	12	11,5	11

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Prevalensi Stunting	Persen	17	16,22	14,69	13,38	12,25	11,28
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	91,00	91,35	91,70	92,05	92,40	92,75
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,57	98,64	98,71	98,78	98,86	98,93
10	Indeks Pendidikan	Angka	0,609	0,615	0,621	0,626	0,632	0,637
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,85	7,97	8,10	8,22	8,34	8,46
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,52	12,58	12,64	12,69	12,75	12,81
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	33,00	35,60	38,20	40,80	43,40	46,00
14	Indeks Kebudayaan daerah	Angka	46,87	47,76	48,66	49,56	50,45	51,35
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,79	74,95	75,10	75,26	75,42	75,57
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	63,5	64,8	66,1	67,2	68,3	69,4
17	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62
III	**ASPEK DAYA SAING**							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	20,39	20,43	20,45	20,47	20,49	20,49
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,40	3,39	3,39	3,39	3,38	3,38
3	Jumlah Tamu Wisatawan	Orang	1.179.800	1.517.668	1.855.535	2.193.403	2.531.270	2.869.130

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mancanegara (Hotel Berbintang)							
4	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah	Persen	4,48	5,60	6,67	6,84	7,04	7,88
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,63	4,73	5,36	5,63	5,66	5,66
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,35	6,84	7,32	7,8	8,29	8,77
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	3,3	4,06	4,81	5,57	6,32	7,08
8	Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	5,45	6,88	8,3	8,46	8,82	8,82
9	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	5.64	7.13	8.60	8.77	9.14	9,14
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian (garam)	Persen	0.33	0.41	0.50	0.51	0.53	0,53
11	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	17,14	17,98	19,08	20,29	21,63	23,07
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	84,85	85,11	85,37	85,62	85,88	86,14
13	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,10	3,25	3,40	3,57	3,74	3,93
14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,00	62,57	63,14	63,70	64,27	66,66
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	34,08	37,09	39,05	41,15	43,37	45,69
16	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	46,44	48,76	51,09	53,41	55,73	58,34
17	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	3,84	4,06	4,28	4,49	4,71	4,92

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,20	28,31	28,42	28,53	28,64	28,73
19	Rasio Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-19,86	-18,07	-16,28	-14,49	-12,70	-10,91
20	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	89,23	89,81	90,22	90,62	91,03	91,46
21	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	83,15	84,99	86,83	88,67	90,51	91,10
22	Persentase Desa Mandiri	Persen	48,06	52,91	57,77	62,62	67,47	72,33
23	Indeks Desa	Angka	78,89	81,39	83,89	86,39	88,89	91,39
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,53	0,75	0,98	1,20	1,42	1,65
25	Tingkat Inflasi	Persen	2,92	2,95	2,97	3,00	3,02	2,50
26	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	Kerjasama	2	3	3	4	4	4
27	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	17,51	18,26	19,00	19,75	20,50	21,25
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Nilai SAKIP	Angka	68,50	69,20	69,50	70,00	70,50	71,00
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,30	4,35	4,41	4,46	4,52	4,58
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks SPBE	Angka	3,71	3,81	3,91	4	4,1	4,2
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,01
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
1.	**PENDIDIKAN**							
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Angka	63,53	66,03	68,53	71,03	73,53	76,03
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	Angka	69,32	70,42	71,52	72,62	73,72	74,82
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	Angka	57,92	60,82	63,72	66,62	69,52	72,42
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Angka	62,37	63,87	65,37	66,87	68,37	69,87

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Angka Partisipasi Sekolah (Usia 5-6 Tahun)	Persen	80,72	83,69	86,66	89,63	92,6	95,14
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun	Persen	99,56	99,77	99,79	99,85	99,99	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun	Persen	99,38	99,68	99,70	99,77	99,98	100
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 tahun (Kesetaraan)	Persen	26,84	30,94	35,04	39,14	43,24	47,33
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	65,4	65,81	66,22	66,63	67,05	67,46
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	73,73	74,48	75,23	75,98	76,73	77,48
11	Iklim Inkulisivitas SD	Angka	61,16	63,66	66,16	68,66	71,16	73,66
12	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	57,76	60,16	62,56	64,69	67,36	69,76
13	Iklim Keamanan SD	Angka	74,25	75,15	75,05	76,95	77,85	78,75
14	Iklim Keamanan SMP	Angka	69,45	70,95	72,45	73,95	75,45	76,95
15	Iklim Kebinekaan SD	Angka	73,25	74,25	75,25	76,25	77,25	78,25
16	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	70,16	71,16	72,16	73,16	74,16	75,16
2.	**KESEHATAN**							
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,06	1,08	1,09	1,11	1,12	1,14
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan	Persen	96,66	97,33	98,00	98,66	99,33	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pelayanan kesehatan ibu hamil							
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	93,91	95,13	96,35	97,57	98,78	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	96,47	97,17	97,88	98,59	99,29	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,83	95,87	96,90	97,93	98,97	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	Persen	58,68	59,35	60,01	60,68	61,35	68,37
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	93,96	95,17	96,37	97,58	98,79	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan jiwa sesuai standar							
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	78,05	78,72	79,39	80,05	80,72	87,74
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	100,00
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	1,74	3,48	5,22	6,96	8,70	10,45
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	23,18	24,92	26,66	28,40	30,14	31,88
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	Persen	93,37	93,55	93,37	93,91	94,09	94,27

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota							
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	90,05	91,38	92,26	93,14	94,02	94,9
6	Mengukur Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	97,98	98,39	98,79	99,19	99,60	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	62,45	63,72	64,99	66,26	67,54	68,81
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	24,32	29,58	34,84	40,11	45,37	50,63
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0,78	1,56	2,34	3,11	3,89	4,67
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	66,71	68,64	70,58	72,51	74,45	76,38

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,48	0,75	1,03	1,31	1,58	1,86
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan di luar panti (indikator SPM)	Persen	91,71	91,98	92,26	92,54	92,81	93,09
7	Waktu tanggap (response time)	Menit	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	penanganan kebakaran							
6.	**SOSIAL**							
1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	0,60	0,98	1,37	1,75	2,52	0,39
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	**TENAGA KERJA**							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	34,17	34,84	35,52	36,19	36,86	37,53
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	Persen	72	73	74	75	76	77

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota							
8.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	13,93	14,73	15,53	16,34	17,14	17,94
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	80	82	85	90	95	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	4,41	5,21	6,01	6,81	7,62	8,42
9.	**PANGAN**							
1	Persentase cadangan pangan	Persen	51,45	60	70	80	90	100
10.	**PERTANAHAN**							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	**LINGKUNGAN HIDUP**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	63,08	63,33	63,59	63,84	64,09	66,30
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	12,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
12.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang telah melakukan Perekaman dan memiliki KTP Elektronik	Persen	99,7	99,75	99,8	99,85	99,85	99,99
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	55	60	63	65	68	70
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97	98	98,25	98,5	99	99,5
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	30	35	37	39	41	43
14.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Anak	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	64,9	65	65,1	65,3	65,5	65,8
3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak	Persen	7,99	7,37	6,76	6,14	5,52	4,91

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terpenuhi (unmet need)							
15.	**PERHUBUNGAN**							
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	0,69	0,75	0,82	0,88	0,94	1,00
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
16.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	87%	88 %	90 %	91 %	92%	93 %
17.	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	15,30	15,40	15,41	15,42	15,43	15,44
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	3,22	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28
18.	**PENANAMAN MODAL**							
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Persen	3,84	4,06	4,28	4,49	4,71	4,92
19.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,03	1,47	1,91	2,35	2,78	3,22
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,62	24,06	24,50	24,94	25,38	25,82
20.	**STATISTIK**							
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	**PERSANDIAN**							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75	75	80	85	85	90
22.	**KEBUDAYAAN**							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	**PERPUSTAKAAN**							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	71,14	73,17	75,37	77,63	79,96	82,35
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	58,39	61,07	62,90	64,78	66,73	68,73
24.	**KEARSIPAN**							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab	Persen	26,86	39,48	53,86	66,18	79,28	92,39

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	an nasiona (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)							
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	84,16	85,00	85,83	86,66	87,50	88,33
25.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	**PARIWISATA**							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	1,39	2,21	3,03	3,86	4,68	5,50
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	Persen	14,43	15,25	16,07	16,90	17,72	18,54
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	32,92	33,75	34,57	35,39	36,21	37,03
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	4,08	4,90	5,73	6,55	7,37	8,19
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	6,98	7,80	8,63	9,45	10,27	11,09
27.	**PERTANIAN**							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar	92,435	94,735	97,035	99,335	101,63	103,935
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	10	10	10	10	10	10
30.	**PERDAGANGAN**							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	84,16	84,91	85,66	86,41	87,15	87,90
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,29	63,04	63,78	64,53	65,28	66,03
31.	**PERINDUSTRIAN**							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	1,68	1,72	1,77	1,81	1,85	1,89
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan	Persen	1,78	3,36	4,93	6,50	8,07	9,64

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	oleh instansi terkait							
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	1,57	3,14	4,71	6,29	7,86	9,43
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	Persen	1,57	3,14	4,71	6,29	7,86	9,43

4.2.3 Rencana Penetapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
1. SPM PENDIDIKAN										
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	92,39	94,30	96,20	98,10	100	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	85,59	89,19	92,79	96,40	100	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	95,25	96,44	97,62	98,81	100	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,32	98,74	99,16	99,58	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,29	97,97	98,65	99,32	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,30	97,98	98,65	99,33	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehata

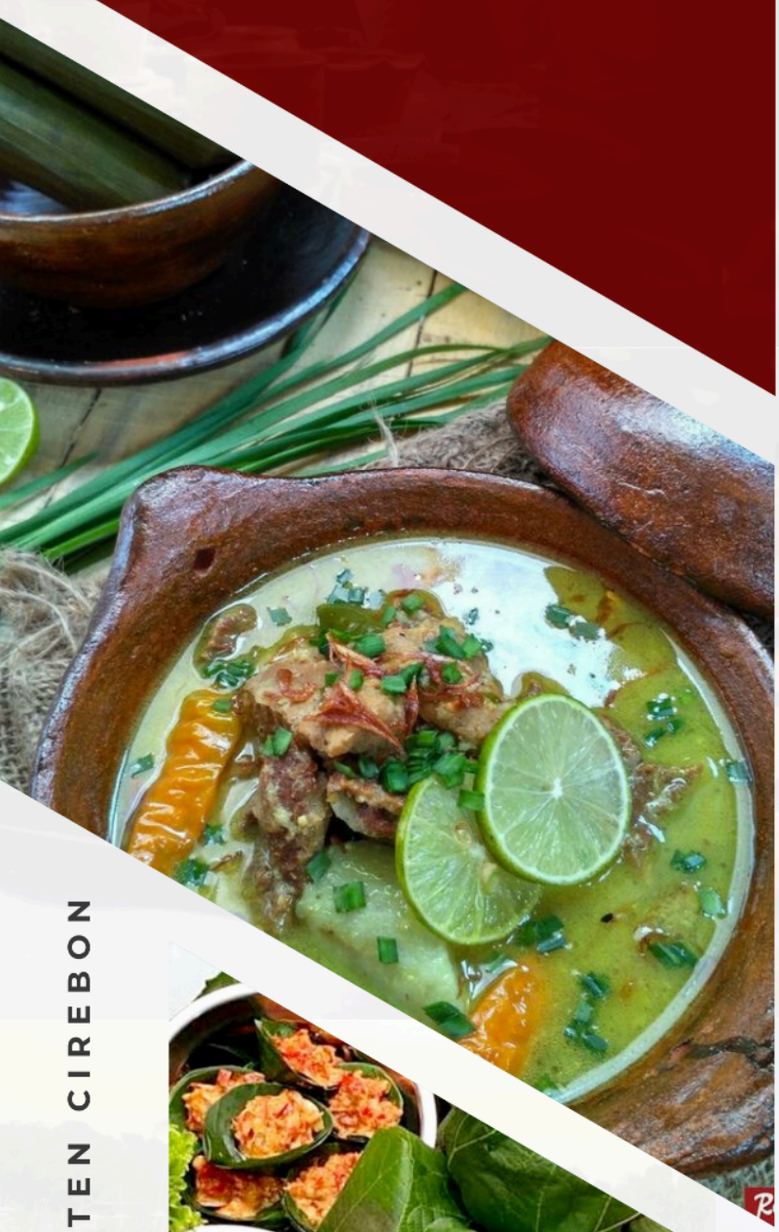
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
										n Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,66	98,25	98,83	99,42	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,16	98,62	99,08	99,54	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89,87	92,41	94,94	97,47	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91,77	93,83	95,89	97,94	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
										Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91,62	93,72	95,81	97,91	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	94,97	96,23	97,49	98,74	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	92,49	94,37	96,25	98,12	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,12	94,84	96,56	98,28	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	%	90,95	93,22	95,48	97,74	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
	virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan								Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM										
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	90,77	93,08	95,38	97,69	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90,09	92,57	95,04	97,52	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT										
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS										
1	Pelayanan ketentraman dan	Persentase Warga Negara yang memperoleh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Satuan Polisi	Program Peningkatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
	ketertiban Umum	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada							Pamong Praja	Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	97,35	98,02	98,68	99,34	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	86,51	89,89	93,26	96,63	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	97,33	98,00	98,67	99,33	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	79,30	84,48	89,65	94,83	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	%	98,79	99,09	99,39	99,70	100	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar	%	98,97	99,23	99,49	99,74	100	Dinas Sosial	Program Rehabilit

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian					Perangkat Daerah	Program
				2026	2027	2028	2029	2030		
	lanjut usia terlantar di luar panti	yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								asi Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	98,79	99,09	99,39	99,70	100	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	97,33	98,00	98,67	99,33	100	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana
										Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial





BAB V

PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Cirebon dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, yang disusun secara sistematis untuk mencapai cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

RPJMD ini juga merangkum keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan pembangunan, berbagai strategi dan upaya yang akan dilakukan, serta mekanisme keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara terarah, efektif, dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, guna mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan daerah. Dokumen ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2025 hingga tahun 2029, yang memuat rencana kerja tahunan guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Setelah berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, diperlukan penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2030-2034 sebagai panduan perencanaan pembangunan untuk lima tahun berikutnya. Dalam masa transisi menuju periode perencanaan baru, diperlukan pedoman khusus untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2029. Pedoman tersebut akan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, serta memperhatikan arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD ini, serta sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir periode RPJMD ini akan menjadi bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang disusun dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.
2. Program prioritas dan/atau proyek strategis daerah yang telah dijalankan dalam periode RPJMD ini, namun masih memiliki relevansi serta urgensi untuk dilanjutkan, direkomendasikan untuk tetap diakomodasi dalam RPJMD periode mendatang guna memastikan kelanjutan dan pencapaian hasil yang optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini, diperlukan konsistensi, kolaborasi, transparansi, inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Agar implementasi RPJMD dapat berjalan secara efektif dan terarah, maka pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

a. Bupati Kabupaten Cirebon berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik dalam pembangunan daerah.
b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RPJMD, sehingga setiap program kerja yang dijalankan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) serta pemangku kepentingan wajib mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
d. Perangkat Daerah (PD) wajib mengimplementasikan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme guna mencapai hasil yang optimal.
e. Setiap Perangkat Daerah (PD) segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pelaksanaan program kerja masing-masing perangkat daerah.
f. Penyusunan RPJMD telah melalui tahapan konsultasi publik, sehingga program-program yang tercantum di dalamnya telah mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
g. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah guna memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
h. Bappelitbangda Kabupaten Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat diukur efektivitas dan dampaknya secara berkala.
i. DPRD Kabupaten Cirebon memiliki kewajiban untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh Bupati dalam penyusunan RAPBD serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan anggaran dengan RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD.
j. Perubahan terhadap RPJMD yang tidak bersifat fundamental dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati, meliputi perubahan target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, serta aspek lainnya yang tidak mengubah substansi utama dari rencana pembangunan daerah.
k. Pemerintah Daerah menetapkan beberapa pendekatan teknis utama, antara lain penerapan manajemen risiko pembangunan melalui Register Risiko,

sistem pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja, serta penguatan mekanisme pelibatan publik melalui strategi komunikasi pembangunan yang transparan.

l. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengembangkan Dashboard Kinerja Daerah yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terbuka dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat memantau capaian indikator kinerja utama RPJMD, progres program strategis, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik.

m. Pemerintah Daerah akan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk pembangunan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan melalui peran multi-aktor berbasis model pentahelix yang mencakup lima unsur utama pembangunan daerah, yaitu: Pemerintah (*Government*), Dunia Usaha (*Business Sector*), Masyarakat/Komunitas (*Community*), Akademisi (*Academia*) dan Media.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan arah pembangunan yang telah dirancang. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih maju dan sejahtera.

5.3 Manajemen Risiko

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko,

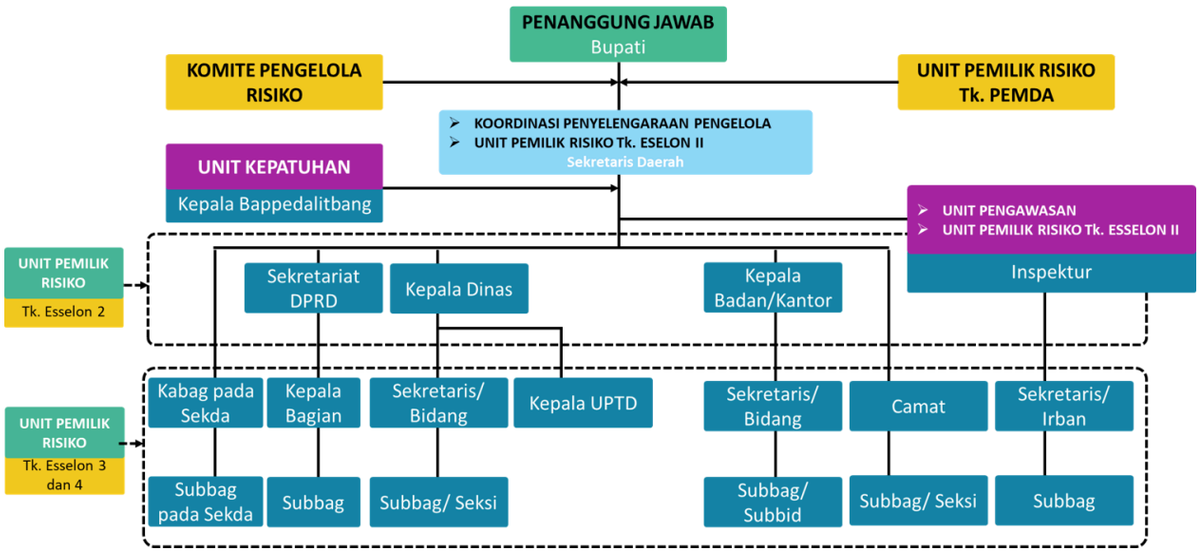
perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

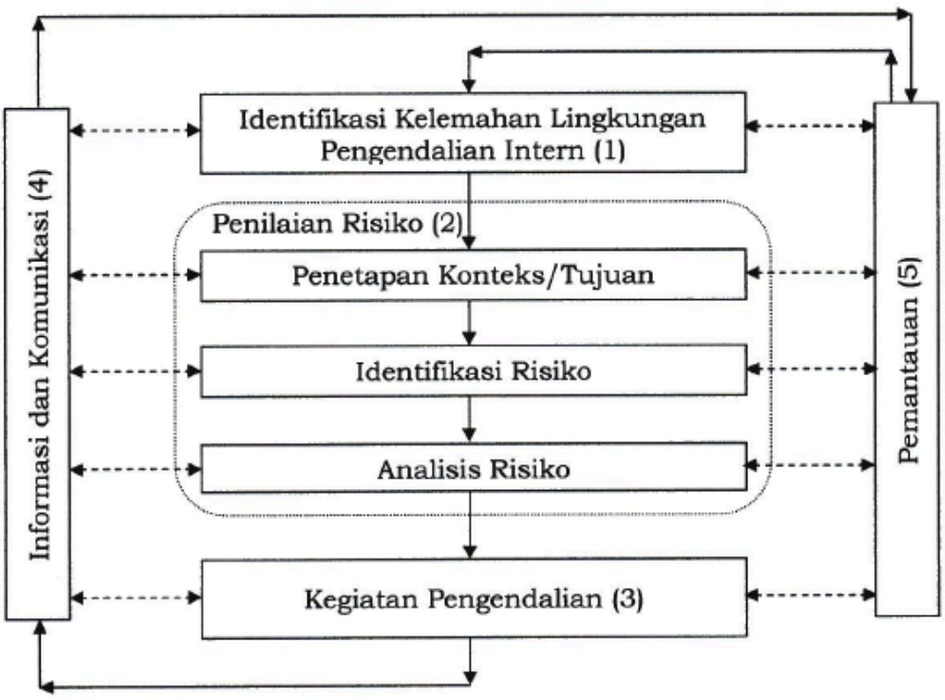
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

Struktur pengelolaan risiko pemerintah daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1 Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 5.2 Proses Pengelolaan Risiko

5.4 Penutup

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka program dan pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Dengan semangat kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan dalam dokumen ini secara konsisten, adaptif, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Cirebon yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara teknis dan operasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. RKPD mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif, terukur, dan mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD, guna memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan terarah.

Dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi rujukan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga menjadi landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelaraskan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, agar seluruh agenda pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi dapat direalisasikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis data, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mencapai pembangunan daerah yang bersih, inovatif, agamis, maju, dan aman. Perjalanan pembangunan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, komitmen berkelanjutan, serta dukungan masyarakat sebagai pilar utama dalam mewujudkan masa depan Cirebon yang lebih baik.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN CIREBON

JL. Sunan Kalijaga No. 11 Sumber, Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611

(0231) 321991

http://bappelitbangda.cirebonkab.go.id

Rumah Aspirasi: http://bit.ly/maharmaskaton

Bappelitbangda Kab Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN CIREBON

JL. Sunan Kalijaga No. 11 Sumber, Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611

(0231) 321991

http://bappelitbangda.cirebonkab.go.id

Rumah Aspirasi: http://bit.ly/maharmaskaton

Bappelitbangda Kab Cirebon